



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM

LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023





Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2023



ꦏꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦂꦁꦒꦱꦼꦩ

BUPATI KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami telah dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023. Laporan Keuangan ini terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, maka laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang kami susun ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Demi terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten

Karangasem yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi, serta dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara komprehensif, yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah Daerah, meningkatkan efektifitas pengendalian kepada para pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya/untuk pengambilan keputusan yang relevan. Serta menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	

Amlapura, 29 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM





ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦂꦁꦱꦼꦩ

BUPATI KARANGASEM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, saldo anggaran lebih operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	

Amlapura, 29 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM


I GEDE DANA

DAFTAR ISI

	Halaman
I Kata Pengantar	i
II Pernyataan	iii
III Daftar Isi	iv
IV Daftar Lampiran	vi
V Daftar Tabel	viii
VI Laporan Keuangan	
1 Laporan Realisasi Anggaran	
2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3 Neraca	
4 Laporan Operasional	
5 Laporan Arus Kas	
6 Laporan Perubahan Ekuitas	
7 Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	2
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	28
BAB IV Kebijakan Akuntansi	30
4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	30
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah	32
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA	42

5.2	Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL	66
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	68
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	95
5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	110
5.6	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	118
5.7	Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja	119
5.8	Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan	119
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah	121
6.1	Letak Geografis	121
6.2	Dasar Hukum Pembentukan	121
6.3	Pemerintahan	121
BAB VII	Penutup	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Lampiran 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Lampiran 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 4	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Lampiran 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Lampiran 6	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Lampiran 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 8	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lampiran 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran 10	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 11	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Lampiran 12	: Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah
Lampiran 13	: Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah
Lampiran 14	: Rincian Dana Desa
Lampiran 15	: Rincian Alokasi Dana Desa
Lampiran 16	: Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
Lampiran 17	Laporan Kekayaan Milik Desa
Lampiran 18	: Laporan Realisasi APBDesa
Lampiran 19	: Kas BLUD
Lampiran 20	: Kas Dana BOS
Lampiran 21	: Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Lampiran 22	: Kas Dana BOK Puskesmas

Lampiran 23.1	: Daftar Mutasi Piutang
Lampiran 23.2	: Daftar Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dan Piutang Lainnya
Lampiran 24	: Penyisihan Piutang
Lampiran 25	: Beban dibayar di muka
Lampiran 26	: Daftar Persediaan
Lampiran 27	: Daftar Aset Tetap Tanah
Lampiran 28	: Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 29	: Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 30	: Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran 31	: Daftar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya
Lampiran 32	: Daftar Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran 33	: Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 34	: Daftar Piutang Pajak yang akan dihapuskan Milik Pemerintah
Lampiran 35	: Daftar Aset Tetap dalam kondisi Rusak
Lampiran 36	: Daftar Deposito Uang Jaminan Reklamasi Yang Masih Dalam Penguasaan
Lampiran 37	: Daftar Pendapatan diterima dimuka
Lampiran 38	: Daftar Mutasi Utang Belanja
Lampiran 39	: Rincian Utang Belanja
Lampiran 40	: Rincian Mutasi PFK BUD,BLUD dan FKTP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem
Tabel 2.2	: Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem
Tabel 2.3	: Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem
Tabel 2.4	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem
Tabel 2.5	: Gini Ratio Kabupaten Karangasem
Tabel 2.6	: Indeks Pembangunan Manusia
Tabel 2.7	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem
Tabel 2.8	: Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem
Tabel 2.9	: PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Urutan	Reff. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN	5.1.1	1.636.163.694.461,00	1.641.546.932.774,23	100,33	1.577.410.438.958,88
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	318.457.513.596,00	381.240.510.353,76	119,71	301.332.231.354,78
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	193.204.686.607,00	232.153.510.496,00	120,16	167.957.909.825,42
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,55	10.215.710.118,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	10.071.066.736,00	10.334.696.322,92	102,62	9.321.192.563,91
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	184.969.713.253,00	128.280.007.895,84	122,21	113.837.409.849,45
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.315.746.180.865,00	1.266.328.469.738,00	96,84	1.251.259.824.797,00
Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.583,00	99,40	1.060.714.388.563,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34	973.346.781.563,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	21.860.366.000,00	21.880.366.000,00	100,00	9.523.896.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	79.383.744.000,00	79.383.744.000,00	100,00	77.849.710.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	243.996.155.865,00	193.005.880.176,00	78,10	190.548.438.234,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	169.967.871.806,00	152.889.792.401,00	89,58	131.365.948.289,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.189.791.945,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	1.060.060.060,00	1.975.945.862,46	101,33	24.818.362.807,10
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	14.945.125,48	-	396.546.349,10
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	1.960.000.000,00	1.000.996.567,01	100,58	24.419.836.458,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.636.163.694.461,00	1.641.546.932.774,23	100,33	1.577.410.438.958,88
BELANJA DAERAH	5.1.2	1.756.953.039.217,00	1.583.842.341.522,99	90,19	1.548.907.880.948,48
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.198,70	92,07	1.199.158.170.061,31
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	737.741.724.183,00	684.649.124.688,67	92,80	721.933.680.292,55
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	552.006.366.721,00	499.841.936.183,79	90,55	452.812.860.996,76
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	34.788.206.293,00	34.393.686.026,25	98,87	18.364.668.762,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	12.197.620.000,00	11.858.310.300,00	97,20	6.046.980.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	173.289.266.079,00	119.336.449.121,10	68,89	139.308.067.688,15
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	522.956.250,00	-	-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97	47.219.074.193,50
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	55.836.694.493,00	38.688.278.976,39	69,31	32.102.107.210,05
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	71.693.318.590,00	41.479.837.150,71	57,94	59.535.424.292,60
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.262.897.332,00	1.210.750.750,60	95,89	461.461.989,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	11.896.774.331,00	54.000,00	-	-
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	11.896.774.381,00	54.006,00	-	-
TRANSFER DAERAH	5.1.2.4	234.033.090.880,00	233.854.801.205,10	99,93	210.441.643.212,00
Bagi Hasil	5.1.2.4.1	30.189.486.680,00	38.110.667.205,20	99,74	20.375.653.392,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.1	26.501.842.451,00	26.501.842.451,00	100,00	19.563.129.403,00
Belanja Bagi Retribusi Daerah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	1.687.614.229,00	1.608.724.754,20	95,33	1.312.523.989,00
Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	203.843.634.000,00	203.764.233.999,99	99,99	199.565.969.820,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.1	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,98	199.565.969.820,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.756.953.039.217,00	1.583.842.341.522,99	90,19	1.548.907.880.948,48
SURPLUS/ DEFISIT		(119.789.344.756,00)	57.803.591.251,26	(48,33)	28.602.568.010,42

Uraian	Ref. C4LK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2022
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	131.299.344.756,00	161.301.637.734,78	100,00	115.187.586.745,82
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	144.190.144.756,00	144.191.886.744,75	100,00	115.187.586.745,82
Pencairan Dena Cadangan	5.1.3.1.2	17.109.200.000,00	17.100.200.000,00	100,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.3.1.3	-	450.880,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	41.600.000.000,00	41.600.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Pembentukan Dena Cadangan	5.1.3.2.1	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100,00	-
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.3	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH		119.799.344.756,00	119.801.637.734,78	100,00	115.687.586.745,82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	-	177.705.128.986,01		144.190.144.756,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	



Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref CaLK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(144.191.886.744,75)	(118.187.586.745,82)
Subtotal		(1.741.988,51)	856.791,12
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24
Subtotal		177.703.386.997,50	144.191.001.547,36
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain	5.2.4	1.741.988,51	(856.791,12)
		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	

Amlapura, 29 Agustus 2024



Pemerintah Kabupaten Karangasem

NERACA

Per 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET	5.3.1	1.725.355.969.991,85	1.602.413.476.157,62
ASET LANCAR	5.3.1.1	333.294.746.466,72	255.766.386.631,46
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	177.705.219.047,79	144.190.144.796,24
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	180.859.800.916,45	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	186.213.706,80	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	13.607.800.769,06	17.714.268.768,19
Kas Dana BGSP	5.3.1.1.1.5	244.602.583,50	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	143.665.757,00	1.964.362.931,81
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	2.663.236.254,00	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	90.061,78	-
Setara Kas	5.3.1.1.1.9	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2		
Piutang	5.3.1.1.3	180.114.990.818,95	132.325.238.427,44
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	94.113.883.017,70	89.054.021.850,45
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.2	467.854.683,00	250.354.541,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.3	12.714.212.354,25	16.570.584.105,99
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.3.4	72.799.040.814,00	24.347.665.130,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.5	-	102.612.800,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(51.821.812.298,11)	(46.760.339.027,26)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4.1	(51.821.812.298,11)	(46.657.726.227,26)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.2	-	(102.612.800,00)
Behan Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	257.670.283,54	241.577.372,88
Persediaan	5.3.1.1.6	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16
Persediaan Barang Pakai Habis	5.3.1.1.6.1	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16
Jumlah Aset Lancar		333.294.746.466,72	255.766.386.631,46
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	146.899.960.492,05	122.970.265.940,13
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	2.691.093.990,31	4.296.537.515,71
Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.1	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	267.846.950,00	208.297.940,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	5.3.1.2.1.3	(8.948.589.478,69)	(7.349.996.943,29)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	144.118.866.501,74	118.679.728.424,42
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	144.118.800.501,74	118.679.728.424,42
Jumlah Investasi Jangka Panjang		146.809.950.492,65	122.970.265.940,13
ASET TETAP	5.3.1.3	1.184.511.342.510,31	1.173.203.557.870,85
Tanah	5.3.1.3.1	165.392.320.343,25	162.717.247.945,25
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	594.067.499.151,39	559.607.671.675,39
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	926.755.964.219,51	888.885.578.590,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.538.240.617.277,17	1.484.775.325.242,76
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	40.296.936.577,35	39.697.000.877,35
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	19.632.600.802,80	14.170.335.600,96
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.099.774.485.660,46)	(1.958.649.602.082,39)
Aset Konsepsi Jasa	5.3.1.3.8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	5.3.1.3.9	-	-
Jumlah Aktiva Tetap		1.184.511.342.510,31	1.173.203.557.870,85
DANA CADANGAN	5.3.1.4	10.898.000.000,00	-
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	10.898.000.000,00	-
Jumlah Dana Cadangan		10.898.000.000,00	-

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET LAINNYA	5.3.1.5	49.749.120.522,78	50.473.265.715,18
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	24.690.189.416,00	24.690.189.416,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	688.429.439,00	225.950.521,00
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	22.071.028.667,78	23.043.994.367,16
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5	2.299.473.000,00	2.513.131.411,00
Jumlah Aset Lainnya		49.749.120.522,78	50.473.265.715,18
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	-	-
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.6.3	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.4	-	-
JUMLAH ASET		1.725.355.969.991,86	1.602.413.476.157,62
KEWAJIBAN	5.3.2	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20
KEWAJIBAN JANGKA PEDEK	5.3.2.1	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20
Utang Perhitungan Pihak ketiga	5.3.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.159.401.566,67	357.776.816,34
Utang Belanja dan Transfer	5.3.2.1.3	61.307.414.493,50	34.512.911.956,86
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	00.061,78	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.466.906.121,95	34.870.688.773,20
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		62.466.906.121,95	34.870.688.773,20
EKUITAS	5.3.3	1.662.889.083.869,91	1.567.542.787.384,42
EKUITAS		1.662.889.053.859,91	1.567.542.787.384,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.725.355.969.991,86	1.602.413.476.157,62

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	



Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN OPERASIONAL
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff Cal.K	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1	1.643.879.800.866,87	1.500.836.083.059,40	143.043.717.797,47	9,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49	114.106.303.529,21	40,90
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	237.196.662.315,59	174.941.530.503,75	62.255.131.811,84	35,59
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	10.211.633.397,87	10.346.354.586,86	(134.721.188,99)	(1,30)
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	22.495.446.496,40	9.800.680.508,35	12.694.765.988,05	129,53
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	123.205.487.682,04	83.914.380.763,73	39.291.126.918,31	46,82
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00	47.460.653.588,00	4,02
Transfer Pemerintahan Pusat	5.4.1.2.1	986.726.186.152,00	986.363.807.974,00	342.378.178,00	0,03
Dana Perimbangan	5.4.1.2.1.1	963.865.820.152,00	875.859.912.974,00	(11.994.092.822,00)	(1,23)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.1.2	21.880.368.000,00	9.523.895.000,00	12.356.471.000,00	129,53
Dana Desa	5.4.1.2.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.2	241.457.256.859,00	194.338.980.449,00	47.118.275.410,00	24,26
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.2.1	166.004.574.688,00	135.189.186.504,00	30.815.388.184,00	22,79
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	75.452.681.171,00	59.149.791.945,00	15.302.889.226,00	27,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	5.4.1.3	23.537.128.994,17	42.110.368.273,91	(18.573.239.319,74)	(43,99)
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	21.626.132.397,16	17.690.531.815,81	3.935.600.581,25	22,26
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	1.960.996.557,01	24.419.836.458,00	(22.458.839.900,99)	(91,97)
JUMLAH PENDAPATAN		1.643.879.800.866,87	1.500.836.083.059,40	143.043.717.797,47	9,53
BEBAN	5.4.2	1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.460,21	71.058.647.626,18	4,82
Beban Pegawai	5.4.2.1	694.588.886.089,23	700.849.168.527,72	(6.260.282.438,49)	(0,89)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	499.241.833.272,83	466.445.262.959,41	32.796.570.313,42	7,03
Beban Bunga	5.4.2.3	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.4	35.327.513.161,25	28.047.094.168,68	7.280.418.992,42	25,96
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	11.856.310.300,00	6.046.980.000,00	5.809.330.300,00	96,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.6	143.109.181.219,04	133.883.325.059,00	9.225.856.160,04	8,89
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.7	5.345.725.668,85	4.303.448.154,28	1.042.279.514,59	24,22
Beban Transfer	5.4.2.8	156.049.346.375,19	134.884.851.580,99	21.164.494.794,20	15,89
Beban Lain-Lain	5.4.2.9	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN		1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.460,21	71.058.647.626,18	4,82
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		98.361.024.770,48	26.375.954.609,19	71.985.070.161,29	272,92

Uraian	Refi CaLK	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL		(214.664.507,00)	27.470.000,00	(242.134.507,00)	(881,45)
Surplus Non Operasional	5.4.3	-	27.470.000,00	(27.470.000,00)	(100,00)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.1	-	27.470.000,00	(27.470.000,00)	(100,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.3.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.3	-	-	-	-
Defisit Non Operasional	5.4.4	214.664.507,00	-	214.664.507,00	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.4.2	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.3	214.664.507,00	-	214.664.507,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(214.664.507,00)	27.470.000,00	(242.134.507,00)	(881,45)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		98.146.360.263,48	26.403.424.809,19	71.742.935.654,29	271,72
POS LUAR BIASA	5.4.5	(54.000,00)	-	(54.000,00)	-
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	5.4.5.2	54.000,00	-	54.000,00	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		(54.000,00)	-	(54.000,00)	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.6	98.146.306.263,48	26.403.424.809,19	71.742.881.654,29	271,72

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	



Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN ARUS KAS
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tariun 2023	Tariun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	232.153.510.498,00	167.957.908.825,42
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	10.472.014.639,00	10.215.719.116,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	10.334.895.322,92	9.321.192.563,91
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	127.962.151.394,84	113.809.939.849,45
Dana Perimbangan	5.5.1.1.5	964.079.478.583,00	973.348.781.563,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.6	21.880.398.000,00	9.523.895.000,00
Dana Desa	5.5.1.1.7	79.383.744.000,00	77.843.710.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1.8	152.889.792.401,00	131.395.646.289,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1.9	40.116.087.774,00	59.149.791.945,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.10	14.949.125,48	398.546.349,10
	5.5.1.1.11	1.980.996.557,01	24.419.636.458,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Jumlah Arus Masuk Kas		1.841.227.986.273,25	1.577.382.968.958,88
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	684.649.124.888,67	721.933.660.292,55
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	499.841.938.183,78	452.812.880.996,78
Belanja Bunga	5.5.1.2.3	-	-
Belanja Subsidi	5.5.1.2.4	-	-
Belanja Hibah	5.5.1.2.5	34.393.686.026,25	16.384.666.762,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.6	11.858.310.300,00	6.046.980.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.7	54.000,00	-
Bagi Hasil	5.5.1.2.8	30.110.557.205,20	20.875.653.392,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.9	203.764.233.999,99	189.565.989.820,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.464.605.892.401,89	1.409.599.813.283,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		176.622.093.871,36	167.783.155.695,57
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	17.109.200.000,00	-
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.2.1.2	317.945.601,00	27.470.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		17.427.148.501,00	27.470.000,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	28.000.000.000,00	-
Belanja Tanah	5.5.2.2.2	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	39.642.592.244,00	47.219.074.193,50
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	38.688.278.978,39	32.102.107.210,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	41.479.827.150,71	59.535.424.292,60
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	1.210.750.760,00	451.481.989,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2.7	15.000.000,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	13.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		189.538.449.121,10	141.808.067.685,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(143.109.302.620,10)	(141.780.507.805,15)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	400.990,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		400.990,00	-
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.1	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		400.990,00	-

Uraian	Refi CaLK	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	108.519.483.569,00	276.532.540.451,22
Jumlah Arus Masuk Kas		108.519.483.569,00	276.532.540.451,22
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	108.519.483.569,00	276.532.540.451,22
Jumlah Arus Keluar Kas		108.519.483.569,00	276.532.540.451,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan / (Penurunan) Kas selama Periode ini	5.5.5	33.613.242.241,26	26.002.558.010,42
Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	144.120.144.756,24	118.188.443.536,94
Koreksi Saldo Awal Kas	5.5.7	1.741.988,51	(856.791,12)
Saldo Akhir Kas di BUD		177.705.128.986,01	144.190.144.756,24
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran		-	-
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)-terkait PFK		98.981,78	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana		-	-
Saldo Akhir Kas	5.5.8	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten ttt	
Sekretaris Badan	



Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2023	2022
Ekuitas Awal	5.6.1	1.567.542.787.384,42	1.541.639.811.645,02
Surplus/(Defisit) LO	5.6.2	98.146.306.263,48	26.403.424.609,19
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	5.6.3	(2.800.029.777,99)	(800.448.889,79)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:	5.6.3.1	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1.1	-	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.1.2	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.1.3	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.1.4	-	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.1.5	-	-
Koreksi Ekuitas - Lainnya	5.6.3.1.6	-	-
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:	5.6.3.2	(2.800.029.777,99)	(500.448.889,79)
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.2.1	(1.995.352.545,70)	662.747.435,98
-Koreksi Ekuitas - Kas	5.6.3.2.1.1	1.741.988,51	(856.791,12)
-Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.3.2.1.2	(2.668.239.132,34)	(14.867.061,00)
-Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.6.3.2.1.3	181.639.598,00	320.373.698,10
-Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	5.6.3.2.1.4	850.000,13	-
-Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.3.2.1.5	488.655.000,00	358.097.590,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.2.2	(220.962.108,18)	(974.266.789,10)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.2.3	(13.414.949,00)	(439.492.491,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.2.4	(1.022.901.938,45)	(60.905.000,67)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.2.5	452.601.761,32	311.467.975,00
Koreksi Ekuitas - Lainnya	5.6.3.2.6	-	-
RK		-	-
Ekuitas Akhir	5.6.4	1.662.889.063.869,91	1.567.542.787.384,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	

Amlapura, 29 Agustus 2024





Pemerintah Kabupaten Karangasem

***CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN***

Per 31 Desember 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan dan Belanja
- 5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 6,56%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 2,61%;
3. *Gini Ratio* Tahun 2023 sebesar 0,337;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 70,09;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 3,10%;
6. Tingkat Inflasi Tahun 2023 sebesar 4,31%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp 18,974 Triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan Kemiskinan Struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Pembahasan masalah kemiskinan pastinya akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk maupun rumah tangga miskin. Karakteristik yang dimaksud adalah pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, diharapkan dapat dihasilkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Kabupaten Karangasem (%)	6,78	6,98	6,56	(0,42)
2	Kabupaten Karangasem (Ribuan Orang)	28,52	29,45	27,83	(1,62)
3	Provinsi Bali (%)	4,53	4,57	4,25	(0,32)
4	Nasional (%)	9,71	9,57	9,36	(0,21)
5	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Dalam kurun waktu Tiga Tahun Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem terakhir mengalami Fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 sebesar 6,78%, Tahun 2022 sebesar 6,98%, dan Tahun 2023 sebesar 6,56%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Karangasem	0,64	0,84	0,62	(0,22)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,68	0,62	0,55	(0,07)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	1,53	(0,03)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	6	9	8	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Karangasem	0,08	0,18	0,09	(0,09)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,15	0,13	0,10	(0,03)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,38	0
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2	8	7	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem TPT Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 2,61%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Karangasem (%)	2,32	3,09	2,61	(0,48)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	(2,11)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	(0,54)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2	3	4	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

TPT di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 2,32%, di Tahun 2022 naik menjadi sebesar 3,09%. Di Tahun 2023 menurun kembali menjadi sebesar 2,61%. Meskipun demikian, angka TPT Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sudah mencapai angka sebesar 2,69%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 0,337 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Tingkat Kabupaten Karangasem	0,318	0,297	0,337	0,04
2	Tingkat Provinsi Bali	0,378	0,363	0,362	(0,001)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Gini Ratio yang disajikan adalah tahun 2021, 2022, dan 2023 dimana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem selama 3 tahun tersebut mengalami fluktuatif per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi, capaian yang diperoleh tiap tahunnya juga mengalami fluktuatif.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pengukuran Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karenanya, pengukuran keberhasilan pembangunan harus mencakup baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60); b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$); c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 70,09 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(poin) 2023 thd 2022
1	Kabupaten Karangasem	68.58	69.48	70.09	0.61
2	Provinsi Bali	76.69	77.40	78.01	0.61
3	Indonesia/Nasional	73.16	73.77	74.39	0.62
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Karangasem

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2022 adalah sebesar 69,48 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 68,58 poin mengalami kenaikan sebesar 0,90 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), serta Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,93 tahun pada Tahun 2023, meningkat 0,30 tahun dibandingkan Tahun 2022. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,68 tahun dengan harapan lama sekolah 12,63 tahun. Sementara, Pengeluaran Riil per kapita per Tahun yang disesuaikan sebesar Rp 10.753.000 atau naik sebesar Rp 475.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Karangasem pada saat ini berada pada urutan 9 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 IPM yang dicapai Kabupaten Karangasem masih di angka terendah se- Provinsi Bali.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Kabupaten Karangasem			Provinsi Bali	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	10.570,60	10.843,41	11.179,22	159.447.58	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,56)	2,58	3,10	5,71	5,05

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebesar 3,10% mengalami peningkatan sebelumnya dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 2,58%. Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2023 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi 2 (dua) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

2.1.6 Laju Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit di kendalikan. dan (iv) **Hiper inflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem didekati dengan tingkat inflasi Singaraja yang memiliki karakteristik cenderung sama. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 4,31% dengan kategori ringan dengan berdasarkan inflasi kota Singaraja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem

No	Inflasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Inflasi Kota Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	(0,32)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	2,07	6,20	2,77	(3,43)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	(2,90)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tingkat Inflasi di Kota Singaraja yang juga mencerminkan kenaikan harga di Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,31%, sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,63%, dan di Tahun 2021 sebesar 2,39%. Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sudah mencapai sebesar 2,70% pada Tahun 2023.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4 692 140,04	4.888.232,90
2	Pertambangan dan Penggalian	614 611,50	676.062,20
3	Industri Pengolahan	740 475,76	774.052,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17 178,66	19.350,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22 691,01	24.557,10
6	Konstruksi	1 270 811,10	1.318.015,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 005 922,35	1.077.719,70
8	Transportasi dan Pergudangan	2 789 763,23	3.070.993,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022	Tahun 2023
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 427 387,30	1.739.410,30
10	Informasi dan Komunikasi	634 616,08	653.175,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	901 446,44	1.062.929,80
12	Real Estate	721 175,79	754.932,90
13	Jasa Perusahaan	142 518,15	152.030,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 365 652,50	1.365.395,50
15	Jasa Pendidikan	464 023,50	467.122,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420 578,37	442.879,10
17	Jasa lainnya	438 499,58	487.816,80
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17 669 491,36	18.974.675,40
19	PDRB Provinsi	245 362 879,31	274.355.724,40

2022 : Angka Sementara

2023 : Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Kebijakan keuangan daerah* merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPd sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Disamping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk:



1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan anggaran dana transfer pusat secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan belanja daerah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karangasem.
4. Penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semester Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan Pembangunan tentu harus diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tercapainya realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi di Tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi juga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem.

Disamping itu adalah hal masa *recovery* pasca dampak Covid-19 Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya secara optimal meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi tahun 2023 berupa Pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas,



pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini di samping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi multiplier efek terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Terus berupaya melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di dalam pelayanan, pembayaran serta pengawasan pajak dan retribusi daerah
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah serta dengan melakukan pelayanan keliling ke daerah-daerah yang berpotensi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Juru Sita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah serta menjalin Kerjasama dengan pihak Kejari Amlapura dengan membentuk SKK dalam hal penagihan piutang pajak daerah ;
4. Optimalisasi pemanfaatan asset dan pengelolaan kekayaan daerah
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Mengoptimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan Menyusun program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta bersifat kreatif dan inovatif dalam Menyusun kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai oleh pemerintah pusat;
7. Menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja :

1. Belanja Operasi :

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan (TPP) ASN, gaji dan tunjangan KDH-WKDH dan DPRD, insentif pajak dan retribusi daerah. Penganggaran gaji dan tunjangan ASN mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan maksimal sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial tidak terencana.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagihasilkan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi:

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk



- daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca covid-19.
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
 6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
 7. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
 8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid-19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
 9. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 12,5 persen.
 10. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
 11. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Sesuai dengan Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Pengangguran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,



pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 6 Maret 2023. Dimana Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pemanfaatan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dalam APBD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; Adanya tambahan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali sesuai dengan surat Gubernur Bali, Nomor B.133900./8681/PADFE/BPKAD, tanggal 30 Desember 2022 dan Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.

2). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 21 Juni 2023. Dimana Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari besaran total dana hibah yang disepakati Bersama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023; Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.

3). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melaksanakan perubahan anggaran dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karangasem Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Oktober.

Target kinerja APBD Tahun 2023 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	1.548.852.521.496,00	1.636.153.694.461,00	87.301.172.965,00	5,34
Pendapatan Asli Daerah	283.117.673.041,00	318.457.513.596,00	35.339.840.555,00	11,10
Pendapatan Pajak Daerah	142.330.509.695,00	193.204.886.607,00	50.874.376.912,00	26,33
Hasil Retribusi Daerah	12.466.294.754,00	10.211.847.000,00	(2.254.447.754,00)	(22,08)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	9.432.787.392,00	10.071.066.736,00	638.279.344,00	6,34
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.888.081.200,00	104.969.713.253,00	(13.918.367.947,00)	(13,26)
Pendapatan Transfer	1.263.987.934.455,00	1.315.746.180.865,00	51.758.246.410,00	3,93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.939.680.000,00	1.071.750.025.000,00	13.810.345.000,00	1,29
Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.048.254.455,00	243.996.155.865,00	37.947.901.410,00	15,55
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp 87.301.172.965,00 atau 6%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi sumber-sumber PAD terutama pada Pendapatan Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pendapatan transfer. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; b. Hasil pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

b. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan atas penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD berupa Aset Rusak Berat / Usang, Hasil Sewa BMD, hasil Kerjasama antar daerah (Taman Ujung, Besakih), Jagir pada Kas Daerah ,Kas Bendahara dan Pada Rekening Dana Cadangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Pendapatan Berupa Denda, dsb.

Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi pada kondisi pandemi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Anggaran Belanja

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja	1.566.785.983.806,00	1.755.953.039.217,00	189.167.055.411,00	10,77
Belanja Operasi	1.187.476.216.084,00	1.336.733.917.177,00	149.257.701.093,00	11,17
Belanja Pegawai	664.979.947.785,00	737.741.724.163,00	72.761.776.378,00	9,86
Belanja Barang dan Jasa	502.620.263.099,00	552.006.366.721,00	49.386.103.622,00	8,95
Belanja Hibah	12.794.505.200,00	34.788.206.293,00	21.993.701.093,00	63,22
Belanja Bantuan Sosial	7.081.500.000,00	12.197.620.000,00	5.116.120.000,00	41,94
Belanja Modal	154.808.006.938,00	173.289.256.979,00	18.481.250.041,00	10,66
Belanja Modal Tanah	0,00	522.956.250,00	522.956.250,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.720.782.668,00	44.059.592.314,00	7.338.809.646,00	16,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.582.763.280,00	55.835.694.493,00	252.931.213,00	0,45
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.464.444.390,00	71.593.316.590,00	10.128.872.200,00	14,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.025.016.600,00	1.262.697.332,00	237.680.732,00	18,82
Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.367.372.830,00	11.896.774.381,00	9.529.401.551,00	80,10
Belanja Transfer	222.134.387.954,00	234.033.090.680,00	11.898.702.726,00	5,08



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Bagi Hasil	20.373.833.954,00	30.189.456.680,00	9.815.622.726,00	32,51
Belanja Bantuan Keuangan	201.760.554.000,00	203.843.634.000,00	2.083.080.000,00	1,02

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp189.167.055.411,00 atau 12%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp149.257.701.093,00, belanja modal sebesar Rp18.481.250.041,00, belanja transfer sebesar Rp11.898.702.726,00 serta Kenaikan pada belanja tidak terduga sebesar Rp9.529.401.551,00.

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- Penanggulangan bencana pertanian dengan menyediakan anggaran untuk antisipasi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
- Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
- Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah, maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
- Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- i. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2023, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2023.

3. Anggaran Pembiayaan

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	59.433.462.310,00	161.299.344.756,00	101.865.882.446,00	63,15
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.433.462.310,00	144.190.144.756,00	84.756.682.446,00	58,78
Pencairan Dana Cadangan	0,00	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	17.933.462.310,00	119.799.344.756,00	101.865.882.446,00	85,03

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SiLPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2023.

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp144.190.144.756,00 meningkat sebesar Rp84.756.682.446,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp59.433.462.310,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2023 yaitu digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.000.000.000,00 dan penyertaan modal daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp1.500.000.000,00. Perumda



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tirta Tohlangkir sebesar Rp1.500.000.000,00 PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp500.000.000,00 dan PT. Karangasem Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp161.299.344.756,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp119.799.344.756,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp(119.799.344.756,00).

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.3.2.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	236.704.432.339,00	204.736.692.401,90	86,49
Belanja Operasi	233.069.521.353,00	202.167.221.911,28	86,74
Belanja Pegawai	74.021.941.699,00	63.976.350.075,00	86,43
Belanja Barang dan Jasa	159.047.579.654,00	138.190.871.836,28	86,89
Belanja Hibah	0,00	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
Belanja Modal	3.634.910.986,00	2.569.470.490,62	70,69
b. Belanja Pada RSUD	122.082.346.696,00	125.479.952.582,64	102,78
Belanja Operasi	115.517.295.696,00	119.751.601.149,00	103,67
Belanja Pegawai	52.791.723.072,00	53.913.591.768,00	102,13
Belanja Barang dan Jasa	62.725.572.624,00	65.838.009.381,00	104,96
Belanja Hibah	0,00	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
Belanja Modal	6.565.051.000,00	5.728.351.433,64	87,26
Alokasi Anggaran	358.786.779.035,00	330.216.644.984,54	92,04
Kesehatan			
Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
Gaji ASN	441.792.927.863,00	411.524.765.202,00	93,15
Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	1.314.160.111.354,00	1.172.118.675.833,99	89,19
Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	27,30%	28,17%	

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB (Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB) Kabupaten Karangasem.

Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan.

Alokasi anggaran stunting tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Karangasem sebesar Rp 7.331.990.851,00 dengan Realisasi sebesar Rp 6.594.856.055,00 (89,95%) yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 4.320.290.851,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.713.110.555,00 (85,95%) yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik serta alokasi anggaran pada Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB sebesar Rp 3.011.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.881.745.500,00 (95,69%).

Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu Hamil KEK, dan balita usia 6 - bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian edukasi pada remaja, dan ibu hamil, dan keluarga termasuk stop BABS.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/ S rendah.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu yang ada yaitu 689 dan sudah terealisasi 370 kit tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan kembali sebesar 331 dan usulan sudah di verifikasi pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

Capaian program pada Tahun 2023 adalah:

1. Skrining Anemia : 100%;
2. TTD Rematri : 100%;
3. Kehamilan (Antenatal Care) : 71%;
4. TTD Bumil : 100%;
5. Makanan Tambahan bagi Ibu Kurang KEK : 1,1%;
6. Tumbuh Kembang Balita (Antropometri Set) : 100%;
7. Imunisasi : 93,28%;
8. Promkes : 100%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3.2.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian			Anggaran	Realisasi	Persentase
a.	Urusan	Bidang	586.885.599.061,00	556.526.326.971,00	94,83
Pendidikan					
Belanja Operasi			536.626.512.560,00	506.267.240.470,00	94,34
Belanja Pegawai			424.521.176.170,00	394.161.904.080,00	92,85
Belanja Barang dan Jasa			106.358.924.797,00	106.358.924.797,00	100,00
Belanja Hibah			5.746.411.593,00	5.746.411.593,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial			0,00	0,00	0,00
Belanja Modal			50.259.086.501,00	50.259.086.501,00	100,00
b.	Urusan	Bidang	10.984.267.294,00	10.313.941.699,00	93,90
Kebudayaan					
Belanja Operasi			10.984.267.294,00	10.313.941.699,00	93,90
Belanja Pegawai			4.065.296.299,00	3.396.246.204,00	83,54
Belanja Barang dan Jasa			3.301.695.495,00	3.301.695.495,00	100,00
Belanja Hibah			3.617.275.500,00	3.616.000.000,00	99,96
Belanja Bantuan Sosial			0,00	0,00	0,00
Belanja Modal			0,00	0,00	0,00
c.	Urusan	Bidang	3.322.203.570,00	3.003.498.496,00	90,41
Perpustakaan					
Belanja Operasi			3.306.745.438,00	3.003.498.496,00	90,83
Belanja Pegawai			2.350.686.144,00	2.112.438.190,00	89,86
Belanja Barang dan Jasa			956.059.294,00	891.060.306,00	93,20
Belanja Hibah			0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial			0,00	0,00	0,00
Belanja Modal			15.458.132,00	0,00	0,00
d.	Urusan	Bidang	16.739.611.664,00	9.288.544.646,86	55,49
Kepemudaan dan Olahraga					
Belanja Operasi			9.466.773.164,00	4.364.190.667,84	46,10
Belanja Pegawai			5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa			6.211.333.164,00	1.241.207.127,84	19,98
Belanja Hibah			3.250.000.000,00	3.117.543.540,00	95,92
Belanja Bantuan Sosial			6.906.838.501,00	0,00	0,00
Belanja Modal			7.272.838.500,00	4.924.353.979,02	67,71
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan			617.931.681.589,00	579.132.311.812,86	93,72
Total Belanja Daerah			1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
Rasio	Alokasi Anggaran		35,19%	36,57%	
	Fungsi Pendidikan				
terhadap Belanja Daerah					



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3.2.3 *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2023, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1. Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
2. Belanja Bagi Hasil dan /atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa			
a. Belanja Bagi Hasil	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74
b. Bantuan Keuangan	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96
Jumlah (a+b)	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93
Selisih (1-2)	1.521.919.948.537,00	1.349.778.639.830,80	88,69
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% selisih)	608.767.979.414,80	539.911.455.932,32	88,69
Total Belanja Infrastruktur	227.569.612.661,00	171.092.254.042,94	75,18
Belanja Modal	166.613.551.329,00	113.390.058.148,10	68,06
Tanah	522.956.250,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	37.383.886.664,00	34.038.257.071,00	91,05
Bangunan dan Gedung	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71
Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94
Aset Tetap Lainnya	1.262.697.332,00	1.168.694.950,00	92,56
Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	48.956.061.332,00	45.912.195.894,84	93,78
Belanja Bantuan Sosial	12.000.000.000,00	11.790.000.000,00	98,25
Rasio Prosentase Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	14,95%	12,58%	

2.3.2.4 *Mandatory Spending Fungsi Aparatur*

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
a. Belanja Pegawai ASN	666.590.534.682,00	624.653.673.335,84	93,71
Gaji dan Tunjangan	441.550.711.144,00	411.524.765.202,00	93,20
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.669.307.775,00	79.707.272.531,00	89,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN	136.370.515.763,00	133.421.635.602,84	97,84



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
b. Belanja Pegawai DPRD	31.834.488.080,00	31.756.691.215,00	99,76
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	249.600.000,00	248.700.000,00	99,64
c. Belanja Gaji KDH/WKDH	2.335.521.764,00	1.582.122.518,83	67,74
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	1.735.521.764,00	982.122.518,83	56,59
Belanja Dana Operasional Pimpinan KDH /WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
d. Belanja Pegawai BLUD	36.981.179.637,00	26.656.637.617,00	72,08
Total Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80
Belanja Pegawai terkait untuk Guru	120.840.741.520,00	110.126.588.700,00	91,13
Total Belanja Pegawai di Luar TP Guru	616.900.982.643,00	574.522.535.986,67	93,13
Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
Rasio Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	35%	36%	

2.3.2.5 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	79.383.744.000,00	79.383.744.000,00	100
Dana Perimbangan	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34
DAK Fisik	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97
DAK Non Fisik	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK	739.725.140.000,00	741.858.312.827,00	100,29
Persentase	10,73%	10,70%	

2.3.2.6 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp 1.000.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian			Anggaran	Realisasi	Persentase
Total	Belanja	Pada	7.916.291.496,00	7.130.111.312,00	90,07
Inspektorat Daerah					
Belanja Operasi			7.543.581.496,00	6.822.328.312,00	90,44
Belanja Pegawai			5.581.931.996,00	5.375.563.136,00	96,30
Belanja Barang dan Jasa			1.961.649.500,00	1.446.765.176,00	73,75
Belanja Modal			372.710.000,00	307.783.000,00	82,58
Total Belanja Daerah			1.755.953.039.217,00	1.583.643.998.035,99	90,19
Persentase			0,45%	0,45%	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan	1.636.153.694.461,00	1.641.545.932.774,25	5.392.238.313,25	100,33
Belanja	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	(172.310.697.694,01)	90,19
Surplus/(Defisit)	(119.799.344.756,00)	57.903.591.251,26	177.702.936.007,26	(48,33)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	2.192.978,75	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	119.799.344.756,00	119.801.537.734,75	2.192.978,75	100,00
SILPA	0,00	177.705.128.986,01	177.705.128.986,01	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

3.1.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
I	Pendapatan	1.641.545,93	1.577.410,44	1.555.811,56	1.475.561,87	1.624.330,23
II	Belanja	1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,92
	Surplus/Defisit	57.903,59	28.502,56	8.280,11	10.926,55	(11.491,69)
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,57	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87
	Pembiayaan Netto	119.801,54	115.687,57	109.908,34	102.981,78	114.461,00
	SILPA	177.705,13	144.190,13	118.188,45	113.908,33	102.969,32

3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2019 sampai 2023 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Pajak Daerah	232.153,51	167.957,91	85.667,48	66.506,52	108.373,67
2	Retribusi Daerah	10.472,01	10.215,72	9.207,86	9.350,56	13.046,35
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.334,90	9.321,19	10.759,41	11.968,12	11.633,18
4	Lain-lain PAD yang sah	128.280,10	113.837,41	147.057,00	131.409,49	99.959,84
Jumlah		381.240,52	301.332,23	252.691,75	219.234,68	233.013,03

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2019 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi pencapaian terutama disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah.

Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi Potongan atau bentuk lain, pendapatan Denda Pajak Daerah, Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian serta, pendapatan dari BLUD.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Belanja Operasi	1.230.741,04	1.199.158,17	1.210.433,00	1.175.320,21	1.290.833,50
2	Belanja Modal	119.036,45	139.308,07	143.668,86	81.578,99	152.232,67
3	Belanja Tak Terduga	0,054		2.119,88	19.630,35	0,00
4	Belanja Transfer	233.864,80	210.441,64	191.309,71	188.105,77	192.755,75
Jumlah		1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,93

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023.

Realisasi Belanja Modal fluktuatif setiap tahun, dimana tahun 2020 Belanja Modal dibatasi untuk pengadaan yang sangat mendesak dan untuk penanganan Covid-19 sehingga



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya karena anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2023 digunakan untuk Pengembalian kelebihan dana transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Bali untuk Rekonstruksi Ruas Jalan Pert.Batu Belah - Batu Belah (0,700km) sesuai SK Gubernur Bali Nomor 8 / 03 - Q / HK / 2022.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,58	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini / dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

3.1.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{381.240.518.353,76}{1.583.642.341.522,99} \times 100\% = 24,07\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 24,07% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{381.240.518.353,76}{1.230.741.037.196,70} \times 100\% = 30,98\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 30,98%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.1.3.3 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{534.130.310.754,76}{1.583.642.341.522,99} \times 100\% = 33,73\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 33,73%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

3.1.3.4 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{534.130.310.754,76}{1.230.741.037.196,70} \times 100\% = 43,40\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 43,40%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
					Realisasi	Target
PAD	14,24	14,97	16,33	19,45	24,07	18,14
Belanja						
PAD	18,05	18,65	20,88	25,13	30,98	23,82
Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah PAD yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan.

Khusus Tahun 2023, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 18,14% untuk menopang belanja dan 23,82% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 24,07% dan 30,98%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2023 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame, MBLB dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dan ketegangan di Jalur Gaza antara Palestina dan Israel juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2023 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Dalam masa pandemi tidak ada pengeluaran yang direalisasikan tanpa ada pagu anggarannya kecuali beberapa utang jangka pendek untuk kegiatan operasional kantor (seperti listrik, air, telepon), kegiatan operasional RSUD, serta utang belanja pegawai karena persentase pendapatan Tahun 2023.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2023. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
7. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada awal Tahun 2023 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadi penggabungan beberapa unit kerja dan perangkat daerah di Kabupaten Karangasem yang ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 7 Unit Bagian), 17 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem. BLUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang memuat BLUD didalamnya.

4.1.4 Perusahaan Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera. Modal Dasar yang disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 telah menggunakan basis akrual. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
4. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
5. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
6. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "**bulan**". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya; dan
7. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
2. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; dan
3. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Pendapatan – LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
5. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Pendapatan – LRA

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.3 Beban - LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
5. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
6. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.4.4 Belanja - LRA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban serta dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain PAD yang Sah;
6. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
7. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.5 Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
2. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
3. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
4. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
5. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
6. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
7. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.6 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;



4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.4.7 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.7.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya;
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
11. Persediaan terdiri atas: barang pakai habis, barang tak pakai habis, barang bekas dipakai; dan
12. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

4.4.7.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*); dan

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

6. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.4.7.3 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi; dan
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

4.4.7.4 Properti Investasi

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk keinginan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

2. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah dan ditatausahakan BMD tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu :
 - a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
 - b. Intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).
3. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

4.4.7.5 Perjanjian Konsesi Jasa

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama



- pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- 2. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
 - a. disediakan oleh mitra, yang:
 - 1). dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2). merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4.4.7.6 Dana Cadangan

- 1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
- 2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

4.4.7.7 Aset Lainnya

- 1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
- 2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
- 3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
- 5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
- 6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya; dan
- 7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

4.4.7.8 Kewajiban

- 1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- 2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- 3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

4.4.7.9 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

4.4.7.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih Rp0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2023, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Pada Tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;

4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan Tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2023} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \text{penyusutan per periode} : 12$$

$$\text{Nilai penyusutan pada tahun berkenaan} = \text{penyusutan per bulan} \times \text{bulan kepemilikan aset tetap.}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2023 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
6. Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

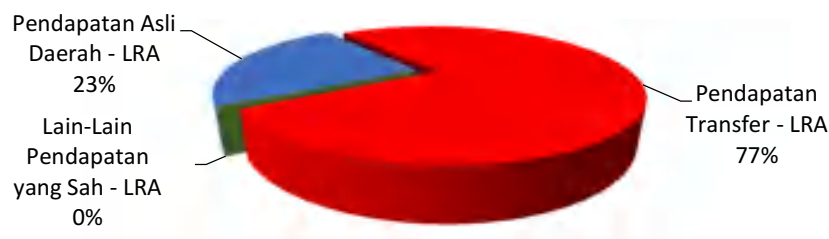
5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah - LRA	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78
Pendapatan Transfer - LRA	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	101,33	24.818.382.807,10
Jumlah	1.636.153.694.461,00	1.641.545.932.774,25	100,33	1.577.410.438.958,88

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LRA TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	193.204.886.607,00	232.153.510.496,00	120,16	167.957.909.825,42
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,55	10.215.719.116,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	104.969.713.253,00	128.280.097.895,84	122,21	113.837.409.849,45
Jumlah	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel - LRA	40.753.353.975,00	51.770.436.080,08	127,03	23.092.040.966,00
Pajak Hotel - LRA	40.753.353.975,00	51.770.436.080,08	127,03	23.092.040.966,00
Pajak Restoran - LRA	17.788.048.205,00	23.692.448.383,00	133,19	11.378.209.719,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya - LRA	16.306.536.010,00	21.011.595.802,00	128,85	10.057.446.671,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LRA	323.000.000,00	874.075.734,00	270,61	191.968.369,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LRA	90.000.000,00	590.729.963,00	656,37	282.126.408,00
Pajak Jasa Boga / Catering dan Sejenisnya - LRA	1.068.512.195,00	1.216.046.884,00	113,81	846.668.271,00
Pajak Hiburan - LRA	136.726.265,00	175.126.520,00	128,09	78.796.577,00
Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LRA	23.000.000,00	3.470.000,00	15,09	1.145.500,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	103.726.265,00	163.704.020,00	157,82	70.425.577,00
Pajak Pertandingan Olahraga - LRA	10.000.000,00	7.952.500,00	79,53	7.225.500,00
Pajak Reklame - LRA	500.005.800,00	658.491.200,00	131,70	526.388.100,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	500.005.800,00	658.491.200,00	131,70	526.388.100,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	16.954.105.732,00	17.977.509.366,00	106,04	15.635.109.437,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	16.954.105.732,00	17.977.509.366,00	106,04	15.635.109.437,00
Pajak Parkir - LRA	14.400.000,00	18.150.000,00	126,04	6.385.500,00
Pajak Parkir - LRA	14.400.000,00	18.150.000,00	126,04	6.385.500,00
Pajak Air Tanah - LRA	1.017.522.865,00	1.145.519.201,67	112,58	918.841.699,00
Pajak Air Tanah - LRA	1.017.522.865,00	1.145.519.201,67	112,58	918.841.699,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	94.240.723.765,00	106.506.402.045,00	113,02	96.437.421.080,67
Pajak Pasir dan Kerikil - LRA	94.240.723.765,00	106.506.402.045,00	113,02	96.437.421.080,67
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) - LRA	6.200.000.000,00	6.132.884.016,00	98,92	6.544.889.473,00
PBB P2 - LRA	6.200.000.000,00	6.132.884.016,00	98,92	6.544.889.473,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	15.600.000.000,00	24.076.543.684,25	154,34	13.339.827.273,75
BPHTB – Pemindahan Hak - LRA	15.600.000.000,00	24.076.543.684,25	154,34	13.339.827.273,75
Jumlah	193.204.886.607,00	232.153.510.496,00	120,16	167.957.909.825,42

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak *Online*;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 55 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2014 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian SPTPD Pajak Hotel dan Restoran;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 26 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan BPHTB secara *online*;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2023 tentang pembebasan sanksi Administratif berupa Denda terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah - LRA di TA 2023 secara umum dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian yang mulai pulih dan mulai pulihnya sektor pariwisata sehingga berdampak pada jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, PPJ dan MBLB;
2. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah khususnya jenis pajak hotel dan restoran yang dilakukan pembayaran bertahap/ angsuran serta Pelaksanaan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan Negeri Karangasem dalam penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pemungutan pajak daerah meliputi *digitalisasi pajak MBLB, digitalisasi pajak hotel, restoran serta transaksi pembayaran non tunai* sebagaimana mendukung Permendagri No. 56 Tahun 2021 tentang TP2DD dan ETPD yaitu melaksanakan digitalisasi pajak daerah meliputi pelaporan online SPTPD, pembayaran online/kanal digital (QRIS, M Banking dsb), faktur barcode/digitalisasi pajak MBLB, validasi BPHTB;
4. Optimalisasi Monitoring Pajak MBLB secara digital melalui IPos dan pelibatan stakeholder terkait dalam pengawasan pajak MBLB melalui pos pengawasan pajak MBLB;
5. Mengoptimalkan sosialisasi perpajakan daerah dan Pelayanan Perpajakan melalui pelayanan online pajak daerah serta pemberian reward kepada wajib pajak (QRIS PBB-P2) dalam pemungutan pajak daerah;
6. Mengoptimalkan validasi data wajib pajak daerah (khususnya PBB-P2, Pajak Hotel, Restoran) dengan melibatkan Perangkat Desa;
7. Mengoptimalkan pendataan potensi wajib pajak daerah yang baru;
8. Pengembangan pelayanan pajak melalui pelayanan online WhatsApp dan jemput PBB-P2 serta pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah keliling (PadaEling); dan
9. Mengoptimalkan pemeriksaan pajak daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum - LRA				
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	710.896.000,00	627.616.800,00	88,29	2.007.261.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	243.820.000,00	243.864.000,00	100,02	253.147.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	215.000.000,00	244.052.000,00	113,51	210.220.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.808.700.000,00	4.122.510.000,00	108,24	4.086.445.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	500.000.000,00	433.649.240,00	86,73	526.817.600,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	45.000.000,00	55.935.000,00	124,30	52.055.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	720.000.000,00	616.819.564,00	85,67	779.427.464,00
Retribusi Jasa Usaha - LRA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	207.951.000,00	228.004.000,00	109,64	223.826.100,00
Retribusi Terminal - LRA	140.000.000,00	145.168.000,00	103,69	127.209.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	250.000.000,00	334.969.000,00	133,99	249.935.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.000.000,00	23.387.000,00	77,96	31.080.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	2.003.480.000,00	1.492.340.000,00	74,49	804.450.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	37.000.000,00	37.182.000,00	100,49	22.465.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu- LRA				
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	800.000.000,00	700.726.035,00	87,59	667.025.352,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	90.000.000,00	171.500.000,00	190,56	61.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	5.000.000,00	2.862.000,00	57,24	3.355.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LRA	405.000.000,00	991.430.000,00	244,80	109.500.000,00
Jumlah	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,55	10.215.719.116,00

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah - LRA di TA 2023 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan karena sangat bergantung pada jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
- b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan disebabkan karena sangat bergantung pada jumlah kendaraan yang diuji;
- c. Realisasi Retribusi pelayanan pasar lebih tinggi dari target disebabkan oleh pasar beroperasi secara normal serta mulai membaiknya perekonomian masyarakat;
- d. Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena penggunaan jasa penyedotan kakus oleh masyarakat meningkat; dan
- e. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena Wajib retribusi terlambat melakukan verifikasi/perhitungan di internal mereka hingga waktu jatuh tempo pembayaran retribusi telah habis dan mereka memilih untuk melakukan pembayaran di awal tahun walaupun dikenakan denda serta Wajib retribusi tidak menyampaikan kendala yang dihadapi pada saat terjadi permasalahan/kendala dalam melakukan pembayaran melalui sistem e-retribusi.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan;
- b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan tidak diperbolehkan lagi memotong sapi betina produktif sesuai peraturan yang berlaku, sehingga menurunkan jumlah sapi yang dipotong di RPH resmi milik pemerintah dan tidak lagi melakukan pemungutan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Babi milik swasta/milik pribadi di Kecamatan, karena Pemerintah tidak ada memberikan fasilitas fisik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

kepada para pelaku usaha pemotongan tersebut, sesuai pasal 3 ayat 2 Perda Nomor 24 Tahun 2011;

- c. Retribusi Terminal realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan karena adanya pengawasan dan pembinaan ke petugas pemungutan retribusi parkir dan meningkatnya kunjungan wisatawan terutama tempat khusus parkir yang berada di objek-objek pariwisata; dan
- e. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan karena objek retribusi hanya terbatas pada wisata tirta yang tersebar di DTW Padang Bai, DTW Candidasa, DTW Kubu, DTW Tulamben, DTW Amed, serta DTW Telaga Waja dengan aktivitas wisata berupa Diving, Snorkling dan Rafting. Kondisi pariwisata yang fluktuatif atau tidak bisa di prediksi, baik dari minat wisatawan yang tidak bisa dipaksa untuk berkunjung maupun dari faktor alam yang mempengaruhi kualitas air laut dan sungai sehingga tidak bisa dilakukan aktivitas wisata rafting dan juga diving.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

- a. Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dibawah anggaran yang ditetapkan disebabkan karena dalam perencanaan atas penentuan target retribusi atas dasar estimasi proyeksi pemohon, namun dalam perjalanannya tidak sesuai dengan estimasi proyeksi yang ditentukan dimana jumlah pemohon kurang dari yang ditargetkan, sehingga pendapatan yang ditargetkan tidak dapat tercapai karena dari 100 dokumen/pemohon yang direncanakan yang memenuhi syarat dan diproses sebanyak 34 dokumen;
- b. Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
- c. Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena ada beberapa kendaraan pedesaan tidak beroperasi akibat dampak sepi penumpang yang mengakibatkan penghasilannya menurun sehingga menunda untuk mengurus perpanjangan izin trayek;
- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan; dan
- e. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 secara total lebih tinggi dari Tahun 2022 disebabkan kondisi perekonomian masyarakat semakin membaik.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91

Penjelasan:

Rincian penerimaan atas Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA TA 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	9.830.245.683,00	9.830.245.683,35	100,00	8.902.529.172,68
PT Jamkrida Bali Mandara	17.540.828,00	17.540.828,00	100,00	12.498.951,00
Perumda Tirta Tohlangkir	223.280.225,00	487.108.811,57	218,16	406.164.440,23
Jumlah	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91

Penerimaan deviden dari PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan hasil RUPS yang dijelaskan sesuai *point* 5.3.1.2.2.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	555.000,00	317.946.501,00	57.287,66	27.470.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	302.340.000,00	-	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah - LRA	1.599.433.525,00	1.826.213.800,40	114,18	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.841.959.649,00	2.400.972.447,61	130,35	1.841.350.137,65
Pendapatan Bunga - LRA	583.333.333,00	2.916.666.666,80	500,00	3.572.916.666,83
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	2.110.891.621,43	-	248.352.744,41
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	10.000.000,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	49.668.592,75	-	202.676.211,65
Pendapatan Denda Pajak - LRA	534.307.143,00	2.011.820.819,24	376,53	450.346.262,33
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	0,00	-	12.049.776,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0,00	81.432.250,00	-	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	57.091.070,00	64.428.347,00	112,85	15.332.138,00
Pendapatan BLUD - LRA	100.343.033.533,00	116.197.716.849,61	115,80	107.465.715.912,58
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	1.200.000,00
Jumlah	104.969.713.253,00	128.280.097.895,84	122,21	113.837.409.849,45

Penjelasan:

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan utamanya disebabkan:

1. Adanya penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan dari sewa gedung kantor oleh Perumda Tirta Toh Langkir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
2. Adanya penerimaan hasil kerjasama daerah dari DTW Besakih dan Taman Soekasada Ujung karena situasi perekonomian dan pariwisata sudah membaik pasca Covid-19.
3. Adanya penerimaan Jasa Giro dari transaksi rekening koran bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang langsung di autodebet ke rekening kas daerah.
4. Adanya penerimaan Pendapatan atas Bunga Deposito karena dilaksanakannya kebijakan manajemen kas pada kas daerah.
5. Adanya penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan dari APIP dan BPK RI.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

6. Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, parkir, MBLB dan PBB-P2, kebijakan pemberian keringanan pajak daerah yaitu pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak daerah (Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023);
8. Pendapatan BLUD mulai meningkat di bulan Agustus, Oktober, Nopember dan Desember 2023, karena adanya layanan baru seperti poli CAPD bagi pasien - pasien dengan penyakit gagal ginjal dan penambahan pelayanan cuci darah, masyarakat memanfaatkan untuk berobat di RSUD Kab. Karangasem, baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan dan dengan dibukanya layanan poli ESWL. Pada bulan Agustus 2023 terdapat pembayaran klaim dua kali yaitu untuk klaim bulan Mei dan Juni 2023 yang juga memberi pengaruh atas pelampauan pendapatan pada tahun 2023.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.563,00	99,40	1.060.714.386.563,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	243.996.155.865,00	193.005.880.175,00	79,10	190.545.438.234,00
Jumlah	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan - LRA	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34	973.346.781.563,00
5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	21.860.366.000,00	21.860.366.000,00	100,00	9.523.895.000,00
5.1.1.2.1.3	Dana Desa - LRA	79.383.744.000,00	79.383.744.000,00	100,00	77.843.710.000,00
	Jumlah	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.563,00	99,40	1.060.714.386.563,00

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil - LRA	14.237.351.000,00	16.750.482.411,00	117,65	21.942.135.428,00
Dana Alokasi Umum - LRA	725.487.789.000,00	725.107.830.416,00	99,95	699.227.251.816,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97	42.965.052.289,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44	209.212.342.030,00
Jumlah	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34	973.346.781.563,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

- a. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	702.544.000,00	1.313.602.297,00	186,98	6.178.876.725,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 - LRA	11.458.093.000,00	13.112.119.740,00	114,44	12.496.068.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	0,00	0,00	-	1.006.617.477,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LRA	262.020.000,00	298.307.865,00	113,85	302.213.226,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	7.000,00	12.298,00	175,69	49.000,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan - LRA	1.814.687.000,00	2.026.440.211,00	111,67	1.958.311.000,00
Jumlah	14.237.351.000,00	16.750.482.411,00	117,65	21.942.135.428,00

- b. Saldo Dana Alokasi Umum - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, di mana Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan sebesar Rp725.487.789.000,00.

- c. Laporan Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Tahun 2023 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

Uraian	Penerimaan dari RKUN (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1. Pendidikan	81.829.552.000	73.609.004.828,00	89,95	8.220.547.172,00
2. Kesehatan	47.567.236.000,00	44.370.454.541,00	93,28	3.196.781.459,00
3. Pekerjaan Umum	39.022.959.000,00	36.200.432.693,00	92,77	2.822.526.307,00
4. Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	594.553.694,00	99,09	5.446.306,00

- d. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Bidang Pendidikan - LRA	0,00	0,00	-	9.448.556.511,00
DAK Bidang Pendidikan PAUD - LRA	376.638.000,00	361.799.140,00	96,06	329.937.066,00
DAK Bidang Pendidikan SD - LRA	4.397.312.000,00	4.125.908.132,00	93,83	0,00
DAK Bidang Pendidikan SMP - LRA	1.803.723.000,00	1.710.771.000,00	94,85	0,00
DAK Bidang Pendidikan SKB - LRA	506.556.000,00	330.082.060,00	65,16	0,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - KB- LRA	181.910.000,00	136.410.000,00	74,99	8.042.745.228,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit - LRA	243.078.000,00	241.000.000,00	99,15	0,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	0,00	0,00	-	1.442.538.984,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	0,00	0,00	-	450.319.500,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	0,00	0,00	-	0,00
DAK Bidang Jalan - LRA	0,00	0,00	-	14.199.633.000,00
DAK Bidang Air Minum - LRA	0,00	0,00	-	4.470.166.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAK Bidang Sanitasi - LRA	0,00	0,00	-	2.586.000.000,00
DAK Bidang Irigasi - LRA	0,00	0,00	-	1.093.412.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LRA	0,00	0,00	-	901.744.000,00
Jumlah	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97	42.965.052.289,00

- e. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Non-Fisik - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BOS Reguler - LRA	77.633.360.000,00	77.258.961.589,00	99,52	71.135.532.396,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	115.526.165.000,00	117.946.582.000,00	102,10	118.710.746.440,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	2.600.500.000,00	749.781.419,00	28,83	1.460.250.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	4.413.010.000,00	4.427.658.233,00	100,33	3.574.959.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	2.078.190.000,00	1.986.500.000,00	95,59	1.213.183.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - LRA	0,00	0,00	-	6.729.732.104,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - BOK - LRA	3.607.143.000,00	0,00	-	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - Pengawasan Obat dan Makanan - LRA	357.862.000,00	0,00	-	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - Akreditasi Puskesmas - LRA	8.851.757.000,00	6.997.941.800,00	79,06	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - BOKB - LRA	5.802.751.000,00	3.911.889.713,00	67,41	3.766.212.850,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	471.370.000,00	461.835.100,00	97,98	390.486.250,00
Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	0,00	0,00	-	1.054.439.540,00
Fasilitasi Penanaman Modal - LRA	365.200.000,00	286.448.000,00	78,44	218.900.850,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LRA	438.800.000,00	334.448.550,00	76,22	225.900.000,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian - LRA	1.125.450.000,00	953.149.000,00	84,69	731.999.600,00
Jumlah	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44	209.212.342.030,00

2. Dana Insentif Daerah (DID) - LRA yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp21.860.366.000,00, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Penggunaan DID Tahun 2023 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

- a. Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya Reguler) Tahun 2023

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
1. Bidang Sosial		
Bantuan Alat Dengar dan Kursi Roda untuk Disabilitas	43.714.850,00	21 orang
Bantuan Penyediaan Pangan berupa Seragam Sekolah bagi siswa miskin	26.568.450,00	29 orang
Bantuan sembako untuk penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut Usia terlantar	34.894.350,00	41 orang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh	5.790.000.000,00	197 unit
2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Biaya listrik, air telp pengelolaan pasar	378.416.511,00	3 pasar
Pameran dagang lokal (sewa stand, tenda dan jaringan listrik, setak dan bahan pameran, ATK)	386.446.850,00	2 kali
Pameran dagang Nasional (sewa stand, bahan pameran, ATK, ekspedisi	81.715.675,00	2 kali
Pemberdayaan kemitraan usaha mikro melalui kerjasama dengan lembaga keuangan	42.423.100,00	40 pelaku usaha mikro
Pemeliharaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan / pasar	340.125.300,00	3 pasar
Promosi Penggunaan Produk Lokal dan pemasaran melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	26.887.650,00	22 (10 Pelaku Usaha, 12 UMKM)
3. Bidang lainnya		
Pembiayaan Penerangan Jalan Umum	2.421.575.714,00	4028 titik
Total	9.572.768.450,00	

b. Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Tahun 2023

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
1. Penurunan Stunting		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	196.800.000,00	1 reservoir
Pengadaan reservoir		
Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Bergizi ke sekolah tingkat SMA (pemberian makanan dan peralatan makan)	73.370.000,00	3 sekolah
2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		
Pemberian sembako kepada masyarakat miskin ekstrem	6.306.055	KK
Penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan		Desa/Kelurahan
Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh (untuk masyarakat miskin)	6.000.000.000,00	200 unit
Sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural (pemberian sembako masyarakat miskin)	72.800.000,00	200 orang
3. Peningkatan Investasi		
Pelaksanaan kegiatan FGD pemanfaatan data perijinan berusaha serta sosialisasi OSS RBA dan sosialisasi pelaporan LKPM (untuk pelaku usaha)	71.540.300,00	581 orang
Pembiayaan penerangan jalan umum	928.197.372,00	4028 titik
Penyediaan alat listrik perlengkapan LPJU (lampu jalan)	127.684.650,00	50 lampu
Penyediaan lampu penerangan jalan umum	361.877.310,00	24 titik
Perbaikan jalan lingkungan pemukiman di kelurahan	1.282.724.515,00	7966 Meter
Rehabilitasi saluran irigasi (DI Uma Cetra, DI Cau Jasri II, DI telun Wayah, DI Langgoon), Rehabilitasi Bendung Basang Alas dan Check Dam bending Umayu	888.762.000,00	1915 Meter
4. Pengendalian Inflasi		
Pekarangan pangan lestari (pembelian pupuk, bibit, media tanam, rumah bibit, fasilitas sarana perairan)	201.957.000,00	3 Kelompok Wanita Tani
Total	10.212.019.202,00	

3. Dana Desa – LRA yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp79.383.744.000,00, sama dengan anggaran yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA	159.967.871.806,00	152.889.792.401,00	95,58	131.395.646.289,00
5.1.1.2.2.2	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00
Jumlah		243.996.155.865,00	193.005.880.175,00	79,10	190.545.438.234,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	58.289.620.900,00	51.487.622.865,00	88,33	50.055.537.787,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	36.315.661.174,00	37.457.989.362,00	103,15	21.531.480.691,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	35.460.938.016,00	36.484.903.613,00	102,89	27.907.595.382,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	204.248.634,00	193.273.404,00	94,63	171.248.258,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	29.697.403.082,00	27.266.003.157,00	91,81	31.729.784.171,00
Jumlah	159.967.871.806,00	152.889.792.401,00	95,58	131.395.646.289,00

2. Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LRA	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	14.949.125,48	-	398.546.349,10
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	1.950.000.000,00	1.960.996.557,01	100,56	24.419.836.458,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Undangan - LRA

Jumlah	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	101,33	24.818.382.807,10
--------	------------------	------------------	--------	-------------------

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA	0,00	0,00	-	387.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	0,00	14.949.125,48	-	11.546.349,10
Jumlah	0,00	14.949.125,48	-	398.546.349,10

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 menerima sumbangan dari masyarakat sebesar Rp500.000,00, Penerimaan kelebihan setor atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan setor sisa TU, penyetoran sisa dana Paud yg di setor ke pusat sebesar Rp271,28, dan penerimaan kelebihan setor pajak yang tidak diketahui nama WP tersebut sebesar Rp14.448.854,20 yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LRA	0,00	66.032.409,01	-	3.106.064,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.950.000.000,00	1.894.964.148,00	97,18	24.416.730.394,00
Jumlah	1.950.000.000,00	1.960.996.557,01	100,56	24.419.836.458,00

Penjelasan:

1. Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di TA 2023 merupakan pengembalian atas hibah yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga yaitu Dana Hibah ke Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp55.432.534,00 dan pengembalian atas dana BKK kegiatan upacara piodalan di Besakih sebesar Rp10.599.875,01;
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2023 dibawah dari yang dianggarkan disebabkan dilakukan pemotongan penyaluran sebesar SILPA tahun 2022 kepada FKTP.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31
Belanja Modal	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15
Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	0,00	0,00
Transfer Daerah	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93	210.441.643.212,00
Jumlah	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	90,19	1.548.907.880.948,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

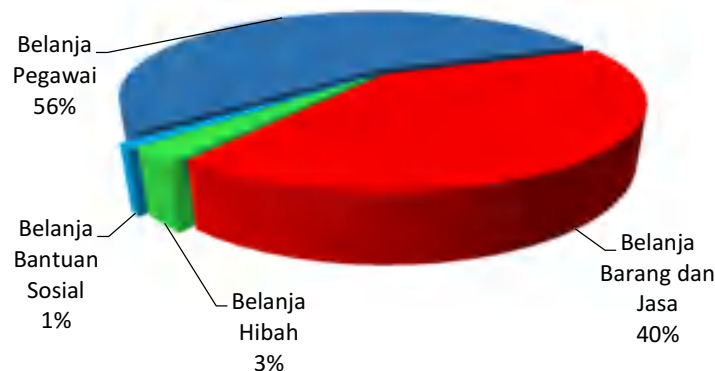
5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80	721.933.660.292,55
Belanja Barang dan Jasa	552.006.366.721,00	499.841.936.183,78	90,55	452.812.860.996,76
Belanja Hibah	34.788.206.293,00	34.393.666.026,25	98,87	18.364.668.762,00
Belanja Bantuan Sosial	12.197.620.000,00	11.856.310.300,00	97,20	6.046.980.000,00
Jumlah	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31

Penjelasan:

1. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



2. Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 1*.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	441.550.711.143,88	411.524.765.202,00	93,20	424.543.362.611,80
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.669.307.775,12	79.707.272.531,00	89,89	81.870.044.396,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.056.565.709,00	133.421.635.602,84	88,33	140.096.055.374,78
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76	31.306.310.635,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.735.521.764,00	982.122.518,83	56,59	834.999.746,97
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.600.000,00	848.700.000,00	99,89	848.350.000,00
Belanja Pegawai BLUD	22.295.129.691,00	26.656.637.617,00	119,56	42.434.537.528,00
Jumlah	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80	721.933.660.292,55

Penjelasan:

1. Terjadi pelampauan pada belanja pegawai BLUD disebabkan terjadinya pembayaran jasa pelayanan akibat peningkatan pendapatan BLUD RSUD yang dikeluarkan berdasarkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 156 Tahun 2023 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

- Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 2*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	93.668.518.058,00	72.682.176.820,10	77,60	67.944.059.923,50
Belanja Jasa	227.263.095.234,00	206.988.403.262,00	91,08	206.737.239.492,00
Belanja Pemeliharaan	56.446.167.177,00	52.300.549.271,84	92,66	20.960.763.293,38
Belanja Perjalanan Dinas	29.606.222.323,00	24.179.917.902,00	81,67	20.259.111.009,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.033.133.154,00	21.906.966.704,00	87,51	16.779.418.825,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	60.864.015.775,00	59.546.270.466,84	97,83	56.203.638.090,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.125.215.000,00	62.237.651.757,00	105,26	63.928.630.363,72
Jumlah	552.006.366.721,00	499.841.936.183,78	90,55	452.812.860.996,76

Penjelasan:

- Terjadi pelampauan pada belanja barang dan jasa BLUD disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan pasien di RSUD Karangasem yang tidak diikuti dengan kecukupan anggaran belanja yang mengakibatkan RSUD menggunakan fleksibilitas sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 156 Tahun 2023 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023; dan
- Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 3*.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.370.000.000,00	18.369.996.900,00	100,00	249.983.214,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.027.366.293,00	14.632.829.126,25	97,37	17.311.892.700,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.390.840.000,00	100,00	802.792.848,00
Jumlah	34.788.206.293,00	34.393.666.026,25	98,87	18.364.668.762,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

- Hibah Kepada Pemerintah Pusat yaitu bantuan Hibah kepada Lembaga Organisasi Kepramukaan TA 2023 sebesar Rp249.996.900,00, Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp13.960.000.000,00, Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4.160.000.000,00;
- Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2023 terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.731.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.708.958.233,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.070.689.963,25
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.985.200,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.096.195.730,00
Jumlah	14.632.829.126,25

- Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 86/HK/2023 tanggal 9 Pebruari 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem TA 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Total Nilai Bantuan
Partai Hati Nurani Rakyat	96.585.000,00
Partai Golongan Karya	288.690.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	379.720.000,00
Partai Demokrat	99.960.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	31.725.000,00
Partai Nasional Demokrat	270.950.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	162.250.000,00
Partai Persatuan Indonesia	60.960.000,00
Jumlah	1.390.840.000,00

- Rincian belanja hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 4*.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	197.620.000,00	66.310.300,00	33,55	166.980.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	12.000.000.000,00	11.790.000.000,00	98,25	5.880.000.000,00
Jumlah	12.197.620.000,00	11.856.310.300,00	97,20	6.046.980.000,00

Penjelasan:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan bedah rumah sebanyak 393 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp30.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	522.956.250,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97	47.219.074.193,50
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71	32.102.107.210,05
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94	59.535.424.292,60
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.262.697.332,00	1.210.750.750,00	95,89	451.461.989,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 5*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal - Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	522.956.250,00	0,00	-	0,00
Jumlah	522.956.250,00	0,00	-	0,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.281.619.200,00	1.062.279.000,00	82,89	41.522.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	745.000.000,00	688.562.000,00	92,42	3.828.473.150,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.706.000,00	46.367.799,00	97,19	14.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.005.805.836,00	18.071.935.966,00	95,09	4.899.706.488,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan	2.117.845.299,00	1.576.389.524,00	74,43	809.467.900,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pemancar				
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.232.772.596,00	1.464.734.881,00	65,60	13.170.260.904,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.227.938.437,00	4.438.004.225,00	84,89	3.071.359.000,00
Belanja Modal Komputer	13.105.437.946,00	12.032.801.849,00	91,82	21.090.933.174,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.800.000,00	41.300.000,00	98,80	0,00
Belanja Modal Alat Peraga	15.000.000,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	12.500.000,00	8.650.000,00	69,20	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	-	292.851.577,50
Belanja Modal Peralatan Olahraga	226.167.000,00	211.567.000,00	93,54	0,00
Jumlah	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97	47.219.074.193,50

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	48.065.574.493,00	29.229.963.509,27	60,81	29.254.959.162,05
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.770.120.000,00	7.458.315.467,12	95,99	2.847.148.048,00
Jumlah	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71	32.102.107.210,05

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 8*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.973.258.840,00	33.776.206.839,07	58,26	55.838.342.500,00
Belanja Modal Bangunan Air	7.384.170.850,00	3.718.196.400,00	50,35	2.059.440.250,00
Belanja Modal Instalasi	1.242.886.900,00	1.235.108.600,00	99,37	745.900.000,00
Belanja Modal Jaringan	4.993.000.000,00	2.750.315.311,64	55,08	891.741.542,60
Jumlah	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94	59.535.424.292,60

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 9*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	664.405.932,00	667.005.700,00	100,39	367.085.989,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00	4.600.000,00	230,00	25.376.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	596.291.400,00	539.145.050,00	90,42	59.000.000,00
Jumlah	1.262.697.332,00	1.210.750.750,00	95,89	451.461.989,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 10*.

5.1.2.2.6 Belanja Modal - Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 11*.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	-	0,00

Penjelasan:

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2023 dan TA 2022. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2023 sebesar Rp54.000,00 merupakan pengembalian kelebihan dana transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Bali untuk rekonstruksi ruas jalan Pert.Batu Belah - Batu Belah (0,700km) sesuai SK Gubernur Bali Nomor 8 / 03 - Q / HK / 2022.

5.1.2.4 Transfer Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00
Transfer Bantuan Keuangan - LRA	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00
Jumlah	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93	210.441.643.212,00

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa - LRA	28.501.842.451,00	28.501.842.451,00	100,00	19.563.129.403,00
5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - LRA	1.687.614.229,00	1.608.724.754,20	95,33	1.312.523.989,00
Jumlah		30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa TA 2023. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 75 desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada *lampiran 12 dan 13*.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.4.2.1	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	92.432.890.000,00	92.432.889.999,99	100,00	160.750.989.820,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	111.410.744.000,00	111.321.344.000,00	99,92	28.815.000.000,00
Jumlah		203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan - LRA didasarkan pada:
 - Transfer Dana Desa Setiap Desa TA 2023 langsung ditransfer dari Kas Negara ke Rekening Kas Desa;
 - Perbup Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- c. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 463/HK/2023 tentang Besaran Atas Penyesuaian Kembali Pembagian Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dan Besaran Kurang Bayar Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Setiap Desa di Kabupaten Karangasem, dan;
 - d. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 77/HK/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
2. Rincian desa penerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus serta Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada *lampiran 14 s.d. 18*.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Jumlah	119.799.344.756,00	119.801.537.734,75	100,00	115.687.586.745,82

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.190.144.756,00	144.191.886.744,75	100,00	118.187.586.745,82
Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	450.990,00	-	0,00
Jumlah	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	24.894.543.388,00	24.894.543.388,24	100,00	11.442.849.593,94
Pelampauan Penerimaan Lain-lain	398.546.349,00	398.546.349,00	100,00	5.921.786.628,00
Pendapatan Daerah yang Sah				
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	1,00	1,00	100,00	0,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	118.897.055.018,00	118.897.055.018,00	100,00	100.823.807.315,00
Koreksi SILPA	0,00	1.741.988,51	-	(856.791,12)
Jumlah	144.190.144.756,00	144.191.886.744,75	100,00	118.187.586.745,82

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pencairan Dana Cadangan TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pencairan Dana Cadangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00	0,00

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	450.990,00	-	0,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembentukan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100,00	0,00

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
➤ PT. BPD Bali	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	750.000.000,00
➤ PT. Jamkrida Bali Mandara	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	250.000.000,00
➤ Perumda Tirta Tohlangkir	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
➤ PT. Karangasem Sejahtera	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

5.1.3.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	0,00

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah - LRA				
✓ Pendapatan Asli Daerah - LRA	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78
✓ Pendapatan Transfer - LRA	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	101,33	24.818.382.807,10
➤ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31
✓ Belanja Modal	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15
✓ Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	-	0,00
➤ Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82
✓ Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Jumlah	0,00	177.705.128.986,01	-	144.190.144.756,24

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp177.705.128.986,01 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ Dana SiLPA Terikat	60.450.145.865,36
✓ Kas di BLUD	13.607.809.769,06
✓ Kas Dana BOSP	244.602.583,50
✓ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00
✓ Setara Kas	0,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari :	
• DAU Penggajian Formasi PPPK	13.617.762,00
• DAU Pendanaan Kelurahan	5.446.306,00
• DAU Bidang Pendidikan	8.220.547.172,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
• DAU Bidang Kesehatan	3.196.781.549,00
• DAU Bidang Pekerjaan Umum	2.822.526.307,00
✓ DAK Fisik yang terdiri dari:	
• DAK Bidang Pendidikan PAUD	7.252.540,00
• DAK Bidang Pendidikan SD	4.978.550,00
• DAK Bidang Pendidikan SMP	6.280.000,00
• DAK Bidang Pendidikan SKB	6.524.750,00
✓ DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
• DAK NF Tunjangan Guru ASN Daerah	11.617.402.000,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas	3.307.452.026,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	2.663.236.254,00
• DAK NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.567.689.300,00
• DAK NF Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	34.875.700,00
• DAK NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	211.284.460,00
• DAK NF Dana Fasilitas Penanaman Modal	84.341.500,00
• DAK NF Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	483.840.050,00
✓ Insentif Fiskal	560.332.550,00
✓ IF Kesejahteraan Masyarakat	1.515.245.798,00
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	4.921.403.674,80
✓ Utang Belanja Jasa Tahun 2023	131.078.320,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah	5.063.321.105,00
✓ Belanja Modal jaringan listrik lainnya/pengadaan LPJU (Pemasangan LPJU Hias)	6.952.000,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	117.256.641.202,65
✓ Pelampauan PAD	62.783.004.757,76
✓ Efisiensi Belanja Hibah	394.540.266,75
✓ Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	341.309.700,00
✓ Efisiensi Belanja Tak Terduga	11.896.720.381
✓ Lain-Lain	41.841.066.097,14
Jumlah	177.705.128.986,01

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06
Kas Dana BOSP	244.602.583,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00
Setara Kas	0,00
Jumlah	177.705.128.986,01

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.8* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.3* dan *Poin 5.2.5*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Karangasem (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(144.191.886.744,75)	(118.187.586.745,82)

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *poin 5.2.4* di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *poin 5.2.5* di bawah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas Bos SD Negeri Tahun 2022	1.741.988,51	(856.791,12)
Jumlah	1.741.988,51	(856.791,12)

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19
Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24

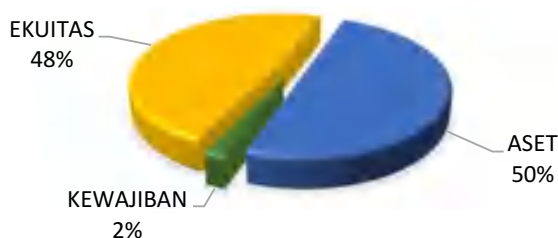
Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.3 di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk per tanggal 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	333.294.746.466,72	255.766.386.631,46	77.528.359.835,26	30,31
Investasi Jangka Panjang	146.809.960.492,05	122.970.265.940,13	23.839.694.551,92	19,39
Aset Tetap	1.184.611.342.510,31	1.173.203.557.870,85	11.407.784.639,46	0,97
Dana Cadangan	10.890.800.000,00	0,00	10.890.800.000,00	-
Aset Lainnya	49.749.120.522,78	50.473.265.715,18	(724.145.192,40)	(1,43)
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.725.355.969.991,86	1.602.413.476.157,62	122.942.493.834,24	7,67

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24	33.515.074.291,55	23,24
Piutang	180.114.990.818,95	132.325.238.427,44	47.789.752.391,51	36,11
Penyisihan Piutang	(51.821.812.298,11)	(46.760.339.027,26)	(5.061.473.270,85)	10,82
Beban di Bayar Dimuka	257.670.283,54	241.577.372,88	16.092.910,66	6,66
Persediaan	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92
Jumlah	333.294.746.466,72	255.766.386.631,46	77.528.359.835,26	30,31

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41	36.751.981.694,04	29,61
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00	182.910.706,00	5.537,71
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19	(4.106.458.999,13)	(23,18)
5.3.1.1.1.5	Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83	(155.988.250,33)	(38,94)
5.3.1.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81	(1.820.697.174,81)	(92,69)
5.3.1.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00	2.663.236.254,00	-
5.3.1.1.1.8	Kas Lainnya	90.061,78	0,00	90.061,78	0,00
5.3.1.1.1.9	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24	33.515.074.291,55	23,24

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada BPD Bali Cabang Amlapura dengan nomor rekening yaitu 022.01.00.00000-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas;
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp186.213.706,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2023 dan disetorkan di awal Tahun 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama (Dinas Kesehatan)	2.112.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD	145.626.706,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.670.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	3.687.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag	22.118.000,00
Jumlah	186.213.706,00

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023;
4. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.607.809.769,06. Pada tahun 2023 sebanyak 12 Puskesmas sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan BLUD yang pada tahun sebelumnya hanya RSUD saja. Rincian saldo Kas BLUD dapat dilihat pada *lampiran 19*;

Untuk RSUD menggunakan 2 (dua) rekening dalam proses transaksi penerimaan sehingga pada akhir tahun 2023 saldo rekening dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2023
Saldo pada rekening nomor 022.01.0000473-1 di BPD Bali Cabang Amlapura	8.367.631.125,11
Saldo pada rekening nomor 145.00.7555777-3 di Bank Mandiri Cabang Amlapura	394.237.208,36
Saldo kas tunai di petugas kasir	32.409.500,00
Jumlah	8.794.277.833,47

Untuk Puskesmas masih menggunakan 1 (satu) rekening dalam penerimaan pendapatan BLUD.

5. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp244.602.583,50 yang tersebar pada 400 sekolah negeri di seluruh Kabupaten



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Karangasem baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 20*;

6. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.665.757,00. Yang masih menerapkan kapitasi FKTP adalah RS Pratama Kubu. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *lampiran 21*;
7. Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengelola Dana BOK pada 12 Puskesmas yang memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.663.236.254,00. yang tersimpan pada rekening di Bank BNI Cabang Karangasem sesuai instruksi dari pemerintah pusat dapat dilihat pada *lampiran 22*;
8. Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2023 mengakui saldo Kas Lainnya di Bendahara yang merupakan Saldo Kas Lainnya Selain BUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.061,78. Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD merupakan utang jangka pendek lainnya dari Puskesmas Rendang karena kurang transfer kepada pihak ketiga sebesar Rp2,00 serta Utang Jangka Pendek Lainnya dari beberapa sekolah sebesar Rp90.059,78;

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Uraian	Saldo Kas Lainnya (Rp)
1	Puskesmas Rendang	2,00
2	SD Negeri 10 Tianyar	0,37
3	SD Negeri 2 Tianyar Tengah	0,03
4	SD Negeri 4 Kubu	39,98
5	SD Negeri 2 Tiyingtali	90.000,00
6	SD Negeri 8 Bunutan	1,00
7	SD Negeri 6 Seraya	18,00
8	SMPN 3 Kubu	0,40
	Jumlah	90.061,78

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada Investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.3 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	94.113.883.017,70	89.054.021.850,45	5.059.861.167,25	5,68
5.3.1.1.3.2	Piutang Retribusi Daerah	487.854.633,00	250.354.541,00	237.500.092,00	94,87
5.3.1.1.3.3	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.714.212.354,25	18.570.584.105,99	(5.856.371.751,74)	(31,54)
5.3.1.1.3.4	Piutang Transfer Antar Daerah	72.799.040.814,00	24.347.665.130,00	48.451.375.684	199,00
5.3.1.1.3.5	Piutang Lainnya	0,00	102.612.800,00	(102.612.800,00)	(100,00)
	Jumlah	180.114.990.818,95	132.325.238.427,44	47.789.752.391,51	36,12

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	928.632.909,04	1.686.381.355,12	(757.748.446,08)	(44,93)
Piutang Pajak Restoran	1.377.822.805,00	893.426.306,00	484.396.499,00	54,22
Piutang Pajak Hiburan	184.992.911,66	185.508.596,66	(515.685,00)	(0,28)
Piutang Pajak Reklame	118.421.261,00	85.413.461,00	33.007.800,00	38,64
Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	169.384.380,00	213.099.497,67	(43.715.117,67)	(20,51)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.210.654.238,00	31.912.467.033,00	2.298.187.205,00	7,20
Piutang PBB-P2	57.123.974.513,00	54.077.725.601,00	3.046.248.912,00	5,63
Jumlah	94.113.883.017,70	89.054.021.850,45	5.059.861.167,25	5,68

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

Diantara saldo piutang pajak tersebut terdapat saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem N0. 26 Tahun 2022 maka pada bulan November 2022 telah dilaksanakan pemungutan PBB-P2 dengan sistem jemput bola/mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari perkotaan dan BumDes ataupun LPD nya belum bekerja sama dengan PT. BPD Bali Cabang Karangasem.

Kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP dilakukan secara bertahap pada Tahun 2023 sehingga dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan *database* SIM PBB Kabupaten Karangasem dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan *database* SIM PBB-P2 sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 3 kecamatan yang sudah tuntas dilaksanakan validasi piutang pajak PBB-P2 sampai dengan tahun 2023 yaitu Kecamatan Rendang dan Kecamatan Bebandem tuntas tahun 2022 serta Kecamatan Kubu tuntas Tahun 2023 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan	NOP	SPPT (Lembar)	Piutang Pajak	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah Piutang Valid	Jumlah Piutang tidak valid
Rendang	118 NOP	2.832	33.661.935,00	56 NOP	62 NOP	17.177.681	16.484.254
Bebandem	91 NOP	2.184	58.797.257,00	44 NOP	47 NOP	35.053.129	23.744.128
Kubu	249 NOP	5.976	111.223.737,00	105 NOP	144 NOP	40.007.903	71.215.834

Atas jumlah piutang yang tidak valid disebabkan tidak ditemukannya Objek dan Wajib Pajaknya. Belum dilakukan perlakuan penghapusan atas piutang yang tidak valid pada tahun 2023.

- b. Terdapat 3 kecamatan yang masih proses validasi pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem. Pada tanggal neraca proses yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak	Progress Validasi	%
Abang	425 NOP	10.200 Lembar SPPT	191.372.056,00	341 NOP	80%
Karangasem	1.463 NOP	35.112 Lembar SPPT	1.628.073.637,00	249 NOP	17%
Selat	751 NOP	18.024 Lembar SPPT	254.572.112,00	503 NOP	67 %

Proses validasi dilanjutkan prosesnya pada tahun 2023.

- c. Terdapat 1 kecamatan yang belum dilakukan proses validasi tahun 2023 yaitu Kecamatan Sidemen. Proses validasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak
Sidemen	1.094 NOP	26.256 Lembar SPPT	286.054.093,00

- d. BPKAD Kabupaten Karangasem akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOP yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para *stakeholder*.
3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	429.899.381,00	242.911.041,00	186.988.340,00	76,98
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	57.955.252,00	7.443.500,00	50.511.752,00	678,60
Jumlah	487.854.633,00	250.354.541,00	237.500.092,00	94,87

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
Piutang Denda Pajak Daerah	3.871.355.537,25	5.687.690.566,19	(1.816.335.028,94)	(31,93)
Piutang Denda Retribusi Daerah	2.527.255,00	2.527.255,00	0,00	0,00
Piutang BLUD RSUD Karangasem	8.603.369.962,00	12.879.756.774,00	(4.276.386.812,00)	(33,20)
Piutang BLUD Puskesmas se-Kab. Karangasem	236.959.600,00	0,00	236.959.600,00	0,00
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	609.510,80	(609.510,80)	(100,00)
Jumlah	12.714.212.354,25	18.570.584.105,99	(5.856.371.751,74)	(31,54)

- a. Pada tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023. Atas peraturan tersebut diterbitkan SK Bupati Karangasem Nomor 565/HK/2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Wajib Pajak tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp1.351.416.600,00.
- b. Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Piutang Lain - Lain PAD yang sah untuk remunerisasi Treasury Deposit Facility Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-233/WPB-22/2023 Perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2023, serta surat Nomor : S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF,atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia dan sudah ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 26 April 2023 dengan keterangan pada Simtrada TDF Remunerasi TW 1 2023.

5. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

a. Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	14.381.661.525,00	11.978.159.317,00	2.403.502.208,00	20,07
Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Bea Balik	12.125.565.271,00	5.819.912.450,00	6.305.652.821,00	108,35
Nama Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak	10.897.009.403,00	6.514.260.049,00	4.382.749.354,00	67,28
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak	58.211.218,00	35.333.314,00	22.877.904,00	64,75
Pemanfaatan Air Permukaan				
Jumlah	37.462.447.417,00	24.347.665.130,00	13.114.782.287,00	53,86

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/684/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Januari 2024.

b. Piutang Bantuan Keuangan Khusus

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	35.336.593.397,00	0,00	35.336.593.397,00	-
Jumlah	35.336.593.397,00	0,00	35.336.593.397,00	-

6. Rincian mutasi piutang dapat dilihat pada *lampiran 23.1 dan 23.2*.
7. Rincian klasifikasi umur atas piutang dapat dilihat pada *lampiran 24*.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
5.3.1.1.4.1	➤ Penyisihan Piutang Pendapatan				
✓	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(50.106.300.933,38)	(45.657.923.723,63)	(4.448.377.209,75)	9,74
✓	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(21.970.169,94)	(7.766.618,06)	(14.203.551,88)	182,88
✓	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(965.550.786,65)	(748.559.234,27)	(216.991.552,38)	28,99
✓	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(727.990.408,14)	(243.476.651,30)	(484.513.756,84)	199,00
5.3.1.1.4.2	➤ Penyisihan Piutang Lainnya				
✓	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(102.612.800,00)	102.612.800,00	-
	Jumlah	(51.821.812.298,11)	(46.760.339.027,26)	(5.061.473.270,85)	10,82

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 24*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa - Asuransi Dibayar Dimuka	68.668.200,20	63.512.213,30	5.155.986,90	8,12
Beban Jasa - Sewa Dibayar Dimuka	189.002.083,34	177.398.492,92	11.603.590,42	6,54
Beban Jasa - Ketersediaan Layanan (Hosting)	0,00	666.666,67	(666.666,67)	(100,00)
Jumlah	257.670.283,54	241.577.372,89	16.092.910,65	6,66

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang melewati TA 2023.

Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 25*.

5.3.1.1.6 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.6.1	Persediaan Barang Pakai Habis	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92
	Jumlah	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92

Penjelasan:

1. Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya. Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 26*;
2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
3. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Bali pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp377.245.719,00. Hibah barang dari kementerian PUPR berupa perabot kantor yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Rp92.703.333,00. Selain itu juga menerima hibah / sumbangan persediaan barang yang diterima oleh beberapa SKPD terkait yaitu RSUD Karangasem sebesar Rp95.422.626,31, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.305.491.632,37;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Barang Cetakan	94.171.624,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Plat IMB	300.000,00
Dinas Pariwisata	Karcis retribusi	1.099.400,00
Dinas Kesehatan	Obat dan BMHP	214.664.507,00
Jumlah		310.235.531,00

Pada Tahun 2023 diterbitkan Persetujuan Pemusnahan BMD oleh Bupati Karangasem kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor: 00024/1492/BPKAD/DPMD/Setda tanggal 16 Agustus 2023, untuk menyetujui pemusnahan barang milik daerah dan diproses lebih lanjut atas :

- Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat barang cetakan atas dokumen catatan sipil yang tidak berlaku sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp94.171.624,00;
- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) plat dengan nilai sebesar Rp300.000,00. Persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku telah dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2023; dan
- Pada Dinas Pariwisata terdapat enam jenis karcis masuk tempat wisata yang sudah rusak sebesar Rp1.099.400,00 namun belum dimusnahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Karcis	Harga/Lembar (Rp)	Nilai (Rp)
Karcis Tulamben			
▪ WNA Anak	1.900	239,00	454.100,00
▪ WNI Dewasa	300	239,00	71.700,00
▪ WNI Anak	400	239,00	95.600,00
Karcis Padang Bai			
▪ WNI Dewasa	400	239,00	95.600,00
▪ WNI Anak	1.600	239,00	382.400,00
Jumlah			1.099.400,00

Surat Keputusan Penghapusan BMD atas persediaan diatas belum diterbitkan sampai tanggal 31 Desember 2023. Di Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan terdapat obat dan BMHP yang kedaluwarsa sebesar Rp214.664.507,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	2.691.093.990,31	4.290.537.515,71	(1.599.443.525,40)	(37,28)
Investasi Permanen	144.118.866.501,74	118.679.728.424,42	25.439.138.077,32	21,44
Jumlah	146.809.960.492,05	122.970.265.940,13	23.839.694.551,92	19,39

5.3.1.2.1 Investasi Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1.1	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.2	Dana Bergulir	207.846.950,00	208.297.940,00	(450.990,00)	(0,22)
5.3.1.2.1.3	Penyisihan Investasi Jangka Panjang				
	Non-Permanen				
	- Penyisihan Investasi Dalam Proyek	(8.741.142.528,69)	(7.141.699.003,29)	(1.599.443.525,40)	(22,40)
	Pembangunan				
	- Penyisihan Dana Bergulir	(207.846.950,00)	(208.297.940,00)	450.990,00	0,22
	Jumlah	2.691.093.990,31	4.290.537.515,71	(1.599.443.525,40)	(37,28)

Penjelasan:

1. Penjelasan Investasi Non-Permanen – Investasi Dalam Proyek Pembangunan

- Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun;
- Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akta Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah ditetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem;
- Pembagian keuntungan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hasil Pengelolaan Bersama yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama; dan
 - Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- Pada Tahun 2023, dengan melandainya Covid-19 berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Ujung. Untuk penerimaan pendapatan tahun 2023 merupakan bagi hasil usaha tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 kunjungan wisata ke Taman Ujung sudah mulai membaik. Dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh manajemen pendapatan yang diterima pada Tahun 2023 keuntungan yang dapat dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.599.443.525,40;
- Penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Ujung yang mengurangi nilai investasi dikarenakan sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapitalisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi. Penyeteroran bagi hasil keuntungan dari Taman Ujung sejak pertama kali disetor adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Hasil Investasi	Nilai Sisa Investasi
Nilai investasi dalam proyek pembangunan diukur dari Tahun 2009		11.432.236.519,00
Hasil investasi yang diterima sejak Tahun 2009 atas PKS Nomor 21 tanggal 11 Januari 2001 antara Puri Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah:		
Hasil investasi tahun setor 2009	53.843.892,00	
Hasil investasi tahun setor 2010	82.249.500,00	
Hasil investasi tahun setor 2011	96.420.000,00	
Hasil investasi tahun setor 2012	121.570.386,00	
Hasil investasi tahun setor 2013	178.557.548,00	
Hasil investasi tahun setor 2014	356.201.584,00	
Hasil investasi tahun setor 2015	523.835.612,00	
Hasil investasi tahun setor 2016	795.210.711,00	
Hasil investasi tahun setor 2017	771.863.297,00	
Hasil investasi tahun setor 2018	910.489.536,00	
Hasil investasi tahun setor 2019	1.509.810.570,91	
Hasil investasi tahun setor 2020	1.741.646.366,38	
Hasil investasi tahun setor 2021	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2022	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2023	1.599.443.525,40	
Jumlah hasil investasi sampai dengan tanggal neraca		(8.741.142.528,69)
Nilai Sisa Investasi yang Dapat Direalisasikan		2.691.093.990,31

- f. Dokumen PKS, tidak memuat informasi mengenai bentuk penyertaan modal atau investasi serta biaya perolehan investasi Pemkab Karangasem pada Taman Soekasada Ujung. Secara umum, PKS mengatur pengelolaan bersama dan pembagian bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh Taman Soekasada Ujung. Selain itu, penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemkab Karangasem dari Taman Soekasada Ujung yang mengurangi nilai investasi tidak sesuai dengan SAP, serta mekanisme pengelolaan bersama belum diatur jelas dalam PKS. Atas hal tersebut, Kepala BPKAD akan menelusuri kembali dan menyajikan Investasi Non Permanen dalam Proyek Pengerjaan pada Taman Soekasada Ujung berdasarkan dokumen perolehan dan merumuskan kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi Non Permanen Dalam Proyek Pembangunan sesuai SAP. Selain itu, Kepala Disbudpar juga akan menelusuri, mengelola dan mendokumentasikan dokumen perolehan atas Investasi Non Permanen Dalam Proyek Pengerjaan pada Taman Soekasada Ujung; dan merumuskan kesepakatan bersama yang memuat pengelolaan bersama yang jelas atas Taman Soekasada Ujung antara Pemkab Karangasem dengan Puri Agung Karangasem meliputi unsur-unsur pengelola, manajemen operasional serta hak dan kewajiban seluruh unsur pengelola.

2. Penjelasan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2009. Sejak Tahun 2010, Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna Dana Bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga Dana Bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet);
- Dalam pengelolaan Dana Bergulir terjadi permasalahan hukum. Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Permintaan Keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan Nomor 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00;

- c. Pada Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2023 proses tersebut sudah berakhir. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Karangasem menyampaikan surat No 530/961/Diskoperindag/Ind tanggal 4 April 2023 Perihal Usulan Penghapusan Piutang Sementara kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah Bali sebesar Rp205.546.950,35;
- d. Mutasi penerimaan dana bergulir sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

Tahun	Mutasi Saldo Dana Bergulir			Pembayaran		
	Saldo Laporan KPKNL	Saldo Neraca Pemda	Selisih	Menurut KPKNL	Menurut Pemda	
					Penerimaan Pembiayaan Pengembalian Dana Bergulir - LRA	Surat Keterangan Lunas
2017	341.700.106,08	290.219.129,08	51.480.977,00	51.480.977,00	51.480.977,00	0,00
2018	290.219.129,08	267.549.150,00	22.669.979,08	52.734.828,08	22.669.979,08	30.064.849,00
2019	267.549.150,00	251.826.425,00	15.722.725,00	25.972.725,00	15.722.725,00	10.250.000,00
2020	251.826.425,00	248.612.789,00	3.213.636,00	3.213.636,00	3.213.636,00	0,00
2021	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208.297.940,00	208.297.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	207.846.950,00	0,00	0,00	450.990,00	0,00

- e. Penyisihan atas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Perbup Karangasem Nomor 19 Tahun 2023, dimana investasi nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 (empat) tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	42.550.000.000,00	41.050.000.000,00	1.500.000.000,00	3,65
PT. Jamkrida Bali Mandara	2.575.000.000,00	2.075.000.000,00	500.000.000,00	24,10
PerumdaTirta Toh Langkir	88.993.866.501,74	75.554.728.424,42	13.439.138.077,32	17,79
Perseroda Karangasem Sejahtera	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	-
Jumlah	144.118.866.501,74	118.679.728.424,42	25.439.138.077,32	21,44

Penjelasan:

1. PT. BPD Bali:

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2023 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali sebesar 2,08% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp42.550.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp1.500.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp9.830.245.683,35 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 1 Maret 2023 untuk Tahun Buku 2022 sesuai Berita Acara Nomor : 0328/BA/DIR/OKA/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2022.

2. PT. Jamkrida Bali Mandara:

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2022:

No	Uraian	Jumlah	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	75.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2017	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017
3	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018
4	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2019
5	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2021	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2021
6	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2022	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
7	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2023	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
Jumlah		2.575.000.000,00	

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp17.540.828,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 11 April 2023 untuk Tahun Buku 2022 dari perhitungan pemilik saham sebesar 1,23% sesuai Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 3 tanggal 11 Maret 2022.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yaitu **metode biaya (cost method)**.

3. Perumda Tirta Tohlangkir:

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2022 yaitu Rp75.554.728.424,42 disebabkan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir TA 2022 tanggal 9 Nopember 2022 menjadi Rp88.993.866.501,74. Perumda Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2023 memperoleh Laba sebesar Rp12.647.659.985,05. Adanya laba yang meningkat tersebut mempengaruhi peningkatan ekuitas Pemerintah di Perumda Tirta Toh Langkir, walaupun adanya koreksi atas keuntungan tahun lalu sebesar Rp885.652.384,67 dan adanya pembagian keuntungan tahun lalu sebesar Rp487.108.811,57 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Desember 2023 didasarkan pada Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/3241/EkBang/Setda tanggal 11 Desember 2023 serta Perda Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih Perumda Tirta Toh Langkir. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2022.

Perumda Tirta Tohlangkir didirikan berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PDAM. Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem maka penyertaan modal pada Perumda Tirta Tohlangkir diakui dengan **metode ekuitas (equity method)**.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perumda Tirta Tohlangkir sampai dengan 31 Desember 2023:

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	70.600.547.648,68
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	5.680.195.396,00
Modal hibah	1.245.250.466,00
Cadangan umum	3.986.708.244,77
Cadangan dana sosial dan pendidikan	1.561.492.094,69
Akumulasi kerugian s.d. tahun lalu	(6.727.987.333,45)
Laba/rugi tahun berjalan (<i>audited</i>)	12.647.659.985,05
Nilai Investasi pada Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem	88.993.866.501,74



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem *sama dengan* nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Tohlangkir dalam laporan keuangan Tahun Buku 2023.

4. Perseroda Karangasem Sejahtera

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 8 Nopember 2022 dimana modal dasar seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) PT dimiliki oleh Pemda. Pada tahun 2023 Pemda Karangasem melakukan penyetoran modal dasar awal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 10 Nopember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 ditransfer ke rekening PT Karangasem Sejahtera tanggal 14 Nopember 2023. Karena baru tahap pembentukan perusahaan maka pada akhir tahun 2023 belum ada keuntungan yang disetor kepada Pemda.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Karangasem Sejahtera yaitu **metode biaya (cost method)**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	165.392.320.343,25	162.717.247.945,25	2.675.072.398,00	1,64
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	594.067.499.151,39	559.607.671.676,39	34.459.827.475,00	6,16
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	926.755.954.219,61	888.885.578.530,53	37.870.375.689,08	4,26
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.538.240.617.277,17	1.464.775.325.242,76	73.465.292.034,41	5,02
Aset Tetap Lainnya	40.296.936.577,35	39.697.000.877,35	599.935.700,00	1,51
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.632.500.602,00	14.170.335.680,96	5.462.164.921,04	38,55
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.099.774.485.660,46)	(1.956.649.602.082,39)	(143.124.883.578,07)	7,31
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.184.611.342.510,31	1.173.203.557.870,85	11.407.784.639,46	0,97

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ekstrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel;
- Didalam penyusunan laporan BMD menggunakan Aplikasi SIMDA BMD namun belum dapat dilaksanakan penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang penatausahaan BMD untuk pengolahan data dan informasi mutasi BMD sehingga kedepan akan diupayakan penerapan aplikasi E-BMD agar sesuai dengan peraturan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:
 - Dengan melakukan proses migrasi data dari data aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD pada seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A-F untuk data *audited* tahun 2022;
 - Walaupun telah melakukan migrasi data hingga data *audited* tahun 2022 namun aplikasi E-BMD belum dapat digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tahun 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- karena saldo awal belum dicocokkan seluruhnya dan cara penggunaan (*Manual Book*) aplikasi E-BMD belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Telah dilakukan sosialisasi pengoperasian E-BMD kepada pengurus barang SKPD namun belum dapat mengoperasikan secara optimal.
 3. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menguasai aset-aset yang berasal dari proses penergian 8 (delapan) unit TK Swasta. Namun, aset-aset yang dikuasai tersebut pada tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset – aset tersebut. Inventarisasi aset juga dilakukan terhadap 1 (satu) unit TK Negeri namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset-aset tersebut;
 4. Berdasarkan data hasil inventarisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah diketahui sebagai berikut:
 - a. Pengembang perumahan yang telah diinventarisasi sebanyak 35 pengembang;
 - b. Terdapat 16 (enam belas) pengembang yang asetnya telah tercatat dalam Daftar Aset Pemda, 19 pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
 5. Atas aset tetap yang diperoleh di Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki jaminan pemeliharaan yang belum jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.679.779.861,10 dengan penerbit jaminan sebagian besar PT Jamkrida Bali Mandara;
 6. Pada tahun 2023 aset dibawah nilai kapitalisasi (*extracomtable*) yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, BLUD, Puskesmas dan sekolah atas semua jenis aset tetap dengan nilai Rp36.414.745.651,97; dan
 7. Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai tahun 2023 belum memiliki aset tetap dengan kategori aset Properti Investasi.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	165.392.320.343,25	162.717.247.945,25	2.675.072.398,00	1,64

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	162.717.247.945,25
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	0,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	2.675.072.398,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penilaian	0,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	155.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.830.572.398,00
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih/Double Catat	0,00
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(155.500.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
Jumlah Mutasi Kurang	(155.500.000,00)
Saldo Akhir	165.392.320.343,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 27*.

- Progres pelaksanaan sertifikasi Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2023 terdiri atas aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 20 ruas jalan dengan luas total 311.564,21m² memiliki nilai Rp1.538.026.000,00. Di tahun 2023 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 104 sertifikat.
 - Pada aplikasi Simda BMD terdapat 1.250 bidang tanah yang terdiri dari 1.247 bidang tanah sebagai aset tetap senilai Rp165.392.320.343,25 yang terdiri atas:
 - Tanah yang sebagian besar digunakan oleh dinas PUPR Perkim sebagai jalan sebanyak 598 bidang senilai Rp80.345.090.817,75; dan
 - Sisanya sebanyak 649 bidang senilai Rp85.047.229.525,50 adalah tanah non jalan.
 - Terdapat 3 bidang tanah yang dilakukan pemanfaatan berupa pinjam pakai seharga Rp23.667.523.000,00.
 - Berdasarkan KIB A, Pemkab Karangasem memiliki 1.250 bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp165.392.320.343,25. Pemeriksaan atas KIB tersebut, diketahui terdapat 1.030 bidang tanah tidak dilengkapi informasi berupa penggunaan, nomor dan tanggal sertifikat. Dari jumlah tersebut, di antaranya sebanyak 324 bidang tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemkab Karangasem dan satu bidang tanah disertifikatkan oleh Desa Adat. Selanjutnya, dari 324 bidang tanah, sebanyak 152 bidang tanah sebesar Rp15.055.906.259,00 belum disertifikatkan atas nama Pemkab Karangasem namun sudah terdapat bukti bahwa penguasaan tanah telah berpindah dari pemilik sebelumnya (bukti pemindahtanganan). Selanjutnya, terdapat sebanyak 171 bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp14.455.616.080,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemkab Karangasem dan tidak terdapat bukti pemindahtanganan maupun sertifikat atas nama pemilik sebelumnya. Selanjutnya, dari 171 bidang tanah yang belum disertifikatkan Pemkab Karangasem dan tidak terdapat bukti pemindahtanganan maupun sertifikat atas nama pemilik sebelumnya, di antaranya terdapat enam bidang tanah senilai Rp36.116.500,00 berupa tanah parkir di area Pura Besakih yang tercatat pada Dishub namun digunakan/dikuasai oleh Pemprov Bali dan pihak lain.
- Selain itu, satu bidang tanah pada SDN 3 Tenganan seluas 1.547,00 m² dengan nilai Rp39.000.000,00 telah disertifikatkan oleh Desa Adat Gumung pada tahun 2017 dengan nomor sertifikat 765 dengan luas 500 m² dan nomor sertifikat 760 dengan luas 760 m². Belum diketahui nilai tanah yang tercatat pada KIB A apakah nilai perolehan atau nilai NJOP. Hasil konfirmasi kepada Kelian Desa Adat Gumung, diketahui bahwa telah diadakan pertemuan antara Disdikpora dan Desa Adat Gumung pada 16 Mei 2023 dengan kesepakatan secara lisan yaitu Desa Adat Gumung akan menghibahkan kedua bidang tanah tersebut ke Pemkab Karangasem dengan perjanjian bahwa tanah tersebut digunakan untuk bangunan sekolah dengan pertimbangan bahwa sekolah dapat menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) jika tanah lokasi dibangunnya sekolah telah bersertifikat atas nama Pemkab Karangasem. Selanjutnya, diketahui bahwa perjanjian tersebut belum dibuat karena terdapat pergantian struktur desa adat.
- Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD akan menelusuri dan mengupayakan bukti pemindahtanganan tanah untuk selanjutnya memproses sertifikat tanah atas nama Pemkab Karangasem secara bertahap, berkoordinasi kembali dengan Pemprov Bali untuk melakukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

inventarisasi fisik memastikan kejelasan status kepemilikan tanah parkir di Pura Besakih dan memproses dokumen hibah atas tanah yang telah disertifikatkan Desa Adat Gumung.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	594.067.499.151,39	559.607.671.676,39	34.459.827.475,00	6,16

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	559.607.671.676,39
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	39.642.592.244,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	11.300.000,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	19.480.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	111.075.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	378.696.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	96.133.920,00
✓ Kurang catat	9.950.000,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	658.685.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	40.927.912.664,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	(2.617.900,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(1.592.850.295,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(39.405.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(3.971.909.254,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
✓ Lebih Catat	(732.600,00)
- Penghapusan Tahun 2023	(61.690.000,00)
- Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta	(140.194.640,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(658.685.500,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(6.468.085.189,00)
Saldo Akhir	594.067.499.151,39

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 28*.

2. Terdapat peralatan dan mesin berupa kendaraan yang masih tercatat yang telah dipindahtangankan tahun 2023 berdasarkan risalah lelang yang telah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Singaraja namun belum diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah). Informasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Harga perolehan aset tetap yang telah di pindahtangankan adalah senilai Rp257.060.000,00 dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai perolehan sehingga nilai buku adalah Rp0,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dikarenakan setelah lelang Perangkat Daerah belum menyampaikan permohonan penghapusan kepada Bupati hingga berakhirnya tahun anggaran 2023.
- c. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penerbitan Surat Keputusan Penghapusan yakni dimulai dengan permohonan penghapusan kepada Bupati, penelitian administrasi kembali, penerbitan surat persetujuan penghapusan oleh bupati dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	926.755.954.219,61	888.885.578.530,53	37.870.375.689,08	4,26

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	888.885.578.530,53
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	36.688.278.976,39
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	341.227.162,71
- Penerimaan Hibah Tahun berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	339.351.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	962.801.709,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	8.354.589.620,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	46.686.248.968,10
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(401.695.780,00)
- Pengakuan Extracomptable	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(6.910.276.615,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(573.506.230,02)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
✓ Lebih Cacat	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
- Penghapusan Tahun 2023	(930.394.654,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(8.815.873.279,02)
Saldo Akhir	926.755.954.219,61

2. Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan, terdapat 22 Rumah Jaga pada 22 sekolah negeri dengan tahun perolehan antara tahun 1962 sampai dengan tahun 2000 dan satu gedung berupa Pos Jaga Kedungdung dengan luas 30 m² pada Lapangan Parkir Kedungdung di area Pura Besakih yang telah dibongkar sebelum tahun 2023 dengan nilai buku sebesar Rp111.800.156,00. Unit Pengguna Barang (UPB) belum pernah mengusulkan penghapusan atas rumah jaga dan pos jaga tersebut. Atas hal tersebut, Kepala Disdikpora selaku Pengguna Barang akan menginventarisasi dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

mengusulkan penghapusan atas gedung dan bangunan yang fisiknya telah dibongkar serta menelusuri serta mencatat bangunan baru pengganti rumah jaga sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

- Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 29*.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.538.240.617.277,17	1.464.775.325.242,76	73.465.292.034,41	5,02

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.464.775.325.242,76
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	41.479.827.150,71
- Utang Belanja Modal	21.136.403.638,70
- Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	0,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	3.025.042.750,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.681.813.250,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	5.358.134.245,00
Jumlah Mutasi Tambah	73.681.221.034,41
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(215.929.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Jumlah Mutasi Kurang	(215.929.000,00)
Saldo Akhir	1.538.240.617.277,17

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 30*.

- Sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 595/Hk/2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Ruas Jalan di Kabupaten Karangasem dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 575 ruas jalan dengan jumlah total 1.202,54 km¹. Atas ruas jalan tersebut sudah semua dilakukan penilaian dan pencatatan BMD.
- Aset Tetap IJ Pemkab Karangasem per 31 Desember 2023 masih memuat berbagai permasalahan, di antaranya:
 - Dua aset ruas jalan dengan tahun perolehan 2004 dan 2005 tercatat dengan nilai sebesar Rp0,00, yaitu Jalan Setapak Desa Duda dan Jalan Setapak Desa Sangkan Gunung dalam KIB D Dinas PUPRKIM. Pengurus Barang, Jabatan Fungsional Bidang Bina Marga (BM), dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan kedua ruas jalan tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum ditemukan dokumen pengadaan/perolehannya untuk lebih lanjut ditindaklanjuti dengan pencatatan nilai atau penghapusan aset.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Dua Jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem tentang Penetapan Status Ruas Jalan namun belum tercatat di KIB yaitu Jalan Dunungan – Br. Lebah dan Jalan Pert. Segi – Cangwang merupakan dua jalan kabupaten baru namun belum dicatat pada KIB D sebagai Aset Tetap Jalan. Kedua ruas jalan tersebut sebagian sudah pernah mendapatkan penanganan rabat beton hasil swadaya masyarakat. Belum tersedia baik dokumen usulan Pemerintah Desa maupun bukti pemindahtanganannya.
- c. Aset Tetap berupa jalan yang tidak dikuasai Pemkab Karangasem belum diproses pemindahtanganan yaitu empat ruas jalan kabupaten yang *upgrade* menjadi jalan provinsi yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km)
1.	Simp. Bajo - Lempuyang – Telaga Mas	5,33
2.	Batusesa - Besakih	5,55
3.	Jalan Lingkar Bebandem	0,41
4.	Jalan Lingkar Pelabuhan Padangbai	0,42

Sebaliknya, terdapat dua ruas jalan provinsi yang *downgrade* menjadi jalan kabupaten, yaitu Jalan Simpang Tista – Lempuyang dan Jalan Wates Tengah – Pesangkan (sebagian panjang jalan) belum diketahui nilai perolehannya. Pengurus Barang, Pejabat Fungsional Bidang BM, dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan bahwa Jalan Kabupaten Karangasem yang penyelenggaraannya beralih menjadi kewenangan menjadi Pemprov Bali masih tercatat pada KIB D Dinas PUPRKIM karena belum terdapat dokumen identifikasi, inventarisasi, dan permohonan hibah dari Pemprov Bali serta belum dilakukan proses serah terima/hibah sebagai dasar dikeluarkannya dari pencatatan. Sebaliknya, atas jalan Pemprov Bali yang penyelenggaraannya beralih menjadi kewenangan menjadi Jalan Kabupaten belum tercatat di KIB D Dinas PUPRKIM karena belum terdapat dokumen identifikasi, inventarisasi, dan permohonan hibah dari Kabupaten Karangasem serta belum dilakukan proses serah terima/hibah sebagai dasar pencatatan. Demikian halnya juga untuk tanah di bawah jalan atas enam ruas jalan tersebut belum diinventarisir untuk proses pemindahtanganan.

Selain itu, terdapat 74 item aset berupa penanganan atas ruas jalan lingkungan dan desa dengan nilai buku Rp3.696.453.361,06 meliputi pengaspalan, pembetonan atau rabat beton, pemasangan paving, dan perbaikan jalan serta lingkungan permukiman dengan tahun perolehan 2004 s.d. 2020, yang berada di wilayah desa pada Kabupaten Karangasem. Pengurus Barang dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan lokasi pekerjaan tersebut belum diketahui sehingga akan ditelusuri terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses pemindahtanganan atau penghapusannya.

Selanjutnya terdapat perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap Aset Tetap belum ditambahkan atau dikapitalisasi pada nilai tercatat aset bersangkutan (Aset Induk). Sebanyak 50 item aset berupa pekerjaan perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang belum diketahui aset induknya dengan tahun perolehan 2002 s.d. 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.490.733.627,00, nilai penyusutan sebesar Rp3.208.327.758,00 dan nilai buku sebesar Rp282.405.869,00 pada KIB D Dinas PUPRKIM. Permasalahan tersebut berdampak terhadap perhitungan masa umur manfaat maupun penyusutan aset. Pengurus Barang dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan pekerjaan tersebut tidak dapat menunjuk secara spesifik lokasi pekerjaan sehingga belum diketahui aset induknya. Inventarisasi atas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Aset Tetap JII belum pernah dilaksanakan termasuk atas aset pekerjaan perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan tersebut yang belum ditambahkan ke aset induk.

Permasalahan lainnya yaitu perencanaan yang tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik tercatat sebagai Aset Tetap. Terdapat 16 item aset berupa pekerjaan perencanaan embung, perencanaan jaringan air bersih/air minum, dan perencanaan konstruksi pengaman pantai dengan tahun perolehan 2007 s.d. 2011 dengan nilai buku sebesar Rp0,00 pada KIB D Dinas PUPRKIM. Pengurus Barang, Pejabat Fungsional Bidang SDA, dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan aset perencanaan tersebut tidak mempunyai aset induk karena tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik namun belum diusulkan penghapusan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	40.296.936.577,35	39.697.000.877,35	599.935.700,00	1,51

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	39.697.000.877,35
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	1.210.750.750,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	39.405.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Tambah	1.250.155.750,00
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(111.075.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(539.145.050,00)
- Belanja Modal Tahun Berjalan yang diserahkan ke sekolah swasta	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Kurang	(650.220.050,00)
Saldo Akhir	40.296.936.577,35

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 31.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.632.500.602,00	14.170.335.680,96	5.462.164.921,04	38,55



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	14.170.335.680,96
Mutasi Tambah:	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.386.002.500,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	6.910.276.615,00
- Utang Belanja	68.810.400,00
Jumlah Mutasi Tambah	8.365.089.515,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.805.235.750,00)
- Pelunasan Utang Tahun 2023	(97.688.843,96)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.902.924.593,96)
Saldo Akhir	19.632.500.602,00

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.365.089.515,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olahraga bertambah sebesar Rp164.509.100,00 berupa perencanaan bangunan sekolah yang akan direalisasikan tahun selanjutnya;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Pemukiman bertambah sebesar Rp6.745.767.515,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Selain dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR Perkim juga terdapat perolehan lainnya berupa perencanaan Jalan Irigasi Dan Jaringan yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.454.812.900,00
3. Terdapat 10 Aset Tetap KDP berupa jasa konsultasi perencanaan gedung dan bangunan yang sudah tidak memiliki kelanjutan pembangunan fisik sebesar Rp352.341.250,00 pada enam perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun Perolehan	Jenis Barang	Nilai
1	Sekretariat Daerah	2009	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor Camat	56.063.000,00
2	Sekretariat Daerah	2009	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Serba Guna	32.278.000,00
3	Sekretariat Daerah	2018	Jasa Konsultasi Perencanaan Videotron	9.743.000,00
4	Dinsos PPPA PPKB	2014	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Dinas Sosial	49.750.000,00
5	Disdikpora	2017	Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Bangunan Kamar Mandi (SMP N 3 Selat, SMP N 3 Bebandem, SMP N 1 Rendang, SMP N 4 Kubu, SMP N 2 Manggis)	14.376.000,00
6	Disbudpar	2013	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Masyarakat Desa Adat	28.405.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Perangkat Daerah	Tahun Perolehan	Jenis Barang	Nilai
7	DLH	2015	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Biogas	4.000.000,00
8	DLH	2019	Jasa Konsultasi Perencanaan Taman kota dijalur 11	54.725.000,00
9	DLH	2019	Jasa Konsultasi Perencanaan pembuatan SUMur resapan dan Lubang biopori	4.446.750,00
10	Diskop UKM Perindag	2020	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pasar Subagan	98.554.500,00
Jumlah				352.341.250,00

PD tersebut belum pernah menginventarisasi aset tetap termasuk KDP, dan belum pernah mengusulkan penghentian KDP untuk mendapat persetujuan dari Kepala Daerah serta selanjutnya dikeluarkan dari pencatatan aset tetap KDP di Neraca.

4. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 32*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(460.190.279.974,96)	(419.507.993.382,91)	(40.682.286.592,05)	9,70
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(419.682.622.136,03)	(386.664.596.283,00)	(33.018.025.853,03)	8,54
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.219.901.583.549,47)	(1.150.477.012.416,48)	(69.424.571.132,99)	6,03
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	(2.099.774.485.660,46)	(1.956.649.602.082,39)	(143.124.883.578,07)	7,31

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.956.649.602.082,39)
Mutasi Tambah:	
- Beban Penyusutan	(143.017.495.087,04)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(378.696.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(446.347.298,00)
✓ Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(4.371.016.972,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(483.875.500,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(148.697.430.857,04)
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	4.495.479.244,97
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	0,00
- Penghapusan Tahun 2023	593.192.534,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
- Mutasi antar Perangkat Daerah	483.875.500,00
Jumlah Mutasi Kurang	5.572.547.278,97
Saldo Akhir	(2.099.774.485.660,46)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.3.1.3.8 Aset Konsesi jasa

Pada tahun 2023 dan Tahun 2022 tidak ada transaksi yang menyebabkan pencatatan Aset Konsesi Jasa dari Entitas Akuntansi.

5.3.1.3.9 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi jasa

Pada tahun 2023 dan Tahun 2022 tidak ada pencatatan Aset Konsesi Jasa dari Entitas Akuntansi sehingga tidak terjadi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.4.1	Dana Cadangan	10.890.800.000,00	0,00	10.890.800.000,00	-

Penjelasan

- Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.890.800.000,00. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2024 sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan tujuan menyediakan dana dalam rangka membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Karangasem Nomor 900.1.3.5/2297/Bid.Perbendaharaan/BPKAD pada tanggal 5 Desember 2023 dilakukan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp17.109.200.000,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.690.189.416,00	24.690.189.416,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	688.429.439,00	225.950.521,00	462.478.918,00	204,68
Aset Lain-Lain	22.071.028.667,78	23.043.994.367,18	(972.965.699,40)	(4,22)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.299.473.000,00	2.513.131.411,00	(213.658.411,00)	(8,50)
Jumlah	49.749.120.522,78	50.473.265.715,18	(724.145.192,40)	(1,43)

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102.612.800,00	0,00	102.612.800,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(102.612.800,00)	0,00	(102.612.800,00)	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Karangasem LHP Nomor 08.C/BPK.DPS/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 yaitu Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem sebesar Rp266.211.400,00 tidak didukung bukti yang memadai. Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut per 31 Desember 2023 belum ditindaklanjuti sebesar Rp102.612.800,00 dan telah dilakukan penyisihan sebesar nilai yang sama. Upaya penagihan atas TGR tersebut masih diupayakan sampai saat ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pemanfaatan	27.504.079.937,00	27.513.879.937,00	(9.800.000,00)	(0,04)
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(2.813.890.521,00)	(2.823.690.521,00)	9.800.000,00	(0,35)
Jumlah	24.690.189.416,00	24.690.189.416,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023
Tanah	23.667.523.000,00
Peralatan dan Mesin	3.400.297.937,00
Gedung dan Bangunan	436.259.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.604.807.521,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(209.083.000,00)
Jumlah	24.690.189.416,00

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	931.748.050,00	377.603.000,00	554.145.050,00	146,75
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(243.318.611,00)	(151.652.479,00)	(91.666.132,00)	60,44
Jumlah	688.429.439,00	225.950.521,00	462.478.918,00	204,68

Penjelasan:

Rincian perangkat daerah yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	168.470.000,00	(41.542.679,00)	126.927.321,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.800.000,00	(16.920.000,00)	1.880.000,00
Dinas Perhubungan	122.100.000,00	(91.575.000,00)	30.525.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	67.700.000,00	(26.176.667,00)	41.523.333,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Karangasem	35.000.000,00	(4.833.333,00)	30.166.667,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Subagan	24.000.000,00	(12.800.000,00)	11.200.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	(39.000.000,00)	6.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	23.600.000,00	(1.966.667,00)	21.633.333,00
Rumah Sakit Umum Daerah	294.150.000,00	(4.902.500,00)	289.247.500,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	132.928.050,00	(3.601.765,00)	129.326.285,00
Jumlah	931.748.050,00	(243.318.611,00)	688.429.439,00

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain - Lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak yang akan Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	-
Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	0,00	0,00	0,00	-
Ternak Guliran dan Tanaman	2.015.034.366,00	2.015.034.366,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	2.248.441.493,31	2.408.049.605,81	(159.608.112,50)	(6,63)
Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	17.403.477.608,47	18.216.835.195,37	(813.357.586,90)	(4,46)
Aset Tetap yang akan Dihapuskan Selain Rusak Berat	223.336.000,00	223.336.000,00	0,00	0,00
Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	180.739.200,00	180.739.200,00	0,00	0,00
Jumlah	22.071.028.667,78	23.043.994.367,18	(972.965.699,40)	(4,22)

Penjelasan:

1. Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang bersih pajak yang dapat direalisasikan dan direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2022 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2023) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rincian piutang pajak yang akan dihapuskan dapat dilihat pada lampiran 34.

2. Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo tagihan piutang bersih atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2023) belum dilakukan pelunasan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

oleh yang bersangkutan. Tagihan atas pembayaran sewa Taman Wisata Putung sampai akhir Tahun 2020 belum dilaksanakan usulan penghapusan.

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu. Sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2023), belum ada penyelesaian tunggakan sewa tersebut di atas.

3. Ternak Guliran dan Tanaman:

Jumlah sebesar Rp2.015.034.366,00 merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00. Atas ternak yang digulirkan dari Tahun 2003, pada tahun 2023 tidak terjadi penagihan dan perguliran kembali kepada petani. Rincian dari Guliran Ternak sesuai rincian dibawah:

Tahun Pemberian	Jenis Ternak	Saldo 31 Desember 2023	
		Jumlah	Nilai
2003	Sapi	36	62.947.500,00
2004	Sapi	16	38.325.000,00
2005	Sapi dan Kambing	30	18.050.000,00
2006	Sapi dan Kambing	34	58.650.000,00
2007	Sapi, Kambing dan Babi	658	915.089.110,00
2008	Sapi, Kambing, Babi, Itik dan Ayam	4.425	899.103.756,00
Jumlah		5.199	1.992.165.366,00

4. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan:

Jumlah sebesar Rp2.248.441.493,31 merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2023. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah swasta
Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat sekolah swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	0,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah swasta
Gedung dan Bangunan	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat sekolah swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas PUPR dan				
Perkim	408.079.000,00	341.172.833,33	66.906.166,67	Akan diserahkan ke Desa
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jumlah	5.054.795.639,00	2.806.354.145,69	2.248.441.493,31	

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga telah mengadakan penelusuran ke sekolah-sekolah swasta yang menerima aset dan mengintruksikan kepada penerima untuk memohon hibah yang hingga akhir Tahun 2023 sudah ditindaklanjuti oleh sebagian besar penerima hibah tersebut namun belum di hapuskan hingga akhir 2023.

Untuk aset pada Dinas Perikanan, telah dilaksanakan penelusuran atas Aset Gedung dan Bangunan tersebut, pihak pengguna yaitu kelompok nelayan menyatakan keinginan untuk memohon hibah aset tersebut. Namun terdapat pertimbangan bahwa tujuan awal dari pengadaan bangunan tersebut adalah sebagai balai pengawasan dimana kelompok nelayan tidak memiliki fungsi pengawas sehingga permohonan hibah masih perlu di pertimbangkan.

Untuk aset jalan yang akan diserahkan ke desa yang tercatat pada Dinas PUPR hingga Tahun 2023 adalah sebesar Rp408.079.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp341.172.833,33 dan nilai buku sebesar Rp66.906.166,67.

Dinas PUPR pada Tahun 2022 telah melakukan proses koordinasi dengan Provinsi Bali terkait aset JIJ yang akan diserahkan ke Provinsi Bali dengan nilai Rp24.216.792.751,99, atas hal tersebut diketahui bahwa Provinsi Bali sudah melakukan pencatatan aset JIJ tersebut. Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.29.028/12221/SEKRET/PUPRKIM tanggal 18 Juli 2022 dilakukan proses permohonan penghapusan aset pada DPUPR Kabupaten Karangasem dengan surat Kepala DPUPR Kabupaten Karangasem Nomor : 028/1733/SEKRET/DPUPR/2022 tanggal 25 Juli 2022 kepada Bupati Karangasem Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem selaku Pengelola Barang Milik Daerah perihal mohon penghapusan barang milik daerah. Tahun 2023 dilakukan penghapusan terhadap 14 ruas jalan yang akan diserahkan ke Provinsi Bali senilai Rp.24.216.792.751,99 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7/KPTS/HK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem tanggal 26 Januari 2023.

5. Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp17.403.477.608,47 merupakan saldo nilai buku Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2023. Di tahun 2023 terdapat mutasi kurang dari keseluruhan asset yang rusak berat sebesar Rp813.357.586,40 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Penambahan dari reklasifikasi dari asset tetap			
Peralatan dan Mesin	3.971.909.254,00	3.957.489.256,00	14.419.998,00
Gedung dan Bangunan	573.506.230,02	537.989.988,97	35.516.241,05



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pengurangan berupa Reklasifikasi Ke Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	(368.896.000,00)	(368.896.000,00)	0,00
Pengurangan Berupa Penghapusan Aset Lainnya			
Gedung dan Bangunan	(2.656.360.892,45)	(1.793.067.067,00)	(863.293.825,45)
Total Pengurangan Nilai Buku Aset Lain-lain			(813.357.586,40)

Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 35*. Atas aset tetap dalam kondisi rusak berat sudah dilakukan pengajuan usulan penghapusan, progres sampai dengan 2023 sudah dibentuk Tim Teknis Penghapusan BMD dan di tahun 2023 baru ditindak lanjuti berupa pemindahtanganan sepeda motor.

Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan pengajuan lelang dalam 4 (empat) tahap lelang namun baru terlaksana proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja atas BMD Rusak Berat jenis kendaraan mobil dan sepeda motor dalam 2 (dua) tahap beberapa Perangkat Daerah dengan nilai lelang yang sudah masuk ke Kas Daerah sebesar Rp317.946.501,00 yang dicatat dalam Pendapatan LLPAD yang Sah-LRA dan Surplus Non Operasional atas Penjualan Aset Non Lancar-LO. Namun dalam Daftar Aset Lain-Lain Rusak Berat tahun 2023 masih tercatat disebabkan belum diterbitkannya SK Penghapusan atas BMD yang sudah terjual. Aset tersebut terdiri dari:

- 83 unit Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp424.138.370,00 dengan akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehannya sehingga nilai buku Rp 0,00;
- 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dengan harga perolehan Rp77.949.000,00 dan nilai buku Rp 0,00.
- 1 unit Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan harga perolehan Rp27.873.557,00 akumulasi penyusutan Rp19.279.211,00 dan nilai buku Rp8.594.346,00
- 5 unit Station Wagon dengan harga perolehan Rp132.275.000,00 akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehan dan nilai buku Rp 0,00

6. Aset Tetap akan Dihapuskan Selain Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp223.336.000,00 merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2023. Atas aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp223.336.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pasar Bebandem dan Pasar Seni Manggis yang berupa perencanaan (DED) yang di alihkan status penggunaannya/pindahan dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pemerintah kabupaten Karangasem belum mengambil kebijakan untuk menghapus DED tersebut walau perencanaan tersebut kemungkinan tidak dapat dilanjutkan mengingat pembangunan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang berbeda.

7. Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut:

Jumlah sebesar Rp180.739.200,00 merupakan saldo Aset Tanah yang masih perlu penelusuran serta Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi
Jumlah		207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	

Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga masih menelusuri dokumen pengadaannya namun belum diketemukan.

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Aset Lainnya - Dana TDF untuk saldo pokok *Treasury Deposit Facility* Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp2.299.473.000,00 berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Amlapura Nomor : S-49/KPN.2203/2024 Perihal Penyampaian Penyampaian Informasi Saldo Rekening TDF tanggal 15 Januari 2024, atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia.

5.3.1.6 Properti Investasi

Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai tahun 2023 belum memiliki aset tetap dengan kategori aset Properti Investasi yang dirinci sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6.1	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.3	Konstruksi dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	-

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14

Tidak termasuk saldo Utang Belanja adalah uang Jaminan Reklamasi yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan ditempatkan bentuk Bilyet deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.053.554.150,00. Uang jaminan reklamasi tersebut diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem, dan dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 36.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.159.401.566,67	357.776.816,34	801.624.750,33	224,06
Utang Belanja dan Transfer	61.307.414.493,50	34.512.911.956,86	26.794.502.536,64	77,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	90.061,78	0,00	90.061,78	-
Jumlah	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Pada tahun 2023 tidak ada transaksi yang menyebabkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga dari Entitas Akuntansi.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak dan retribusi				
✓ Pajak Reklame Diterima Dimuka	149.900.733,33	128.341.317,67	21.559.415,66	16,80
✓ Retribusi IMTA Diterima Dimuka	659.290.000,00	103.430.000,00	555.860.000,00	537,43
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	19.786.833,33	77.765.499,67	(57.978.666,34)	(74,56)
Pendapatan Diterima Dimuka - LLPAD				
✓ Pendapatan BLUD Diterima Dimuka	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	0,00
✓ Sewa BMD Diterima Dimuka	282.184.000,00	0,00	282.184.000,00	0,00
Jumlah	1.159.401.566,67	357.776.816,34	801.624.750,33	224,06

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Utang Belanja				
✓ Utang Belanja Pegawai	22.692.741.268,80	13.205.581.619,90	9.487.159.648,90	71,84
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa	12.346.138.081,00	17.714.609.558,00	(5.368.471.477,00)	(30,31)
✓ Utang Belanja Modal	21.205.214.038,70	97.688.843,96	21.107.525.194,74	21.606,89
➤ Utang Transfer				
✓ Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.063.321.105,00	3.495.031.935,00	1.568.289.170,00	44,87
Jumlah	61.307.414.493,50	34.512.911.956,86	26.794.502.536,64	77,64

Penjelasan:

Atas utang belanja Tahun 2023 didalamnya termasuk utang belanja yang belum dibayarkan atas Belanja Pegawai yaitu belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK, insentif pemungutan retribusi, insentif pemungutan pajak, jasa pelayanan sebesar Rp22.692.741.268,80, utang barang dan jasa sebesar Rp12.346.138.081,00, utang belanja modal sebesar Rp21.205.214.038,70 serta utang transfer bagi hasil pendapatan kepada desa sebesar Rp5.063.321.105,00. Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 38 dan 39.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya –Lainnya	90,061,78	0,00	90,061,78	
Jumlah	90,061,78	0,00	90,061,78	

Penjelasan:

Utang Jangka Pendek Lainnya – Lainnya merupakan utang Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kurang transfer kepada pihak ketiga pada Puskesmas Rendang sebesar Rp2,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kurang transfer serta penyetoran kas tunai ke rekening dana BOS dari Bendahara BOS beberapa sekolah sebesar Rp90.059,00;

Utang ini juga disajikan sebagai bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam poin 5.3.1.1.1 di atas.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	1.662.889.063.869,91	1.567.542.787.384,42	95.346.276.485,49	6,08

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.4*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

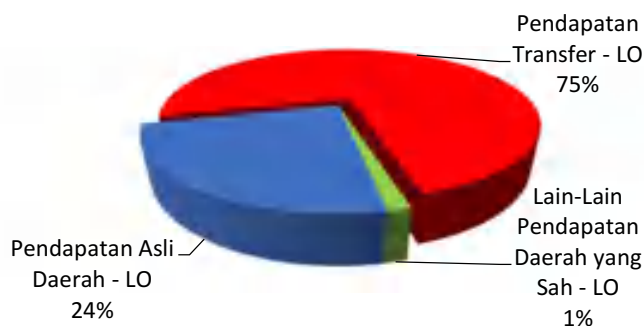
5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah - LO	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49
Pendapatan Transfer - LO	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91
Jumlah	1.643.879.800.856,87	1.500.836.083.059,40

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah - LO	237.196.662.315,59	174.941.530.503,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.211.633.397,67	10.346.354.586,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	22.495.446.496,40	9.800.680.508,35
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	123.205.487.682,04	83.914.360.763,73
Jumlah	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel - LO	51.012.687.634,00	21.768.009.556,00
Pajak Restoran - LO	24.176.844.882,00	10.584.435.629,00
Pajak Hiburan - LO	174.610.835,00	64.994.681,00
Pajak Reklame - LO	669.939.583,34	540.734.983,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	17.977.509.366,00	15.635.109.437,00
Pajak Parkir - LO	18.150.000,00	6.337.500,00
Pajak Air Tanah - LO	1.101.804.084,00	832.641.941,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	108.804.589.250,00	102.979.527.050,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.183.982.997,00	9.189.912.453,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	24.076.543.684,25	13.339.827.273,75
Jumlah	237.196.662.315,59	174.941.530.503,75

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.043.151.819,59 (Rp237.196.662.315,59 - Rp232.153.510.496,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	5.043.151.819,59
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2023 yang belum dibayar WP	13.209.031.795,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	128.341.316,67
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WP	(8.144.320.558,75)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang diterima pembayarannya di TA 2023	(149.900.733,33)
Jumlah Penjelasan Selisih	5.043.151.819,59

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	627.616.800,00	2.007.261.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	243.864.000,00	253.147.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	244.052.000,00	210.220.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.122.510.000,00	4.086.445.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	433.649.240,00	526.817.600,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	55.935.000,00	52.055.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	803.807.904,00	817.609.668,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	285.982.666,67	211.831.766,66
Retribusi Terminal - LO	145.168.000,00	127.209.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	334.969.000,00	249.935.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	23.387.000,00	31.080.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	1.492.340.000,00	804.450.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	37.182.000,00	22.465.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	751.237.787,00	674.468.852,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	171.500.000,00	61.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	2.862.000,00	3.355.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	435.570.000,00	206.504.100,00
Jumlah	10.211.633.397,67	10.346.354.586,66

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp260.381.241,33 (Rp10.211.633.397,67 – Rp10.472.014.639,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(260.381.241,33)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD Tahun 2023 yang belum dibayar WR	417.903.774,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas SKRD Tahun 2023 yang belum dibayar WR	57.955.252,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	57.978.666,67
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	103.430.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WR	(230.915.434,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas SKRD sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WR	(7.443.500,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterima pembayarannya di TA 2023	(659.290.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(260.381.241,33)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	22.495.446.496,40	9.800.680.508,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp12.160.551.173,48 (Rp22.495.446.496,40 - Rp10.334.895.322,92). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	12.160.551.173,48
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari pengakuan laba usaha PDAM Tahun Buku 2023	12.647.659.985,05
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembagian tunai atas laba usaha PDAM Tahun Buku 2022 di Tahun 2023	(487.108.811,57)
Jumlah Penjelasan Selisih	12.160.551.173,48

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian tunai atas deviden dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	Pembagian Untung/Rugi BUMD	Tahun 2023
PT BPD Bali	Biaya	Tunai	9.830.245.683,35
PT Jamkrida Bali Mandara	Biaya	Tunai	17.540.828,00
Perumda Tirta Tohlangkir	Ekuitas	Pengakuan Laba	487.108.811,57
Jumlah			10.334.895.322,92

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	317.946.501,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	20.156.000,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	226.770.275,00	0,00
Jasa Giro - LO	2.400.362.936,81	1.841.959.648,45
Pendapatan Bunga - LO	2.916.666.666,80	3.572.916.666,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	2.110.891.621,43	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	49.668.592,75	0,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	2.487.546.053,64	2.627.682.475,81
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	81.432.250,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	64.428.347,00	467.561.094,06
Pendapatan BLUD - LO	112.529.618.437,61	75.404.240.878,58
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	0,00
Jumlah	123.205.487.682,04	83.914.360.763,73



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.074.610.213,80 (Rp123.205.487.682,04 - Rp128.280.097.895,84). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(5.074.610.213,80)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2023 yang belum dibayar WP	2.487.546.053,64
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Retribusi atas SKRD Tahun 2021 yang belum dibayar WR	0,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga di BLUD yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	12.060.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang BLUD yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 atas pelayanan yang telah diberikan	8.345.393.537,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran Jasa Giro atas Remunerasi DBH pada Rekening TDF-TKD yang telah dibayar di Tahun 2023	(609.510,80)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Denda Pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WP di Tahun 2023	(2.011.820.819,24)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang BLUD yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar pihak ketiga di Tahun 2023	(12.013.491.949,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO Hasil Kerjasama Daerah karena penyisihan investasi non permanen taman ujung	(1.599.443.525,40)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang diterima pembayarannya di TA 2023	(282.184.000,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan BLUD yang diterima pembayarannya di TA 2023	(12.060.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.074.610.213,80)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	985.726.186.152,00	985.383.807.974,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	241.457.255.859,00	194.338.980.449,00
Jumlah	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan - LO		
	➢ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	16.536.824.000,00	24.455.266.839,00
	➢ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	725.107.830.416,00	699.227.251.816,00
	➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	6.905.970.332,00	42.965.052.289,00
	➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	215.315.195.404,00	209.212.342.030,00
5.4.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah - LO	21.860.366.000,00	9.523.895.000,00
5.4.1.2.1.3	Dana Desa - LO	0,00	0,00
	Jumlah	985.726.186.152,00	985.383.807.974,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp79.597.402.411,00 (Rp985.726.186.152,00 - Rp1.065.323.588.563,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(79.597.402.411,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	2.299.473.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	(2.513.131.411,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas tidak diakuinya penerimaan Dana Desa Tahun Berjalan sebagai Pendapatan Operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(79.383.744.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(79.597.402.411,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	166.004.574.688,00	135.189.188.504,00
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan - LO		
	➢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	75.452.681.171,00	59.149.791.945,00
	Jumlah	241.457.255.859,00	194.338.980.449,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp48.451.375.684,00 (Rp241.457.255.859,00 - Rp193.005.880.175,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	48.451.375.684,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023	37.462.447.417,00
✓ Pengakuan Pendapatan LO dari kenaikan saldo Piutang BKK Provinsi TA 2023	35.336.593.397,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang telah disebabkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengakuan piutang sebelum Tahun 2023	(24.347.665.130,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	48.451.375.684,00

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah - LO	21.626.132.397,16	17.690.531.815,91
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	1.960.996.557,01	24.419.836.458,00
Jumlah	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	13.113.428.146,00	2.327.068.392,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.797.639.977,68	14.197.655.182,81
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	5.700.115.148,00	1.154.261.892,00
Sumbangan Pihak ketiga	14.949.125,48	11.546.349,10
Jumlah	21.626.132.397,16	17.690.531.815,91

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp21.611.183.271,68 (Rp21.626.132.397,16 - Rp14.949.125,48). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	21.611.183.271,68
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang Milik Daerah selama Tahun 2023	15.157.435.961,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa JIJ dan Bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat selama Tahun 2023	3.582.884.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2023	2.870.863.310,68
Jumlah Penjelasan Selisih	21.611.183.271,68



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	66.032.409,01	3.106.064,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.894.964.148,00	24.416.730.394,00
Jumlah	1.960.996.557,01	24.419.836.458,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2023.

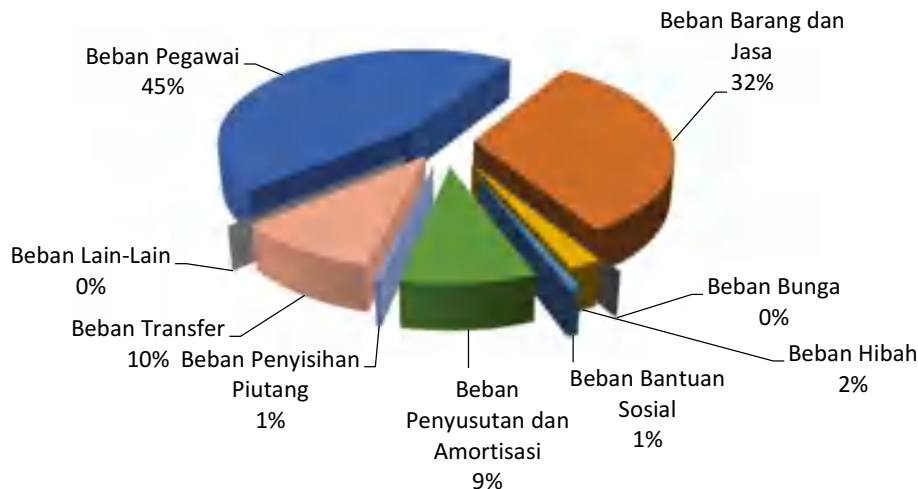
5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	694.588.886.089,23	700.849.168.527,72
Beban Barang dan Jasa	499.241.833.272,83	466.445.262.959,41
Beban Bunga		
Beban Hibah	35.327.513.161,25	28.047.094.168,83
Beban Bantuan Sosial	11.856.310.300,00	6.046.980.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	143.109.161.219,04	133.883.325.059,00
Beban Penyisihan Piutang	5.345.725.668,85	4.303.446.154,26
Beban Transfer	156.049.346.375,19	134.884.851.580,99
Beban Lain-Lain		
Jumlah	1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.450,21

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	411.164.779.158,00	423.657.950.461,80
Beban Tambahan Penghasilan ASN	79.707.272.531,00	81.870.044.396,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.500.993.018,00	141.852.919.490,68
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.507.991.215,00	31.306.310.635,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.340.851.668,23	834.999.746,97
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.700.000,00	848.350.000,00
Beban Pegawai BLUD	26.518.298.499,00	20.478.593.797,27
Jumlah	694.588.886.089,23	700.849.168.527,72

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp9.939.761.402,56 (Rp694.588.886.089,23 - Rp684.649.124.686,67). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	9.939.761.402,56
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada perangkat daerah Non-BLUD	16.479.296.216,80
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada BLUD Karangasem	6.213.445.052,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2023 pada perangkat daerah Non-BLUD	(6.401.195.696,24)
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2023 pada BLUD Karangasem	(6.351.784.170,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	9.939.761.402,56

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	72.839.035.885,49	81.926.145.001,65
Beban Jasa	201.851.241.669,47	207.644.373.401,19
Beban Pemeliharaan	52.386.806.519,13	21.067.183.953,38
Beban Perjalanan Dinas	24.179.917.902,00	20.259.111.009,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.906.966.704,00	16.685.858.825,00
Beban Barang dan Jasa BOS	60.675.880.133,74	56.639.519.327,93
Beban Barang dan Jasa BLUD	65.401.984.459,00	62.223.071.441,26
Jumlah	499.241.833.272,83	466.445.262.959,41



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp600.102.910,95 (Rp499.241.833.272,83 - Rp499.841.936.183,78). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(600.102.910,95)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan TA 2022 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	24.108.025.902,16
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan barang yang diperoleh secara hibah dari pihak ketiga	2.870.863.310,68
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tak Pakai Habis yang berasal dari Salah Pos Belanja	2.617.900,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tidak Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	1.592.850.295,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (jasa) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	0,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (pemeliharaan) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	401.695.780,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang telah belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran kas	136.498.206,33
✓ Pengakuan Beban LO karena adanya penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	12.346.138.081,00
✓ Koreksi ekuitas lebih catat persediaan awal TA 2023	488.655.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022	(17.714.609.550,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka, sehingga pengakuan beban dialokasikan secara bertahap	(151.741.116,86)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya kapitaslisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan	(1.738.529.662,71)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Jasa yang direklasifikasi menjadi Beban Hibah	(776.687.665,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan yang berasal dari belanja barang TA 2023	(21.951.214.884,55)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dari persediaan obat kadaluwarsa yang direklasifikasi menjadi defisit non operasional lainnya	(214.664.507,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(600.102.910,95)

5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bunga	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.369.996.900,00	2.441.816.474,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.789.988.596,25	24.802.484.846,83
Beban Hibah Dana BOS	776.687.665,00	
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	802.792.848,00
Jumlah	35.327.513.161,25	28.047.094.168,83

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp933.847.135,00 (Rp35.327.513.161,25 – Rp34.393.666.026,25). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	933.847.135,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO yang berasal dari penyerahan persediaan barang yang kepada masyarakat/pihak ketiga dari Belanja TA 2022 yang diakui sebagai Beban Hibah TA 2023	953.355.200,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Hibah yang berasal dari reklasifikasi Beban Jasa	776.687.665,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO dikarenakan terdapat Belanja Hibah Barang yang belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca dan diakui sebagai Persediaan Barang	(796.195.730,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	933.847.135,00

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	66.310.300,00	166.980.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.790.000.000,00	5.880.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah	11.856.310.300,00	6.046.980.000,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2022.

5.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.301.940.830,05	38.317.990.295,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.120.229.715,00	30.795.830.536,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	66.595.324.541,99	64.698.700.145,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	91.666.132,00	70.804.083,00
Jumlah	143.109.161.219,04	133.883.325.059,00

Penjelasan:

1. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*; dan
2. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*, dan juga dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.448.377.209,75	4.042.051.685,96
✓ Beban Penyisihan Piutang Retribusi	14.203.551,88	5.719.329,69
✓ Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	398.631.150,38	217.739.716,46
✓ Beban Penyisihan Piutang Transfer	484.513.756,84	37.935.422,15
Jumlah	5.345.725.668,85	4.303.446.154,26

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp284.252.398,00 [Rp5.345.725.668,85 - (Rp46.760.339.027,26 - Rp51.821.812.298,11)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	284.252.398,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang Denda Pajak TA 2023	181.633.502,89
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang LLPAD yang Sah (Remunerasi DBH) TA 2023	6.095,11
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah	102.612.800,00
Jumlah Penjelasan Selisih	284.252.398,00

5.4.2.8 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	31.678.856.375,20	23.162.571.760,99
Beban Transfer Bantuan Keuangan	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00
Jumlah	156.049.346.375,19	134.884.851.580,99

5.4.2.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30.179.956.364,00	21.834.528.276,52
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.498.900.011,20	1.328.043.484,47
Jumlah	31.678.856.375,20	23.162.571.760,99

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.568.289.170,00 (Rp31.678.856.375,20 – Rp30.110.567.205,20). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.568.289.170,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas pengakuan Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023	5.063.321.105,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban atas pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 di Tahun 2023	(3.495.031.935,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	1.568.289.170,00

5.4.2.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00
Jumlah	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp79.383.744.000,00 (Rp124.370.489.999,99 – Rp203.754.233.999,99). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(79.383.744.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(79.383.744.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(79.383.744.000,00)

2. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.9 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.3.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
	✓ Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Aset Lainnya - LO	0,00	27.470.000,00
5.4.3.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
5.4.3.3	Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	27.470.000,00

Penjelasan:

Pada Tahun 2023 tidak ada pengakuan nilai Surplus Non-Operasional namun Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.4.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
5.4.4.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
5.4.4.3	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	214.664.507,00	0,00
	Jumlah	214.664.507,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan defisit atas persediaan berupa obat kadaluwarsa yang sudah dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.5.1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
5.4.5.2	Beban Luar Biasa	54.000,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2023

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

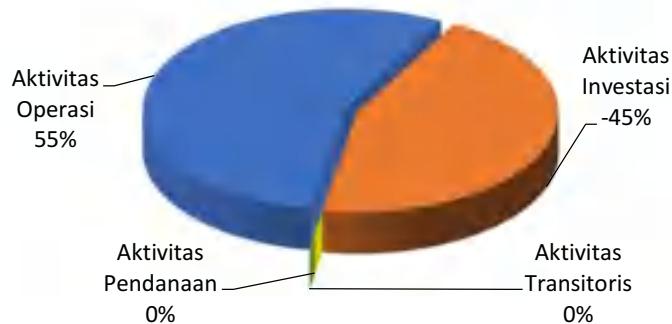
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah - LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah - LO	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49
✓ Pendapatan Transfer - LO	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.450,21
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	27.470.000,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	214.664.507,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	54.000,00	0,00
Jumlah	98.146.306.263,48	26.403.424.609,19

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.6.2.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut perubahan Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2023.



Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.641.227.986.273,25	1.577.382.968.958,88
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.464.605.892.401,89	1.409.599.813.263,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	176.622.093.871,36	167.783.155.695,57

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.1.1 ➤ Pendapatan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	51.770.436.080,08	23.092.040.966,00
✓ Pajak Restoran	23.692.448.383,00	11.378.209.719,00
✓ Pajak Hiburan	175.126.520,00	78.796.577,00
✓ Pajak Reklame	658.491.200,00	526.388.100,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	17.977.509.366,00	15.635.109.437,00
✓ Pajak Parkir	18.150.000,00	6.385.500,00
✓ Pajak Air Tanah	1.145.519.201,67	918.841.699,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	106.506.402.045,00	96.437.421.080,67
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.132.884.016,00	6.544.889.473,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.076.543.684,25	13.339.827.273,75
5.5.1.1.2 > Pendapatan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan	627.616.800,00	2.007.261.100,00
✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	243.864.000,00	253.147.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	244.052.000,00	210.220.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pasar	4.122.510.000,00	4.086.445.000,00
✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	433.649.240,00	526.817.600,00
✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.935.000,00	52.055.000,00
✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	616.819.564,00	779.427.464,00
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	228.004.000,00	223.826.100,00
✓ Retribusi Terminal	145.168.000,00	127.209.000,00
✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir	334.969.000,00	249.935.000,00
✓ Retribusi Rumah Potong Hewan	23.387.000,00	31.080.500,00
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.492.340.000,00	804.450.000,00
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.182.000,00	22.465.000,00
✓ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.726.035,00	667.025.352,00
✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	171.500.000,00	61.500.000,00
✓ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.862.000,00	3.355.000,00
✓ Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	991.430.000,00	109.500.000,00
5.5.1.1.3 > Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.334.895.322,92	9.321.192.563,91
5.5.1.1.4 > Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	302.340.000,00	0,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,40	0,00
✓ Penerimaan Jasa Giro	2.400.972.447,61	1.841.350.137,65
✓ Pendapatan Bunga	2.916.666.666,80	3.572.916.666,83
✓ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.110.891.621,43	248.352.744,41
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.668.592,75	202.676.211,65
✓ Pendapatan Denda Pajak	2.011.820.819,24	450.346.262,33
✓ Pendapatan Denda Retribusi	0,00	12.049.776,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	81.432.250,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	64.428.347,00	15.332.138,00
✓ Pendapatan BLUD	116.197.716.849,61	107.465.715.912,58
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
✓ Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	1.200.000,00
> Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
5.5.1.1.5 ✓ Dana Perimbangan	964.079.478.563,00	973.346.781.563,00
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	16.750.482.411,00	21.942.135.428,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	725.107.830.416,00	699.227.251.816,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.905.970.332,00	42.965.052.289,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	215.315.195.404,00	209.212.342.030,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian		Tahun 2023	Tahun 2022
Non Fisik			
5.5.1.1.6	✓ Dana Insentif Daerah	21.860.366.000,00	9.523.895.000,00
5.5.1.1.7	✓ Dana Desa	79.383.744.000,00	77.843.710.000,00
➤ Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah			
5.5.1.1.8	✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.889.792.401,00	131.395.646.289,00
5.5.1.1.9	✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	40.116.087.774,00	59.149.791.945,00
5.5.1.1.10 ➤ Pendapatan Hibah- LRA			
	✓ Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat	0,00	387.000.000,00
	✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.949.125,48	11.546.349,10
5.5.1.1.11 ➤ Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	✓ Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
	✓ Pendapatan atas Pengembalian Hibah	66.032.409,01	3.106.064,00
	✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.894.964.148,00	24.416.730.394,00
Jumlah		1.641.227.986.273,25	1.577.382.968.958,88

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.2.1 ➤ Belanja Pegawai			
	✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	411.524.765.202,00	424.543.362.611,80
	✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.707.272.531,00	81.870.044.396,00
	✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.421.635.602,84	140.096.055.374,78
	✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.507.991.215,00	31.306.310.635,00
	✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	982.122.518,83	834.999.746,97
	✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.700.000,00	848.350.000,00
	✓ Belanja Pegawai BLUD	26.656.637.617,00	42.434.537.528,00
5.5.1.2.2 ➤ Belanja Barang dan Jasa			
	✓ Belanja Barang	72.682.176.820,10	67.944.059.923,50
	✓ Belanja Jasa	206.988.403.262,00	206.737.239.492,00
	✓ Belanja Pemeliharaan	52.300.549.271,84	20.960.763.293,38
	✓ Belanja Perjalanan Dinas	24.179.917.902,00	20.259.111.009,00
	✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.906.966.704,00	16.779.418.825,00
	✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	59.546.270.466,84	56.203.638.090,16
	✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.237.651.757,00	63.928.630.363,72
5.5.1.2.3 ➤ Belanja Bunga			
5.5.1.2.4 ➤ Belanja Subsidi			
5.5.1.2.5 ➤ Belanja Hibah			
	✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.369.996.900,00	249.983.214,00
	✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.632.829.126,25	17.311.892.700,00
	✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	802.792.848,00
5.5.1.2.6 ➤ Belanja Bantuan Sosial			
	✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	66.310.300,00	166.980.000,00
	✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.790.000.000,00	5.880.000.000,00
5.5.1.2.7 ➤ Belanja Tak Terduga			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian		Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Tak Terduga		54.000,00	0,00
5.5.1.2.8	> Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
✓ Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		28.501.842.451,00	19.563.129.403,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1.608.724.754,20	1.312.523.989,00
5.5.1.2.9	> Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		203.754.233.999,99	189.565.989.820,00
Jumlah		1.464.605.892.401,89	1.409.599.813.263,31

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	17.427.146.501,00	27.470.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	160.536.449.121,10	141.808.067.685,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143.109.302.620,10)	(141.780.597.685,15)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.1.1	> Pencairan Dana Cadangan		
✓ Pencairan Dana Cadangan		17.109.200.000,00	0,00
5.5.2.1.2	> Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Aset Lain-Lain		317.946.501,00	27.470.000,00
Jumlah		17.427.146.501,00	27.470.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.2.1	> Pembentukan Dana Cadangan		
✓ Pembentukan Dana Cadangan		28.000.000.000,00	0,00
5.5.2.2.2	> Belanja Modal Tanah		
5.5.2.2.3	> Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar		1.062.279.000,00	41.522.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan		688.562.000,00	3.828.473.150,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		46.367.799,00	14.500.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		18.071.935.966,00	4.899.706.488,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.576.389.524,00	809.467.900,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		1.464.734.881,00	13.170.260.904,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	4.438.004.225,00	3.071.359.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	12.032.801.849,00	21.090.933.174,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.300.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	8.650.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	292.851.577,50
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	211.567.000,00	0,00
5.5.2.2.4 > Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	29.229.963.509,27	29.254.959.162,05
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.458.315.467,12	2.847.148.048,00
5.5.2.2.5 > Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.776.206.839,07	55.838.342.500,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	3.718.196.400,00	2.059.440.250,00
✓ Belanja Modal Instalasi	1.235.108.600,00	745.900.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	2.750.315.311,64	891.741.542,60
5.5.2.2.6 > Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	667.005.700,00	367.085.989,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.600.000,00	25.376.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	539.145.050,00	59.000.000,00
5.5.2.2.7 > Belanja Modal Aset Lainnya		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	0,00
5.5.2.2.8 > Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah	160.536.449.121,10	141.808.067.685,15

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.1.1 > Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	450.990,00	0,00
Jumlah	450.990,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.2	➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
	✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.1.1	➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	✓ Iuran Wajib Pegawai	5.341.444.064,00	5.529.033.225,70
	✓ Pajak Penghasilan	31.536.016.103,00	142.404.877.396,72
	✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.344.074.316,00	78.546.870.719,00
	✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	0,00
	✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	22.039.129.516,00	23.200.134.032,00
	✓ BPJS Kesehatan	21.898.279.915,00	23.609.093.128,80
	✓ PFK Lainnya	119.403.006,00	0,00
	✓ Iuran JKK	865.543.161,89	893.321.978,44
	✓ Iuran JKM	2.194.185.166,11	2.268.580.244,56
	✓ BPJS Kesehatan Non ASN	181.388.321,00	80.629.726,00
	Jumlah	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 40*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.2.1	➤ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	✓ Iuran Wajib Pegawai	5.341.444.064,00	5.529.033.225,70
	✓ Pajak Penghasilan	31.536.016.103,00	142.420.794.221,72
	✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.344.074.316,00	78.530.823.572,00
	✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	0,00
	✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	22.039.129.516,00	23.200.134.032,00
	✓ BPJS Kesehatan	21.898.279.915,00	23.609.093.128,80
	✓ PFK Lainnya	119.403.006,00	0,00
	✓ Iuran JKK	865.543.161,89	893.321.978,44
	✓ Iuran JKM	2.194.185.166,11	2.268.710.566,56
	✓ BPJS Kesehatan Non ASN	181.388.321,00	80.629.726,00
	Jumlah	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 40*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	176.622.093.871,36	167.783.155.695,57
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143.109.302.620,10)	(141.780.597.685,15)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Jumlah	33.513.242.241,26	26.002.558.010,42

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
	Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
	Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
	Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Jumlah	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana BOS di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.741.988,51	(856.791,12)
Jumlah	1.741.988,51	(856.791,12)

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.4* di atas.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19
Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi di FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81
Kas Lainnya	90.061,78	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2023.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas Tahun 2023 tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	1.567.542.787.384,42	1.541.639.811.645,02

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) - LO	98.146.306.263,48	26.403.424.609,19

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 6.4.6*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.3.1.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar :	0,00	0,00
5.6.3.1.2 Koreksi Ekuitas atas Investasi	0,00	0,00
5.6.3.1.3 Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	0,00	0,00
5.6.3.1.4 Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	0,00	0,00
5.6.3.1.5 Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	0,00	0,00
5.6.3.1.6 Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki dampak kumulatif perubahan kebijakan.

5.6.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.3.2.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar :	(1.995.352.545,70)	662.747.435,98
5.6.3.2.1.1 - Koreksi Ekuitas atas Kas	1.741.988,51	(856.791,12)
5.6.3.2.1.2 - Koreksi Ekuitas atas Piutang	(2.668.239.132,34)	(14.867.061,00)
5.6.3.2.1.3 - Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang	181.639.598,00	320.373.698,10



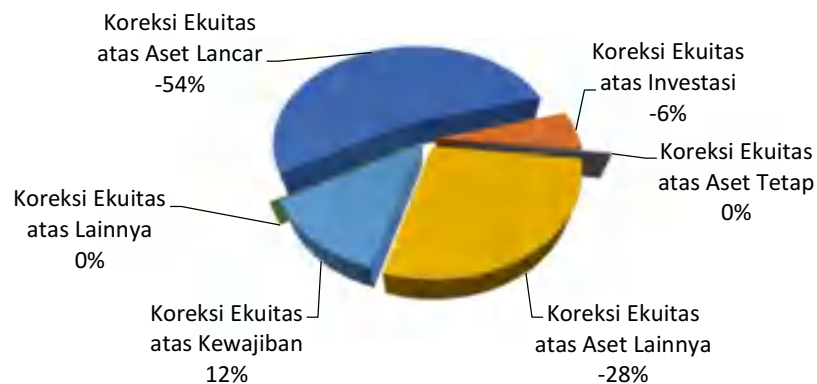
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.6.3.2.1.4	- Koreksi Ekuitas atas Beban Dibayar Dimuka	850.000,13	0,00
5.6.3.2.1.5	- Koreksi Ekuitas atas Persediaan	488.655.000,00	358.097.590,00
5.6.3.2.2	Koreksi Ekuitas atas Investasi	(220.962.106,16)	(974.266.789,10)
5.6.3.2.3	Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(13.414.949,00)	(439.492.491,00)
5.6.3.2.4	Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(1.022.901.938,45)	(60.905.000,67)
5.6.3.2.5	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	452.601.761,32	311.467.975,00
5.6.3.2.6	Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(2.800.029.777,99)	(500.448.869,79)

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya koreksi saldo awal di kas Bendahara, Koreksi Saldo awal piutang pajak, saldo awal piutang LLPAD, koreksi penyesuaian piutang LLPAD dan koreksi beban dibayar dimuka ;
2. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Investasi yang disebabkan oleh koreksi nilai ekuitas investasi ;
3. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Tetap yang disebabkan reklasifikasi dan koreksi peralatan dan mesin, reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan ;
4. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lainnya yang disebabkan koreksi aset lainnya; dan
5. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Kewajiban yang disebabkan koreksi utang belanja.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	1.662.889.063.869,91	1.567.542.787.384,42

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point* 5.3.3.



5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan Pesta Demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif dan DPD pada tanggal 14 Februari 2024 serta Pemilukada akan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024. Atas kegiatan tersebut mempengaruhi tatanan ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Karangasem termasuk salah satu daerah yang terpengaruh perubahan perekonomian seperti meningkatnya harga bahan pokok dan beberapa bahan pangan, kepercayaan investasi belum stabil serta hal lainnya. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 adalah:

1. Potensi ketertagihan piutang daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi yaitu Piutang pajak daerah untuk 8 jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, PPJ, dan PBB P2 dengan piutang kondisi per-31 Desember 2023 sekitar 94,11 Milyar, potensi ketertagihan terhadap piutang pajak daerah tersebut secara keseluruhan sekitar 9,15%; dan
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek pada Tahun 2024 masih bisa dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan anggaran. Untuk kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menganggarkan di Induk 2024 dan tidak terganggu dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2024.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 741 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2022). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gede Dana, S.Pd, M.Si dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH, MA. Tahun 2021 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2021 - 2026.

Pada awal Tahun 2023 susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD di mana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada Tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketenagakerjaan;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Karangasem;
27. Kecamatan Kubu;
28. Kecamatan Abang;
29. Kecamatan Bebandem;
30. Kecamatan Selat;
31. Kecamatan Manggis;
32. Kecamatan Rendang; dan
33. Kecamatan Sidemen.

Dalam Tahun 2023, terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang dibidang keuangan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	

Amlapura, 29 Agustus 2024
BUPATI KARANGASEM

1 GEDE DANA



Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	Anggaran				Realisasi			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BKPSDM	4.471.291.007,00	3.591.653.898,00	-	-	3.826.671.940,00	2.458.135.754,00	-	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.944.111.158,00	3.606.790.694,00	19.651.825.200,00	-	2.926.808.490,00	2.758.965.469,00	19.651.825.200,00	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.348.231.322,00	3.385.946.050,00	-	-	2.261.060.476,00	3.030.007.988,00	-	-
4	BPKAD	20.978.429.421,00	8.073.471.416,00	-	-	16.023.755.880,67	7.433.692.359,00	-	-
5	BPKAD sebagai SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.042.352.556,00	3.175.689.058,00	-	-	2.957.087.828,00	2.633.956.818,00	-	-
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.074.296.299,00	4.469.311.753,00	3.617.275.500,00	-	3.396.246.204,00	4.003.311.704,32	3.616.000.000,00	-
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.951.612.239,00	11.793.968.649,00	-	-	2.712.681.010,00	10.281.003.852,00	-	-
9	Dinas Kesehatan	126.813.664.771,00	221.773.152.278,00	-	-	117.889.941.843,00	204.028.881.217,28	-	-
10	Dinas Ketenagakerjaan	3.746.074.452,00	1.060.246.278,00	-	-	3.416.125.609,00	894.403.091,00	-	-
11	Dinas Kominfo	3.011.448.960,00	6.074.880.801,00	-	-	2.753.558.278,00	5.181.976.409,00	-	-
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.582.344.769,00	6.818.516.086,00	-	-	4.802.694.148,00	5.918.713.196,79	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.888.820.900,00	13.345.254.163,00	-	-	2.825.937.395,00	12.909.679.797,00	-	-
14	Dinas PUPR, Perkim	11.056.035.664,00	31.893.372.577,00	1.350.000.000,00	12.000.000.000,00	10.123.634.551,00	29.946.080.338,00	1.096.195.730,00	11.790.000.000,00
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.292.883.605,00	2.757.261.260,00	-	-	2.204.180.057,00	2.391.434.781,00	-	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.295.039.946,00	3.701.698.980,00	-	-	3.205.807.393,00	3.426.343.005,00	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.384.522.764,00	3.651.968.208,00	-	-	2.342.588.283,00	3.293.377.957,00	-	-
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	424.526.616.170,00	112.570.257.961,00	8.996.411.593,00	-	394.161.904.080,00	107.599.032.411,84	8.863.955.133,00	-
19	Dinas Perhubungan	3.493.353.850,00	11.568.589.130,00	-	-	3.322.674.531,00	9.824.765.018,00	-	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.350.686.144,00	956.059.294,00	-	-	2.112.438.190,00	891.060.306,00	-	-
21	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	14.874.702.878,00	9.848.897.435,00	-	-	14.208.584.605,00	7.685.214.257,00	-	-
22	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	4.958.563.887,00	10.160.013.771,00	75.000.000,00	197.620.000,00	4.171.516.599,00	7.620.670.827,05	75.000.000,00	66.310.300,00
23	Inspektorat	5.581.931.996,00	1.961.649.500,00	-	-	5.375.563.136,00	1.446.765.176,00	-	-
24	Kecamatan Abang	2.543.845.317,00	728.241.350,00	-	-	2.511.994.531,00	695.859.045,00	-	-
25	Kecamatan Bebandem	2.244.800.901,00	699.656.392,00	-	-	2.188.668.214,00	645.037.755,00	-	-
26	Kecamatan Karangasem	4.860.111.912,00	714.042.587,00	-	-	4.712.613.036,00	683.533.566,00	-	-
27	Kecamatan Kubu	1.791.803.872,00	615.293.383,00	-	-	1.651.454.899,00	592.689.766,00	-	-
28	Kecamatan Manggis	2.551.334.762,00	635.116.300,00	-	-	2.467.089.909,00	538.224.841,00	-	-
29	Kecamatan Rendang	3.258.000.105,00	616.403.849,00	-	-	3.039.224.923,00	554.286.237,00	-	-
30	Kecamatan Selat	2.458.207.619,00	691.527.160,00	-	-	2.175.285.350,00	632.141.383,00	-	-
31	Kecamatan Sidemen	2.390.658.777,00	662.482.637,00	-	-	2.314.291.198,00	595.723.178,00	-	-
32	Kelurahan Karangasem	2.720.000,00	1.945.956.920,00	392.221.500,00	-	2.720.000,00	1.900.731.427,00	389.752.812,09	-
33	Kelurahan Padangkerta	2.040.000,00	1.388.012.919,00	327.000.000,00	-	2.040.000,00	1.203.041.374,00	324.447.167,16	-
34	Kelurahan Subagan	1.360.000,00	1.320.388.370,00	358.472.500,00	-	1.360.000,00	1.057.754.510,00	356.489.984,00	-
35	Satuan Polisi Pamong Praja	8.235.259.258,00	3.398.568.719,00	-	-	7.731.307.204,00	2.766.643.326,00	-	-
36	Sekretariat Daerah	14.468.970.529,00	31.922.655.874,00	20.000.000,00	-	13.744.021.092,00	25.477.093.103,00	20.000.000,00	-
37	Sekretariat DPRD	35.265.596.353,00	30.429.371.021,00	-	-	35.085.593.804,00	26.841.704.940,50	-	-
	Jumlah	737.741.724.163,00	552.006.366.721,00	34.788.206.293,00	12.197.620.000,00	684.649.124.686,67	499.841.936.183,78	34.393.666.026,25	11.856.310.300,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	441.550.711.143,88	411.524.765.202,00	93,20
1	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.189.630.623,00	2.630.003.953,00	82,45
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.979.571.158,00	1.965.547.506,00	99,29
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.468.611.565,00	1.415.085.093,00	96,36
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.556.693.420,00	5.245.976.141,00	94,41
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.940.214.136,00	1.868.860.457,00	96,32
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.748.206.299,00	2.296.873.255,00	83,58
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.916.437.584,00	1.751.367.044,00	91,39
8	Dinas Kesehatan	71.571.998.404,00	63.108.106.715,00	88,17
9	Dinas Ketenagakerjaan	2.548.357.424,00	2.322.521.073,00	91,14
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.944.642.519,88	1.828.931.725,00	94,05
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Peindustrian dan Perdagangan	3.673.987.179,00	3.110.186.633,00	84,65
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.887.117.455,00	1.848.929.047,00	97,98
13	Dinas PUPR, Perkim	7.901.361.053,00	7.167.232.011,00	90,71
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.488.867.756,00	1.448.497.262,00	97,29
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.228.272.326,00	2.156.441.834,00	96,78
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.564.222.276,00	1.531.601.869,00	97,91
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	275.199.577.697,00	260.112.953.747,00	94,52
18	Dinas Perhubungan	2.340.310.702,00	2.245.539.937,00	95,95
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.563.126.444,00	1.382.760.636,00	88,46
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	10.324.781.588,00	9.797.701.630,00	94,90
21	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	3.602.600.201,00	2.906.375.414,00	80,67
22	Inspektorat	3.337.743.147,00	3.200.527.093,00	95,89
23	Kecamatan Abang	1.780.610.232,00	1.763.832.045,00	99,06
24	Kecamatan Bebandem	1.565.937.716,00	1.522.336.995,00	97,22
25	Kecamatan Karangasem	3.403.548.095,00	3.321.712.943,00	97,60
26	Kecamatan Kubu	1.190.763.872,00	1.133.467.044,00	95,19
27	Kecamatan Manggis	1.776.240.642,00	1.726.356.449,00	97,19
28	Kecamatan Rendang	2.340.137.100,00	2.222.445.990,00	94,97
29	Kecamatan Selat	1.662.625.872,00	1.517.485.277,00	91,27
30	Kecamatan Sidemen	1.693.471.255,00	1.626.342.608,00	96,04
31	Satuan Polisi Pamong Praja	5.918.745.538,00	5.499.111.288,00	92,91
32	Sekretariat Daerah	7.967.880.012,00	7.629.451.524,00	95,75
33	Sekretariat DPRD	2.274.419.853,00	2.220.202.964,00	97,62
II	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.669.307.775,12	79.707.272.531,00	89,89
1	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.281.660.384,00	1.196.667.987,00	93,37
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	955.700.000,00	952.420.984,00	99,66
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	876.899.757,00	843.935.383,00	96,24
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.601.476.868,00	2.480.048.221,00	95,33
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.100.778.420,00	1.087.547.371,00	98,80
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.215.000.000,00	1.098.012.949,00	90,37
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.035.174.655,00	961.313.966,00	92,86
8	Dinas Kesehatan	15.716.056.974,00	13.279.591.034,00	84,50
9	Dinas Ketenagakerjaan	1.176.787.028,00	1.074.142.036,00	91,28
10	Dinas Kominfo	994.126.440,12	888.946.553,00	89,42
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Peindustrian dan Perdagangan	1.592.154.736,00	1.444.324.715,00	90,72
12	Dinas Lingkungan Hidup	971.527.440,00	958.996.848,00	98,71
13	Dinas PUPR, Perkim	3.067.299.461,00	2.914.653.640,00	95,02
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	801.975.849,00	753.642.795,00	93,97
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.059.787.620,00	1.045.285.559,00	98,63
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	813.490.488,00	806.226.414,00	99,11
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	28.073.010.686,00	23.838.721.633,00	84,92
18	Dinas Perhubungan	1.075.593.323,00	1.016.059.340,00	94,47
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	787.559.700,00	729.677.554,00	92,65
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4.544.748.790,00	4.408.842.975,00	97,01
21	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	1.349.163.686,00	1.259.021.185,00	93,32
22	Inspektorat	2.242.148.849,00	2.173.676.043,00	96,95
23	Kecamatan Abang	761.195.085,00	746.122.486,00	98,02
24	Kecamatan Bebandem	676.823.185,00	664.291.219,00	98,15
25	Kecamatan Karangasem	1.454.523.817,00	1.388.860.093,00	95,49
26	Kecamatan Kubu	599.000.000,00	515.947.855,00	86,13
27	Kecamatan Manggis	773.054.120,00	738.693.460,00	95,56
28	Kecamatan Rendang	915.823.005,00	814.738.933,00	88,96
29	Kecamatan Selat	793.541.747,00	655.760.073,00	82,64
30	Kecamatan Sidemen	695.147.522,00	685.908.590,00	98,67
31	Satuan Polisi Pamong Praja	2.314.473.720,00	2.230.835.916,00	96,39
32	Sekretaris Daerah	5.217.996.000,00	4.953.819.096,00	94,94
33	Sekretariat DPRD	1.135.608.420,00	1.100.539.625,00	96,91

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.056.565.709,00	133.421.635.602,84	88,33
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.840.000,00	8.840.000,00	100,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.293.856.178,00	7.489.237.284,34	66,31
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.360.000,00	680.000,00	50,00
4	Dinas Kesehatan	17.230.479.702,00	14.845.606.477,00	86,16
5	Dinas Ketenagakerjaan	20.930.000,00	19.462.500,00	92,99
6	Dinas Kominfo	65.984.000,00	35.680.000,00	54,07
7	Dinas Lingkungan Hidup	30.176.005,00	18.011.500,00	59,69
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	111.090.000,00	1.360.000,00	1,22
9	Dinas PUPR, Perkim	87.375.150,00	41.748.900,00	47,78
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.980.000,00	4.080.000,00	58,45
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.810.000,00	4.760.000,00	69,90
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	121.254.027.787,00	110.210.228.700,00	90,89
13	Dinas Perhubungan	70.561.075,00	59.497.441,50	84,32
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Peindustrian dan Perdagangan	316.202.854,00	248.182.800,00	78,49
15	Inspektorat	2.040.000,00	1.360.000,00	66,67
16	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5.172.500,00	2.040.000,00	39,44
17	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	6.800.000,00	6.120.000,00	90,00
18	Kecamatan Karangasem	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
19	Kecamatan Abang	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
20	Kecamatan Kubu	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
21	Kecamatan Bebandem	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
22	Kecamatan Selat	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
23	Kecamatan Rendang	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
24	Kecamatan Sidemen	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
25	Kecamatan Manggis	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
26	Sekretaris Daerah	487.560.458,00	388.700.000,00	79,72
27	Sekretariat DPRD	21.080.000,00	8.160.000,00	38,71
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2.040.000,00	1.360.000,00	66,67
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.720.000,00	2.040.000,00	75,00
IV	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76
1	Sekretariat DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76
V	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.735.521.764,00	982.122.518,83	56,59
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.526.402.955,00	808.494.234,33	52,97
2	Dinas Kominfo	6.696.000,00		0,00
3	Dinas Perhubungan	6.888.750,00	1.577.812,50	22,90
4	Sekretaris Daerah	195.534.059,00	172.050.472,00	87,99
VI	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.600.000,00	848.700.000,00	99,89
1	Sekretaris Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
2	Sekretariat DPRD	249.600.000,00	248.700.000,00	99,64
VII	Belanja Pegawai BLUD	22.295.129.691,00	26.656.637.617,00	119,56
1	Rumah Sakit Umum Daerah	22.295.129.691,00	26.656.637.617,00	119,56
	Jumlah Seluruh Belanja Pegawai	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Barang	93.668.518.058,00	72.682.176.820,10	77,60
1	BKPSDM	751.487.375,00	508.291.701,00	67,64
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.681.743.800,00	1.254.204.820,00	74,58
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.172.839.850,00	993.864.021,00	84,74
4	BPKAD	2.607.448.379,00	2.209.870.756,00	84,75
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	747.610.575,00	609.889.365,00	81,58
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.238.286.108,00	1.010.944.223,00	81,64
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.935.495.083,00	1.739.004.513,00	89,85
8	Dinas Kesehatan	22.917.736.920,00	14.870.158.702,10	64,88
9	Dinas Ketenagakerjaan	429.099.878,00	395.070.375,00	92,07
10	Dinas Kominfo	585.697.844,00	492.716.915,00	84,12
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.783.888.148,00	1.394.445.273,00	78,17
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.313.771.170,00	5.083.669.550,00	95,67
13	Dinas PUPR, Perkim	3.985.521.982,00	3.387.507.139,00	85,00
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	844.945.300,00	751.116.680,00	88,90
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.094.603.088,00	964.727.050,00	88,13
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	683.303.317,00	572.025.419,00	83,71
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.184.116.255,00	6.062.363.899,00	84,39
18	Dinas Perhubungan	1.713.893.474,00	1.511.012.725,00	88,16
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	321.714.023,00	297.786.129,00	92,56
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5.072.013.486,00	3.803.824.297,00	75,00
21	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	2.785.157.159,00	1.679.789.286,00	60,31
22	Inspektorat	895.530.200,00	646.567.620,00	72,20
23	Kecamatan Abang	354.101.104,00	335.241.040,00	94,67
24	Kecamatan Bebandem	369.054.450,00	340.887.754,00	92,37
25	Kecamatan Karangasem	1.786.192.201,00	1.392.679.993,00	77,97
26	Kecamatan Kubu	351.282.183,00	345.417.570,00	98,33
27	Kecamatan Manggis	305.797.900,00	255.746.587,00	83,63
28	Kecamatan Rendang	336.021.949,00	299.687.798,00	89,19
29	Kecamatan Selat	427.487.235,00	397.840.363,00	93,06
30	Kecamatan Sidemen	321.761.037,00	291.842.970,00	90,70
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1.541.693.887,00	1.171.683.942,00	76,00
32	Sekretaris Daerah	15.079.752.709,00	11.822.126.621,00	77,54
33	Sekretariat DPRD	7.049.469.989,00	5.790.171.724,00	82,14
II	Belanja Jasa	227.263.095.234,00	206.988.403.262,00	91,08
1	BKPSDM	2.148.618.383,00	1.334.105.885,00	62,09
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.016.224.400,00	939.582.347,00	92,46
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.959.281.200,00	1.800.722.211,00	91,91
4	BPKAD	4.665.216.781,00	4.520.514.621,00	96,90
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.969.468.383,00	1.613.304.966,00	81,92
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.569.921.450,00	1.429.861.181,00	91,08
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.341.486.800,00	2.157.180.566,00	92,13
8	Dinas Kesehatan	131.306.392.713,00	120.826.136.235,00	92,02
9	Dinas Ketenagakerjaan	431.046.400,00	375.197.354,00	87,04
10	Dinas Kominfo	5.106.323.000,00	4.342.759.422,00	85,05
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.624.283.011,00	3.171.626.623,00	87,51
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.613.108.343,00	7.437.594.207,00	97,69
13	Dinas PUPR, Perkim	7.679.450.201,00	7.444.103.180,00	96,94
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.703.217.190,00	1.450.899.101,00	85,19
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.392.717.592,00	2.288.875.941,00	95,66
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.340.129.700,00	1.266.118.066,00	94,48
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.753.860.306,00	11.826.544.019,00	92,73
18	Dinas Perhubungan	9.420.822.996,00	7.978.972.198,00	84,70
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	509.162.482,00	468.584.897,00	92,03
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4.012.715.682,00	3.412.639.703,00	85,05
21	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	3.839.893.108,00	3.096.663.636,00	80,64
22	Inspektorat	547.561.400,00	465.700.622,00	85,05
23	Kecamatan Abang	297.169.296,00	291.563.305,00	98,11
24	Kecamatan Bebandem	258.767.042,00	241.634.101,00	93,38
25	Kecamatan Karangasem	1.482.872.600,00	1.374.063.054,00	92,66
26	Kecamatan Kubu	179.011.200,00	169.146.796,00	94,49
27	Kecamatan Manggis	231.818.400,00	216.304.504,00	93,31
28	Kecamatan Rendang	195.856.800,00	184.508.639,00	94,21
29	Kecamatan Selat	190.515.200,00	167.771.200,00	88,06

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
30	Kecamatan Sidemen	255.721.600,00	237.111.707,00	92,72
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1.461.644.392,00	1.278.573.484,00	87,48
32	Sekretaris Daerah	9.239.594.683,00	8.214.888.573,00	83,53
33	Sekretariat DPRD	5.519.222.500,00	4.965.150.918,00	89,96
III	Belanja Pemeliharaan	56.446.167.177,00	52.300.549.271,84	92,66
1	BKPSDM	383.098.300,00	366.591.928,00	95,69
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	102.500.000,00	82.485.000,00	80,47
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	127.800.000,00	126.459.300,00	98,95
4	BPKAD	384.789.260,00	339.213.100,00	88,16
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	57.756.600,00	32.275.974,00	55,88
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	256.187.095,00	221.390.264,32	86,42
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	133.835.266,00	129.044.000,00	96,42
8	Dinas Kesehatan	3.146.531.358,00	2.294.714.284,18	72,93
9	Dinas Ketenagakerjaan	60.200.000,00	44.883.250,00	74,56
10	Dinas Kominfo	313.291.557,00	283.618.212,00	90,53
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	924.299.000,00	911.877.446,79	98,66
12	Dinas Lingkungan Hidup	339.374.650,00	338.585.000,00	99,77
13	Dinas PUPR, Perkim	14.944.103.794,00	14.240.060.000,00	95,29
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	178.784.276,00	178.379.500,00	99,77
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.299.600,00	62.171.100,00	66,64
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.240.326.200,00	1.145.688.328,00	92,37
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	29.053.486.725,00	27.976.889.356,00	96,29
18	Dinas Perhubungan	377.077.660,00	307.424.750,00	81,53
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.100.000,00	71.049.660,00	99,93
20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	133.392.923,00	130.295.455,00	97,68
21	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	486.759.754,00	267.738.021,05	55,00
22	Inspektorat	322.800.000,00	154.829.772,00	47,96
23	Kecamatan Abang	39.470.950,00	37.873.000,00	95,95
24	Kecamatan Bebandem	30.834.900,00	30.834.700,00	100,00
25	Kecamatan Karangasem	116.460.995,00	110.793.730,00	95,13
26	Kecamatan Kubu	55.000.000,00	53.945.000,00	98,08
27	Kecamatan Manggis	62.500.000,00	41.873.650,00	67,00
28	Kecamatan Rendang	49.512.600,00	43.717.500,00	88,30
29	Kecamatan Selat	43.524.725,00	41.228.200,00	94,72
30	Kecamatan Sidemen	55.000.000,00	42.152.500,00	76,64
31	Satuan Polisi Pamong Praja	253.887.990,00	238.733.500,00	94,03
32	Sekretaris Daerah	1.822.446.983,00	1.295.195.252,00	71,07
33	Sekretariat DPRD	786.734.016,00	658.538.538,50	83,71
IV	Belana Perjalanan Dinas	29.606.222.323,00	24.179.917.902,00	81,67
1	BKPSDM	303.449.840,00	244.196.240,00	80,47
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	746.322.494,00	482.693.302,00	64,68
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111.275.000,00	94.212.456,00	84,67
4	BPKAD	416.016.996,00	364.093.882,00	87,52
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	360.340.000,00	338.276.513,00	93,88
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	73.217.100,00	55.966.036,00	76,44
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	143.151.500,00	105.774.773,00	73,89
8	Dinas Kesehatan	1.481.328.287,00	711.575.239,00	76,77
9	Dinas Ketenagakerjaan	139.900.000,00	79.252.112,00	56,65
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	463.845.927,00	419.763.854,00	90,50
11	Dinas PUPR, Perkim	295.000.000,00	287.599.519,00	97,49
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.314.494,00	5.039.500,00	20,73
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	111.078.700,00	110.568.914,00	99,54
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.328.991,00	296.666.144,00	79,04
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	888.887.200,00	481.653.971,00	54,19
16	Dinas Perhubungan	56.795.000,00	27.355.345,00	48,17
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.082.789,00	48.689.620,00	99,20
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	310.987.890,00	222.579.802,00	71,57
19	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	328.803.750,00	268.979.884,00	81,81
20	Inspektorat	195.757.900,00	179.667.162,00	91,78
21	Kecamatan Abang	30.000.000,00	23.701.700,00	79,01
22	Kecamatan Karangasem	96.875.000,00	91.674.100,00	94,63
23	Kecamatan Kubu	30.000.000,00	24.180.400,00	80,60
24	Kecamatan Bebandem	30.000.000,00	20.781.300,00	69,27
25	Kecamatan Rendang	30.000.000,00	21.606.300,00	72,02
26	Kecamatan Manggis	30.000.000,00	19.370.100,00	64,57
27	Kecamatan Selat	30.000.000,00	25.301.620,00	84,34
28	Kecamatan Sidemen	30.000.000,00	24.616.001,00	82,05
29	Satuan Polisi Pamong Praja	141.342.450,00	77.652.400,00	54,94
30	Sekretaris Daerah	5.265.466.499,00	3.688.626.253,00	72,73
31	Sekretariat DPRD	16.871.144.516,00	15.227.090.560,00	90,26

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
32	Dinas Lingkungan Hidup	79.000.000,00	49.831.040,00	63,08
33	Dinas Kominfo	67.510.000,00	60.881.860,00	90,18
V	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.033.133.154,00	21.906.966.704,00	87,51
1	BKPSDM	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00
3	BPKAD			#DIV/0!
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	40.513.500,00	40.210.000,00	99,25
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.331.700.000,00	1.285.150.000,00	96,50
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.240.000.000,00	6.150.000.000,00	84,94
7	Dinas Kesehatan	3.795.948.000,00	3.088.645.000,00	81,37
8	Dinas Kominfo	2.058.400,00	2.000.000,00	97,16
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.200.000,00	21.000.000,00	94,59
10	Dinas PUPR, Perkim	4.989.296.600,00	4.586.810.500,00	91,93
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.000.000,00		0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.880.000,00	12.880.000,00	100,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.825.891.700,00	1.705.310.700,00	93,40
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
15	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	319.787.454,00	115.875.000,00	36,24
16	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	2.719.400.000,00	2.307.500.000,00	84,85
17	Kecamatan Abang	7.500.000,00	7.480.000,00	99,73
18	Kecamatan Bebandem	11.000.000,00	10.899.900,00	99,09
19	Kecamatan Karangasem	1.886.000.000,00	1.875.850.000,00	99,46
20	Kecamatan Manggis	5.000.000,00	4.930.000,00	98,60
21	Kecamatan Rendang	5.012.500,00	4.766.000,00	95,08
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.000.000,00		0,00
23	Sekretaris Daerah	515.395.000,00	456.256.404,00	88,53
24	Sekretariat DPRD	202.800.000,00	200.753.200,00	98,99
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
VI	Belanja Barang dan Jasa BOS	60.864.015.775,00	59.546.270.466,84	97,83
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	60.864.015.775,00	59.546.270.466,84	97,83
VII	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.125.215.000,00	62.237.651.757,00	105,26
1	Rumah Sakit Umum Daerah	59.125.215.000,00	62.237.651.757,00	105,26
Jumlah Seluruh Belanja Barang dan Jasa		552.006.366.721,00	499.841.936.183,78	90,55

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.390.840.000,00	100,00
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.840.000,00	1.390.840.000,00	100,00
II	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.027.366.293,00	14.632.829.126,25	97,37
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.985.200,00	140.985.200,00	100,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.617.275.500,00	3.616.000.000,00	99,96
3	Dinas PUPR, Perkim	1.350.000.000,00	1.096.195.730,00	81,20
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.746.411.593,00	8.613.958.233,00	98,49
5	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
6	Sekretaris Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
7	Kelurahan Karangasem	392.221.500,00	389.752.812,09	99,37
8	Kelurahan Padangkerta	327.000.000,00	324.447.167,16	99,22
9	Kelurahan Subagan	358.472.500,00	356.489.984,00	99,45
III	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.370.000.000,00	18.369.996.900,00	100,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00	249.996.900,00	100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.120.000.000,00	18.120.000.000,00	100,00
	Jumlah Seluruh Belanja Hibah	34.788.206.293,00	34.393.666.026,25	98,87

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	Anggaran						Realisasi					
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	BKPSDM		229.660.000,00						219.760.000,00		-	-	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		45.950.000,00						45.400.000,00				
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		355.106.900,00						330.167.016,00				
4	BPKAD		358.643.600,00	195.000.000,00					350.510.000,00	149.285.584,19			
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		118.453.750,00						111.750.000,00				
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		47.000.000,00						39.500.000,00				
7	Dinas Kesehatan		7.905.561.986,00	1.587.000.000,00	285.000.000,00	422.400.000,00			6.264.579.189,00	1.369.180.435,62	281.445.299,64	382.617.000,00	
8	Dinas Ketenagakerjaan		145.456.800,00	190.000.000,00					145.156.000,00				
9	Dinas Kominfo		580.000.000,00						541.958.800,00				
10	Dinas PUPR, Perkim	522.956.250,00	1.948.230.000,00	25.579.500.000,00	65.947.429.690,00				1.814.622.200,00	7.674.922.415,00	38.082.812.889,07		
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		125.058.200,00						118.400.000,00				
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		24.320.000,00						21.900.000,00				
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		207.410.000,00						161.360.000,00				
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		166.000.000,00			23.691.400,00			162.553.848,00			23.600.000,00	
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		28.860.692.921,00	27.254.197.380,00	617.886.900,00	799.147.800,00			27.121.028.161,00	26.645.446.919,02	614.031.650,00	802.933.750,00	
16	Dinas Perhubungan		95.803.732,00		4.175.250.000,00				80.088.630,00		1.946.493.002,00		
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					15.458.132,00							
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan		138.700.000,00	620.000.000,00					131.700.000,00	471.803.991,55			
19	Dinas Lingkungan Hidup		177.677.900,00	199.997.113,00					124.825.000,00	198.139.587,89			
20	Inspektorat		372.710.000,00						307.783.000,00				
21	Kecamatan Abang		52.700.000,00						46.150.000,00				
22	Kecamatan Karangasem		76.000.000,00						71.970.000,00				
23	Kecamatan Rendang		49.000.000,00						46.200.000,00				
24	Kelurahan Karangasem		28.076.000,00		187.500.000,00	15.000.000,00			27.926.000,00		180.804.300,00		15.000.000,00
25	Kelurahan Padangkerta		33.250.000,00		215.250.000,00				33.177.900,00		209.673.010,00		
26	Kelurahan Subagan				165.000.000,00						164.567.000,00		
27	Kecamatan Kubu		35.000.000,00						33.869.000,00				
28	Kecamatan Bebandem		100.907.800,00						97.250.000,00				
29	Kecamatan Selat		97.063.500,00						86.261.000,00				
30	Kecamatan Sidemen		14.000.000,00	180.000.000,00					11.700.000,00	179.500.043,12			
31	Kecamatan Manggis		59.000.000,00						51.900.000,00				
32	Satuan Polisi Pamong Praja		126.000.000,00						124.525.000,00				
33	Sekretaris Daerah		1.216.659.225,00	30.000.000,00		2.000.000,00			653.832.500,00			1.600.000,00	
34	Sekretariat DPRD		269.500.000,00						264.789.000,00				
	Jumlah	522.956.250,00	44.059.592.314,00	55.835.694.493,00	71.593.316.590,00	1.262.697.332,00	15.000.000,00		39.642.592.244,00	36.688.278.976,39	41.479.827.150,71	1.210.750.750,00	15.000.000,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Tanah	522.956.250,00	-	0,00
1	Dinas PUPR, PERKIM	522.956.250,00	0,00	0,00
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Tanah	522.956.250,00	-	0,00

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Alat Besar	1.281.619.200,00	1.062.279.000,00	82,89
1	Dinas Kesehatan	53.500.000,00	0,00	0,00
2	Sekretaris Daerah	129.234.400,00	49.000.000,00	37,92
3	Dinas PUPR, PERKIM	1.050.000.000,00	968.519.200,00	92,24
4	Dinas Sosial, PPPA, PPKB	17.500.000,00	17.000.000,00	97,14
5	Kecamatan Sidemen	5.000.000,00	3.750.000,00	75,00
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26.384.800,00	24.009.800,00	91,00
II	Belanja Modal Alat Angkutan	745.000.000,00	688.562.000,00	92,42
1	Inspektorat	45.000.000,00	37.062.000,00	82,36
2	Dinas PUPR, PERKIM	700.000.000,00	651.500.000,00	93,07
III	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.706.000,00	46.367.799,00	97,19
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.097.000,00	29.800.000,00	95,83
2	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	9.958.799,00	99,59
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.609.000,00	6.609.000,00	109,69
IV	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.005.805.836,00	18.071.935.966,00	95,09
1	BPKAD	45.536.800,00	42.400.000,00	93,11
2	Dinas Kesehatan	2.030.738.900,00	1.715.392.213,00	84,47
3	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	23.500.000,00	23.350.000,00	99,36
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.000.000,00	20.300.000,00	84,58
5	Dinas PUPR, PERKIM	26.880.000,00	25.178.000,00	93,67
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125.058.200,00	118.400.000,00	94,68
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	91.453.750,00	87.450.000,00	95,62
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.000.000,00	37.703.848,00	91,96
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.208.565.486,00	14.806.556.989,00	97,36
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.209.900,00	117.767.016,00	91,14
11	Inspektorat	177.710.000,00	176.386.000,00	99,25
12	Kecamatan Karangasem	31.000.000,00	29.400.000,00	94,84
13	Kelurahan Padangkerta	33.250.000,00	33.177.900,00	99,78
14	Kelurahan Karangasem	4.076.000,00	4.076.000,00	100,00
15	Kecamatan Kubu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
16	Kecamatan Bebandem	11.877.800,00	9.700.000,00	81,66
17	Kecamatan Selat	10.000.000,00	9.795.000,00	97,95
18	Kecamatan Rendang	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00
19	Sekretaris Daerah	368.800.000,00	207.069.000,00	56,15
20	Sekretariat DPRD	264.500.000,00	259.989.000,00	98,29
21	Satuan Polisi Pamong Praja	48.000.000,00	47.425.000,00	98,80
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.000.000,00	38.550.000,00	98,85
23	Dinas Ketenagakerjaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
24	Dinas Lingkungan Hidup	26.000.000,00	22.600.000,00	86,92
25	Dinas Perhubungan	5.539.000,00	2.650.000,00	47,84
26	BKPSDM	159.060.000,00	156.370.000,00	98,31
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.050.000,00	29.500.000,00	98,17
V	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.117.845.299,00	1.576.389.524,00	74,43
1	BPKAD	5.802.400,00	5.650.000,00	97,37
2	BKPSDM	35.000.000,00	34.700.000,00	99,14
3	Dinas Kesehatan	121.280.689,00	118.005.000,00	97,30
4	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	31.200.000,00	30.550.000,00	97,92
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.258.162.210,00	930.776.224,00	73,98
6	Kecamatan Abang	3.000.000,00	0,00	0,00
7	Sekretaris Daerah	193.500.000,00	14.850.000,00	7,67
8	Dinas PUPR, PERKIM	15.000.000,00	14.650.000,00	97,67
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.000.000,00	66.000.000,00	97,06
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	261.900.000,00	236.358.300,00	90,25

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.000.000,00	124.850.000,00	99,88
VI	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.232.772.596,00	1.464.734.881,00	65,60
1	Dinas Kesehatan	2.050.862.596,00	1.328.324.881,00	64,77
2	Dinas Sosial, PPPA, PPKB	181.910.000,00	136.410.000,00	74,99
VII	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.227.938.437,00	4.438.004.225,00	84,89
1	Dinas Kesehatan	342.000.000,00	285.525.688,00	83,49
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.500.000,00	23.900.000,00	97,55
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.861.438.437,00	4.128.578.537,00	84,93
VIII	Belanja Modal Komputer	13.105.437.946,00	12.032.801.849,00	91,82
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.000.000,00	75.300.000,00	88,59
3	BPKAD	307.304.400,00	302.460.000,00	98,42
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.000.000,00	19.200.000,00	83,48
5	Dinas Kesehatan	3.297.179.801,00	2.807.372.608,00	85,14
6	Dinas Ketenagakerjaan	139.456.800,00	139.156.000,00	99,78
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	254.600.000,00	243.150.500,00	95,50
8	Dinas PUPR, PERKIM	156.350.000,00	154.775.000,00	98,99
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.320.000,00	21.900.000,00	90,05
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.000.000,00	24.300.000,00	90,00
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.258.365.988,00	7.012.930.611,00	96,62
12	Dinas Perhubungan	90.264.732,00	77.438.630,00	85,79
13	BKPSDM	35.600.000,00	28.690.000,00	80,59
14	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	84.000.000,00	77.800.000,00	92,62
15	Dinas Sosial, PPPA, PPKB	8.000.000,00	7.950.000,00	99,38
16	Inspektorat	150.000.000,00	94.335.000,00	62,89
17	Kecamatan Karangasem	45.000.000,00	42.570.000,00	94,60
18	Kelurahan Karangasem	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38
19	Kecamatan Kubu	15.000.000,00	13.869.000,00	92,46
20	Kecamatan Selat	87.063.500,00	76.466.000,00	87,83
21	Kecamatan Sidemen	9.000.000,00	7.950.000,00	88,33
22	Kecamatan Rendang	24.000.000,00	21.450.000,00	89,38
23	Kecamatan Abang	49.700.000,00	46.150.000,00	92,86
24	Kecamatan Bebandem	89.030.000,00	87.550.000,00	98,34
25	Kecamatan Manggis	59.000.000,00	51.900.000,00	87,97
26	Satuan Polisi Pamong Praja	78.000.000,00	77.100.000,00	98,85
27	Sekretaris Daerah	512.624.825,00	374.263.500,00	73,01
28	Sekretariat DPRD	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	151.677.900,00	102.225.000,00	67,40
IX	Belanja Modal Alat Keselelamatan Kerja	41.800.000,00	41.300.000,00	98,80
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.800.000,00	31.800.000,00	76,08
X	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	12.500.000,00	8.650.000,00	69,20
1	Sekretaris Daerah	12.500.000,00	8.650.000,00	69,20
XI	Belanja Modal Alat Peraga	15.000.000,00	0,00	0,00
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00
XII	Belanja Modal Peralatan Olahraga	226.167.000,00	211.567.000,00	93,54
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	226.167.000,00	211.567.000,00	93,54
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.065.574.493,00	29.229.963.509,27	60,81
1	BPKAD	195.000.000,00	149.285.584,19	76,56
2	Dinas Kesehatan	1.501.400.000,00	1.369.180.435,62	91,19
3	Dinas PUPR, PERKIM	25.579.500.000,00	7.674.922.415,00	30,00
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.939.677.380,00	19.366.631.495,02	97,13
5	Dinas Lingkungan Hidup	199.997.113,00	198.139.587,89	99,07
6	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	620.000.000,00	471.803.991,55	76,10
7	Sekretariat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
II	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.770.120.000,00	7.458.315.467,12	95,99
1	Dinas Kesehatan	85.600.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.314.520.000,00	7.278.815.424,00	99,51
3	Kecamatan Sidemen	180.000.000,00	179.500.043,12	99,72
4	Dinas Ketenagakerjaan	190.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.973.258.840,00	33.776.206.839,07	58,26
1	Dinas PUPR, PERKIM	57.973.258.840,00	33.776.206.839,07	58,26
II	Belanja Modal Bangunan Air	7.384.170.850,00	3.718.196.400,00	50,35
1	Dinas PUPR, PERKIM	7.384.170.850,00	3.718.196.400,00	50,35
III	Belanja Modal Instalasi	1.242.886.900,00	1.235.108.600,00	99,37
1	Dinas Kesehatan	35.000.000,00	32.667.300,00	93,34
2	Dinas PUPR, PERKIM	590.000.000,00	588.409.650,00	99,73
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	617.886.900,00	614.031.650,00	99,38
IV	Belanja Modal Jaringan	4.993.000.000,00	2.750.315.311,64	55,08
1	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	248.777.999,64	99,51
2	Dinas Perhubungan	4.175.250.000,00	1.946.493.002,00	46,62
3	Kelurahan Karangasem	187.500.000,00	180.804.300,00	96,43
4	Kelurahan Padangkerta	215.250.000,00	209.673.010,00	97,41
5	Kelurahan Subagan	165.000.000,00	164.567.000,00	99,74
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	664.405.932,00	667.005.700,00	102,78
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	648.947.800,00	667.005.700,00	102,78
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.458.132,00	0,00	0,00
II	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.000.000,00	4.600.000,00	230,00
1	Sekretaris Daerah	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.000.000,00	0,00
III	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	596.291.400,00	539.145.050,00	90,42
1	Dinas Kesehatan	422.400.000,00	382.617.000,00	90,58
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.691.400,00	23.600.000,00	99,61
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	150.200.000,00	132.928.050,00	88,50
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.262.697.332,00	1.210.750.750,00	95,89

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2023**

Dalam Rupiah

No	SKPD	TA.2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1	Kelurahan Karangasem	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

No	Kecamatan / Desa	Pagu				Transfer dari RKUD ke Rekening Desa								
		Induk	Perubahan	Kurang Salur 2022	Jumlah	Tahap I	Tahap II	Tahap III (75%)	Tahap IV (90%)	Kurang Salur 2022	Total Penyaluran		Sisa	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9		10	11 = 7+ 8 +9+10	12 = 11 / 6 x 100	13	14 = 13 / 6 x 100
49	KESIMPAR	19.117.500,00	16.122.700,00	1.122.480,00	17.245.180,00	4.779.375,00	4.779.375,00	2.533.275,00	3.224.540,00	1.122.480,00	16.439.045,00	95,33		
50	TRIBUANA	22.429.500,00	18.915.800,00	1.317.940,00	20.233.740,00	5.607.375,00	5.607.375,00	2.972.100,00	3.783.160,00	1.317.940,00	19.287.950,00	95,33		
Kecamatan Bebandem														
51	BUNGAYA	23.420.100,00	19.751.200,00	1.374.610,00	21.125.810,00	5.855.025,00	5.855.025,00	3.103.350,00	3.950.240,00	1.374.610,00	20.138.250,00	95,33		
52	BUDAKELING	20.608.100,00	17.379.800,00	1.209.890,00	18.589.690,00	5.152.025,00	5.152.025,00	2.730.800,00	3.475.960,00	1.209.890,00	17.720.700,00	95,33		
53	BEBANDEM	30.878.700,00	26.041.500,00	1.820.650,00	27.862.150,00	7.719.675,00	7.719.675,00	4.091.775,00	5.208.300,00	1.820.650,00	26.560.075,00	95,33		
54	SIBETAN	27.334.300,00	23.052.300,00	1.610.150,00	24.662.450,00	6.833.575,00	6.833.575,00	3.622.075,00	4.610.460,00	1.610.150,00	23.509.835,00	95,33		
55	JUNGUTAN	29.576.900,00	24.943.500,00	1.735.820,00	26.679.320,00	7.394.225,00	7.394.225,00	3.919.175,00	4.988.700,00	1.735.820,00	25.432.145,00	95,33		
56	BUNGAYA KANGIN	22.783.100,00	19.214.000,00	1.336.260,00	20.550.260,00	5.695.775,00	5.695.775,00	3.018.950,00	3.842.800,00	1.336.260,00	19.589.560,00	95,33		
57	BUANA GIRI	30.493.900,00	25.721.200,00	1.790.810,00	27.512.010,00	7.624.725,00	7.624.725,00	4.041.450,00	5.144.240,00	1.790.810,00	26.225.950,00	95,33		
58	MACANG	17.851.300,00	15.054.800,00	1.047.830,00	16.102.630,00	4.462.825,00	4.462.825,00	2.365.450,00	3.010.960,00	1.047.830,00	15.349.890,00	95,33		
Kecamatan Selat														
59	MUNCAN	26.123.000,00	22.030.700,00	1.536.400,00	23.567.100,00	6.530.750,00	6.530.750,00	3.461.525,00	4.406.140,00	1.536.400,00	22.465.565,00	95,33		
60	SELAT	19.328.900,00	16.301.000,00	1.135.510,00	17.436.510,00	4.832.225,00	4.832.225,00	2.561.300,00	3.260.200,00	1.135.510,00	16.621.460,00	95,33		
61	DUDA	22.784.300,00	19.215.000,00	1.335.570,00	20.550.570,00	5.696.075,00	5.696.075,00	3.019.100,00	3.843.000,00	1.335.570,00	19.589.820,00	95,32		
62	SEBUDI	32.072.900,00	27.048.600,00	1.882.090,00	28.930.690,00	8.018.225,00	8.018.225,00	4.250.000,00	5.409.720,00	1.882.090,00	27.578.260,00	95,33		
63	DUDA UTARA	23.479.700,00	19.801.600,00	1.379.090,00	21.180.690,00	5.869.925,00	5.869.925,00	3.111.350,00	3.960.320,00	1.379.090,00	20.190.610,00	95,33		
64	DUDA TIMUR	25.019.600,00	21.100.200,00	1.470.860,00	22.571.060,00	6.254.900,00	6.254.900,00	3.315.350,00	4.220.040,00	1.470.860,00	21.516.050,00	95,33		
65	PERINGSARI	23.829.300,00	20.096.300,00	1.397.970,00	21.494.270,00	5.957.325,00	5.957.325,00	3.157.575,00	4.019.260,00	1.397.970,00	20.489.455,00	95,33		
66	AMERTA BHUANA	20.571.300,00	17.348.800,00	1.205.680,00	18.554.480,00	5.142.825,00	5.142.825,00	2.725.950,00	3.469.760,00	1.205.680,00	17.687.040,00	95,32		
Kecamatan Kubu														
67	BAN	53.597.100,00	45.200.900,00	3.133.090,00	48.333.990,00	13.399.275,00	13.399.275,00	7.102.125,00	9.040.180,00	3.133.090,00	46.073.945,00	95,32		
68	DUKUH	28.235.900,00	23.812.600,00	1.654.010,00	25.466.610,00	7.058.975,00	7.058.975,00	3.741.500,00	4.762.520,00	1.654.010,00	24.275.980,00	95,32		
69	KUBU	23.909.500,00	20.164.000,00	1.404.090,00	21.568.090,00	5.977.375,00	5.977.375,00	3.168.250,00	4.032.800,00	1.404.090,00	20.559.890,00	95,33		
70	TIANYAR	35.427.500,00	29.877.700,00	2.084.160,00	31.961.860,00	8.856.875,00	8.856.875,00	4.694.525,00	5.975.540,00	2.084.160,00	30.467.975,00	95,33		
71	TIANYAR BARAT	35.232.600,00	29.713.300,00	2.066.200,00	31.779.500,00	8.808.150,00	8.808.150,00	4.668.675,00	5.942.660,00	2.066.200,00	30.293.835,00	95,33		
72	TIANYAR TENGAH	30.257.800,00	25.517.800,00	1.767.350,00	27.285.150,00	7.564.450,00	7.564.450,00	4.009.450,00	5.103.560,00	1.767.350,00	26.009.260,00	95,32		
73	TULAMBEN	35.994.200,00	30.355.500,00	2.113.720,00	32.469.220,00	8.998.550,00	8.998.550,00	4.769.525,00	6.071.100,00	2.113.720,00	30.951.445,00	95,33		
74	BATURINGGIT	26.947.700,00	22.726.300,00	1.580.930,00	24.307.230,00	6.736.925,00	6.736.925,00	3.570.875,00	4.545.260,00	1.580.930,00	23.170.915,00	95,33		
75	SUKADANA	30.914.300,00	26.071.500,00	1.815.500,00	27.887.000,00	7.728.575,00	7.728.575,00	4.096.475,00	5.214.300,00	1.815.500,00	26.583.425,00	95,33		
Jumlah		1.870.862.694,00	1.577.789.486,00	109.824.743,00	1.687.614.229,00	467.716.923,50	467.716.923,50	247.908.267,50	315.557.897,20	109.824.743,00	1.608.724.754,70	95,33	-	-

No	Kecamatan / Desa	Pagu				Transfer dari RKUD ke Rekening Desa									
		Induk	Perubahan	Kurang Salur 2022	Jumlah	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	penyesuaian tambahan pajak 2023	Kurang Salur 2022	Total Penyaluran		Sisa	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10		11	12 = 7+ 8 +9+10+11	13 = 12 / 6 x 100	14	12 = 11 / 5 x 100
57	BUANA GIRI	301.636.200,00	409.452.600,00	55.198.500,00	464.651.100,00	75.409.050,00	75.409.050,00	75.409.050,00	75.409.050,00	107.816.400,00	55.198.500,00	464.651.100,00	100,00	-	-
58	MACANG	176.550.600,00	239.656.500,00	32.300.400,00	271.956.900,00	44.137.650,00	44.137.650,00	44.137.650,00	44.137.650,00	63.105.900,00	32.300.400,00	271.956.900,00	100,00	-	-
Kecamatan Selat															
59	MUNCAN	258.358.200,00	350.705.300,00	47.355.400,00	398.060.700,00	64.589.550,00	64.589.550,00	64.589.550,00	64.589.550,00	92.347.100,00	47.355.400,00	398.060.700,00	100,00	-	-
60	SELAT	191.164.800,00	259.494.400,00	35.001.100,00	294.495.500,00	47.791.200,00	47.791.200,00	47.791.200,00	47.791.200,00	68.329.600,00	35.001.100,00	294.495.500,00	100,00	-	-
61	DUDA	225.338.200,00	305.882.800,00	41.167.300,00	347.050.100,00	56.334.550,00	56.334.550,00	56.334.550,00	56.334.550,00	80.544.600,00	41.167.300,00	347.050.100,00	100,00	-	-
62	SEBUDI	317.203.000,00	430.583.600,00	58.013.900,00	488.597.500,00	79.300.750,00	79.300.750,00	79.300.750,00	79.300.750,00	113.380.600,00	58.013.900,00	488.597.500,00	100,00	-	-
63	DUDA UTARA	232.216.300,00	315.219.300,00	42.508.200,00	357.727.500,00	58.054.075,00	58.054.075,00	58.054.075,00	58.054.075,00	83.003.000,00	42.508.200,00	357.727.500,00	100,00	-	-
64	DUDA TIMUR	247.445.300,00	335.891.800,00	45.338.500,00	381.230.300,00	61.861.325,00	61.861.325,00	61.861.325,00	61.861.325,00	88.446.500,00	45.338.500,00	381.230.300,00	100,00	-	-
65	PERINGSARI	235.673.100,00	319.911.700,00	43.090.400,00	363.002.100,00	58.918.275,00	58.918.275,00	58.918.275,00	58.918.275,00	84.238.600,00	43.090.400,00	363.002.100,00	100,00	-	-
66	AMERTA BHUANA	203.452.100,00	276.173.700,00	37.165.900,00	313.339.600,00	50.863.025,00	50.863.025,00	50.863.025,00	50.863.025,00	72.721.600,00	37.165.900,00	313.339.600,00	100,00	-	-
Kecamatan Kubu															
67	BAN	530.077.400,00	719.547.500,00	96.570.900,00	816.118.400,00	132.519.350,00	132.519.350,00	132.519.350,00	132.519.350,00	189.470.100,00	96.570.900,00	816.118.400,00	100,00	-	-
68	DUKUH	279.254.800,00	379.071.200,00	50.981.900,00	430.053.100,00	69.813.700,00	69.813.700,00	69.813.700,00	69.813.700,00	99.816.400,00	50.981.900,00	430.053.100,00	100,00	-	-
69	KUBU	236.466.800,00	320.989.100,00	43.278.700,00	364.267.800,00	59.116.700,00	59.116.700,00	59.116.700,00	59.116.700,00	84.522.300,00	43.278.700,00	364.267.800,00	100,00	-	-
70	TIANYAR	350.380.100,00	475.619.400,00	64.240.500,00	539.859.900,00	87.595.025,00	87.595.025,00	87.595.025,00	87.595.025,00	125.239.300,00	64.240.500,00	539.859.900,00	100,00	-	-
71	TIANYAR BARAT	348.452.100,00	473.002.200,00	63.688.800,00	536.691.000,00	87.113.025,00	87.113.025,00	87.113.025,00	87.113.025,00	124.550.100,00	63.688.800,00	536.691.000,00	100,00	-	-
72	TIANYAR TENGAH	299.251.400,00	406.215.300,00	54.476.700,00	460.692.000,00	74.812.850,00	74.812.850,00	74.812.850,00	74.812.850,00	106.963.900,00	54.476.700,00	460.692.000,00	100,00	-	-
73	TULAMBEN	355.983.800,00	483.226.100,00	65.149.900,00	548.376.000,00	88.995.950,00	88.995.950,00	88.995.950,00	88.995.950,00	127.242.300,00	65.149.900,00	548.376.000,00	100,00	-	-
74	BATURINGGIT	266.514.600,00	361.777.100,00	48.731.500,00	410.508.600,00	66.628.650,00	66.628.650,00	66.628.650,00	66.628.650,00	95.262.500,00	48.731.500,00	410.508.600,00	100,00	-	-
75	SUKADANA	305.744.400,00	415.029.300,00	55.958.500,00	470.987.800,00	76.436.100,00	76.436.100,00	76.436.100,00	76.436.100,00	109.284.900,00	55.958.500,00	470.987.800,00	100,00	-	-
Jumlah		18.502.966.260,00	25.116.635.259,00	3.385.207.192,00	28.501.842.451,00	4.625.741.565,00	4.625.741.565,00	4.625.741.565,00	4.625.741.565,00	6.613.668.999,00	3.385.207.192,00	28.501.842.451,00	100,00	-	-

No	Kecamatan / Desa	Pagu					Transfer dari RKUD ke Rekening Desa						
		BLT		Mandiri	MAJU	Jumlah	BLT	Mandiri	MAJU	Total Penyaluran		Sisa	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 / 6 x 100	12 = 10 - 5	13 = 12 / 6 x 100
55	Jungutan	190.800.000,00	MANDIRI	1.232.653.000,00	-	1.423.453.000,00	190.800.000,00	1.232.653.000,00	-	1.423.453.000,00	100,00	-	-
56	Bungaya Kangin	216.000.000,00	MANDIRI	649.695.000,00	-	865.695.000,00	216.000.000,00	649.695.000,00	-	865.695.000,00	100,00	-	-
57	Buana Giri	252.000.000,00	MAJU	-	972.359.000,00	1.224.359.000,00	252.000.000,00	-	972.359.000,00	1.224.359.000,00	100,00	-	-
58	Macang	136.800.000,00	MAJU	-	828.645.000,00	965.445.000,00	136.800.000,00	-	828.645.000,00	965.445.000,00	100,00	-	-
Kecamatan Selat													
59	Muncan	93.600.000,00	MANDIRI	954.786.000,00	-	1.048.386.000,00	93.600.000,00	954.786.000,00	-	1.048.386.000,00	100,00	-	-
60	Selat	162.000.000,00	MANDIRI	609.728.000,00	-	771.728.000,00	162.000.000,00	609.728.000,00	-	771.728.000,00	100,00	-	-
61	Duda	244.800.000,00	MANDIRI	897.132.000,00	-	1.141.932.000,00	244.800.000,00	897.132.000,00	-	1.141.932.000,00	100,00	-	-
62	Sebudi	108.000.000,00	MAJU	-	867.853.000,00	975.853.000,00	108.000.000,00	-	867.853.000,00	975.853.000,00	100,00	-	-
63	Duda Utara	226.800.000,00	MANDIRI	824.195.000,00	-	1.050.995.000,00	226.800.000,00	824.195.000,00	-	1.050.995.000,00	100,00	-	-
64	Duda Timur	273.600.000,00	MANDIRI	790.602.000,00	-	1.064.202.000,00	273.600.000,00	790.602.000,00	-	1.064.202.000,00	100,00	-	-
65	Pering Sari	205.200.000,00	MAJU	-	755.585.000,00	960.785.000,00	205.200.000,00	-	755.585.000,00	960.785.000,00	100,00	-	-
66	Amerta Bhuana	82.800.000,00	MAJU	-	852.337.000,00	935.137.000,00	82.800.000,00	-	852.337.000,00	935.137.000,00	100,00	-	-
Kecamatan Kubu													
67	Ban	270.000.000,00	MAJU	-	1.738.357.000,00	2.008.357.000,00	270.000.000,00	-	1.738.357.000,00	2.008.357.000,00	100,00	-	-
68	Dukuh	216.000.000,00	MAJU	-	863.950.000,00	1.079.950.000,00	216.000.000,00	-	863.950.000,00	1.079.950.000,00	100,00	-	-
69	Kubu	201.600.000,00	MANDIRI	608.315.000,00	-	809.915.000,00	201.600.000,00	608.315.000,00	-	809.915.000,00	100,00	-	-
70	Tianyar	280.800.000,00	MANDIRI	850.633.000,00	-	1.131.433.000,00	280.800.000,00	850.633.000,00	-	1.131.433.000,00	100,00	-	-
71	Tianyar Barat	129.600.000,00	MANDIRI	1.102.224.000,00	-	1.231.824.000,00	129.600.000,00	1.102.224.000,00	-	1.231.824.000,00	100,00	-	-
72	Tianyar Tengah	342.000.000,00	MAJU	-	1.133.431.000,00	1.475.431.000,00	342.000.000,00	-	1.133.431.000,00	1.475.431.000,00	100,00	-	-
73	Tulamben	270.000.000,00	MANDIRI	1.246.209.000,00	-	1.516.209.000,00	270.000.000,00	1.246.209.000,00	-	1.516.209.000,00	100,00	-	-
74	Baturinggit	93.600.000,00	MANDIRI	813.367.000,00	-	906.967.000,00	93.600.000,00	813.367.000,00	-	906.967.000,00	100,00	-	-
75	Sukadana	100.800.000,00	MANDIRI	893.879.000,00	-	994.679.000,00	100.800.000,00	893.879.000,00	-	994.679.000,00	100,00	-	-
Jumlah													
		13.752.000.000,00		32.223.428.000,00	33.408.316.000,00	79.383.744.000,00	13.752.000.000,00	32.223.428.000,00	33.408.316.000,00	79.383.744.000,00	100,00	-	-

No	Kecamatan / Desa	Siltap	Pagu Desa	Total Pagu	SILTAP(12BLN)	Transfer dari RKUD ke Rekening Desa						
						Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Total Penyaluran		Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10	12 = 11 / 6 x 100	13
47	Seraya	669.178.800,00	942.624.300,00	1.611.803.100,00	669.178.800,00	235.656.075,00	235.656.075,00	235.656.075,00	235.656.075,00	1.611.803.100,00	100,00	-
48	Seraya Barat	496.436.400,00	762.560.700,00	1.258.997.100,00	496.436.400,00	190.640.175,00	190.640.175,00	190.640.175,00	190.640.175,00	1.258.997.100,00	100,00	-
49	Seraya Timur	496.436.400,00	831.474.300,00	1.327.910.700,00	496.436.400,00	207.868.575,00	207.868.575,00	207.868.575,00	207.868.575,00	1.327.910.700,00	100,00	-
50	Pertima	611.598.000,00	758.844.000,00	1.370.442.000,00	611.598.000,00	189.711.000,00	189.711.000,00	189.711.000,00	189.711.000,00	1.370.442.000,00	100,00	-
51	Tegalingsah	381.274.800,00	635.649.600,00	1.016.924.400,00	381.274.800,00	158.912.400,00	158.912.400,00	158.912.400,00	158.912.400,00	1.016.924.400,00	100,00	-
52	Bukit	611.598.000,00	696.634.300,00	1.308.232.300,00	611.598.000,00	174.158.575,00	174.158.575,00	174.158.575,00	174.158.575,00	1.308.232.300,00	100,00	-
KECAMATAN ABANG												
53	Ababi	582.807.600,00	890.416.600,00	1.473.224.200,00	582.807.600,00	222.604.150,00	222.604.150,00	222.604.150,00	222.604.150,00	1.473.224.200,00	100,00	-
54	Tiyang Tali	467.646.000,00	664.225.000,00	1.131.871.000,00	467.646.000,00	166.056.250,00	166.056.250,00	166.056.250,00	166.056.250,00	1.131.871.000,00	100,00	-
55	Bunutan	525.226.800,00	1.180.444.300,00	1.705.671.100,00	525.226.800,00	295.111.075,00	295.111.075,00	295.111.075,00	295.111.075,00	1.705.671.100,00	100,00	-
56	Tista	410.065.200,00	817.383.100,00	1.227.448.300,00	410.065.200,00	204.345.775,00	204.345.775,00	204.345.775,00	204.345.775,00	1.227.448.300,00	100,00	-
57	Abang	410.065.200,00	661.099.800,00	1.071.165.000,00	410.065.200,00	165.274.950,00	165.274.950,00	165.274.950,00	165.274.950,00	1.071.165.000,00	100,00	-
58	Pidpid	410.065.200,00	686.585.600,00	1.096.650.800,00	410.065.200,00	171.646.400,00	171.646.400,00	171.646.400,00	171.646.400,00	1.096.650.800,00	100,00	-
59	Datah	640.388.400,00	1.256.270.800,00	1.896.659.200,00	640.388.400,00	314.067.700,00	314.067.700,00	314.067.700,00	314.067.700,00	1.896.659.200,00	100,00	-
60	Culik	381.274.800,00	645.091.100,00	1.026.365.900,00	381.274.800,00	161.272.775,00	161.272.775,00	161.272.775,00	161.272.775,00	1.026.365.900,00	100,00	-
61	Purwakerti	381.274.800,00	712.461.800,00	1.093.736.600,00	381.274.800,00	178.115.450,00	178.115.450,00	178.115.450,00	178.115.450,00	1.093.736.600,00	100,00	-
62	Kerta Mandala	352.484.400,00	704.901.700,00	1.057.386.100,00	352.484.400,00	176.225.425,00	176.225.425,00	176.225.425,00	176.225.425,00	1.057.386.100,00	100,00	-
63	Labasari	410.065.200,00	638.000.400,00	1.048.065.600,00	410.065.200,00	159.500.100,00	159.500.100,00	159.500.100,00	159.500.100,00	1.048.065.600,00	100,00	-
64	Nawa Kerti	352.484.400,00	674.961.700,00	1.027.446.100,00	352.484.400,00	168.740.425,00	168.740.425,00	168.740.425,00	168.740.425,00	1.027.446.100,00	100,00	-
65	Kesimpar	381.274.800,00	599.664.800,00	980.939.600,00	381.274.800,00	149.916.200,00	149.916.200,00	149.916.200,00	149.916.200,00	980.939.600,00	100,00	-
66	Tribuana	381.274.800,00	703.550.400,00	1.084.825.200,00	381.274.800,00	175.887.600,00	175.887.600,00	175.887.600,00	175.887.600,00	1.084.825.200,00	100,00	-
KECAMATAN KUBU												
67	Ban	669.178.800,00	1.681.187.600,00	2.350.366.400,00	669.178.800,00	420.296.900,00	420.296.900,00	420.296.900,00	420.296.900,00	2.350.366.400,00	100,00	-
68	Dukuh	410.065.200,00	885.681.400,00	1.295.746.600,00	410.065.200,00	221.420.350,00	221.420.350,00	221.420.350,00	221.420.350,00	1.295.746.600,00	100,00	-
69	Kubu	410.065.200,00	749.975.600,00	1.160.040.800,00	410.065.200,00	187.493.900,00	187.493.900,00	187.493.900,00	187.493.900,00	1.160.040.800,00	100,00	-
70	Tianyar	352.484.400,00	1.111.261.700,00	1.463.746.100,00	352.484.400,00	277.815.425,00	277.815.425,00	277.815.425,00	277.815.425,00	1.463.746.100,00	100,00	-
71	Tianyar Barat	640.388.400,00	1.105.146.700,00	1.745.535.100,00	640.388.400,00	276.286.675,00	276.286.675,00	276.286.675,00	276.286.675,00	1.745.535.100,00	100,00	-
72	Tianyar Tengah	582.807.600,00	949.102.400,00	1.531.910.000,00	582.807.600,00	237.275.600,00	237.275.600,00	237.275.600,00	237.275.600,00	1.531.910.000,00	100,00	-
73	Tulamben	410.065.200,00	1.129.034.300,00	1.539.099.500,00	410.065.200,00	282.258.575,00	282.258.575,00	282.258.575,00	282.258.575,00	1.539.099.500,00	100,00	-
74	Baturinggit	323.694.000,00	845.274.700,00	1.168.968.700,00	323.694.000,00	211.318.675,00	211.318.675,00	211.318.675,00	211.318.675,00	1.168.968.700,00	100,00	-
75	Sukadana	467.646.000,00	969.695.700,00	1.437.341.700,00	467.646.000,00	242.423.925,00	242.423.925,00	242.423.925,00	242.423.925,00	1.437.341.700,00	100,00	-
Jumlah												
		33.749.091.600,00	58.683.798.400,00	92.432.890.000,00	33.749.091.600,00	14.670.949.600,00	14.670.949.600,00	14.670.949.600,00	14.670.949.600,00	92.432.890.000,00	100,00	-

Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Karangasem TA 2023

Dalam Rupiah

No	Kecamatan / Desa	Total Pagu	Transfer dari RKUD ke Rekening Desa		
			Tahap I	Sisa	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3 x 100%
	Kecamatan Rendang				
1	Desa Pempatan	994.000.000,00	994.000.000,00	-	0,00
2	Desa Besakih	701.000.000,00	701.000.000,00		0,00
3	Desa Menanga	740.000.000,00	740.000.000,00		0,00
4	Desa Rendang	541.000.000,00	541.000.000,00		0,00
5	Desa Nongan	638.000.000,00	638.000.000,00		0,00
6	Desa Pesaban	208.000.000,00	208.000.000,00		0,00
	Kecamatan Selat				
7	Desa Muncan	451.000.000,00	451.000.000,00		0,00
8	Desa Peringsari	480.000.000,00	480.000.000,00		0,00
9	Desa Sebudi	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00		0,00
10	Desa Amerta Bhuana	389.000.000,00	389.000.000,00		0,00
11	Desa Selat	373.000.000,00	373.000.000,00		0,00
12	Desa Duda	477.000.000,00	477.000.000,00		0,00
13	Desa Duda Utara	534.000.000,00	534.000.000,00		0,00
14	Desa Duda Timur	592.000.000,00	592.000.000,00		0,00
	Kecamatan Sidemen				
15	Desa Sinduwati	235.000.000,00	235.000.000,00		0,00
16	Desa Sidemen	225.000.000,00	225.000.000,00		0,00
17	Desa Telaga Tawang	269.000.000,00	269.000.000,00		0,00
18	Desa Tri Eka Buana	225.000.000,00	225.000.000,00		0,00
19	Desa Talibeng	444.000.000,00	444.000.000,00		0,00
20	Desa Lokasari	393.000.000,00	393.000.000,00		0,00
21	Desa Kerta Buana	205.000.000,00	205.000.000,00		0,00
22	Desa Wisma Kerta	315.000.000,00	315.000.000,00		0,00
23	Desa Tangkup	476.000.000,00	476.000.000,00		0,00
24	Desa Sangkan Gunung	623.000.000,00	623.000.000,00		0,00
	Kecamatan Bebandem				
25	Desa Sibetan	380.000.000,00	380.000.000,00		0,00
26	Desa Jungutan	360.000.000,00	360.000.000,00		0,00
27	Desa Macang	134.000.000,00	134.000.000,00		0,00
28	Desa Bebandem	768.000.000,00	768.000.000,00		0,00
29	Desa Bhuana Giri	706.000.000,00	706.000.000,00		0,00
30	Desa Budakeling	383.000.000,00	383.000.000,00		0,00
31	Desa Bungaya	350.000.000,00	350.000.000,00		0,00
32	Desa Bungaya Kangin	145.000.000,00	145.000.000,00		0,00
	Kecamatan Manggis				
33	Desa Gegelang	413.000.000,00	413.000.000,00		0,00
34	Desa Antiga	292.000.000,00	292.000.000,00		0,00
35	Desa Antiga Kelod	148.000.000,00	148.000.000,00		0,00
36	Desa Padangbai	151.000.000,00	151.000.000,00		0,00
37	Desa Ulakan	524.000.000,00	524.000.000,00		0,00
38	Desa Manggis	951.000.000,00	951.000.000,00		0,00
39	Desa Selumbung	302.000.000,00	302.000.000,00		0,00
40	Desa Ngis	221.000.000,00	221.000.000,00		0,00
41	Desa Nyuhtebel	151.000.000,00	151.000.000,00		0,00
42	Desa Tenganan	476.000.000,00	476.000.000,00		0,00
43	Desa Sengkidu	151.000.000,00	151.000.000,00		0,00
44	Desa Pesedahan	114.000.000,00	114.000.000,00		0,00
	Kecamatan Karangasem				
45	Desa Bugbug	444.000.000,00	444.000.000,00		0,00
46	Desa Pertima	709.000.000,00	709.000.000,00		0,00
47	Desa Tegallinggah	128.000.000,00	128.000.000,00		0,00
48	Desa Bukit	613.000.000,00	613.000.000,00		0,00
49	Desa Tumbu	215.000.000,00	215.000.000,00		0,00
50	Desa Seraya Barat	340.000.000,00	340.000.000,00		0,00
51	Desa Seraya	605.000.000,00	605.000.000,00		0,00
52	Desa Seraya Timur	313.000.000,00	313.000.000,00		0,00
	Kecamatan Abang				
53	Desa Ababi	461.000.000,00	461.000.000,00		0,00
54	Desa Tiyingtali	526.000.000,00	526.000.000,00		0,00
55	Desa Abang	252.000.000,00	252.000.000,00		0,00
56	Desa Pidpid	172.000.000,00	172.000.000,00		0,00
57	Desa Nawa Kerti	118.000.000,00	118.000.000,00		0,00
58	Desa Kesimpar	195.000.000,00	195.000.000,00		0,00

No	Kecamatan / Desa	Total Pagu	Transfer dari RKUD ke Rekening Desa		
			Tahap I	Sisa	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 3 x 100%
59	Desa Tista	242.000.000,00	242.000.000,00		0,00
60	Desa Tribuana	412.000.000,00	412.000.000,00		0,00
61	Desa Kertha Mandala	208.000.000,00	208.000.000,00		0,00
62	Desa Culik	195.000.000,00	195.000.000,00		0,00
63	Desa Labasari	211.000.000,00	211.000.000,00		0,00
64	Desa Datah	528.000.000,00	528.000.000,00		0,00
65	Desa Purwakerti	205.000.000,00	205.000.000,00		0,00
66	Desa Bunutan	464.000.000,00	464.000.000,00		0,00
	Kecamatan Kubu				
67	Desa Tulamben	534.000.000,00	534.000.000,00		0,00
68	Desa Dukuh	322.000.000,00	322.000.000,00		0,00
69	Desa Kubu	215.000.000,00	215.000.000,00		0,00
70	Desa Baturinggih	248.000.000,00	248.000.000,00		0,00
71	Desa Sukadana	720.000.000,00	720.000.000,00		0,00
72	Desa Ban	2.019.000.000,00	2.019.000.000,00		0,00
73	Desa Tianyar	461.000.000,00	461.000.000,00		0,00
74	Desa Tianyar Tengah	627.000.000,00	627.000.000,00		0,00
75	Desa Tianyar Barat	441.000.000,00	441.000.000,00		0,00
Jumlah		32.027.000.000,00	32.027.000.000,00	-	0,00



KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Total Kabupaten Karangasem	KECAMATAN							
		MANGGIS	SELAT	RENDANG	ABANG	KARANGASEM	BEBANDEM	KUBU	SIDEMEN
I. ASET DESA									
A. ASET LANCAR									
1. Kas Desa	35.014.039.164,48	5.693.011.088,71	3.466.351.689,64	2.472.404.067,00	5.819.745.944,35	3.421.165.990,27	3.712.855.829,49	5.398.918.720,33	5.029.585.834,69
a. Uang Kas di Bendahara Desa	318.523.104,70	1.245.262,98	-	-	3.806.307,01	97.587,86	229.020.002,87	42.653.892,38	41.700.051,60
b. Rekening Kas Desa	34.695.516.059,78	5.691.765.825,73	3.466.351.689,64	2.472.404.067,00	5.815.939.637,34	3.421.068.402,41	3.483.835.826,62	5.356.264.827,95	4.987.885.783,09
2. Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. piutang Panjer Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. piutang Pembangunan Pasar Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	35.014.039.164,48	5.693.011.088,71	3.466.351.689,64	2.472.404.067,00	5.819.745.944,35	3.421.165.990,27	3.712.855.829,49	5.398.918.720,33	5.029.585.834,69
B. ASET TIDAK LANCAR									
1. Investasi Permanen	1.735.000.000,00	475.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00	540.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	-	190.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	1.505.000.000,00	475.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00	310.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	-	190.000.000,00
2. Aset Tetap	65.111.741.479,48	15.340.439.134,61	8.805.795.027,26	4.835.454.523,64	8.215.263.578,48	4.840.849.740,00	4.310.478.660,00	12.814.188.625,38	5.949.272.190,11
- Tanah	306.200.000,00	-	-	-	-	261.200.000,00	-	45.000.000,00	-
- Peralatan dan Mesin	10.896.353.869,39	1.268.805.083,00	927.020.905,26	1.273.700.805,00	1.934.813.208,95	1.267.694.640,00	392.936.060,00	2.381.457.700,18	1.449.925.467,00
- Gedung dan Bangunan	10.602.300.828,94	2.376.321.835,00	1.716.469.100,00	1.481.581.620,00	1.252.273.972,00	411.803.505,00	881.455.100,00	754.484.540,00	1.727.911.156,94
- Jalan Jaringan dan Instalasi	33.955.363.218,90	5.631.512.793,00	6.010.619.822,00	1.828.290.950,00	4.552.906.397,53	1.773.031.595,00	2.657.144.000,00	8.833.217.025,20	2.668.640.636,17
- Aset Tetap Lainnya	4.430.038.940,00	1.260.604.350,00	151.685.200,00	190.259.600,00	463.227.000,00	1.127.120.000,00	378.943.500,00	800.029.360,00	58.169.930,00
- Kontruksi Dalam Pengerjaan	415.259.548,64	296.970.000,00	-	61.621.548,64	12.043.000,00	-	-	-	44.625.000,00
3. Dana Cadangan	1.339.660.000,00	-	-	-	1.050.000.000,00	-	289.660.000,00	-	-
- Dana Cadangan	1.339.660.000,00	-	-	-	1.050.000.000,00	-	289.660.000,00	-	-
4. Aset Tidak lancar Lainnya	136.623.500,00	52.152.500,00	-	-	71.871.000,00	12.600.000,00	-	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	70.260.572.599,48	15.867.591.634,61	8.840.795.027,26	4.950.454.523,64	9.877.134.578,48	5.083.449.740,00	6.687.686.280,00	12.814.188.625,38	6.139.272.190,11
JUMLAH ASET (A + B)	104.604.271.193,70	21.560.602.723,32	12.307.146.716,90	7.422.858.590,64	15.696.880.522,83	8.504.615.730,27	9.730.201.539,23	18.213.107.345,71	11.168.858.024,80
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	76.326.448,64	-	(2.440.633,08)	-	1.058.480,08	-	50.584.564,32	27.124.037,32	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	76.326.448,64	-	(2.440.633,08)	-	1.058.480,08	-	50.584.564,32	27.124.037,32	-
JUMLAH KEWAJIBAN	76.326.448,64	-	(2.440.633,08)	-	1.058.480,08	-	50.584.564,32	27.124.037,32	-
EKUITAS									
Ekuitas	62.044.570.178,45	10.403.102.951,01	8.840.795.027,26	4.899.238.362,16	9.719.880.901,09	4.336.198.014,04	4.855.638.660,00	12.814.188.625,38	6.175.527.637,51
Ekuitas SAL	36.652.448.331,52	6.502.289.698,70	3.468.792.322,72	2.472.404.067,00	4.845.941.141,66	4.168.417.716,23	4.829.478.314,91	5.371.794.683,01	4.993.330.387,29
JUMLAH EKUITAS	98.697.018.509,97	16.905.392.649,71	12.309.587.349,98	7.371.642.429,16	14.565.822.042,75	8.504.615.730,27	9.685.116.974,91	18.185.983.308,39	11.168.858.024,80
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	100.021.719.671,45	17.054.377.649,71	12.309.587.349,98	7.422.858.590,64	15.695.822.042,75	8.504.615.730,27	9.679.616.974,91	18.185.983.308,39	11.168.858.024,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	98.773.344.958,61	16.905.392.649,71	12.307.146.716,90	7.371.642.429,16	14.566.880.522,83	8.504.615.730,27	9.735.701.539,23	18.213.107.345,71	11.168.858.024,80

Kas BLUD Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	Puskesmas	Saldo BLUD Tahun 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo BLUD Tahun 2022 setelah Koreksi	Pendapatan BLUD TA 2023	Belanja BLUD TA 2023	Saldo BLUD Tahun 2023 (SILPA)			
							Saldo Tunai	Saldo Rekening	Utang PFK	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	RSUD	17.714.268.768,19		17.714.268.768,19	85.702.649.872,92	94.622.640.807,64	32.409.500,00	8.761.868.333,47		8.794.277.833,47
2	PUSKESMAS KARANGASEM I			-	3.040.252.892,58	2.346.080.891,00	78.000,00	694.094.001,58		694.172.001,58
3	PUSKESMAS KARANGASEM II			-	2.667.717.928,39	2.235.350.374,00	404.599,00	431.962.955,39		432.367.554,39
4	PUSKESMAS MANGGIS I			-	2.178.041.256,38	1.851.531.935,00	1.609.000,00	324.900.321,38		326.509.321,38
5	PUSKESMAS MANGGIS II			-	900.368.100,18	770.264.805,00	44.000,00	130.059.295,18		130.103.295,18
6	PUSKESMAS ABANG I			-	2.687.634.265,39	2.185.072.584,00	743.000,00	501.818.681,39		502.561.681,39
7	PUSKESMAS ABANG II			-	2.669.032.633,24	2.366.914.339,00	618.000,00	301.500.294,24		302.118.294,24
8	PUSKESMAS KUBU I			-	2.559.070.805,48	2.090.027.780,00	108.100,00	468.935.025,48		469.043.025,48
9	PUSKESMAS KUBU II			-	2.523.725.639,26	2.025.213.462,00	425.000,00	498.087.077,26		498.512.177,26
10	PUSKESMAS BEBANDEM			-	2.929.131.150,88	2.452.289.167,10	479.000,00	476.362.983,78		476.841.983,78
11	PUSKESMAS SELAT			-	3.081.966.555,45	2.663.952.474,00	288.000,00	417.726.081,45		418.014.081,45
12	PUSKESMAS RENDANG			-	2.986.333.432,60	2.731.471.650,00	1.739.500,00	253.122.284,60	(2,00)	254.861.782,60
13	PUSKESMAS SIDEMEN			-	2.271.792.316,86	1.963.365.580,00	112.000,00	308.314.736,86		308.426.736,86
	Jumlah	17.714.268.768,19	-	17.714.268.768,19	116.197.716.849,61	120.304.175.848,74	39.057.699,00	13.568.752.072,06	(2,00)	13.607.809.769,06

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	Puskesmas	Saldo JKN Tahun 2022	Transfer Saldo JKN 2022 ke Kasda karena sudah BLUD	Saldo JKN Tahun 2022 Setelah Transfer	Pendapatan JKN TA 2023	Belanja JKN TA 2023	Saldo JKN Tahun 2023 (SILPA)		
							Saldo Tunai	Saldo Rekening	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karangasem I	424.416.412,74	(424.416.412,74)	-			-		-
2	Karangasem II	110.738.609,42	(110.738.609,42)	-			-		-
3	Abang I	79.289.507,80	(79.289.507,80)	-			-		-
4	Abang II	200.775.818,87	(200.775.818,87)	-			-		-
5	Kubu I	91.955.221,00	(91.955.221,00)	-			-		-
6	Kubu II	130.987.600,48	(130.987.600,48)	-			-		-
7	Manggis I	32.201.796,08	(32.201.796,08)	-			-		-
8	Manggis II	55.546.226,66	(55.546.226,66)	-			-		-
9	Sidemen	13.978.263,11	(13.978.263,11)	0,00			-		0,00
10	Selat	459.746.740,01	(459.746.740,01)	-			-		-
11	Bebandem	226.370.851,91	(226.370.851,91)	-			-		-
12	Rendang	19.410,73	(19.410,73)	0,00			-		0,00
13	RS Pratama	138.336.473,00	-	138.336.473,00	1.894.964.148,00	1.889.634.864,00	78.418,00	143.587.339,00	143.665.757,00
Jumlah		1.964.362.931,81	(1.826.026.458,81)	138.336.473,00	1.894.964.148,00	1.889.634.864,00	78.418,00	143.587.339,00	143.665.757,00

Kas BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo Kas Lainnya Tahun 2022	Koreksi Saldo Awal 2022	Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 Setelah Koreksi	PENDAPATAN MURNI BOK	BELANJA BOK	Saldo Kas BOK Puskesmas Tahun 2023		
							Saldo Tunai	Saldo Rekening	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PUSKESMAS KARANGASEM I				678.290.900,00	454.634.469,00		223.656.431,00	223.656.431,00
2	PUSKESMAS KARANGASEM II				452.078.200,00	386.019.070,00		66.059.130,00	66.059.130,00
3	PUSKESMAS MANGGIS I				529.664.800,00	304.269.469,00		225.395.331,00	225.395.331,00
4	PUSKESMAS MANGGIS II				430.366.000,00	171.686.100,00		258.679.900,00	258.679.900,00
5	PUSKESMAS ABANG I				508.708.200,00	347.148.650,00		161.559.550,00	161.559.550,00
6	PUSKESMAS ABANG II				546.360.500,00	324.278.953,00		222.081.547,00	222.081.547,00
7	PUSKESMAS KUBU I				552.121.000,00	396.380.382,00		155.740.618,00	155.740.618,00
8	PUSKESMAS KUBU II				810.894.000,00	375.406.421,00		435.487.579,00	435.487.579,00
9	PUSKESMAS BEBANDEM				595.005.600,00	328.142.946,00		266.862.654,00	266.862.654,00
10	PUSKESMAS SELAT				878.992.000,00	474.634.253,00		404.357.747,00	404.357.747,00
11	PUSKESMAS RENDANG				456.612.100,00	450.468.509,00		6.143.591,00	6.143.591,00
12	PUSKESMAS SIDEMEN				558.848.500,00	321.636.324,00		237.212.176,00	237.212.176,00
JUMLAH		-	-	-	6.997.941.800,00	4.334.705.546,00	-	2.663.236.254,00	2.663.236.254,00

Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	Piutang Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2023				Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	Nilai Bersih Dapat Direalisasi Per 31 Desember 2023			
					Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2023	Mutasi Kurang								
						Pembayaran atas Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2023	Pembayaran atas Piutang per 2022	Total Pembayaran Tahun 2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A.	Piutang Pajak													
1	Pajak Hotel	1.686.381.355,12	-	1.686.381.355,12	51.012.687.634,00	50.717.789.463,00	1.052.646.617,08	51.770.436.080,08	928.632.909,04	417.663.232,88	510.969.676,16			
2	Pajak Restoran	893.426.306,00	-	893.426.306,00	24.176.844.882,00	23.274.234.692,00	418.213.691,00	23.692.448.383,00	1.377.822.805,00	451.274.142,10	926.548.662,90			
3	Pajak Hiburan	185.508.596,66	-	185.508.596,66	174.610.835,00	174.610.835,00	515.685,00	175.126.520,00	184.992.911,66	166.994.264,16	17.998.647,50			
4	Pajak Reklame	85.413.461,00	-	85.413.461,00	691.499.000,00	656.656.400,00	1.834.800,00	658.491.200,00	118.421.261,00	82.672.559,00	35.748.702,00			
5	Pajak Air Tanah	213.099.497,67	-	213.099.497,67	1.101.804.084,00	1.066.026.012,00	79.493.189,67	1.145.519.201,67	169.384.380,00	72.230.036,32	97.154.343,68			
6	Pajak Parkir	-	-	-	18.150.000,00	-	-	18.150.000,00	-	-	-			
7	Pajak MBLB	31.912.467.033,00	-	31.912.467.033,00	108.804.589.250,00	101.868.918.250,00	4.637.483.795,00	106.506.402.045,00	34.210.654.238,00	12.230.205.452,00	21.980.448.786,00			
8	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	17.977.509.366,00	17.977.509.366,00	-	17.977.509.366,00	-	-	-			
9	Pajak PBB-P2	54.077.725.601,00	-	54.077.725.601,00	9.183.982.997,00	4.178.751.235,00	1.954.132.781,00	6.132.884.016,00	57.123.974.513,00	36.685.261.246,92	20.438.713.266,08			
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	24.076.543.684,25	24.076.543.684,25	-	24.076.543.684,25	-	-	-			
	Jumlah Piutang Pajak	89.054.021.850,45	(4.850.069,00)	89.049.171.781,45	237.216.221.732,25	224.009.189.937,25	8.144.320.556,75	232.153.510.496,00	94.113.883.017,70	50.106.300.933,38	44.007.582.084,32			
	Retribusi Jasa Umum													
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	627.616.800,00	627.616.800,00	-	627.616.800,00	-	-	-			
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	243.864.000,00	243.864.000,00	-	243.864.000,00	-	-	-			
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	-	-	-	244.052.000,00	244.052.000,00	-	244.052.000,00	-	-	-			
4	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	4.122.510.000,00	4.122.510.000,00	-	4.122.510.000,00	-	-	-			
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	433.649.240,00	433.649.240,00	-	433.649.240,00	-	-	-			
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	55.935.000,00	55.935.000,00	-	55.935.000,00	-	-	-			
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	242.911.041,00	-	242.911.041,00	803.807.904,00	385.904.130,00	230.915.434,00	616.819.564,00	429.899.381,00	16.174.644,74	413.724.736,26			
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	242.911.041,00	-	242.911.041,00	6.531.434.944,00	6.113.531.170,00	230.915.434,00	6.344.446.604,00	429.899.381,00	16.174.644,74	413.724.736,26			
	Retribusi Jasa Usaha													
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	228.004.000,00	228.004.000,00	-	228.004.000,00	-	-	-			
2	Retribusi Terminal	-	-	-	145.168.000,00	145.168.000,00	-	145.168.000,00	-	-	-			
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	334.969.000,00	334.969.000,00	-	334.969.000,00	-	-	-			
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	23.387.000,00	23.387.000,00	-	23.387.000,00	-	-	-			
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	1.492.340.000,00	1.492.340.000,00	-	1.492.340.000,00	-	-	-			
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	37.182.000,00	37.182.000,00	-	37.182.000,00	-	-	-			
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	2.261.050.000,00	2.261.050.000,00	-	2.261.050.000,00	-	-	-			
	Retribusi Perizinan Tertentu													
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	171.500.000,00	171.500.000,00	-	171.500.000,00	-	-	-			
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	2.862.000,00	2.862.000,00	-	2.862.000,00	-	-	-			
3	Retribusi Persetujuan bangunan Gedung	7.443.500,00	-	7.443.500,00	751.237.787,00	693.282.535,00	7.443.500,00	700.726.035,00	57.955.252,00	5.795.525,20	52.159.726,80			
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	991.430.000,00	991.430.000,00	-	991.430.000,00	-	-	-			
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	7.443.500,00	-	7.443.500,00	1.917.029.787,00	1.859.074.535,00	7.443.500,00	1.866.518.035,00	57.955.252,00	5.795.525,20	52.159.726,80			
	Jumlah Retribusi	250.354.541,00	-	250.354.541,00	10.709.514.731,00	10.233.655.705,00	238.358.934,00	10.472.014.639,00	487.854.633,00	21.970.169,94	465.884.463,06			
C.	Piutang lain-Lain PAD yang Sah													
1	Denda Pajak	5.687.690.566,19	-	5.687.690.566,19	2.487.546.053,64	1.148.698.146,12	863.122.673,12	2.011.820.819,24	3.871.355.537,25	387.135.553,73	3.484.219.983,53			
2	Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem	12.879.756.774,00	-	12.879.756.774,00	8.108.433.937,00	-	12.013.491.949,00	12.013.491.949,00	8.603.369.962,00	576.020.364,37	8.027.349.597,63			
3	Piutang BLUD Puskesmas se-Kab. Karangasem	-	-	-	236.959.600,00	-	-	236.959.600,00	236.959.600,00	2.369.596,00	234.590.004,00			
4	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.527.255,00	-	2.527.255,00	-	-	-	-	2.527.255,00	25.272,55	2.501.982,45			
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	609.510,80	-	609.510,80	0,00	-	609.510,80	609.510,80	-	-	-			
	Jumlah Piutang lain-Lain PAD yang Sah	18.570.584.105,99	-	18.570.584.105,99	10.832.939.590,64	1.148.698.146,12	12.877.224.132,92	14.025.922.279,04	12.714.212.354,25	965.550.786,65	11.748.661.567,61			

No	Piutang Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2023				Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	Nilai Bersih Dapat Direalisasi Per 31 Desember 2023
					Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2023	Mutasi Kurang					
						Pembayaran atas Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2023	Pembayaran atas Piutang per 2022	Total Pembayaran Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D.	Transfer Antar Daerah										
	Bagi Hasil Pajak Provinsi										
1	PKB	11.978.159.317,00	-	11.978.159.317,00	53.891.125.073,00	39.509.463.548,00	11.978.159.317,00	51.487.622.865,00	14.381.661.525,00	143.816.615,25	14.237.844.909,75
2	BBNKB	5.819.912.450,00	-	5.819.912.450,00	43.763.642.183,00	31.638.076.912,00	5.819.912.450,00	37.457.989.362,00	12.125.565.271,00	121.255.652,71	12.004.309.618,29
3	PBBKB	6.514.260.049,00	-	6.514.260.049,00	40.867.652.967,00	29.970.643.564,00	6.514.260.049,00	36.484.903.613,00	10.897.009.403,00	108.970.094,03	10.788.039.308,97
4	PPAP	35.333.314,00	-	35.333.314,00	216.151.308,00	157.940.090,00	35.333.314,00	193.273.404,00	58.211.218,00	582.112,18	57.629.105,82
5	Pajak Rokok	-	-	-	27.266.003.157,00	27.266.003.157,00	-	27.266.003.157,00	-	-	-
	Jumlah Bagi Hasil pajak Provinsi	24.347.665.130,00	-	24.347.665.130,00	166.004.574.688,00	128.542.127.271,00	24.347.665.130,00	152.889.792.401,00	37.462.447.417,00	374.624.474,17	37.087.822.942,83
	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi										
1	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	-	-	-	53.219.697.672,00	17.883.104.275,00		17.883.104.275,00	35.336.593.397,00	353.365.933,97	34.983.227.463,03
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	-	-	-	53.219.697.672,00	17.883.104.275,00	-	17.883.104.275,00	35.336.593.397,00	353.365.933,97	34.983.227.463,03
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	24.347.665.130,00	-	24.347.665.130,00	219.224.272.360,00	146.425.231.546,00	24.347.665.130,00	170.772.896.676,00	72.799.040.814,00	727.990.408,14	72.071.050.405,86
E.	Piutang Lainnya										
1	Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah	102.612.800,00	-	102.612.800,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelebihan Pencairan Realisasi Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Lainnya	102.612.800,00	-	102.612.800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Keseluruhan	132.325.238.427,44	-	129.554.386.495,10	477.984.948.413,89	381.816.775.334,37	45.607.568.755,67	427.424.344.090,04	180.114.990.818,95	51.821.812.298,11	128.293.178.520,85

Daftar Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Piutang Pajak	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2023				Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2023	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2023	Pembayaran atas Piutang per 2022	Jumlah Pembayaran Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8		10 = 5 + 6 - 9	10	11
A. Denda Pajak											
1	Denda Pajak Hotel	864.381.316,86	(715.307.308,52)	149.074.008,34	192.529.784,24	165.228.419,72	13.025.809,00	178.254.228,72	163.349.563,86	16.334.956,39	147.014.607,47
2	Denda Pajak Restoran	430.729.195,84	(380.861.471,70)	49.867.724,14	246.008.736,72	100.354.979,72	4.235.618,00	104.590.597,72	191.285.863,14	19.128.586,31	172.157.276,83
3	Denda Pajak Hiburan	15.458.384,50	(4.143.964,00)	11.314.420,50	1.249.450,00	1.249.450,00	-	1.249.450,00	11.314.420,50	1.131.442,05	10.182.978,45
4	Denda Pajak Reklame	672.149,86	-	672.149,86	-	-	-	-	672.149,86	67.214,99	604.934,87
5	Denda Pajak Air Tanah (AT)	42.183.028,60	(34.140.484,12)	8.042.544,48	11.220.799,88	11.382.855,88	715.040,12	12.097.896,00	7.165.448,36	716.544,84	6.448.903,52
6	Denda Pajak Parkir	1.610.092,00	-	1.610.092,00	55.147,00	55.147,00	-	55.147,00	1.610.092,00	161.009,20	1.449.082,80
7	Denda Pajak Mineral Bukan Logam	4.332.656.398,53	(1.157.607.035,00)	3.175.049.363,53	1.186.789.994,80	820.473.844,80	45.407.514,00	865.881.358,80	3.495.957.999,53	349.595.799,95	3.146.362.199,58
8	Denda BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Denda PBB-P2	-	-	-	849.692.141,00	49.953.449,00	799.738.692,00	849.692.141,00	-	-	-
	Jumlah Piutang Denda	5.687.690.566,19	(2.292.060.263,34)	3.395.630.302,85	2.487.546.053,64	1.148.698.146,12	863.122.673,12	2.011.820.819,24	3.871.355.537,25	387.135.553,73	3.484.219.983,53
B. Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem											
1	Askes Inhealth	1.389.675,00	-	1.389.675,00	98.010,00	-	1.389.675,00	1.389.675,00	98.010,00	980,10	97.029,90
2	Rujukan JKN & Jamkesmas	7.130.000,00	-	7.130.000,00	-	-	-	-	7.130.000,00	7.130.000,00	-
3	PMI (Sarana/Kantong Darah)	2.632.000,00	-	2.632.000,00	3.780.000,00	-	2.632.000,00	2.632.000,00	3.780.000,00	37.800,00	3.742.200,00
4	JKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Obat Fee For Service	354.001.479,00	-	354.001.479,00	659.899.107,00	-	354.001.479,00	354.001.479,00	659.899.107,00	6.598.991,07	653.300.115,93
6	Pasien Umum	487.806.025,00	-	487.806.025,00	-	-	-	-	487.806.025,00	487.806.025,00	-
7	Pasien DSP	371.328.800,00	(371.328.800,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jasa Raharja	3.038.710,00	-	3.038.710,00	2.428.725,00	-	3.038.710,00	3.038.710,00	2.428.725,00	24.287,25	2.404.437,75
9	Rujukan Ambulance	32.035.000,00	-	32.035.000,00	22.340.000,00	-	32.035.000,00	32.035.000,00	22.340.000,00	223.400,00	22.116.600,00
10	TB MDR Dikes Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RS. Balimed Karangasem	61.963.500,00	-	61.963.500,00	10.637.500,00	-	61.963.500,00	61.963.500,00	10.637.500,00	106.375,00	10.531.125,00
12	RS. Balimed Denpasar	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-	-	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	-
13	BPJS Tenaga Kerja	30.542.855,00	-	30.542.855,00	10.534.270,00	-	30.542.855,00	30.542.855,00	10.534.270,00	105.342,70	10.428.927,30
14	PT Prodia Wida Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BPJS kesehatan	11.242.677.500,00	-	11.242.677.500,00	7.394.174.000,00	-	11.242.677.500,00	11.242.677.500,00	7.394.174.000,00	73.941.740,00	7.320.232.260,00
16	Covid	279.744.000,00	-	279.744.000,00	-	-	279.744.000,00	279.744.000,00	-	-	-
17	Pasien LP	482.230,00	-	482.230,00	3.242.325,00	-	482.230,00	482.230,00	3.242.325,00	32.423,25	3.209.901,75
18	Dinas Kesehatan	1.625.000,00	-	1.625.000,00	1.300.000,00	-	1.625.000,00	1.625.000,00	1.300.000,00	13.000,00	1.287.000,00
	Jumlah Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem	12.879.756.774,00	(371.328.800,00)	12.508.427.974,00	8.108.433.937,00	-	12.013.491.949,00	12.013.491.949,00	8.603.369.962,00	576.020.364,37	8.027.349.597,63
C. Piutang BLUD Puskesmas se - Kabupaten Karangasem											
C.1 Piutang BLUD Puskesmas Karangasem I											
1	Pelayanan RJTP	-	-	-	1.982.100,00	-	-	-	1.982.100,00	19.821,00	1.962.279,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Karangasem I	-	-	-	1.982.100,00	-	-	-	1.982.100,00	19.821,00	1.962.279,00
C.2 Piutang BLUD Puskesmas Karangasem II											
1	Pelayanan Promotif	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	1.600,00	158.400,00
2	Pelayanan RITP	-	-	-	24.794.200,00	-	-	-	24.794.200,00	247.942,00	24.546.258,00
3	Pelayanan RJTP	-	-	-	9.184.200,00	-	-	-	9.184.200,00	91.842,00	9.092.358,00

No	Piutang Pajak	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2023				Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2023	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2023	Pembayaran atas Piutang per 2022	Jumlah Pembayaran Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8		10 = 5 + 6 - 9	10	11
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Karangasem II	-	-	-	34.138.400,00	-	-	-	34.138.400,00	341.384,00	33.797.016,00
C.3	Piutang BLUD Puskesmas Manggis I										
1	Pelayanan RITP	-	-	-	1.597.100,00	-	-	-	1.597.100,00	15.971,00	1.581.129,00
2	Pelayanan RJTP	-	-	-	1.246.300,00	-	-	-	1.246.300,00	12.463,00	1.233.837,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Manggis I	-	-	-	2.843.400,00	-	-	-	2.843.400,00	28.434,00	2.814.966,00
C.4	Piutang BLUD Puskesmas Abang I										
1	Pelayanan Promotif	-	-	-	834.200,00	-	-	-	834.200,00	8.342,00	825.858,00
2	Pelayanan RITP	-	-	-	3.397.100,00	-	-	-	3.397.100,00	33.971,00	3.363.129,00
3	Pelayanan RJTP	-	-	-	7.817.100,00	-	-	-	7.817.100,00	78.171,00	7.738.929,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Abang I	-	-	-	12.048.400,00	-	-	-	12.048.400,00	120.484,00	11.927.916,00
C.5	Piutang BLUD Puskesmas Abang II										
1	Pelayanan RJTP	-	-	-	6.107.100,00	-	-	-	6.107.100,00	61.071,00	6.046.029,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Abang II	-	-	-	6.107.100,00	-	-	-	6.107.100,00	61.071,00	6.046.029,00
C.6	Piutang BLUD Puskesmas Kubu I										
1	Pelayanan RITP	-	-	-	25.776.800,00	-	-	-	25.776.800,00	257.768,00	25.519.032,00
2	Pelayanan RJTP	-	-	-	12.344.700,00	-	-	-	12.344.700,00	123.447,00	12.221.253,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Kubu I	-	-	-	38.121.500,00	-	-	-	38.121.500,00	381.215,00	37.740.285,00
C.7	Piutang BLUD Puskesmas Kubu II										
1	Pelayanan RJTP	-	-	-	13.115.500,00	-	-	-	13.115.500,00	131.155,00	12.984.345,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Kubu II	-	-	-	13.115.500,00	-	-	-	13.115.500,00	131.155,00	12.984.345,00
C.8	Piutang BLUD Puskesmas Bebandem										
1	Pelayanan RJTP	-	-	-	2.874.200,00	-	-	-	2.874.200,00	28.742,00	2.845.458,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Bebandem	-	-	-	2.874.200,00	-	-	-	2.874.200,00	28.742,00	2.845.458,00
C.9	Piutang BLUD Puskesmas Selat										
1	Pelayanan Promotif	-	-	-	1.531.300,00	-	-	-	1.531.300,00	15.313,00	1.515.987,00
2	Pelayanan RITP	-	-	-	32.179.700,00	-	-	-	32.179.700,00	321.797,00	31.857.903,00
3	Pelayanan RJTP	-	-	-	30.783.600,00	-	-	-	30.783.600,00	307.836,00	30.475.764,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Selat	-	-	-	64.494.600,00	-	-	-	64.494.600,00	644.946,00	63.849.654,00
C.10	Piutang BLUD Puskesmas Rendang										
1	Pelayanan RITP	-	-	-	14.394.200,00	-	-	-	14.394.200,00	143.942,00	14.250.258,00

No	Piutang Pajak	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2022 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2023				Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2023	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2023	Pembayaran atas Piutang per 2022	Jumlah Pembayaran Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8		10 = 5 + 6 - 9	10	11
2	Pelayanan RJTP	-	-	-	5.198.800,00	-	-	-	5.198.800,00	51.988,00	5.146.812,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Rendang	-	-	-	19.593.000,00	-	-	-	19.593.000,00	195.930,00	19.397.070,00
C.11	Piutang BLUD Puskesmas Sidemen										
1	Pelayanan Promotif	-	-	-	397.100,00	-	-	-	397.100,00	3.971,00	393.129,00
2	Pelayanan RITP	-	-	-	22.188.400,00	-	-	-	22.188.400,00	221.884,00	21.966.516,00
3	Pelayanan RJTP	-	-	-	19.055.900,00	-	-	-	19.055.900,00	190.559,00	18.865.341,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas Sidemen	-	-	-	41.641.400,00	-	-	-	41.641.400,00	416.414,00	41.224.986,00
	Jumlah Piutang BLUD Puskesmas se - Kabupaten Karangasem	-	-	-	236.959.600,00	-	-	-	236.959.600,00	2.369.596,00	234.590.004,00
N.	Piutang Lainnya atas Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi										
1	PT Protelindo	-	-	-				-	-	-	-
2	PT. Solusi Tunas Pratama	1.889.307,00		1.889.307,00		-		-	1.889.307,00	18.893,07	1.870.413,93
3	PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratell)	-	-	-				-	-	-	-
4	PT. Centratama Menara Indonesia	637.948,00		637.948,00				-	637.948,00	6.379,48	631.568,52
	Jumlah Piutang Denda Retribusi	2.527.255,00	-	2.527.255,00	-	-	-	-	2.527.255,00	25.272,55	2.501.982,45
O.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)										
	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	609.510,80	-	609.510,80	-	-	609.510,80	609.510,80	-	-	-
	Jumlah Piutang Remunerisasi TDF	609.510,80	-	609.510,80	-	-	609.510,80	609.510,80	-	-	-
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	18.570.584.105,99	(2.663.389.063,34)	15.907.195.042,65	10.832.939.590,64	1.148.698.146,12	12.877.224.132,92	14.025.922.279,04	12.714.212.354,25	965.550.786,65	11.748.661.567,61
P.	Piutang Lainnya atas Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah										
1	Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (nilai temuan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2013 yang sudah ditetapkan dalam SK Penetapan/ Pembebanan Kerugian Daerah)	102.612.800,00	(102.612.800,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Lainnya	102.612.800,00	(102.612.800,00)	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Jenis Piutang		No	Uraian		Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang						
Pajak											
Self Assessment			0 - <1 Tahun	1%	1 - 2 Tahun	10%	> 2 - 5 Tahun	50%	> 5 Tahun	100%	Total
	1	Pajak Hotel	294.898.171,00	2.948.981,71	75.304.305,00	7.530.430,50	302.493.224,74	151.246.612,37	255.937.208,30	255.937.208,30	417.663.232,88
	2	Pajak Restoran	902.610.190,00	9.026.101,90	27.550.147,00	2.755.014,70	16.338.885,00	8.169.442,50	431.323.583,00	431.323.583,00	451.274.142,10
	3	Pajak Hiburan	-	-	-	-	35.997.295,00	17.998.647,50	148.995.616,66	148.995.616,66	166.994.264,16
	4	Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Pajak MBLB	6.935.671.000,00	69.356.710,00	6.115.075.000,00	611.507.500,00	19.221.133.992,00	9.610.566.996,00	1.938.774.246,00	1.938.774.246,00	12.230.205.452,00
		Jumlah	8.133.179.361,00	81.331.793,61	6.217.929.452,00	621.792.945,20	19.575.963.396,74	9.787.981.698,37	2.775.030.653,96	2.775.030.653,96	13.266.137.091,14
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	81.331.793,61		621.792.945,20		9.787.981.698,37		2.775.030.653,96			
Official Assessment			0 - <1 Tahun		1 - 3 Tahun		> 3 - 5 Tahun		> 5 Tahun		Total
	1	Pajak Air Tanah	35.778.072,00	357.780,72	54.636.396,00	5.463.639,60	25.122.592,00	12.561.296,00	53.847.320,00	53.847.320,00	72.230.036,32
	2	Pajak Reklame	36.109.800,00	361.098,00	-	-	-	-	82.311.461,00	82.311.461,00	82.672.559,00
	3	Pajak PBB P2	5.005.231.762,00	50.052.317,62	13.014.525.993,00	1.301.452.599,30	7.540.920.856,00	3.770.460.428,00	31.563.295.902,00	31.563.295.902,00	36.685.261.246,92
		Jumlah	5.077.119.634,00	50.771.196,34	13.069.162.389,00	1.306.916.238,90	7.566.043.448,00	3.783.021.724,00	31.699.454.683,00	31.699.454.683,00	36.840.163.842,24
		Penyisihan Piutang Tak Tertagih	50.771.196,34		1.306.916.238,90		3.783.021.724,00		31.699.454.683,00		
		Total Penyisihan Piutang Pajak							50.106.300.933,38		
Retribusi											
			0 - 1 Bulan		> 1 - 3 Bulan		> 3 - 12 Bulan		> 12 Bulan		Total
1	Retribusi Menara Telekomunikasi	417.903.774,00	4.179.037,74	-	-	-	-	11.995.607,00	11.995.607,00	-	16.174.644,74
2	Retribusi Persetujuan bangunan Gedung	-	-	57.955.252,00	5.795.525,20	-	-	-	-	-	5.795.525,20
	Jumlah	417.903.774,00	4.179.037,74	57.955.252,00	5.795.525,20	-	-	11.995.607,00	11.995.607,00	-	21.970.169,94
	% Penyisihan Piutang	1%	-	10%	-	50%	-	100%	-	-	-
	Penyisihan Piutang	4.179.037,74	-	5.795.525,20	-	-	-	11.995.607,00	-	-	-
Total Penyisihan Piutang Retribusi								21.970.169,94			
Piutang lain-Lain PAD yang Sah											
			s.d. Jatuh Tempo		1 Bulan Sejak Tagihan I		1 Bulan Sejak Tagihan II		1 Bulan Sejak Tagihan III		Total
1	Denda Pajak	-	-	3.871.355.537,25	387.135.553,73	-	-	-	-	-	387.135.553,73
2	Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem	8.108.433.937,00	81.084.339,37	-	-	-	-	494.936.025,00	494.936.025,00	-	576.020.364,37
3	Piutang BLUD Puskesmas se- Kab. Karangasem	236.959.600,00	2.369.596,00								
4	Piutang LLPAD atas Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.527.255,00	25.272,55	-	-	-	-	-	-	-	25.272,55
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	-								-
	Jumlah	8.347.920.792,00	83.479.207,92	3.871.355.537,25	387.135.553,73	-	-	494.936.025,00	494.936.025,00	-	963.181.190,65
	% Penyisihan Piutang	1%	-	10%	-	50%	-	100%	-	-	-
	Penyisihan Piutang	83.479.207,92	-	387.135.553,73	-	-	-	494.936.025,00	-	-	-
Total Piutang lain-Lain PAD yang Sah								965.550.786,65			
Piutang Transfer Antar Daerah											
			0 - 1 Bulan		> 1 - 3 Bulan		> 3 - 12 Bulan		> 12 Bulan		Total
1	Bagi Hasil Pajak Propinsi	37.462.447.417,00	374.624.474,17	-	-	-	-	-	-	-	374.624.474,17
2	Bantuan Keuangan Khusus Propinsi	35.336.593.397,00	353.365.933,97								353.365.933,97
	Jumlah	72.799.040.814,00	727.990.408,14	-	-	-	-	-	-	-	727.990.408,14
	% Penyisihan Piutang	1%	-	10%	-	50%	-	100%	-	-	-
	Penyisihan Piutang	727.990.408,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PenyisihanPiutang Transfer Antar Daerah								727.990.408,14			-
Jumlah Keseluruhan								51.821.812.298,11			

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Perjanjian	Nilai Pembebanan Per Bulan	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Des 2022		Beban Tahun 2023 atas Belanja (SP2D) Sebelum Tahun 2023		Beban Tahun 2023 atas Belanja (SP2D) Tahun 2023		Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023		
			Mulai	Berakhir				Bulan	Beban	Bulan	Beban	Bulan	Beban	Atas Belanja (SP2D) sebelum Tahun 2023	Atas Belanja (SP2D) Tahun 2023	Total
1	2	3	6	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12 = 10 x 11	13	14 = 10 x 13	15	16 = 10 x 15	17 = 9-12-14-16	18 = 9-12-14-16	19 = 17 + 18
Asuransi Dibayar Dimuka																
Belanja Dibayar Dimuka Bagian Umum																
1	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan	31/03/2022	31/03/2023	12	68.669.275,00	5.722.439,58	9	51.501.956,22	3	17.167.318,74		-	0,04		0,04
2	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Premi Asuransi Kendaraan Operasional /Lapangan	31/03/2022	31/03/2023	12	74.594.725,00	6.216.227,08	9	55.946.043,72	3	18.648.681,24		-	0,04		0,04
3	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Premi Asuransi Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Kantor Setda	17/07/2022	17/07/2023	12	47.479.223,00	3.956.601,92	5	19.783.009,60	7	27.696.213,44		-	0,04		0,04
4	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan	18/07/2023	18/07/2024	12	49.043.354,94	4.086.946,2500					5	20.434.731,25		28.608.623,69	28.608.623,69
5	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Kendaraan Dinas)	31/03/2023	31/03/2024	12	67.552.400,00	5.629.366,6700					9	50.664.300,03		16.888.099,97	16.888.099,97
6	Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Kendaraan Operasional/Lapangan)	31/03/2023	31/03/2024	12	92.685.906,00	7.723.825,5000					9	69.514.429,50		23.171.476,50	23.171.476,50
Jumlah Bagian Umum						400.024.883,94			127.231.009,54		63.512.213,42		140.613.460,78	0,04	68.668.200,16	68.668.200,20
Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka						400.024.883,94			127.231.009,54		63.512.213,42		140.613.460,78	0,04	68.668.200,16	68.668.200,20
Sewa Dibayar Dimuka																
Belanja Sewa Tanah Tempat Bangunan BPKAD																
1	BPKAD	Sewa Tanah Tempat Bangunan Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Br. Dinas Bencingan Desa Rendang - Pos Rendang	05/12/2019	05/12/2023	48	19.000.000,00	395.833,33	37	14.645.833,33	11	4.354.166,67	-	-	0,00	-	0,00
2	BPKAD	Sewa Tanah tempat Bangunan Pos Penjagaan Pajak MBLB di Desa Pempatan - Pos Pempatan	11/12/2013	10/12/2023	120	12.500.000,00	104.166,67	109	11.354.166,67	11	1.145.833,33	-	-	0,00	-	0,00
3	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Bhuana Giri - Pos Butus	29/01/2020	29/01/2023	36	15.000.000,00	416.666,67	35	14.583.333,33	1	416.666,67	-	-	0,00	-	0,00
4	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Ababi - Pos Umanyar	29/01/2020	29/01/2023	36	15.000.000,00	416.666,67	35	14.583.333,33	1	416.666,67	-	-	0,00	-	0,00
5	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Datah - Pos Datah	01/04/2020	01/04/2025	60	18.700.000,00	311.666,67	33	10.285.000,00	12	3.740.000,00	-	-	4.675.000,00	-	4.675.000,00
6	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Duda - Pos Selat	03/11/2020	04/11/2023	36	22.500.000,00	625.000,00	26	16.250.000,00	10	6.250.000,00	-	-	-	-	-
7	BPKAD	Sewa Tanah dan Bangunan tempat pos pengawasan pajak MBLB di Br. Dinas Kayu Putih Desa Bebandem - Pos Kayu Putih	30/11/2021	30/11/2023	24	12.000.000,00	500.000,00	13	6.500.000,00	11	5.500.000,00	-	-	-	-	-
8	BPKAD	Sewa Tanah Tempat Bangunan Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Br. Dinas Bencingan Desa Rendang - Pos Rendang	05/12/2023	05/12/2025	24	11.500.000,00	479.166,67					1	479.166,67		11.020.833,33	11.020.833,33
9	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Bhuana Giri - Pos Butus	30/01/2023	05/12/2028	36	15.000.000,00	416.666,67					11	4.583.333,33		10.416.666,67	10.416.666,67
10	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Ababi - Pos Umanyar	30/01/2023	05/12/2028	36	15.000.000,00	416.666,67					11	4.583.333,33		10.416.666,67	10.416.666,67
11	BPKAD	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Duda - Pos Selat	03/11/2023	04/11/2025	24	19.000.000,00	791.666,67					2	1.583.333,33		17.416.666,67	17.416.666,67
12	BPKAD	Sewa Tanah dan Bangunan tempat pos pengawasan pajak MBLB di Br. Dinas Kayu Putih Desa Bebandem - Pos Kayu Putih	30/11/2023	30/11/2025	24	13.750.000,00	572.916,67					1	572.916,67		13.177.083,33	13.177.083,33
13	BPKAD	Perpanjangan sewa hosting website kantor	04/12/2023	04/12/2024	12	22.500.000,00	1.875.000,00					1	1.875.000,00		20.625.000,00	20.625.000,00
Jumlah BPKAD						211.450.000,00			88.201.666,67		21.823.333,33		13.677.083,33	4.675.000,00	83.072.916,67	87.747.916,67

No	SKPD	Uraian	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Perjanjian	Nilai Pembebanan Per Bulan	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Des 2022		Beban Tahun 2023 atas Belanja (SP2D) Sebelum Tahun 2023		Beban Tahun 2023 atas Belanja (SP2D) Tahun 2023		Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023		
			Mulai	Berakhir				Bulan	Beban	Bulan	Beban	Bulan	Beban	Atas Belanja (SP2D) sebelum Tahun 2023	Atas Belanja (SP2D) Tahun 2023	Total
1	2	3	6	7	8	9	10 = 9 : 8	11	12 = 10 x 11	13	14 = 10 x 13	15	16 = 10 x 15	17 = 9-12-14-16	18 = 9-12-14-16	19 = 17 + 18
Belanja Dibayar Dimuka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan																
1	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan	Sewa Menyewa atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Propinsi Bali	09/12/2022	09/12/2023	12	30.159.265,00	2.513.272,08	1	2.513.272,08	11	27.645.992,92		-	-	-	-
2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan	Sewa Menyewa atas Tanah di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem	03/10/2020	03/10/2030	120	41.500.000,00	345.833,33	27	9.337.500,00	12	4.150.000,00	-	-	28.012.500,00	-	28.012.500,00
3	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan	Sewa Menyewa atas Tanah di Pasar Karanganyar Kecamatan Bebandem Desa Sibetan Kabupaten Karangasem	22/11/2022	22/11/2027	60	93.500.000,00	1.558.333,33	1	1.558.333,33	12	18.700.000,00		-	73.241.666,67	-	73.241.666,67
Jumlah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan						165.159.265,00			13.409.105,42		50.495.992,92		-	101.254.166,67	-	101.254.166,67
Jumlah Sewa Dibayar Dimuka						376.609.265,00			101.610.772,08		72.319.326,25		13.677.083,33	105.929.166,67	83.072.916,67	189.002.083,33
Belanja Ketersediaan Layanan Dibayar Dimuka																
Belanja Dibayar Dimuka Satuan Polisi Pamong Praja																
1	Satuan Polisi Pamong Praja	Perpanjangan sewa hosting website kantor	04/02/2022	04/02/2023	12	8.000.000,00	666.666,67	11	7.333.333,37	1	666.666,63		-	0,00	-	0,00
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja						8.000.000,00			7.333.333,37		666.666,63		-	0,00	-	0,00
Jumlah ketersediaan Layanan Dibayar Dimuka						8.000.000,00	-		7.333.333,37		666.666,63		-	0,00	-	0,00
Jumlah Beban Dibayar Dimuka						784.634.148,94			236.175.114,99		136.498.206,30		154.290.544,11	105.929.166,71	151.741.116,83	257.670.283,53

Daftar Persediaan Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2023

		Barang Pakai Habis												
		ATK	Bahan Komputer	Kertas & Cover	Brg Ctkan	Barang Kuasi	Benda Pos	Material/ obat-obatan	Pakan Ikan/Ternak	Bahan Lainnya	Bahan Makanan/natura dan pakan natura	Alat Listrik	Perabot Kantor	Bibit ikan/ternak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.596.800,00	1.660.000,00	4.327.000,00	9.087.800,00		1.000.000,00					946.000,00	1.660.400,00	
2	Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP	38.708.392,00	9.172.278,00	2.128.520,00			2.400.000,00	2.862.350,00		1.094.500,00		11.325.713,00	4.861.465,00	
3	Bidang Pengelolaan Pendidikan SD	151.575.028,33	32.821.944,00	3.242.840,00	16.989.922,00		9.787.000,00	22.986.637,00		35.973.673,00		13.624.400,00	21.476.497,00	
4	Dinas Kesehatan	17.678.500,00	-	-	-	119.640.000,00		4.506.713.627,37						
5	Puskesmas Karangasem I	21.657.250,00	7.075.200,00			159.250,00		199.967.000,80		4.330.900,00		7.883.000,00		
6	Puskesmas Karangasem II	949.400,00	1.731.600,00	1.369.000,00		452.000,00	740.000,00	212.677.097,47		1.687.100,00		2.479.000,00		
7	Puskesmas Kubu I		1.975.800,00	1.140.000,00		543.000,00		306.344.305,59		729.000,00		997.200,00		
8	Puskesmas Kubu II	2.995.200,00	3.604.200,00			201.000,00	500.000,00	367.867.621,24						
9	Puskesmas Manggis I	3.793.050,00	2.611.800,00	1.133.600,00		892.000,00	630.000,00	314.742.217,67		8.367.700,00		2.567.000,00		
10	Puskesmas Manggis II	115.600,00	2.805.300,00	2.671.600,00	870.000,00	726.000,00		141.796.613,48		3.406.000,00		648.000,00		
11	Puskesmas Abang I					1.050.499,50		406.857.045,90						
12	Puskesmas Abang II	381.000,00				1.803.750,00	500.000,00	353.828.030,20						
13	Puskesmas Rendang	1.876.510,00				1.344.750,00		524.320.441,83		534.000,00				
14	Puskesmas Selat	13.337.850,00	24.693.000,00	739.000,00		374.000,00		433.981.017,05				15.725.000,00		
15	Puskesmas Sidemen	202.700,00	104.500,00	1.330.200,00	1.575.000,00	685.000,00	860.000,00	182.202.388,28				1.230.000,00		
16	Puskesmas Bebandem	12.972.750,00	17.232.000,00	12.040.000,00		667.000,00	500.000,00	322.840.167,84		7.484.600,00		14.606.500,00		
17	UPT Laboratorium Kesehatan	26.000,00		154.000,00		577.500,00	40.000,00	4.405.355,00		29.000,00				
18	RS Pratama Kubu	280.800,00	819.500,00	415.200,00		2.086.000,00		295.489.299,30		485.400,00		605.000,00		
19	Rumah Sakit Umum Daerah	35.639.150,00	34.754.200,00					8.045.099.071,21			199.864.050,00	914.600,00		
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.999.000,00	1.698.000,00	1.901.000,00									2.800.900,00	
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000,00		210.000,00			150.000,00							
22	Satuan Polisi Pamong Praja	163.000,00		294.800,00			60.000,00						283.400,00	
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			593.200,00			100.000,00							
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			140.000,00										
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							109.224.791,00						
26	Dinas Lingkungan Hidup	43.900,00	115.000,00	427.500,00		6.073.290,00							607.100,00	
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.028.536.140,00	85.461.387,00	258.309.674,00								14.251.800,00	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						150.000,00							
29	Dinas Perhubungan			726.000,00	173.390.000,00	18.472.370,00	220.000,00					397.915.241,00		
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.900,00		294.600,00										
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	514.900,00		1.095.000,00						49.600,00				
32	Dinas Ketenagakerjaan	15.700,00		380.700,00	90.400,00		220.000,00							
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			87.200,00										
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.914.800,00	2.149.000,00	4.908.500,00	3.443.000,00	150.824.293,00						716.000,00	2.120.500,00	
35	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	174.400,00	1.573.200,00				1.300.000,00		20.223.582,00		812.363.679,49			31.238.394,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15.000,00		264.000,00		77.559.474,00	50.000,00							
37	Bagian Hukum			268.000,00										
38	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	90.000,00		4.125.000,00			200.000,00							

[illegible]

		Barang Pakai Habis												
		ATK	Bahan Komputer	Kertas & Cover	Brg Ctkan	Barang Kuasi	Benda Pos	Material/ obat-obatan	Pakan Ikan/Ternak	Bahan Lainnya	Bahan Makanan/natura dan pakan natura	Alat Listrik	Perabot Kantor	Bibit ikan/ternak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Bagian Organisasi	50.000,00		335.000,00	6.323.100,00									
40	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	301.100,00		938.000,00			150.000,00							
41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			337.000,00			200.000,00							
42	Bagian Umum	318.000,00		670.000,00	915.000,00		500.000,00						7.759.000,00	
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	78.000,00		335.000,00										
44	Sekretariat DPRD	116.500,00		905.000,00										
45	Kecamatan Abang	130.500,00		340.000,00			40.000,00							
46	Kecamatan Kubu	48.000,00		87.000,00								103.000,00	75.000,00	
47	Kecamatan Selat			70.000,00										
48	Kecamatan Bebandem		270.000,00	380.000,00			200.000,00							
49	Kecamatan Rendang	8.000,00		246.000,00	222.000,00									
50	Inspektorat Daerah	16.500,00		280.000,00										
51	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.942.000,00	660.000,00			150.000,00						709.500,00	
52	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	187.500,00	2.981.500,00	1.920.000,00										
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			13.250.000,00										
54	Kelurahan Subagan	497.000,00	350.000,00	300.000,00	428.000,00		150.000,00					600.600,00	300.000,00	
55	Kecamatan Karangasem	100.000,00		67.000,00										
	JUMLAH	318.658.680,33	1.180.676.162,00	152.987.847,00	471.643.896,00	384.131.176,50	20.797.000,00	16.754.205.078,23	20.223.582,00	64.171.473,00	1.012.227.729,49	472.886.254,00	56.905.562,00	31.238.394,00

							Barang Tidak Habis Pakai				Barang dan Jasa		Total
		Bahan bangunan dan konstruksi	Bahan Kimia	Bahan/Kegiatan Kantor Lainnya	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Jasa)	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Sovernir sosialisasi pajak (payung)	Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Hibah KPU (Bilik suara)	Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Barang dan Jasa BOS	Barang dan Jasa BLUD	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)
39	Bagian Organisasi												6.708.100,00
40	Bagian Perekonomian dan Pembangunan												1.389.100,00
41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan												537.000,00
42	Bagian Umum			13.950.000,00									24.112.000,00
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa												413.000,00
44	Sekretariat DPRD												1.021.500,00
45	Kecamatan Abang												510.500,00
46	Kecamatan Kubu												313.000,00
47	Kecamatan Selat												70.000,00
48	Kecamatan Bebandem												850.000,00
49	Kecamatan Rendang												476.000,00
50	Inspektorat Daerah												296.500,00
51	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah												3.461.500,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												5.089.000,00
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						6.517.500,00			3.582.884.000,00			3.602.651.500,00
54	Kelurahan Subagan												2.625.600,00
55	Kecamatan Karangasem												167.000,00
	JUMLAH	683.771.650,00	9.363.273,00	112.719.235,00	18.000.000,00	5.083.000,00	6.517.500,00	193.007.392,00	796.195.730,00	4.273.268.000,00	-	-	27.038.678.614,55

DAFTAR ASET TETAP TANAH PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran 27

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang		Saldo per 31 Desember 2023
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43.850.749.747,00	-	-	-	-	-	-	43.850.749.747,00
2	Dinas Kesehatan	2.169.341.720,00	-	-	-	-	-	-	2.169.341.720,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.292.093.400,00	-	-	-	-	-	-	7.292.093.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80.563.056.462,75	-	2.675.072.398,00	-	2.675.072.398,00	-	-	83.238.128.860,75
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	162.900.000,00	-	-	-	-	-	-	162.900.000,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	3.076.000,00	-	-	-	-	-	-	3.076.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	407.359.443,00	-	-	-	-	-	-	407.359.443,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	61.685.000,00	-	-	-	-	-	-	61.685.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.930.700.000,00	-	-	-	-	-	-	2.930.700.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	3.651.971.492,50	-	-	-	-	-	-	3.651.971.492,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.680.000,00	-	-	-	-	-	-	263.680.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.916.313.080,00	-	-	155.500.000,00	155.500.000,00	-	-	6.071.813.080,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.464.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.464.800.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	513.344.450,00	-	-	-	-	-	-	513.344.450,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	10.035.109.330,00	-	-	-	-	-	-	10.035.109.330,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	151.040.000,00	-	-	-	-	-	-	151.040.000,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	167.936.000,00	-	-	-	-	-	-	167.936.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	988.871.820,00	-	-	-	-	155.500.000,00	155.500.000,00	833.371.820,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	122.624.000,00	-	-	-	-	-	-	122.624.000,00
26	Kecamatan Karangasem	452.500.000,00	-	-	-	-	-	-	452.500.000,00
27	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bebandem	18.110.000,00	-	-	-	-	-	-	18.110.000,00
30	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Rendang	369.810.000,00	-	-	-	-	-	-	369.810.000,00
32	Kecamatan Sidemen	1.176.000,00	-	-	-	-	-	-	1.176.000,00
33	Kecamatan Manggis	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		162.717.247.945,25	-	2.675.072.398,00	155.500.000,00	2.830.572.398,00	155.500.000,00	155.500.000,00	165.392.320.343,25

[illegible]

No	OPD	Mutasi Kurang										Saldo per 31 Desember 2023
		Salah Pos Belanja Modal	Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Penghapusan Tahun 2023	Belanja Modal Tahun Berjalan diserahkan ke Pihak Swasta	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
						Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Lebih Catat					
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	1.526.110.420,00	-	10.500.000,00	-	-	-	140.194.640,00	-	1.676.805.060,00	172.832.910.093,31
2	Dinas Kesehatan	2.617.900,00	19.628.400,00	-	2.500.000,00	-	732.600,00	-	-	-	25.478.900,00	84.805.323.582,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	7.200.000,00	-	3.167.908.000,00	-	-	-	-	-	3.175.108.000,00	138.510.558.502,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.041.299.208,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.600.000,00	3.663.254.180,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.714.047.395,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	58.800.000,00	-	-	-	-	-	58.800.000,00	5.942.763.113,40
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	287.635.500,00	287.635.500,00	7.864.534.832,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.973.340.368,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	348.631.054,00	-	-	-	-	-	348.631.054,00	17.416.631.873,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.114.742.199,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.521.965.358,00
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.247.046.374,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	77.605.000,00	-	-	-	-	-	77.605.000,00	5.081.953.012,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	179.050.000,00	179.050.000,00	5.208.526.925,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.693.305.383,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.899.008.818,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.317.895.415,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	325.000,00	15.922.008.648,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	184.328.500,00	-	-	61.690.000,00	-	-	246.018.500,00	29.496.003.254,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	39.405.000,00	-	-	-	-	-	192.000.000,00	231.405.000,00	14.376.307.550,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	45.456.700,00	-	-	-	-	-	45.456.700,00	2.920.666.242,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah								Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya				
								Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan			
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.397.861.466,00	350.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	350.510.000,00	
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.085.606.750,00	219.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	219.760.000,00	
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	2.060.076.775,00	307.783.000,00	-	-	-	-	-	-	-	307.783.000,00	
26	Kecamatan Karangasem	2.251.056.023,00	133.073.900,00	-	-	-	-	-	-	-	133.073.900,00	
27	Kecamatan Abang	898.376.877,00	46.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	46.150.000,00	
28	Kecamatan Kubu	949.151.300,00	33.869.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.869.000,00	
29	Kecamatan Bebandem	1.087.244.604,00	97.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.250.000,00	
30	Kecamatan Selat	1.414.488.720,00	86.261.000,00	-	-	-	-	-	-	-	86.261.000,00	
31	Kecamatan Rendang	1.088.682.800,00	46.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	46.200.000,00	
32	Kecamatan Sidemen	1.208.014.241,00	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000,00	
33	Kecamatan Manggis	1.035.700.085,00	51.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	51.900.000,00	
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.699.456.760,00	45.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.400.000,00	
JUMLAH		559.607.671.676,39	39.642.592.244,00	11.300.000,00	19.480.000,00	111.075.000,00	378.696.000,00	9.950.000,00	96.133.920,00	658.685.500,00	40.927.912.664,00	

No	OPD	Mutasi Kurang										Saldo per 31 Desember 2023
		Salah Pos Belanja Modal	Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Penghapusan Tahun 2023	Belanja Modal Tahun Berjalan diserahkan ke Pihak Swasta	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
						Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Lebih Catat					
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.748.371.466,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	22.275.000,00	-	-	-	-	-	22.275.000,00	2.283.091.750,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.367.859.775,00
26	Kecamatan Karangasem	-	5.986.475,00	-	30.255.000,00	-	-	-	-	-	36.241.475,00	2.347.888.448,00
27	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.526.877,00
28	Kecamatan Kubu	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	963.020.300,00
29	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.184.494.604,00
30	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.749.720,00
31	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.882.800,00
32	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219.714.241,00
33	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.087.600.085,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	23.650.000,00	-	-	-	-	-	23.650.000,00	1.721.206.760,00
JUMLAH		2.617.900,00	1.592.850.295,00	39.405.000,00	3.971.909.254,00	-	732.600,00	61.690.000,00	140.194.640,00	658.685.500,00	6.468.085.189,00	594.067.499.151,39

DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN 31 DESEMBER 2023

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang					Saldo per 31 Desember 2023
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Total Mutasi Tambah	Salah Pos Belanja Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Penghapusan Tahun 2023	Total Mutasi Kurang	
						Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	403.477.501.726,58	26.645.446.919,02	-	-	812.153.604,00	-	27.457.600.523,02	401.695.780,00	164.509.100,00	559.506.230,02	374.238.654,00	1.499.949.764,02	429.435.152.485,58
2	Dinas Kesehatan	106.652.660.562,70	426.576.241,62	-	-	55.737.000,00	-	482.313.241,62	-	-	-	360.056.000,00	360.056.000,00	106.774.917.804,32
3	Rumah Sakit Umum Daerah	111.908.796.435,23	942.604.194,00	-	23.840.000,00	-	-	966.444.194,00	-	-	-	-	-	112.875.240.629,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.890.604.876,00	7.674.922.415,00	-	315.511.500,00	-	-	7.990.433.915,00	-	6.745.767.515,00	-	-	6.745.767.515,00	12.135.271.276,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	694.057.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694.057.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	201.462.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.462.000,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	1.677.976.069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677.976.069,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.141.038.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.141.038.100,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	1.253.544.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253.544.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.932.976.119,16	198.139.587,89	-	-	-	1.861.132.622,00	2.059.272.209,89	-	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00	5.978.248.329,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.165.869.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165.869.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.669.668.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.669.668.000,00
13	Dinas Perhubungan	10.707.496.048,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.707.496.048,14
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	293.362.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.362.100,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	86.813.568.322,67	-	178.733.904,71	-	-	-	178.733.904,71	-	-	-	-	-	86.992.302.227,38
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.016.904.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.016.904.500,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.572.529.557,00	-	-	-	-	6.493.456.998,00	6.493.456.998,00	-	-	-	196.100.000,00	196.100.000,00	19.869.886.555,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	466.965.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.965.725,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20.320.581.973,24	471.803.991,55	-	-	-	-	471.803.991,55	-	-	-	-	-	20.792.385.964,79
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	23.403.584.436,81	-	-	-	94.911.105,00	-	94.911.105,00	-	-	-	-	-	23.498.495.541,81
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	28.931.935.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.931.935.130,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	996.848.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.848.170,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.839.860.552,00	149.285.584,19	-	-	-	-	149.285.584,19	-	-	-	-	-	3.989.146.136,19

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang					Saldo per 31 Desember 2023
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Total Mutasi Tambah	Salah Pos Belanja Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Penghapusan Tahun 2023	Total Mutasi Kurang	
						Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan							
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	887.548.500,00	-	136.704.628,00	-	-	-	136.704.628,00	-	-	-	-	-	1.024.253.128,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	540.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.580.000,00
26	Kecamatan Karangasem	4.227.401.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.227.401.000,00
27	Kecamatan Abang	2.676.493.706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.676.493.706,00
28	Kecamatan Kubu	3.555.019.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.555.019.895,00
29	Kecamatan Bebandem	1.561.667.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.561.667.000,00
30	Kecamatan Selat	1.772.794.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.772.794.130,00
31	Kecamatan Rendang	727.929.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727.929.871,00
32	Kecamatan Sidemen	2.626.906.025,00	179.500.043,12	25.788.630,00	-	-	-	205.288.673,12	-	-	-	-	-	2.832.194.698,12
33	Kecamatan Manggis	909.648.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.648.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	369.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.800.000,00
JUMLAH		888.885.578.530,53	36.688.278.976,39	341.227.162,71	339.351.500,00	962.801.709,00	8.354.589.620,00	46.686.248.968,10	401.695.780,00	6.910.276.615,00	573.506.230,02	930.394.654,00	8.815.873.279,02	926.755.954.219,61

[illegible]

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang		Saldo per 31 Desember 2023
			Belanja Modal	Utang Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Total Mutasi Kurang	
							Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan				
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.543.815.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.543.815.574,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.356.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.356.950,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	28.846.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.846.600,00
26	Kecamatan Karangasem	108.433.880,00	555.044.310,00	-	-	-	-	-	555.044.310,00	-	-	663.478.190,00
27	Kecamatan Abang	16.153.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.153.450,00
28	Kecamatan Kubu	33.093.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.093.648,00
29	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Manggis	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.464.775.325.242,76	41.479.827.150,71	21.136.403.638,70	3.025.042.750,00	2.681.813.250,00	-	5.358.134.245,00	73.681.221.034,41	215.929.000,00	215.929.000,00	1.538.240.617.277,17

[illegible]

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2023
			Belanja Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	663.505.671,00	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	665.105.671,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	687.792.840,00	-	39.405.000,00	-	39.405.000,00	-	-	-	-	727.197.840,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	1.965.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.000,00
26	Kecamatan Karangasem	3.939.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.939.600,00
27	Kecamatan Abang	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
28	Kecamatan Kubu	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
29	Kecamatan Bebandem	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
30	Kecamatan Selat	12.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.950.000,00
31	Kecamatan Rendang	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
32	Kecamatan Sidemen	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
33	Kecamatan Manggis	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		39.697.000.877,35	1.210.750.750,00	39.405.000,00	-	1.250.155.750,00	111.075.000,00	539.145.050,00	-	650.220.050,00	40.296.936.577,35

DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan 31 DESEMBER 2023

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			Saldo per 31 Desember 2023
			Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Utang Tahun 2023	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Pelunasan Utang di Tahun 2023	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	788.654.817,00	-	164.509.100,00	-	164.509.100,00	-	-	-	953.163.917,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	335.149.526,00	-	-	-	-	53.837.750,00	-	53.837.750,00	281.311.776,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.703.166.087,96	1.386.002.500,00	6.745.767.515,00	68.810.400,00	8.200.580.415,00	2.751.398.000,00	97.688.843,96	2.849.086.843,96	18.054.659.659,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	49.750.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	63.171.750,00	-	-	-	-	-	-	-	63.171.750,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	98.554.500,00	-	-	-	-	-	-	-	98.554.500,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.805.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.805.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	98.084.000,00	-	-	-	-	-	-	-	98.084.000,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	14.170.335.680,96	1.386.002.500,00	6.910.276.615,00	68.810.400,00	8.365.089.515,00	2.805.235.750,00	97.688.843,96	2.902.924.593,96	19.632.500.602,00

DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP 31 DESEMBER 2023

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2023
			Beban Penyusutan	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Penghapusan Tahun 2023	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
					Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan							
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	302.649.736.550,83	31.081.221.668,00	-	267.188.679,00	-	-	31.348.410.347,00	528.516.655,97	252.413.050,00	-	780.929.705,97	333.217.217.191,86
2	Dinas Kesehatan	98.671.602.733,14	10.869.570.910,00	-	-	-	332.650.000,00	11.202.220.910,00	2.500.000,00	166.658.817,00	-	169.158.817,00	109.704.664.826,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	151.498.993.313,53	13.975.101.229,05	-	-	-	-	13.975.101.229,05	3.167.908.000,00	-	-	3.167.908.000,00	162.306.186.542,58
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.105.389.926.384,70	61.756.676.601,99	-	177.825.190,00	1.351.699.042,00	-	63.286.200.833,99	-	-	-	-	1.168.676.127.218,69
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.241.612.169,00	238.990.270,00	-	-	-	-	238.990.270,00	-	-	-	-	3.480.602.439,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.173.015.013,00	744.417.461,00	-	-	-	-	744.417.461,00	-	-	-	-	5.917.432.474,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	6.023.657.602,00	317.463.633,00	-	-	-	-	317.463.633,00	50.680.002,00	-	-	50.680.002,00	6.290.441.233,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.353.823.106,00	792.333.261,00	-	-	-	-	792.333.261,00	-	-	151.225.500,00	151.225.500,00	10.994.930.867,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	4.154.114.565,00	494.544.875,00	-	-	-	-	494.544.875,00	-	-	-	-	4.648.659.440,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.764.606.325,00	1.347.121.399,00	-	-	1.678.152.656,00	-	3.025.274.055,00	362.304.387,00	-	-	362.304.387,00	19.427.575.993,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.186.954.734,00	435.731.627,00	-	-	-	-	435.731.627,00	-	-	-	-	5.622.686.361,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.126.155.708,00	121.851.774,00	-	-	-	-	121.851.774,00	-	-	-	-	3.248.007.482,00
13	Dinas Perhubungan	31.760.511.597,00	3.066.489.141,00	368.896.000,00	-	20.829.018,00	-	3.456.214.159,00	-	-	-	-	35.216.725.756,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.946.879.241,00	334.082.557,00	-	-	-	-	334.082.557,00	77.605.000,00	-	-	77.605.000,00	4.203.356.798,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	34.665.427.089,19	3.781.004.512,00	-	-	-	-	3.781.004.512,00	-	-	179.050.000,00	179.050.000,00	38.267.381.601,19
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.144.152.824,00	1.317.517.280,00	-	-	-	-	1.317.517.280,00	-	-	-	-	17.461.670.104,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.548.933.614,00	1.104.629.438,00	-	1,00	1.320.336.256,00	-	2.424.965.695,00	-	112.430.667,00	-	112.430.667,00	9.861.468.642,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.813.586.888,00	228.049.103,00	-	-	-	-	228.049.103,00	-	-	-	-	3.041.635.991,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	25.083.604.384,00	1.520.635.097,00	-	-	-	-	1.520.635.097,00	-	-	-	-	26.604.239.481,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	40.584.800.374,00	3.058.358.758,00	9.800.000,00	-	-	151.225.500,00	3.219.384.258,00	184.328.500,00	61.690.000,00	-	246.018.500,00	43.558.166.132,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	23.802.085.987,00	2.086.004.281,00	-	-	-	-	2.086.004.281,00	-	-	153.600.000,00	153.600.000,00	25.734.490.268,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.120.891.928,00	146.580.155,00	-	-	-	-	146.580.155,00	45.456.700,00	-	-	45.456.700,00	3.222.015.383,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2022 Audited	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2023
			Beban Penyusutan	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Penghapusan Tahun 2023	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
					Kurang Catat	Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan							
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.219.930.140,00	2.865.524.249,00	-	1.333.428,00	-	-	2.866.857.677,00	-	-	-	-	36.086.787.817,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.140.241.688,00	123.192.144,00	-	-	-	-	123.192.144,00	22.275.000,00	-	-	22.275.000,00	2.241.158.832,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	2.075.860.508,00	158.050.789,00	-	-	-	-	158.050.789,00	-	-	-	-	2.233.911.297,00
26	Kecamatan Karangasem	3.637.111.582,00	277.740.111,00	-	-	-	-	277.740.111,00	30.255.000,00	-	-	30.255.000,00	3.884.596.693,00
27	Kecamatan Abang	1.526.691.207,00	120.946.261,00	-	-	-	-	120.946.261,00	-	-	-	-	1.647.637.468,00
28	Kecamatan Kubu	1.822.016.766,00	155.976.688,00	-	-	-	-	155.976.688,00	-	-	-	-	1.977.993.454,00
29	Kecamatan Bebandem	1.939.195.953,00	83.530.950,00	-	-	-	-	83.530.950,00	-	-	-	-	2.022.726.903,00
30	Kecamatan Selat	2.166.961.725,00	103.242.031,00	-	-	-	-	103.242.031,00	-	-	-	-	2.270.203.756,00
31	Kecamatan Rendang	1.325.143.213,00	49.964.696,00	-	-	-	-	49.964.696,00	-	-	-	-	1.375.107.909,00
32	Kecamatan Sidemen	1.870.404.061,00	132.377.620,00	-	-	-	-	132.377.620,00	-	-	-	-	2.002.781.681,00
33	Kecamatan Manggis	1.428.684.355,00	43.671.828,00	-	-	-	-	43.671.828,00	-	-	-	-	1.472.356.183,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.792.288.754,00	84.902.689,00	-	-	-	-	84.902.689,00	23.650.000,00	-	-	23.650.000,00	1.853.541.443,00
								-					
JUMLAH		1.956.649.602.082,39	143.017.495.087,04	378.696.000,00	446.347.298,00	4.371.016.972,00	483.875.500,00	148.697.430.857,04	4.495.479.244,97	593.192.534,00	483.875.500,00	5.572.547.278,97	2.099.774.485.660,46

Daftar Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Alamat	Saldo 31 Des 2021	Ketetapan	Pelunasan	Saldo 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6-7)
A. Piutang Pajak Hotel							
	Bintang 5						
1	Hotel Amankila	10001154.04.02	Manggis	306.149.536,00	-	-	306.149.536,00
	Bintang 3						
1	Hotel Alila	10003323.04.02	Buitan	157.174.268,77	-	-	157.174.268,77
2	Hotel Tulamben Bali	10005022.05.08	Tulamben	61.603.203,45	-	-	61.603.203,45
	Melati 3						
1	Candidasa BB	10000003.01.04	Candidasa	110.659.759,00	-	-	110.659.759,00
2	Balina BB	10000017.04.02	Buitan	135.615.259,58	-	-	135.615.259,58
3	Hotel Bali Samudra	10000785.04.07	Nyuhtebel	34.832.605,00	-	-	34.832.605,00
	Melati 1						
1	Home Stay Pandawa	10000026.01.04	Candidasa	4.215.740,00	-	-	4.215.740,00
2	Serikandi Beach	10000336.01.04	Candidasa	275.325,00	-	-	275.325,00
3	Villa Amlapura	10006447.01.01	Amlapura	500,00	-	-	500,00
Jumlah Piutang Pajak Hotel				810.526.196,80	-	-	810.526.196,80
B. Piutang Pajak Restoran							
	Restoran						
1	Rest. Hawaii	20000107.01.04	Candidasa	748.800,00	-	-	748.800,00
2	Bar Bir Garden	20000696.01.04	Candidasa	799.200,00	-	-	799.200,00
3	Ciao Restaurant	20001138.01.04	Candidasa	5.747.406,00	-	-	5.747.406,00
4	Rest. Srikandi	20001288.01.04	Candidasa	597.787,50	-	-	597.787,50
5	Rest. Prima Bambu	20001307.03.02	Ababi	12.708.018,00	-	-	12.708.018,00
6	Rest. Taman Tirta	20001327.08.01	Menanga	47.966.720,64	-	-	47.966.720,64
7	Rest. Sumber Rasa	20001331.01.01	Amlapura	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
8	Rest Bukit Jambul/ Green Hills	20002958.08.06	Pesaban	31.907.207,50	-	-	31.907.207,50
	Warung/Rumah Makan						
1	W R. Nym. Sudana	20000074.01.02	Subagan	302.400,00	-	-	302.400,00
2	W R. Samsudin	20000096.01.01	Amlapura	450.000,00	-	-	450.000,00
3	W R. Saparua II	20000335.01.02	Subagan	466.800,00	-	-	466.800,00
4	W R. Ni Wayan Putu	20000672.03.02	Tirta Gangga	117.000,00	-	-	117.000,00
5	W R. Jawa Timur	20001139.01.02	Subagan	828.000,00	-	-	828.000,00
6	W R. Yulia	20001140.01.01	Amlapura	549.000,00	-	-	549.000,00
	Cafe						
1	Tirtagangga Cafe	20001125.03.02	Tirta Gangga	750.000,00	-	-	750.000,00
Jumlah Piutang Restoran				105.688.339,64	-	-	105.688.339,64
C. Piutang Pajak Air Tanah							
1	Hotel Amankila	8000.7698.03.08	Manggis	4.328.000,00	-	-	4.328.000,00
2	Candi Beach Cottage	8000.7702.04.07	Nyuh Tebel	5.689.200,00	-	-	5.689.200,00
3	Hotel Candidasa Beach II	8000.7737.01.04	Candidasa	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00
Jumlah Piutang Pajak Air Tanah				24.417.200,00	-	-	24.417.200,00
Total Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan				940.631.736,44	-	-	940.631.736,44

DAFTAR ASET TETAP DALAM KONDISI RUSAK BERAT 31 DESEMBER 2023

No	OPD	Jenis Aset Tetap				Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 - 7
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	30.755.779.515,97	11.532.017.484,04	1.364.000,00	9.534.685.194,71	40.414.167.312,00	11.409.678.882,72
2	Dinas Kesehatan	9.456.269.411,22	836.364.591,85	1.000.000,00	-	9.790.811.365,22	502.822.637,85
3	Rumah Sakit Umum Daerah	30.736.435.598,80	75.542.500,00	-	5.499.000,00	30.729.007.722,00	88.469.376,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.292.720.386,00	59.000.000,00	14.332.257.200,00	-	12.409.884.921,67	3.274.092.664,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	80.336.410,00	-	-	211.041.000,00	78.047.661,00	213.329.749,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	252.177.059,36	-	-	-	252.177.059,36	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	445.594.127,00	-	-	-	432.423.279,00	13.170.848,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.528.833.954,80	-	-	-	1.526.126.455,80	2.707.499,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	454.829.333,00	-	-	-	454.268.917,00	560.416,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.444.821.375,77	14.000.000,00	9.965.000,00	-	2.398.969.197,00	69.817.178,77
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	747.728.800,00	-	-	-	747.596.085,00	132.715,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	180.865.801,00	-	-	-	180.757.468,00	108.333,00
13	Dinas Perhubungan	1.765.234.580,97	-	463.000.000,00	-	2.210.091.764,97	18.142.816,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	662.763.493,00	-	-	-	662.763.493,00	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	369.603.457,00	-	-	-	363.145.207,00	6.458.250,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	904.880.831,00	-	3.925.000,00	166.466.000,00	894.724.425,00	180.547.406,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	547.954.360,00	1.130.690.000,00	488.049.000,00	77.014.000,00	1.683.978.482,00	559.728.878,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	341.053.050,00	-	-	9.416.350,00	339.923.883,00	10.545.517,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.931.699.755,00	951.673.400,00	1.400.705.850,00	4.000.000,00	3.450.005.600,00	838.073.405,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	3.931.823.087,00	363.974.500,00	-	37.455.000,00	4.235.644.273,00	97.608.314,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	1.009.294.050,00	-	-	-	1.004.845.237,00	4.448.813,00

No	OPD	Jenis Aset Tetap				Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 - 7
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.008.014.481,00	-	-	51.850.000,00	1.007.803.015,00	52.061.466,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	976.748.016,00	14.000.000,00	-	-	979.232.182,00	11.515.834,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	312.367.400,00	-	-	-	309.913.483,00	2.453.917,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	594.330.650,00	-	-	-	586.455.733,00	7.874.917,00
26	Kecamatan Karangasem	263.354.855,00	-	-	-	262.496.855,00	858.000,00
27	Kecamatan Abang	155.488.000,00	111.820.000,00	-	-	233.681.349,00	33.626.651,00
28	Kecamatan Kubu	163.595.800,00	-	-	-	162.555.800,00	1.040.000,00
29	Kecamatan Bebandem	157.881.250,00	2.500.000,00	-	-	159.886.458,00	494.792,00
30	Kecamatan Selat	75.480.000,00	-	-	-	75.480.000,00	-
31	Kecamatan Rendang	167.713.000,00	-	-	-	167.604.668,00	108.332,00
32	Kecamatan Sidemen	66.736.361,00	-	-	-	66.736.361,00	-
33	Kecamatan Manggis	122.059.916,00	-	-	-	122.059.916,00	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.188.220.025,00	-	-	3.000.000,00	1.188.220.025,00	3.000.000,00
	Jumlah	95.092.688.190,89	15.091.582.475,89	16.700.266.050,00	10.100.426.544,71	119.581.485.653,02	17.403.477.608,47

Daftar Deposito Uang Jaminan Reklamasi Yang Masih Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem

No	Nama	Alamat	Tanggal Bilyet	Nomor Bilyet	Nilai Bilyet yang Masih Dikuasai	Nilai Bilyet yang Sudah Dicairkan
1	I Ketut Dastra	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	06/05/1999	01.03426-6	2.500.000,00	-
2	I Nyoman Wira	Bukit, Sukadana, Kubu	06/05/1999	01.03426-6	2.500.000,00	-
3	I Wayan Putu Gde Artawa.SE	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	06/05/1999	01.03426-6	1.250.000,00	-
4	I Nyoman Mangku	Bukit, Sukadana, Kubu	24/06/1999	01.03671-3	2.500.000,00	-
5	I Wayan Karsi	Lebih, Sebudi, Selat	03/09/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
6	I Nengah Astawa		03/09/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
7	I Wayan Sumerta	Pura, Sebudi, Selat	03/09/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
8	Wy.Tusan Darsana	Lebah, Sukadana, Kubu	03/09/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
9	Drs.I Ketut Giri	Dukuh, Kubu	03/09/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
10	I N.Tedun Pandetra		11/10/2000	01.04377-8	2.500.000,00	-
11	I Komang Sumerati	Cucut, Ban, Kubu	06/06/2001	01.04502-7	2.500.000,00	-
12	I Nengah Subali	Eka Adnyana, Tianyar, Kubu	06/06/2001	01.04502-7	2.500.000,00	-
13	I Gede Somantapa	Lebah, Sukadana, Kubu	21/03/2002	0104730-9	-	2.500.000,00
14	I Made Mustika Sari	Umanyar, ababi, Abang	10/06/2002	0104784-1	2.500.000,00	-
15	I Wayan Surem	Telungbhuana, Sebudi, Selat	24/01/2002	0104677-9	2.500.000,00	-
16	I Gusti Lanang Putu	Badeg Kelodan, Sebudi, Selat	07/05/2002	01.04769-3	2.500.000,00	-
17	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	24/06/2002	01.04805-3	2.500.000,00	-
18	Putu Sutrepti	Bukit, Sukadana, Kubu	16/07/2002	01.04817-1	5.000.000,00	-
19	I Made Swadiaya	Nangka, Bhuana Giri, Bebandem	07/08/2003	01.05097-7	-	2.500.000,00
20	I Gede Beleleng	Eka Adnyana, Tianyar, Kubu	10/06/2004	01.05277-9	2.500.000,00	-
21	Ir.I Made Palayuta	Kesimpar, Besakih, Rendang	05/08/2004	01.05310-3	10.000.000,00	-
22	I Nyoman Sidia	Badeg tengah, Sebudi, Selat	24/09/2004	01.05337-0	5.000.000,00	-
23	I Nengah Tunas	Dinas Bukit, Sukadana, Kubu	11/11/2004	01.05359-1	2.500.000,00	-
24	Gusti Sudiarta	Badeg Tengah, Sebudi, Selat	20/12/2004	01.05374-7	7.500.000,00	-
25	I Wayan Karsi	Lebih, Sebudi, Selat	03/01/2005	01.05375-9	5.000.000,00	-
26	I Made Suparta Yasa	Badeg Tunggal, Sebudi, Selat	13/04/2005	03.0105410-7	7.500.000,00	-
27	Putu Budi Harijane	Yeha, Sebudi, Selat	10/05/2005	01.05420-1	7.500.000,00	-
28	I Nyoman Gede	Badeg Kelodan, Sebudi, Selat	16/05/2005	01.05422-3	10.000.000,00	-
29	I Ketut Buleleng	Ban, Ban, Kubu	23/05/2005	01.05404-0	1.250.000,00	-
30	I Nengah Sumardi SE	Liligundi, Bebandem	30/05/2005	01.05425-9	10.000.000,00	-
31	I Made Mustika Sari	Butus, Bhuana Giri, Bebandem	31/05/2005	01.05426-1	7.500.000,00	-
32	A.A.Ketut Sutrisna	Telung Bhuana, Sebudi, Selat	11/07/2005	01.05436-7	10.000.000,00	-
33		Pura, Sebudi, Selat	19/07/2005	01.05442-9	5.000.000,00	-
34	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	19/07/2005	01.05443-1	5.000.000,00	-
35	I Wayan Kusuma Jaya	Lebih, Sebudi, Selat	22/07/2005	01.05446-6	7.500.000,00	-
36	I Nyoman Sidia	Badeg tengah, Sebudi, Selat	19/10/2005	01.05486-7	2.500.000,00	-
37	I Wayan Prasa	Telung Bhuana, Sebudi, Selat	02/12/2005	03.0100009-3	8.000.000,00	-
38	I Komang Geria	Untalan, Jungutan, Bebandem	22/03/2006	030100059-8	8.000.000,00	-
39	I Nengah Sumardi,SE	Kreteg, Bebandem, Bebandem	25/05/2006	030100089-7	4.000.000,00	-
40	I Nyoman Ririg	Panek, Ban, Kubu	13/09/2006	030100152-8	2.500.000,00	-
41	I Nengah Subrata(Campuhan)	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	15/02/2007	030100213-2	-	5.000.000,00
42	I Made Trisnawati	Yeha, Sebudi, Selat	16/08/2007	030100291-2	10.000.000,00	-
43	I Nyoman Warta	Lebih, Sebudi, Selat	02/10/2007	03.0100316-2	10.000.000,00	-
44	I Ketut Dayuh	Batu Dawe, Tulamben, Kubu	29/10/2007	030100322-7	-	10.000.000,00
45	I GB Wahyu Diatmika		15/01/2009	030100517-2	49.914.950,00	-
46	Ir. I Ketut Wiadnya	Kubu	09/09/2009	030100606-0	49.914.950,00	-
47	I Gusti AR Pirawana	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	03/12/2009	030100666-9	3.750.000,00	-
48	I Gede Sandi	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	03/12/2009	03.0100665-7	1.250.000,00	-
49	I Komang Dudun	Bukit, Sukadana, Kubu	03/12/2009	03.0100664-5	2.500.000,00	-
50	I Nengah Sari	Nusu, Sukadana, Kubu	03/12/2009	03.0100663-3	2.500.000,00	-
51	I Gede Ardana	Muntig, Tulamben, Kubu	03/12/2009	03.0100662-0	2.500.000,00	-
52	I Nyoman Jangkrik	Bukit Paon, Bhuana Giri, Bebandem	01/12/2010	03.0100875-8	-	49.914.950,00
53	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	08/02/2011	03.0100932-4	49.914.950,00	-
54	I Gusti Made Tusan	Bhuana Giri, Bebandem	30/05/2011	03.0100993-4	-	49.914.950,00
55	CV Suas Karya	Batudawe, Kubu	08/11/2011	03.01.01096-9	-	49.914.950,00
56	PT Teguh Karya Raharjo	Nusu, Sukadana, Kubu	29/02/2012	03.01.01178-0	49.914.950,00	-
57	I Nengah Subrata (Campuhan)	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	02/05/2012	03.01.01204-6	-	44.914.950,00
58	I Ketut Wirata	Sebudi, Selat	10/06/2012	03.01.01205-8	49.914.950,00	-
59	I Nengah Darma	Tukad yeh sah, Rendang	05/07/2012	03.01.01242-4	-	49.914.950,00
60	I Komang Wirawan	Kubu	02/10/2012	03.01.01281-4 /	-	49.914.950,00
61	I Ketut Ardika (Zero)	Dharmawinangun, Kubu	16/10/2012	03.01.01291-7	-	49.914.950,00
62	PT. Surya Mas Jaya Raya	Kubu	24/04/2013	03.01.01397-3	49.914.950,00	-
63	I Gede Ariana (Catur Karya)	Kubu	24/06/2013	03.01.01422-6	-	49.914.950,00
64	Nyoman Mangku (Sari Bumi)	Sukadana, Kubu	04/07/2013	03.01.01428-8	-	49.914.950,00
65	I Gede Rida	Kubu	30/09/2013	03.01.01453-7	49.914.950,00	-
66	I Kdk Armawa (Alam Bumi D)	Sukadana, Kubu	06/11/2013	03.01.01461-6	49.914.950,00	-
	A.A Lanang Ag Ananda				-	-
67	Anurata I	Kubu	03/03/2014	03.01.01443-4	49.914.950,00	-
	(I Nyoman Munia Dana)				-	-
68	I Nengah Subrata (Tukad Batang Sari)	Kubu	05/03/2014	03.01.01445-8	-	49.914.950,00
69	I Nyoman Suastika Dwiyana RBC	Kubu	05/03/2014	03.01.01446-1	-	49.914.950,00

No	Nama	Alamat	Tanggal Bilyet	Nomor Bilyet	Nilai Bilyet yang Masih Dikuasai	Nilai Bilyet yang Sudah Dicairkan
70	I Gede Agung Suparwata,SH	Kubu	05/03/2014	03.01.01447-2	-	49.914.950,00
71	I Made Sudarsana (anom jaya)	Kubu	26/05/2014	03.01.01467-8	-	49.914.950,00
72	I Kadek Budiarta (mahendra Stone)	Kubu	26/05/2014	03.01.01468-1 /	49.914.950,00	-
73	I Gusti Made Tusan (DBK)	Bebandem	02/07/2014	03.01.01712- 5	49.914.950,00	-
74	I Nengah Subrata (Soma Ribek)	BD Darmawinangun, tianyar,kubu	08/07/2014	03.01.01477-0	-	49.914.950,00
75	I Gst Ag Bgs Oka Wisnawa (wayan	BD Pejeng, Rendang	08/07/2014	03.01.01476-9 /	49.914.950,00	-
76	I Nyoman Arya (Pasir Rejeki)	BD. Mekar sari, Desa Sukadana, Kubu	14/07/2014	03.01.01478-3	-	49.914.950,00
77	I Gede Mangku Surata (alam bumi	Kubu	23/07/2014	03.01.01479-5	-	49.914.950,00
78	I Nengah Birit (Arsa Bhuaana	Bebandem	02/09/2014	03.01.01488-6	-	49.914.950,00
79	I Nyoman Mangku Lebih	Kubu	05/09/2014	03.01.01490-	49.914.950,00	-
80	I Made Gara (Roy CS)	Kubu	22/10/2014	03.01.01502-4	-	49.914.950,00
81	I Nyoman Munia Dana (Hanurata II)	Kubu	04/11/2014	03.01.01505-1	49.914.950,00	-
82	I Nyoman Tarka (Harta Rasih)	Kubu	06/11/2014	03.01.01506-	-	49.914.950,00
83	I Gede Somantapa(giri mandara)	Kubu	12/11/2014	03.01.01508-6	-	47.414.950,00
84	I Ketut Dayuh (Abu Pasir Indah)	Tulamben	11/02/2015	03.01.01528-2	-	39.914.950,00
85	I Made Ardana / edwin pieterzs	Baturinggit, Desa Baturinggit	26/02/2015	03.01.01530-9	-	49.914.950,00
86	I Gede Ariana (Panca Pandawa)	Darmawinangun, Tianyar, Kubu	29/05/2015	03.01.01553-0	-	49.914.950,00
87	I Made Suweca (pandawa jaya)	Darmawinangun, Tianyar, Kubu	08/07/2015	03.01.01566-1	-	49.914.950,00
88	PT . Octa (A.A Ayu Mahayuni)	Nusu, Sukadana, Kubu	30/12/2015	03.01.01607-8	99.829.900,00	-
89	Guna Karya (I Made sudarsana)	Nusu, Sukadana, Kubu	26/01/2016	03.01.01024-8	49.914.950,00	-
90	PT. Bumi Pasir Mandiri	Dukuh, Tulamben, Kubu	25/02/2016	03.01.01634-0	-	249.574.750,00
			Jumlah		1.053.554.150,00	1.450.033.550,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
300	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. Platinum Jaya Makmur	18-03-2023	17-03-2024	12	1.635.000,00	136.250,00		9	1.226.250,00		1.226.250,00	408.750,00		408.750,00
301	BPKAD (Pajak Reklame)	MIXUE SUDIRMAN	25-05-2023	24-05-2024	12	690.000,00	57.500,00		7	402.500,00		402.500,00	287.500,00		287.500,00
302	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. Ryan Grafika	20-03-2023	19-03-2024	12	627.000,00	52.250,00		9	470.250,00		470.250,00	156.750,00		156.750,00
303	BPKAD (Pajak Reklame)	JFC / Padangkerta	08-04-2023	07-04-2024	12	735.000,00	61.250,00		9	551.250,00		551.250,00	183.750,00		183.750,00
304	BPKAD (Pajak Reklame)	JFC Bebandem	25-04-2023	24-04-2024	12	696.000,00	58.000,00		8	464.000,00		464.000,00	232.000,00		232.000,00
305	BPKAD (Pajak Reklame)	ACK Karanglangko	07-04-2023	06-04-2024	12	756.600,00	63.050,00		9	567.450,00		567.450,00	189.150,00		189.150,00
306	BPKAD (Pajak Reklame)	PRIME GENERATION	19-04-2023	18-04-2024	12	870.000,00	72.500,00		8	580.000,00		580.000,00	290.000,00		290.000,00
307	BPKAD (Pajak Reklame)	Yagya Dasa Klinik	28-04-2023	27-04-2024	12	876.000,00	73.000,00		8	584.000,00		584.000,00	292.000,00		292.000,00
308	BPKAD (Pajak Reklame)	DFC	09-05-2023	08-05-2024	12	350.400,00	29.200,00		8	233.600,00		233.600,00	116.800,00		116.800,00
309	BPKAD (Pajak Reklame)	DFC	09-05-2023	08-05-2024	12	444.000,00	37.000,00		8	296.000,00		296.000,00	148.000,00		148.000,00
310	BPKAD (Pajak Reklame)	APOTEK SINDU RAJA FARMA	21-09-2023	20-09-2024	12	915.000,00	76.250,00		3	228.750,00		228.750,00	686.250,00		686.250,00
311	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	11-04-2023	10-04-2024	12	438.000,00	36.500,00		9	328.500,00		328.500,00	109.500,00		109.500,00
312	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	11-04-2023	10-04-2024	12	1.186.800,00	98.900,00		9	890.100,00		890.100,00	296.700,00		296.700,00
313	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. World Innovative Telecommunication	15-06-2023	14-06-2024	12	1.275.000,00	106.250,00		7	743.750,00		743.750,00	531.250,00		531.250,00
314	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. World Innovative Telecommunication	13-06-2023	12-06-2024	12	915.000,00	76.250,00		7	533.750,00		533.750,00	381.250,00		381.250,00
315	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. World Innovative Telecommunication	15-06-2023	14-06-2024	12	1.145.400,00	95.450,00		7	668.150,00		668.150,00	477.250,00		477.250,00
316	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. World Innovative Telecommunication	15-06-2023	14-06-2024	12	1.231.800,00	102.650,00		7	718.550,00		718.550,00	513.250,00		513.250,00
317	BPKAD (Pajak Reklame)	PT BWF SUBAGAN KARANGASEM	26-04-2023	25-04-2024	12	555.000,00	46.250,00		8	370.000,00		370.000,00	185.000,00		185.000,00
318	BPKAD (Pajak Reklame)	PT BWF SUBAGAN KARANGASEM	26-04-2023	25-04-2024	12	426.000,00	35.500,00		8	284.000,00		284.000,00	142.000,00		142.000,00
319	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. KaryaTeknik Indonesia	21-01-2023	20-01-2024	12	516.000,00	43.000,00		11	473.000,00		473.000,00	43.000,00		43.000,00
320	BPKAD (Pajak Reklame)	Komang Bayu/Bandung Collection	04-07-2023	03-07-2024	12	915.000,00	76.250,00		6	457.500,00		457.500,00	457.500,00		457.500,00
321	BPKAD (Pajak Reklame)	ACK Bebandem	21-08-2023	20-08-2024	12	717.600,00	59.800,00		4	239.200,00		239.200,00	478.400,00		478.400,00
322	BPKAD (Pajak Reklame)	APOTEK PAYE FARMA	11-07-2023	10-07-2024	12	735.000,00	61.250,00		6	367.500,00		367.500,00	367.500,00		367.500,00
323	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. SEKAR TUNJUNG BIRU/ BALI MED KRASEMA	19-07-2023	18-07-2024	12	3.795.000,00	316.250,00		5	1.581.250,00		1.581.250,00	2.213.750,00		2.213.750,00
324	BPKAD (Pajak Reklame)	UD WIPRA	21-07-2023	20-07-2024	12	627.000,00	52.250,00		5	261.250,00		261.250,00	365.750,00		365.750,00
325	BPKAD (Pajak Reklame)	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	08-08-2023	07-08-2024	12	1.501.800,00	125.150,00		5	625.750,00		625.750,00	876.050,00		876.050,00
326	BPKAD (Pajak Reklame)	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	08-08-2023	07-08-2024	12	2.787.000,00	232.250,00		5	1.161.250,00		1.161.250,00	1.625.750,00		1.625.750,00
327	BPKAD (Pajak Reklame)	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	08-08-2023	07-08-2024	12	850.200,00	70.850,00		5	354.250,00		354.250,00	495.950,00		495.950,00
328	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. Media Putra Bangsa	14-08-2023	13-08-2024	12	696.000,00	58.000,00		5	290.000,00		290.000,00	406.000,00		406.000,00
329	BPKAD (Pajak Reklame)	OPTIK INTERNASIONAL	05-09-2023	04-09-2024	12	915.000,00	76.250,00		4	305.000,00		305.000,00	610.000,00		610.000,00
330	BPKAD (Pajak Reklame)	OPTIK INTERNASIONAL	05-09-2023	04-09-2024	12	915.000,00	76.250,00		4	305.000,00		305.000,00	610.000,00		610.000,00
331	BPKAD (Pajak Reklame)	Klinik Penta Medika	14-06-2023	13-06-2024	12	2.316.000,00	193.000,00		7	1.351.000,00		1.351.000,00	965.000,00		965.000,00
332	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	912.000,00	76.000,00		5	380.000,00		380.000,00	532.000,00		532.000,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
333	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	1.038.000,00	86.500,00		5	432.500,00		432.500,00	605.500,00		605.500,00
334	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	519.000,00	43.250,00		5	216.250,00		216.250,00	302.750,00		302.750,00
335	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	1.920.000,00	160.000,00		5	800.000,00		800.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
336	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	4.356.000,00	363.000,00		5	1.815.000,00		1.815.000,00	2.541.000,00		2.541.000,00
337	BPKAD (Pajak Reklame)	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	09-08-2023	08-08-2024	12	2.895.000,00	241.250,00		5	1.206.250,00		1.206.250,00	1.688.750,00		1.688.750,00
338	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. BCA Tbk	26-09-2023	25-09-2024	12	735.600,00	61.300,00		3	183.900,00		183.900,00	551.700,00		551.700,00
339	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. BCA Tbk	26-09-2023	25-09-2024	12	328.800,00	27.400,00		3	82.200,00		82.200,00	246.600,00		246.600,00
340	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. BCA Tbk	26-09-2023	25-09-2024	12	700.400,00	58.366,67		3	175.100,00		175.100,00	525.300,00		525.300,00
341	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. BCA Tbk	26-09-2023	25-09-2024	12	378.800,00	31.566,67		3	94.700,00		94.700,00	284.100,00		284.100,00
342	BPKAD (Pajak Reklame)	PT. BCA Tbk	26-09-2023	25-09-2024	12	328.800,00	27.400,00		3	82.200,00		82.200,00	246.600,00		246.600,00
343	BPKAD (Pajak Reklame)	UD.Mawar Sari	16-08-2023	15-08-2024	12	804.000,00	67.000,00		4	268.000,00		268.000,00	536.000,00		536.000,00
344	BPKAD (Pajak Reklame)	UD.Mawar Sari	16-08-2023	15-08-2024	12	843.000,00	70.250,00		4	281.000,00		281.000,00	562.000,00		562.000,00
345	BPKAD (Pajak Reklame)	SPBU ABIAN SOAN	21-09-2023	20-09-2024	12	4.515.000,00	376.250,00		3	1.128.750,00		1.128.750,00	3.386.250,00		3.386.250,00
346	BPKAD (Pajak Reklame)	GM Conblock	06-09-2023	05-09-2024	12	1.059.000,00	88.250,00		4	353.000,00		353.000,00	706.000,00		706.000,00
347	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Gadai Mas	06-09-2023	05-09-2024	12	870.000,00	72.500,00		4	290.000,00		290.000,00	580.000,00		580.000,00
348	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Gadai Mas	06-09-2023	05-09-2024	12	876.000,00	73.000,00		4	292.000,00		292.000,00	584.000,00		584.000,00
349	BPKAD (Pajak Reklame)	ANEMONE	07-09-2023	06-09-2024	12	561.000,00	46.750,00		4	187.000,00		187.000,00	374.000,00		374.000,00
350	BPKAD (Pajak Reklame)	ANEMONE	07-09-2023	06-09-2024	12	600.000,00	50.000,00		4	200.000,00		200.000,00	400.000,00		400.000,00
351	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. Beruang Mas Putra	05-07-2023	04-07-2024	12	1.059.000,00	88.250,00		6	529.500,00		529.500,00	529.500,00		529.500,00
352	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Mustika Harapan Jaya	28-08-2023	27-08-2024	12	3.132.600,00	261.050,00		4	1.044.200,00		1.044.200,00	2.088.400,00		2.088.400,00
353	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.INDOBAT (MD JEGER)	18-09-2023	17-09-2024	12	465.000,00	38.750,00		3	116.250,00		116.250,00	348.750,00		348.750,00
354	BPKAD (Pajak Reklame)	I Wayan Darma Saputra	18-09-2023	17-09-2024	12	375.000,00	31.250,00		3	93.750,00		93.750,00	281.250,00		281.250,00
355	BPKAD (Pajak Reklame)	I Gede Agia Suaputra	05-10-2023	04-10-2024	12	876.000,00	73.000,00		3	219.000,00		219.000,00	657.000,00		657.000,00
356	BPKAD (Pajak Reklame)	I Gede Agia Suaputra	05-10-2023	04-10-2024	12	444.000,00	37.000,00		3	111.000,00		111.000,00	333.000,00		333.000,00
357	BPKAD (Pajak Reklame)	ANEMONE KERTHA MANDALA	23-09-2023	22-09-2024	12	415.200,00	34.600,00		3	103.800,00		103.800,00	311.400,00		311.400,00
358	BPKAD (Pajak Reklame)	Komang Bayu Swastika	17-10-2023	16-10-2024	12	3.075.000,00	256.250,00		2	512.500,00		512.500,00	2.562.500,00		2.562.500,00
359	BPKAD (Pajak Reklame)	JNE / MD WISNU WEDA DWIJUANT	19-10-2023	18-10-2024	12	1.005.000,00	83.750,00		2	167.500,00		167.500,00	837.500,00		837.500,00
360	BPKAD (Pajak Reklame)	JNE / MD WISNU WEDA DWIJUANT	19-10-2023	18-10-2024	12	1.005.000,00	83.750,00		2	167.500,00		167.500,00	837.500,00		837.500,00
361	BPKAD (Pajak Reklame)	JNT / I KM VITO SUYADNYANA	19-10-2023	18-10-2024	12	915.000,00	76.250,00		2	152.500,00		152.500,00	762.500,00		762.500,00
362	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	21-10-2023	20-10-2024	12	2.445.000,00	203.750,00		2	407.500,00		407.500,00	2.037.500,00		2.037.500,00
363	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	21-10-2023	20-10-2024	12	843.000,00	70.250,00		2	140.500,00		140.500,00	702.500,00		702.500,00
364	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	20-10-2023	19-10-2024	12	1.452.000,00	121.000,00		2	242.000,00		242.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
365	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	18-10-2023	17-10-2024	12	1.452.000,00	121.000,00		2	242.000,00		242.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
366	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	18-10-2023	17-10-2024	12	1.452.000,00	121.000,00		2	242.000,00		242.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
367	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	20-10-2023	19-10-2024	12	1.491.000,00	124.250,00		2	248.500,00		248.500,00	1.242.500,00		1.242.500,00
368	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	20-10-2023	19-10-2024	12	1.452.000,00	121.000,00		2	242.000,00		242.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
369	BPKAD (Pajak Reklame)	Pegadaian	21-10-2023	20-10-2024	12	1.452.000,00	121.000,00		2	242.000,00		242.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
370	BPKAD (Pajak Reklame)	Apotek K 24	22-11-2023	21-11-2024	12	375.000,00	31.250,00		1	31.250,00		31.250,00	343.750,00		343.750,00
371	BPKAD (Pajak Reklame)	I Wayan Merta Sukadana	02-11-2023	01-11-2024	12	804.000,00	67.000,00		2	134.000,00		134.000,00	670.000,00		670.000,00
372	BPKAD (Pajak Reklame)	Labihiir	27-10-2023	26-10-2024	12	375.000,00	31.250,00		2	62.500,00		62.500,00	312.500,00		312.500,00
373	BPKAD (Pajak Reklame)	CATUR ARTHA, ST (JFC CULIK)	11-12-2022	10-12-2023	12	696.000,00	58.000,00		1	58.000,00		58.000,00	638.000,00		638.000,00
374	BPKAD (Pajak Reklame)	CATUR ARTHA, ST (JFC CULIK)	27-01-2023	26-01-2024	12	696.000,00	58.000,00		11	638.000,00		638.000,00	58.000,00		58.000,00
375	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. Pasir Madawa / PT. Indomarco Prismatama	21-12-2032	20-12-2024	12	1.034.400,00	86.200,00		0	-		-	1.034.400,00		1.034.400,00
376	BPKAD (Pajak Reklame)	CV. Pasir Madawa / PT. Indomarco Prismatama	21-12-2023	20-12-2024	12	962.400,00	80.200,00		0	-		-	962.400,00		962.400,00
377	BPKAD (Pajak Reklame)	Rama Candidasa Resort & Spa	07-12-2023	06-12-2024	12	1.581.600,00	131.800,00		1	131.800,00		131.800,00	1.449.800,00		1.449.800,00
378	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Akar Daya	22-12-2023	05-01-2024	12	340.000,00	28.333,33		0	-		-	340.000,00		340.000,00
379	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.YAKULT	25-01-2023	24-01-2024	12	4.872.000,00	406.000,00		11	4.466.000,00		4.466.000,00	406.000,00		406.000,00
380	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.YAKULT	25-01-2023	24-01-2024	12	1.392.000,00	116.000,00		11	1.276.000,00		1.276.000,00	116.000,00		116.000,00
381	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	06-06-2023	05-06-2024	12	3.596.900,00	299.741,67		7	2.098.191,67		2.098.191,67	1.498.708,33		1.498.708,33
382	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	06-06-2023	05-06-2024	12	390.100,00	32.508,33		7	227.558,33		227.558,33	162.541,67		162.541,67
383	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	03-06-2023	02-06-2024	12	339.200,00	28.266,67		7	197.866,67		197.866,67	141.333,33		141.333,33
384	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	03-06-2023	02-06-2024	12	2.507.200,00	208.933,33		7	1.462.533,33		1.462.533,33	1.044.666,67		1.044.666,67
385	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	03-06-2023	02-06-2024	12	597.800,00	49.816,67		7	348.716,67		348.716,67	249.083,33		249.083,33
386	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	27-05-2023	26-05-2024	12	428.700,00	35.725,00		7	250.075,00		250.075,00	178.625,00		178.625,00
387	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	27-05-2023	26-05-2024	12	852.600,00	71.050,00		7	497.350,00		497.350,00	355.250,00		355.250,00
388	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	1.381.600,00	115.133,33		7	805.933,33		805.933,33	575.666,67		575.666,67
389	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	537.000,00	44.750,00		7	313.250,00		313.250,00	223.750,00		223.750,00
390	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	261.900,00	21.825,00		7	152.775,00		152.775,00	109.125,00		109.125,00
391	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	303.400,00	25.283,33		7	176.983,33		176.983,33	126.416,67		126.416,67
392	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	1.381.600,00	115.133,33		7	805.933,33		805.933,33	575.666,67		575.666,67
393	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	537.000,00	44.750,00		7	313.250,00		313.250,00	223.750,00		223.750,00
394	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	15-05-2024	12	261.900,00	21.825,00		7	152.775,00		152.775,00	109.125,00		109.125,00
395	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	16-05-2023	05-05-2024	12	303.400,00	25.283,33		7	176.983,33		176.983,33	126.416,67		126.416,67
396	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	08-09-2023	07-09-2024	12	303.400,00	25.283,33		4	101.133,33		101.133,33	202.266,67		202.266,67
397	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	08-09-2023	07-09-2024	12	261.900,00	21.825,00		4	87.300,00		87.300,00	174.600,00		174.600,00
398	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	08-09-2023	07-09-2024	12	537.000,00	44.750,00		4	179.000,00		179.000,00	358.000,00		358.000,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
399	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	08-09-2023	07-09-2024	12	1.381.600,00	115.133,33		4	460.533,33		460.533,33	921.066,67		921.066,67
400	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Bali Agung Water	25-09-2023	24-09-2024	12	4.555.200,00	379.600,00		3	1.138.800,00		1.138.800,00	3.416.400,00		3.416.400,00
401	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Bali Agung Water	25-09-2023	24-09-2024	12	1.777.400,00	148.116,67		3	444.350,00		444.350,00	1.333.050,00		1.333.050,00
402	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Bali Agung Water	25-09-2023	24-09-2024	12	1.704.500,00	142.041,67		3	426.125,00		426.125,00	1.278.375,00		1.278.375,00
403	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Bali Agung Water	25-09-2023	24-09-2024	12	487.200,00	40.600,00		3	121.800,00		121.800,00	365.400,00		365.400,00
404	BPKAD (Pajak Reklame)	PT.Bali Agung Water	20-10-2023	19-10-2024	12	1.027.400,00	85.616,67		2	171.233,33		171.233,33	856.166,67		856.166,67
405	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	04-12-2023	03-12-2024	12	261.900,00	21.825,00		1	21.825,00		21.825,00	240.075,00		240.075,00
406	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	04-12-2023	03-12-2024	12	303.400,00	25.283,33		1	25.283,33		25.283,33	278.116,67		278.116,67
407	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	04-12-2023	03-12-2024	12	1.381.600,00	115.133,33		1	115.133,33		115.133,33	1.266.466,67		1.266.466,67
408	BPKAD (Pajak Reklame)	PT SENSATIA BOTANICALS	04-12-2023	03-12-2024	12	537.000,00	44.750,00		1	44.750,00		44.750,00	492.250,00		492.250,00
													-		
	JUMLAH - BPKAD				597.750.300,00			140.415.983,33		179.092.266,67	128.341.316,67	307.433.583,33	149.900.733,33	-	149.900.733,33
B. Ret. Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) - Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kerja															
1	Dinas Ketenagakerjaan	GERIA GIRI SHANTI .PT (DAVID WINSTON MITCHELL)BR. DINAS LEBAH DESA PURWAKERTI, KECAMATAN ABANG, KARANGASEM	10-12-2022	09-12-2023	12	18.120.000,00	1.510.000,00	1	1.510.000,00	11	-	16.610.000,00	16.610.000,00	-	-
2	Dinas Ketenagakerjaan	GERIA GIRI SHANTI .PT (LISELOTTE CLAIRE A VERHASSELT)BR. DINAS LEBAH DESA PURWAKERTI, KECAMATAN ABANG, KARANGASEM	10-12-2022	09-12-2023	12	18.120.000,00	1.510.000,00	1	1.510.000,00	11		16.610.000,00	16.610.000,00	-	-
3	Dinas Ketenagakerjaan	KUNCI UTAMA LAUTAN. PT. (KIRIL POPOV)BR. TENGADING, DESA ANTIGA, KECAMATAN MANGGIS KARANGASEM	16-11-2022	15-11-2023	12	18.120.000,00	1.510.000,00	1	1.510.000,00	11		16.610.000,00	16.610.000,00	-	-
4	Dinas Ketenagakerjaan	OCEAN SUN PT (MARTIN SENDER)JL. RAYA KUBU, DESA TULAMBEN, KECAMATAN KUBU KARANGASEM	23-11-2022	22-11-2023	12	18.480.000,00	1.540.000,00	1	1.540.000,00	11		16.940.000,00	16.940.000,00	-	-
5	Dinas Ketenagakerjaan	DREAM DIVERS BALI .PT (OLEG KRAVTSOV)BANJAR DINAS TULAMBEN, DESA TULAMBEN KECAMATAN KUBU KARANGASEM	19-12-2022	18-12-2023	12	18.360.000,00	1.530.000,00	0	-	12		18.360.000,00	18.360.000,00	-	-
6	Dinas Ketenagakerjaan	TIGA LAUT TIRTA. PT (JUN NAKAMATSU) JL. KETUT NATIH, BANJAR DINAS SELONI, DESA CULIK KECAMATAN ABANG KARANGASEM	11-01-2023	10-01-2024	12	18.300.000,00	1.525.000,00	0	-	12		18.300.000,00	18.300.000,00	-	-
7	Dinas Ketenagakerjaan	ABSOLUTE SCUBA INDONESIA PT	19-02-2023	18-02-2024	12	17.760.000,00	1.480.000,00			10	14.800.000,00		14.800.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
8	Dinas Ketenagakerjaan	PT ALTRA NUSANTARA TRADING	25-02-2023	24-02-2024	12	17.820.000,00	1.485.000,00			10	14.850.000,00		14.850.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)	02-03-2023	1-03-2024	12	17.820.000,00	1.485.000,00			10	14.850.000,00		14.850.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	PURI FIA MONA PT	22 -03-2023	21-03-2024	12	17.820.000,00	1.485.000,00			9	13.365.000,00		13.365.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
11	Dinas Ketenagakerjaan	DREAM DIVER BALI PT	07-04-2023	06-04-2023	12	17.820.000,00	1.485.000,00			9	13.365.000,00		13.365.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	PT.ALAM SEMPURNA	13-07-2023	12-07-2024	12	17.280.000,00	1.440.000,00			6	8.640.000,00		8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
13	Dinas Ketenagakerjaan	NUSANTARA ISLAND RESORTS,PT	05-07-2023	04-07-2024	12	17.340.000,00	1.445.000,00			6	8.670.000,00		8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
14	Dinas Ketenagakerjaan	EVOLUTION DIVER AMED. PT	04-06-2023	03-06-2024	12	18.060.000,00	1.505.000,00		7	10.535.000,00		10.535.000,00	7.525.000,00		7.525.000,00
15	Dinas Ketenagakerjaan	ABYSS DIVE CENTER PT	07-06-2023	06-06-2024	12	17.460.000,00	1.455.000,00		7	10.185.000,00		10.185.000,00	7.275.000,00		7.275.000,00
16	Dinas Ketenagakerjaan	ABYSS DIVE CENTER PT	11-06-2023	10-06-2024	12	17.460.000,00	1.455.000,00		7	10.185.000,00		10.185.000,00	7.275.000,00		7.275.000,00
17	Dinas Ketenagakerjaan	ABYSS DIVE CENTER PT	11-06-2023	10-06-2024	12	17.460.000,00	1.455.000,00		7	10.185.000,00		10.185.000,00	7.275.000,00		7.275.000,00
18	Dinas Ketenagakerjaan	PT.SIDDHARTHA DIVING CENTER	29-06-2023	28-06-2024	12	17.460.000,00	1.455.000,00		6	8.730.000,00		8.730.000,00	8.730.000,00		8.730.000,00
19	Dinas Ketenagakerjaan	PT NOFEAR DIVING BALI	17-06-2023	16-06-2024	12	17.580.000,00	1.465.000,00		6	8.790.000,00		8.790.000,00	8.790.000,00		8.790.000,00
20	Dinas Ketenagakerjaan	PT BALI WISATA TIRTA	12-07-2023	11-07-2024	12	17.640.000,00	1.470.000,00		6	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00		8.820.000,00
21	Dinas Ketenagakerjaan	PT.BALI CLUB DIVING CENTER	12-07-2023	11-07-2024	12	17.640.000,00	1.470.000,00		6	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00		8.820.000,00
22	Dinas Ketenagakerjaan	PT OCEAN GANG LEAGUE	07-07-2023	06-07-2024	12	17.820.000,00	1.485.000,00		6	8.910.000,00		8.910.000,00	8.910.000,00		8.910.000,00
23	Dinas Ketenagakerjaan	PT BALI WISATA TIRTA	18-07-2023	17-07-2024	12	17.820.000,00	1.485.000,00		5	7.425.000,00		7.425.000,00	10.395.000,00		10.395.000,00
24	Dinas Ketenagakerjaan	PT BALI PALMS RESORT	10-08-2023	09-08-2024	12	17.760.000,00	1.480.000,00		6	8.880.000,00		8.880.000,00	8.880.000,00		8.880.000,00
25	Dinas Ketenagakerjaan	DREAM DIVER BALI PT	31-07-2023	30-07-2024	12	17.640.000,00	1.470.000,00		6	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00		8.820.000,00
26	Dinas Ketenagakerjaan	GRIYA ASRI,PT	02-08-2023	01-08-2024	12	17.640.000,00	1.470.000,00		6	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00		8.820.000,00
27	Dinas Ketenagakerjaan	RELAX ENJOY RECHARGE,PT	18-09-2023	17-09-2024	12	17.580.000,00	1.465.000,00		3	4.395.000,00		4.395.000,00	13.185.000,00		13.185.000,00
28	Dinas Ketenagakerjaan	PT PURI WIRATA	01-08-2023	31 -07-2024	12	17.640.000,00	1.470.000,00		6	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00		8.820.000,00
29	Dinas Ketenagakerjaan	PARADISE DIVING INDONESIA,PT	19-08-2023	18 - 02-2024	6	8.850.000,00	1.475.000,00		4	5.900.000,00		5.900.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00
30	Dinas Ketenagakerjaan	PT ORGANIC MUSH HUB	14-09-2023	13 - 09-2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		4	5.960.000,00		5.960.000,00	11.920.000,00		11.920.000,00
31	Dinas Ketenagakerjaan	PT PONDOK TIRTA SELAM	07-09-2023	06-09 - 2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		4	5.960.000,00		5.960.000,00	11.920.000,00		11.920.000,00
32	Dinas Ketenagakerjaan	PT SIDEMEN PUTRA PADANGBAI	06-10-2023	05 - 10-2024	12	17.940.000,00	1.495.000,00		3	4.485.000,00		4.485.000,00	13.455.000,00		13.455.000,00
33	Dinas Ketenagakerjaan	RELAX BALI RESORT PT	08 -09-2023	07-09-2023	12	18.000.000,00	1.500.000,00		4	6.000.000,00		6.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
34	Dinas Ketenagakerjaan	RELAX BALI RESORT PT	03-09-2023	02-09-2024	12	18.000.000,00	1.500.000,00		4	6.000.000,00		6.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
35	Dinas Ketenagakerjaan	AMED FUNS DIVERS BALI,PT	18-08-2023	17-08-2024	12	18.000.000,00	1.500.000,00		4	6.000.000,00		6.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
36	Dinas Ketenagakerjaan	GANDAMAYU BLUE WATER,PT	29-08-2023	28-08-2024	12	17.940.000,00	1.495.000,00		4	5.980.000,00		5.980.000,00	11.960.000,00		11.960.000,00
37	Dinas Ketenagakerjaan	PENJELAJAHAN LAUT BIRU,PT	02-08-2023	01-08-2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		5	7.450.000,00		7.450.000,00	10.430.000,00		10.430.000,00
38	Dinas Ketenagakerjaan	BALINKI GEKO PT	15 -10-2023	14-10-2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		3	4.470.000,00		4.470.000,00	13.410.000,00		13.410.000,00
39	Dinas Ketenagakerjaan	PT PEOPLEPOINT BALI GROUP	01 -10-2023	30-09-2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		3	4.470.000,00		4.470.000,00	13.410.000,00		13.410.000,00
40	Dinas Ketenagakerjaan	TERMINAL SELAM TULAMBEN RESORT,PT	12-09-2023	11-09-2024	12	17.940.000,00	1.495.000,00		4	5.980.000,00		5.980.000,00	11.960.000,00		11.960.000,00
41	Dinas Ketenagakerjaan	PT FRESH FINS BALI	12-10-2023	11-10-2024	12	17.880.000,00	1.490.000,00		3	4.470.000,00		4.470.000,00	13.410.000,00		13.410.000,00
42	Dinas Ketenagakerjaan	PT.RUMAH TEH ASLI	19-10-2023	18-10-2024	12	18.060.000,00	1.505.000,00		2	3.010.000,00		3.010.000,00	15.050.000,00		15.050.000,00
43	Dinas Ketenagakerjaan	PT.WIGUNA MENYELAM CANDIDASA	06-10-2023	05-10-2024	12	18.180.000,00	1.515.000,00		3	4.545.000,00		4.545.000,00	13.635.000,00		13.635.000,00
44	Dinas Ketenagakerjaan	RELAX ENJOY RECHARGE,PT	08-10-2023	07-10-2024	12	18.180.000,00	1.515.000,00		3	4.545.000,00		4.545.000,00	13.635.000,00		13.635.000,00
45	Dinas Ketenagakerjaan	PANTAI AMED SELAM,PT	14-10-2023	13-10-2024	12	18.360.000,00	1.530.000,00		3	4.590.000,00		4.590.000,00	13.770.000,00		13.770.000,00
46	Dinas Ketenagakerjaan	KUNCI UTAMA LAUTAN,PT	26 -10-2023	25-10-2024	12	18.480.000,00	1.540.000,00		2	3.080.000,00		3.080.000,00	15.400.000,00		15.400.000,00

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian	Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
										Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
1	Dinas Pariwisata	Sewa menyewa Kios di Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung	24-01-2022	24-01-2023	12	1.900.000,00	158.333,33	11	1.741.667	1	158.333,33	158.333,33		-	-
2	Dinas Pariwisata	Sewa menyewa Kios di Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung	08-07-2022	08-07-2023	12	1.900.000,00	158.333,33	6	950.000	6	950.000,00	950.000,00		-	-
3	Dinas Pariwisata	Sewa menyewa Kios di Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung	05-10-2022	05-10-2023	12	1.900.000,00	158.333,33	3	475.000	9	1.425.000,00	1.425.000,00		-	-
4	Dinas Pariwisata	Sewa menyewa Kios di Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung	03-08-2022	03-08-2023	12	1.900.000,00	158.333,33	5	791.667	7	1.108.333,33	1.108.333,33		-	-
	JUMLAH - Dinas Pariwisata				7.600.000,00	633.333,33	25,00	3.958.333,33		-	3.641.666,67	3.641.666,67		-	-
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan - Dinas Perhubungan														
1	Dinas Perhubungan	Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah di terminal Karang Sokong untuk permainan anak-anak	29-10-2022	29-10-2025	36	6.048.000,00	168.000,00	2	336.000	12	2.016.000,00	2.016.000,00		3.696.000,00	3.696.000,00
2	Dinas Perhubungan	sewa menyewa lahan bagian di lapangan parkir Tirta Gangga (lahan milik pemerintah Kabupaten Karanaseam)	27-06-2022	27-06-2027	60	7.400.000,00	123.333,33	6	740.000	12	1.480.000,00	1.480.000,00		5.180.000,00	5.180.000,00
	JUMLAH - Dinas Perhubungan				13.448.000,00			1.076.000,00		-	3.496.000,00	3.496.000,00		8.876.000,00	8.876.000,00
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan - Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan														
1	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI WAYAN SUATI, 028/844/Diskopperindag/Dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4	816.000,00	816.000,00	-	-	-
2	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ANAK AGUNG AYU WIRYAWATI, 028/845/Diskopperindag/Dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000	4	480.000,00	480.000,00	-	-	-
3	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, KADEK TRI JAYANTHA ANANDA, 028/846/Diskopperindag/Dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
4	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI WAYAN SUATI, 028/847/Diskopperindag/Dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000	4	480.000,00	480.000,00	-	-	-
5	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DARMA PUTRA, 028/848/Diskopperindag/dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000	4	480.000,00	480.000,00	-	-	-
6	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DARMA PUTRA, 028/849/Diskopperindag/Dag	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000	4	480.000,00	480.000,00	-	-	-

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
											Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
7	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, GO SING IN, 028/850/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
8	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, DHARMA SUTEJA, 028/851/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	7.497.000,00	624.750,00	8	4.998.000	4		2.499.000,00	2.499.000,00	-	-	-
9	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI KETUT MAWARTI, 028/852/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4		816.000,00	816.000,00	-	-	-
10	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KADEK TRI JAYANTHA ANANDA, 028/853/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
11	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, HAJI AMIN, 028/854/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
12	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ABBAS ALI, 028/855/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4		816.000,00	816.000,00	-	-	-
13	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ATANG FERYANTO, 028/856/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.340.000,00	195.000,00	8	1.560.000	4		780.000,00	780.000,00	-	-	-
14	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, TAN TJIK SIE, 028/857/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4		816.000,00	816.000,00	-	-	-
15	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, IR. I MADE SUARTAMA, 028/858/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.852.000,00	321.000,00	8	2.568.000	4		1.284.000,00	1.284.000,00	-	-	-
16	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI KETUT RUNI, 028/859/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4		816.000,00	816.000,00	-	-	-
17	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DANA, 028/860/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-

No	SKPD	Uraian	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Bulan Tahun 2022	Telah Menjadi Pendapatan LO Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2023	Pendapatan LO - Tahun 2023			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023		
											Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2023	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2023	Jumlah
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12	13 = 12 + 12	14	15	16 = 14 + 15
18	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ABBAS ALI, 028/861/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000	4		480.000,00	480.000,00	-	-	-
19	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, SITI BADARIAH, 028/863/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
20	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I MADE ARNAWA, 028/864/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
21	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, RICHI MAHENDRA, 028/865/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000	4		1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
22	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, SITI BADARIAH, 028/866/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	3.528.000,00	294.000,00	8	2.352.000	4		1.176.000,00	1.176.000,00	-	-	-
23	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, RICHI MAHENDRA, 028/867/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000	4		600.000,00	600.000,00	-	-	-
24	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, RICHI MAHENDRA, 028/868/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000	4		600.000,00	600.000,00	-	-	-
25	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, RICHI MAHENDRA, 028/869/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000	4		600.000,00	600.000,00	-	-	-
26	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI KETUT SIMPREG, 028/870/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000	4		816.000,00	816.000,00	-	-	-
27	Diskoperindang Kabupaten Karangasem	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I GUSTI NGURAH PARTHA, 028/871/Diskopperindag/DAG	3 Mei 2022	3 Mei 2023	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000	4		600.000,00	600.000,00	-	-	-

Daftar Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Dalam Rupiah

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo Per 31 Desember 2022 Setelah Koreksi	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2022	Pembayaran Utang Belanja Transfer Tahun 2022	Pembayaran Utang Belanja Tahun 2022 di Tahun 2023	Utang atas Belanja Tahun 2023	Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023	Rincian Saldo Utang Belanja					
												Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Transfer	Total	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9	11	12 = 5 - 10 + 11	13	14	15	16	17 = 13 + 14 + 15 + 16	
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.266.695.500,00		1.266.695.500,00	1.266.695.500,00				1.266.695.500,00	11.398.494.224,00	11.398.494.224,00	11.398.494.224,00					11.398.494.224,00
2	Dinas Kesehatan	1.527.367.206,00		1.527.367.206,00	1.356.688.906,00	170.678.300,00			1.527.367.206,00	2.600.595.878,00	2.600.595.878,00	1.965.406.582,00	635.189.296,00				2.600.595.878,00
3	RSUD	24.343.528.735,00	(186.438.977,00)	24.157.089.758,00	6.757.814.972,00	17.399.274.786,00			24.157.089.758,00	16.506.058.586,00	16.506.058.586,00	4.926.188.121,00	11.579.870.465,00				16.506.058.586,00
4	Dinas PUPR	129.788.993,96		129.788.993,96	32.100.150,00		97.688.843,96		129.788.993,96	21.200.488.288,70	21.200.488.288,70	2.226.250,00		21.198.262.038,70			21.200.488.288,70
5	Dinas Perhubungan	36.420.354,00		36.420.354,00	32.167.754,00	4.252.600,00			36.420.354,00	38.014.500,00	38.014.500,00	27.407.500,00	3.655.000,00	6.952.000,00			38.014.500,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	242.371.664,00	(1.500,00)	242.370.164,00	101.966.300,00	140.403.864,00			242.370.164,00	184.553.820,00	184.553.820,00	57.130.500,00	127.423.320,00				184.553.820,00
7	BPKAD (SKPD)	3.426.176.068,90	(266.161.281,66)	3.160.014.787,24	3.160.014.787,24				3.160.014.787,24	3.722.697.984,40	3.722.697.984,40	3.722.697.984,40					3.722.697.984,40
8	BPKAD (SKPKD)	3.495.031.935,00		3.495.031.935,00			3.495.031.935,00		3.495.031.935,00	5.063.321.105,00	5.063.321.105,00				5.063.321.105,00		5.063.321.105,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00	-	-	-	-				-
10	Dinas Lingkungan Hidup	10.531.500,00		10.531.500,00	10.531.500,00				10.531.500,00	12.191.000,00	12.191.000,00	12.191.000,00					12.191.000,00
11	Bagian Umum									580.999.107,40	580.999.107,40	580.999.107,40					580.999.107,40
	Jumlah	34.512.911.956,86	- 452.601.758,66	34.060.310.198,20	12.752.979.869,24	17.714.609.550,00	97.688.843,96	3.495.031.935,00	34.060.310.198,20	61.307.414.493,50	61.307.414.493,50	22.692.741.268,80	12.346.138.081,00	21.205.214.038,70	5.063.321.105,00		61.307.414.493,50

Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2023

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER								TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIJ		
1	2	3	4	6	7	8	9		10	11
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga									
	Tunjangan Profesi Guru PNSD Semester II Triwulan IV TA 2023	9.387.845.600,00								9.387.845.600,00
	Iuran BPJS 4% Semester II triwulan IV Tahun 2023	375.513.824,00								375.513.824,00
	Tunjangan Profesi Guru PPPK Semester II, Triwulan III dan Triwulan IV TA 2023	1.572.245.000,00								1.572.245.000,00
	Iuran BPJS 4% Tunjangan Profesi Guru PPPK Semester II triwulan IV Tahun 2023	62.889.800,00								62.889.800,00
	Sub Jumlah Dinas Pendidikan dan Olah Raga	11.398.494.224,00	-	-	-	-	-	-	-	11.398.494.224,00
2	Dinas Kesehatan									
-	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Desember 2023									
	UPTD Puskesmas Manggis II	1.596.701,00								1.596.701,00
	UPTD Puskesmas Abang II	4.655.577,00								4.655.577,00
	UPTD Puskesmas Bebandem	4.652.568,00								4.652.568,00
	UPTD Puskesmas Karangasem I	5.186.185,00								5.186.185,00
	UPTD Puskesmas Karangasem II	3.576.956,00								3.576.956,00
	UPTD Puskesmas Kubu I	3.174.772,00								3.174.772,00
	UPTD Puskesmas Kubu II	3.956.743,00								3.956.743,00
	UPTD Puskesmas Manggis I	4.123.074,00								4.123.074,00
	UPTD Puskesmas Rendang	4.364.140,00								4.364.140,00
	UPTD Puskesmas Selat	4.264.438,00								4.264.438,00
	UPTD Puskesmas Sidemen	3.510.866,00								3.510.866,00
	UPTD Puskesmas Abang I	3.889.254,00								3.889.254,00
	RS Pratama Kubu	2.377.122,00								2.377.122,00
-	Dinas Kesehatan									
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS Puskesmas dan RS Pratama Tahun 2020	469.422.937,00								469.422.937,00
-	RS Pratama Kubu									
	Jaspel JKN/Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	61.543.551,00								61.543.551,00
	Jaspel JKN/Jasa Pelayanan Kesehatan bagi NON ASN				42.655.313,00					42.655.313,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER								TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIJ		
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan/Jaspel Umum Bagi ASN bulan September s/d Desember 2023	33.891.447,00								33.891.447,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan/Jaspel Umum Bagi NON ASN bulan September s/d Desember 2023				30.545.653,00					30.545.653,00
	UPTD Laboratorium									
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan/Jaspel Umum Bagi ASN bulan Desember 2023	1.991.200,00								1.991.200,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan/Jaspel Umum Bagi NON ASN bulan Desember 2023				1.285.550,00					1.285.550,00
3	UPTD Puskesmas Manggis II									
	Belanja Pemeliharaan alat-besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor					5.000.000,00				5.000.000,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		39.922.933,00							39.922.933,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					9.898.853,00				9.898.853,00
4	UPTD Puskesmas Abang II									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		127.047.551,00							127.047.551,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					31.319.264,00				31.319.264,00
5	UPTD Puskesmas Bebandem									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		124.028.349,00							124.028.349,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					44.887.903,00				44.887.903,00
6	UPTD Puskesmas Karangasem I									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		138.364.152,00							138.364.152,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					36.257.967,00				36.257.967,00
7	UPTD Puskesmas Karangasem II		-			-				
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		106.719.577,00			-				106.719.577,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					68.937.160,00				68.937.160,00
8	UPTD Puskesmas Kubu I									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		98.729.885,00							98.729.885,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					75.335.005,00				75.335.005,00
9	UPTD Puskesmas Kubu II									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		115.413.747,00							115.413.747,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					42.612.661,00				42.612.661,00
10	UPTD Puskesmas Manggis I									

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER								TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIJ		
	Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan					2.790.000,00				2.790.000,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		108.730.485,00							108.730.485,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					57.140.345,00				57.140.345,00
11	UPTD Puskesmas Rendang									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		126.473.346,00							126.473.346,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					50.819.506,00				50.819.506,00
12	UPTD Puskesmas Selat									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		142.469.710,00							142.469.710,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					71.994.860,00				71.994.860,00
13	UPTD Puskesmas Sidemen									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		113.689.074,00							113.689.074,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					33.710.103,00				33.710.103,00
14	UPTD Puskesmas Abang I									
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN/Remunerasi		107.640.242,00							107.640.242,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					29.999.153,00				29.999.153,00
	Sub Jumlah Dinas Kesehatan	616.177.531,00	1.349.229.051,00	-	74.486.516,00	560.702.780,00	-	-	-	2.600.595.878,00
15	RSUD									
-	Jasa Pelayanan (JKBM, JKN, Umum, Farmasi, CI, Rujukan JKN, Rujukan Jamkesmas)		4.864.216.001,00							4.864.216.001,00
-	Darah Siap Transfusi (PMI)					184.182.000,00				184.182.000,00
-	BBM Rujukan Ambulance					4.096.000,00				4.096.000,00
-	RS Balimed Karangasem					6.949.230,00				6.949.230,00
-	RS Kasih Ibu Saba					470.000,00				470.000,00
-	PT Prodia					2.852.000,00				2.852.000,00
-	Sampah Medis					262.175.895,00				262.175.895,00
-	Bahan Habis Pakai (BHP)					5.419.965.909,00				5.419.965.909,00
-	Obat-obatan					3.934.738.105,00				3.934.738.105,00
-	Bahan Kimia/Lab					1.435.768.102,00				1.435.768.102,00
-	Gas Medis					229.460.624,00				229.460.624,00
-	Belanja Air					60.752.600,00				60.752.600,00
-	Alat Tulis Kantor					38.460.000,00				38.460.000,00
	Iuran BPJS 4% (APBD)	61.972.120,00								61.972.120,00
	Sub Jumlah RSUD	61.972.120,00	4.864.216.001,00	-	-	11.579.870.465,00	-	-	-	16.506.058.586,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER								TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIJ		
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman				-					
-	Rinsentif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Triwulan IV TA 2023)	1.237.500,00								1.237.500,00
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat (TA 2023)	988.750,00								988.750,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Belong - Bakung							1.150.899.400,00		1.150.899.400,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bunutan - Purwakerthi							2.479.990.800,00		2.479.990.800,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Gambang - Ijo Gading							890.913.800,00		890.913.800,00
-	Rekonstruks Jalan Ruas Jalan Junggul - Pr. Panggul Besi (Lanjutan)							992.000.100,00		992.000.100,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Jungutan - Tihingan							331.900.100,00		331.900.100,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Merita - Br. Bebayu							909.463.100,00		909.463.100,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Mumbul - Pengadangan							349.213.900,00		349.213.900,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Muncan - Susut							1.372.429.100,00		1.372.429.100,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pengadangan - Pasar Agung							570.514.700,00		570.514.700,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pura Kayu Sakti - Pura Maksan Kaja Kangin							808.254.300,00		808.254.300,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Untung Surapati - Dukuh Meranggi							502.091.800,00		502.091.800,00
-	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Wates Kangin - Pateh							1.319.725.400,00		1.319.725.400,00
-	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Bantas - Br. Dukuh (Lanjutan)							857.312.400,00		857.312.400,00
-	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Culik - Kebon							2.098.323.500,00		2.098.323.500,00
-	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan							2.184.264.600,00		2.184.264.600,00
-	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Tepas - Pr. Dalem Ban							858.303.600,00		858.303.600,00
-	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Abang Kikian							1.302.073.500,00		1.302.073.500,00
-	Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tukad Masi Ruas Jalan Banyu Campah - Kebung							951.999.300,00		951.999.300,00
-	Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Gantalan I Kec. Bebandem (BKK)							425.800.000,00		425.800.000,00
-	Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Mbah Api Kec. Bebandem (BKK)							276.500.000,00		276.500.000,00
-	Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Tangkup Kec. Sidemen (BKK)							283.487.000,00		283.487.000,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER								TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIJ		
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.426.535,96								3.426.535,96
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.002.425,85								7.002.425,85
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	306.711.947,91								306.711.947,91
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	311.400,00								311.400,00
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak air Tanah	21.171.863,91								21.171.863,91
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	342.972.500,00								342.972.500,00
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.361.692.218,31								1.361.692.218,31
	Sub Jumlah BPKAD	3.722.697.984,40	-	-	-	-	-	-	-	3.722.697.984,40
20	BPKAD (SKPKD)									
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah T.A 2023								5.063.321.105,00	5.063.321.105,00
	Sub Jumlah BPKAD SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	5.063.321.105,00	5.063.321.105,00
21	Dinas Lingkungan Hidup									-
	Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Triwulan IV TA 2023	12.191.000,00								12.191.000,00
	Sub Jumlah DLH	12.191.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.191.000,00
22	BAGIAN UMUM									-
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	189.022.639,33								189.022.639,33
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	73.081.669,90								73.081.669,90
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	534.777,29								534.777,29
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.092.864,15								1.092.864,15
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	47.868.338,69								47.868.338,69
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	48.600,00								48.600,00
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.304.279,34								3.304.279,34
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	212.518.438,70								212.518.438,70
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	53.527.500,00								53.527.500,00
	Sub Jumlah Bagian Umum	580.999.107,40	-	-	-	-	-	-	-	580.999.107,40
	Saldo Utang per 31 Desember 2023	16.479.296.216,80	6.213.445.052,00	-	205.564.836,00	12.140.573.245,00	68.810.400,00	21.136.403.638,70	5.063.321.105,00	61.307.414.493,50

Rincian Mutasi PFK BUD, BLUD, FKTP dan BOK Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD		BLUD RSUD		BLUD PUSKESMAS		FKTP		BOK		Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran			Penerimaan	Pengeluaran			Penerimaan	Pengeluaran
1	IWP - Bpjs Kesehatan (1%)	5.341.444.064,00	5.341.444.064,00									5.341.444.064,00	5.341.444.064,00
2	IWP - Taspen (8%)	22.039.129.516,00	22.039.129.516,00									22.039.129.516,00	22.039.129.516,00
3	BPJS Kesehatan PNS	18.750.637.487,00	18.750.637.487,00									18.750.637.487,00	18.750.637.487,00
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	865.543.161,89	865.543.161,89									865.543.161,89	865.543.161,89
5	Jaminan Kematian (JKM)	2.194.185.166,11	2.194.185.166,11									2.194.185.166,11	2.194.185.166,11
6	PPh Pasal 21 Gaji dan Tunjangan ASN	1.849.234.286,00	1.849.234.286,00									1.849.234.286,00	1.849.234.286,00
7	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	19.370.906.452,00	19.370.906.452,00	20.965.581,00	20.965.581,00	997.684.879,00	997.684.879,00	60.925.201,00	60.925.201,00	13.441.245,00	13.441.245,00	20.463.923.358,00	20.463.923.358,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	678.141.908,00	678.141.908,00	636.613.260,00	636.613.260,00	46.925.187,00	46.925.187,00	2.776.483,00	2.776.483,00	2.325.749,00	2.325.749,00	1.366.782.587,00	1.366.782.587,00
9	PPh Pasal 23 Jasa	519.115.960,00	519.115.960,00	86.419.572,00	86.419.572,00	44.395.984,00	44.395.984,00	1.149.417,00	1.149.417,00	13.956.724,00	13.956.724,00	665.037.657,00	665.037.657,00
10	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	122.109.379,00	122.109.379,00									122.109.379,00	122.109.379,00
11	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.184.481.042,00	2.184.481.042,00									2.184.481.042,00	2.184.481.042,00
12	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	18.580.015.594,00	18.580.015.594,00	5.229.164.728,00	5.229.164.728,00	493.639.322,00	493.639.322,00	22.472.946,00	22.472.946,00	18.781.726,00	18.781.726,00	24.344.074.316,00	24.344.074.316,00
13	PPH Pasal 4 (2) Final	24.711.361,00	24.711.361,00	25.733.204,00	25.733.204,00	1.511.237,00	1.511.237,00	511.809,00	511.809,00	1.248.173,00	1.248.173,00	53.715.784,00	53.715.784,00
14	BPJS Kesehatan Dewan	181.388.321,00	181.388.321,00									181.388.321,00	181.388.321,00
15	BPJS Kesehatan PPPK	3.147.642.428,00	3.147.642.428,00									3.147.642.428,00	3.147.642.428,00
16	PPh Pasal 21 Pihak Ketiga	258.048.884,00	258.048.884,00	1.188.877.795,00	1.188.877.795,00							1.446.926.679,00	1.446.926.679,00
17	PPh Pasal 21 Anggota DPRD	3.383.805.331,00	3.383.805.331,00									3.383.805.331,00	3.383.805.331,00
18	Lainnya	119.403.006,00	119.403.006,00									119.403.006,00	119.403.006,00
												-	-
	Jumlah	99.609.943.347,00	99.609.943.347,00	7.187.774.140,00	7.187.774.140,00	1.584.156.609,00	1.584.156.609,00	87.835.856,00	87.835.856,00	49.753.617,00	49.753.617,00	108.519.463.569,00	108.519.463.569,00

Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAPORAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PEMDA
PER 31 DESEMBER 2023



LAPORAN IKHTISAR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari: Bagian Pertama tentang Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bagian Kedua tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Ketiga tentang Ikhtisar Kinerja Keuangan Kabupaten Karangasem. Dan tambahan berupa Hambatan dan Kendala Pencapaian Target serta Kinerja Non Keuangan.

I. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Visi Pembangunan Kabupaten Karangasem adalah *"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI"* yang selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) misi dengan orientasi arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintergerasi dalam satu kesatuan wilayah Karangasem, yang berpihak dan taat asas pada Budaya Karangasem yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi / wilayah Karangasem yang sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Maka di tempuh melalui 6 (enam) Misi, yaitu:

1. Membangun Pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Serta Nelayan.
2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Konfrehensif dan Terintegrasi.
4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi.
5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu.dan
6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima.

Berdasarkan atas Visi, dan Misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

strategis, yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Misi kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan Pembangunan Daerah yang terukur. Adapun tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan antara lain:

- a. Misi 1, yaitu: Membangun Pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Serta Nelayan dengan tujuan:
 - 1). Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kulaitas Layak.
 - 2). Terwujudnya Swasembada Pangan, Bahan Baku Sandang Krama Karangasem , dan Daya Saing Pertanian.
- b. Misi 2, yaitu Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas, dengan tujuan:
 - 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Krama Karangasem.
 - 2) Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas
 - 3) Terwujudnya Karakter Krama Karangasem Unggul sebagai Individu dan Sosial yang berbasis Kearifan Lokal.
 - 4) Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem yang unggul dan berdaya saing tinggi
 - 5) Terwujudnya Tenaga Kerja yang berkompeten dan berdaya saing
 - 6) Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan.
- c. Misi 3, yaitu Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Konfhrensif dan Terintegrasi, dengan tujuan:
 - 1) Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Karangasem.
 - 2) Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem.
 - 3) Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.
 - 4) Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan Kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi.
 - 5) Terwujudnya Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karangasem.
 - 6) Berkembangnya Perekonomian berbasis Budaya Bali.
 - 7) Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Darat,Laut dan Udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru.
 - 8) Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Karangasem yang harmonis.
 - 9) Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah.
- d. Misi 4, yaitu Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi, dengan tujuan:
 - 1) Berkembangnya destinasi dan Produk Pariwisata Budaya berbasis Komunitas.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pasar Pariwisata Kabupaten Karangasem.
- e. Misi 5, yaitu Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu, dengan tujuan:
 - 1) Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- 2) Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
- f. Misi 6, yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima, dengan tujuan:
 - 1) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 6 Maret 2023. Dimana Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pemanfaatan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dalam APBD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; Adanya tambahan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali sesuai dengan surat Gubernur Bali, Nomor B.133900./8681/PADFE/BPKAD, tanggal 30 Desember 2022 dan Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya. 2). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 21 Juni 2023. Dimana Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari besaran total dana hibah yang disepakati Bersama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023; Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya. 3). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melaksanakan perubahan anggaran dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karangasem Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Oktober.

Target kinerja APBD Tahun 2023 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.548.852.521.496,00	1.636.153.694.461,00	87.301.172.965,00	5,34
01.01	Pendapatan Asli Daerah	283.117.673.041,00	318.457.513.596,00	35.339.840.555,00	11,10
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	142.330.509.695,00	193.204.886.607,00	50.874.376.912,00	26,33
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	12.466.294.754,00	10.211.847.000,00	(2.254.447.754,00)	(22,08)
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	9.432.787.392,00	10.071.066.736,00	638.279.344,00	6,34
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.888.081.200,00	104.969.713.253,00	(13.918.367.947,00)	(13,26)
01.02	Pendapatan Transfer	1.263.987.934.455,00	1.315.746.180.865,00	51.758.246.410,00	3,93
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.939.680.000,00	1.071.750.025.000,00	13.810.345.000,00	1,29



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.048.254.455,00	243.996.155.865,00	37.947.901.410,00	15,55
01.03	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp 87.301.172.965,00 atau 5,34%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi sumber-sumber PAD terutama pada Pendapatan Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pendapatan transfer. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; b. Hasil pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

2. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan atas penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD berupa Aset Rusak Berat / Usang, Hasil Sewa BMD, hasil Kerjasama antar daerah (Taman Ujung, Besakih), Jagir pada Kas Daerah ,Kas Bendahara dan Pada Rekening Dana Cadangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Pendapatan Berupa Denda, dsb.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi pada kondisi pandemi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

b. Anggaran Belanja

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Belanja	1.566.785.983.806,00	1.755.953.039.217,00	189.167.055.411,00	10,77
02.01	Belanja Operasi	1.187.476.216.084,00	1.336.733.917.177,00	149.257.701.093,00	11,17
02.01.01	Belanja Pegawai	664.979.947.785,00	737.741.724.163,00	72.761.776.378,00	9,86
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	502.620.263.099,00	552.006.366.721,00	49.386.103.622,00	8,95
02.01.05	Belanja Hibah	12.794.505.200,00	34.788.206.293,00	21.993.701.093,00	63,22
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.081.500.000,00	12.197.620.000,00	5.116.120.000,00	41,94
02.02	Belanja Modal	154.808.006.938,00	173.289.256.979,00	18.481.250.041,00	10,66
02.01.01	Belanja Modal Tanah		522.956.250,00	522.956.250,00	0
02.01.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.720.782.668,00	44.059.592.314,00	7.338.809.646,00	16,66
02.01.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.582.763.280,00	55.835.694.493,00	252.931.213,00	0,45
02.01.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.464.444.390,00	71.593.316.590,00	10.128.872.200,00	14,15
02.01.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.025.016.600,00	1.262.697.332,00	237.680.732,00	18,82
	Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.03	Belanja Tidak Terduga	2.367.372.830,00	11.896.774.381,00	9.529.401.551,00	80,10
02.04	Belanja Transfer	222.134.387.954,00	234.033.090.680,00	11.898.702.726,00	5,08
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	20.373.833.954,00	30.189.456.680,00	9.815.622.726,00	32,51
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.760.554.000,00	203.843.634.000,00	2.083.080.000,00	1,02



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp 189.167.055.411,00 atau 10,77%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp 149.257.701.093,00, belanja modal sebesar Rp 18.481.250.041,00, belanja transfer sebesar Rp 11.898.702.726,00 serta Kenaikan pada belanja tidak terduga sebesar Rp 9.529.401.551,00.

Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- b. Penanggulangan bencana pertanian dengan menyediakan anggaran untukantisipasi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- c. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- d. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
- e. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
- f. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah, maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
- g. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- h. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
- i. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2023, maka dalam Perubahan RKPD Semester Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk penyusunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2023.

c. Anggaran Pembiayaan

No	Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Pembiayaan				
03.01	Penerimaan Pembiayaan	59.433.462.310,00	161.299.344.756,00	101.865.882.446,00	63,15
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.433.462.310,00	144.190.144.756,00	84.756.682.446,00	58,78
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	0,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	0,00
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	0,00
03.02.03	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	17.933.462.310,00	119.799.344.756,00	101.865.882.446,00	85,03

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SiLPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2023.

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp 161.299.344.756,00 meningkat sebesar Rp 101.865.882.446,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 59.433.462.310,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2023 yaitu digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah Pembentukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 28.000.000.000,00 dan penyertaan modal daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 13.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp 1.500.000.000,00. Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp1.500.000.000 PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp 500.000.000,00 dan PT. Karangasem Sejahtera sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp161.299.344.756,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 41.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp119.799.344.756,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp (119.799.344.756,00).

2.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
I	Pendapatan	1.641.545,93	1.577.410,44	1.555.811,56	1.475.561,87	1.624.330,23
II	Belanja	1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,92
	Surplus/Defisit	57.903,59	28.502,56	8.280,11	10.926,5	(11.491,69)
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,57	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87
	Pembiayaan Netto	119.801,54	115.687,57	109.908,34	102.981,78	114.461,00
	SILPA	177.705,13	144.190,13	118.188,45	113.908,34	102.969,31

2.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2019 sampai 2023 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Pajak Daerah	232.153,51	167.957,91	85.667,48	66.506,52	108.373,67
2	Retribusi Daerah	10.472,01	10.215,72	9.207,86	9.350,56	13.046,35
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.334,90	9.321,19	10.759,41	11.968,12	11.633,18
4	Lain-lain PAD yang sah	128.280,10	113.838,20	147.057,00	131.409,49	99.959,84
	Jumlah	381.240,52	301.332,84	252.691,75	219.234,68	233.013,03

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2019 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi pencapaian terutama disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah.

Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah. Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi Potongan atau bentuk lain, pendapatan Denda Pajak Daerah, Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian serta, pendapatan dari BLUD. Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

2.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

N	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Belanja Operasi	1.230.741,04	1.199.158,17	1.210.433,00	1.175.320,21	1.290.833,50
2	Belanja Modal	119.036,45	139.308,07	143.668,86	81.578,99	152.232,67
3	Belanja Tak Terduga	0,054	0,00	2.119,88	19.630,35	0,00
4	Belanja Transfer	233.864,80	210.441,64	191.309,71	188.105,77	192.755,75
Jumlah		1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,93

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023. Realisasi Belanja Modal fluktuatif setiap tahun, dimana tahun 2020 Belanja Modal dibatasi untuk pengadaan yang sangat mendesak dan untuk penanganan Covid-19 sehingga realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya karena anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19. Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2023 digunakan untuk Pengembalian kelebihan dana transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Bali untuk Rekonstruksi Ruas Jalan Pert.Batu Belah - Batu Belah (0,700km) sesuai SK Gubernur Bali Nomor 8 / 03 - Q / HK / 2022.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,58	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini / dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

1.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.636.153.694.461,00	1.641.545.932.774,25	5.392.238.313,25	100,33
2	Belanja	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	(172.310.697.694,01)	90,19
	Surplus/(Defisit)	(119.799.344.756,00)	57.903.591.251,26	177.702.936.007,26	(48,33)
3	Pembiayaan				
A	Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	2.192.978,75	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

B	Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Neto	119.799.344.756,00	119.801.537.734,75	2.192.978,75	100,00
	SILPA	0,00	177.705.128.986,01	177.705.128.986,01	0,00

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, secara garis besar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.636.153.694.461,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.641.545.932.774,25 atau 100,33% dari anggarannya, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 318.457.513.596,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 381.240.518.353,76 atau tercapai 119,71%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp 193.204.886.607,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 232.153.510.496,00 atau tercapai 120,16%.
 - b. Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 10.211.847.000,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 10.472.014.639,00 atau tercapai 102,55%.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp 10.071.066.736,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 10.334.895.322,92 atau tercapai 102,62%.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 104.969.713.253,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 128.280.097.895,84 atau 122,21%
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.315.746.180.865,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 1.258.329.468.738,00 atau 95,64% yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dianggarkan sebesar Rp 1.071.750.025.000,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 1.065.323.588.563,00 atau tercapai 99,40%, terdiri dari:
 - 1) Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp 970.505.915.000,00 terrealisasi sebesar Rp 964.079.478.563,00 atau terrealisasi 99,34%
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp 21.860.366.000,00 terrealisasi sebesar Rp 21.860.366.000,00 atau terrealisasi 100%
 - 3) Dana Desa sebesar Rp 79.383.744.000,00 terrealisasi sebesar Rp 79.383.744.000,00 atau terrealisasi 100%
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dianggarkan sebesar Rp 243.996.155.865,00 dengan terrealisasi sebesar Rp 193.005.880.175,00 atau terrealisasi 79,10%, terdiri dari :
 1. Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp 159.967.871.806,00 terrealisasi sebesar Rp 152.889.792.401,00 atau terrealisasi 95,58%
 2. Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 84.028.284.059,00 terrealisasi sebesar Rp 40.116.087.774,00 atau terrealisasi 47,74%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.950.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp 1.975.945.682,49 atau terealisasi 101,33%, yang terdiri dari :
 1. Pendapatan Hibah tidak dianggarkan tapi terrealisasi sebesar Rp 14.949.125,48
 2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp 1.950.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp 1.960.996.557,01 atau terrealisasi 100,56%

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.755.953.039.217,00 terealisasi sebesar Rp 1.583.642.341.522,99 atau 90,19%.

Belanja Daerah disusun menjadi 4 (Empat) kelompok belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi di anggarkan sebesar Rp 1.336.733.917.177,00 terealisasi sebesar Rp 1.230.741.037.196,70 atau 92,07%. yang terdiri dari:
 - a) Belanja pegawai di anggarkan sebesar Rp 737.741.724.163,00 terealisasi sebesar Rp 684.649.124.686,67 atau 92,80%.
 - b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 552.006.366.721,00 terealisasi sebesar Rp. 499.841.936.183,78 atau 90,55%.
 - c) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 34.788.206.293,00 terealisasi sebesar Rp 34.393.666.026,25 atau 98,87%.
 - d) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp 12.197.620.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.856.310.300,00 atau 97,20%.
2. Belanja Modal di anggarkan sebesar Rp 173.289.256.979,00 terrealisasi sebesar Rp 119.036.449.121,10 atau 68,69%. terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp 522.956.250,00 tidak ada realisasi.
 - b. Belanja Modal Peralatan Mesin dianggarkan sebesar Rp 44.059.592.314,00 terealisasi sebesar Rp 39.642.592.244,00 atau terealisasi 89,97%.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 55.835.694.493,00 terealisasi sebesar Rp 36.688.278.976,39 atau 65,71%.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp 71.593.316.590,00 terealisasi sebesar Rp 41.479.827.150,71 atau 57,94%.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 1.262.697.332,00 terealisasi sebesar Rp 1.210.750.750,00 atau 95,89%.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.000.000,00 atau 100,00%.
3. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp 11.896.774.381,00 terealisasi Rp 54.000,00 atau 0,00%
4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 234.033.090.680,00 terrealisasi sebesar Rp 233.864.801.205,19 atau 99,93%, terdiri dari :
 - a) Transfer Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp 30.189.456.680,00 terrealisasi sebesar Rp



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

30.110.567.205,20 atau 99,74 %.

- b) Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 203.843.634.000,00 terealisasi sebesar Rp 203.754.233.999,99 atau 99,96 %.

C. Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah target Rp 161.299.344.756,00 terrealisasi Rp 161.301.537.734,75 atau 100,00%;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah target Rp 41.500.000.000,00 realisasi Rp 41.500.000.000,00 atau 100%.

III. Ikhtisar Kinerja Keuangan Kabupaten Karangasem

Kinerja atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 tercermin dalam beberapa analisis rasio keuangan daerah sebagai berikut ini:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan Derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Karangasem Tahun 2023:

$$\text{Derajat Desentralisasi} : \frac{381.240.518.353,76}{1.641.545.932.774,25} \times 100\% = 23,22\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh Penerimaan Daerah dengan total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi rasio ini makin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} : \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} : \frac{1.258.329.468.738,00}{1.641.545.932.774,25} \times 100\% = 76,66\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan antar Daerah. Makin tinggi rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah makin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat+Antar Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} : \frac{381.240.518.353,76}{1.258.329.468.738,00} \times 100\% = 30,30\%$$



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4. *Rasio Lancar*

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya terhadap aset lancar.

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} : \frac{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}{\text{Aset Lancar}} \times 100\%$$

Rasio Lancar Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} : \frac{62.466.906.121,95}{333.294.746.466,72} \times 100\% = 18,74\%$$

5. *Rasio Cair*

Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya Aset Lancar terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara, Piutang dan Penyisihan Piutang, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, bagian lancar pinjaman, bagian lancar Piutang Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} : \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

Rasio Cair Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Cair (Quick Ratio)} = \frac{(333.294.746.466,72 - 27.038.678.614,55)}{62.466.906.121,95} = 4,90$$

6. *Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio)*

Rasio Hutang terhadap Aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang di milikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Utang Perhitungan Pihak ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, Pendapatan Diterima dimuka, Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Belanja, Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari Kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Ratio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)} : \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt Ratio} : \frac{62.466.906.121,95}{1.725.355.969.991,86} \times 100\% = 3,62\%$$

7. *Rasio Ekuitas terhadap Total Aset*

Rasio ekuitas terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan Total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap Total Aset, sehingga yang diukur adalah jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

$$\text{Rasio Ekuitas terhadap Total Aset} : \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Ekuitas terhadap total aset Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekuitas Thd Total Aset} : \frac{1.662.889.063.869,91}{1.725.355.969.991,86} \times 100\% = 96,38\%$$

IV. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2023 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame, MBLB dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dan ketegangan di Jalur Gaza antara Palestina dan Israel juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di

sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2023 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Dalam masa pandemi tidak ada pengeluaran yang direalisasikan tanpa ada pagu anggarannya kecuali beberapa utang jangka pendek untuk kegiatan operasional kantor (seperti listrik, air, telepon), kegiatan operasional RSUD, serta utang belanja pegawai karena persentase pendapatan Tahun 2023.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2023. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
7. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat

V. Kinerja Non Keuangan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebesar 3,10% mengalami peningkatan sebelumnya dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 2,58%. Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2023 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi 2 (dua) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem Tahun 2023 hanya tumbuh 0,61%. Pertumbuhan ini tercatat lebih baik dibandingkan tahun 2022.

Tingkat inflasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,31% mengikuti inflasi Kota Singaraja, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,63% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Namun inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sebesar 2,77% pada Tahun 2023.

Dalam Kisaran Tahun 2023 beberapa prestasi yang diperoleh Kabupaten Karangasem di tingkat Nasional maupun Provinsi antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Kabupaten /Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan RI terkait Tidak pernah ditemukan kasus frambusia 3 tahun berturut-turut dibuktikan dengan laporan kasus dan ada verifikasi ke lapangan oleh Kemenkes.
2. Penghargaan Kabupaten terbaik dalam capaian imunisasi dasar lengkap pada aplikasi ASIK dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
3. Penghargaan WTP yang Kedelapan Kalinya.
4. Penghargaan Kota Layak Anak
5. Kota Peduli Hak Asasi Manusia terkait Rencana Aksi Daerah Peduli HAM.
6. Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Prov. Bali atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tahun 2023 dengan Opini Kualitas Tertinggi dan Zona Hijau.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

7. Penghargaan Smart City 2023

Selain Penghargaan tingkat nasional tersebut, Kabupaten Karangasem juga memperoleh berbagai penghargaan lainnya baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Demikian Laporan Ikhtisar Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023. Ikhtisar ini menggambarkan garis besar dari pencapaian-pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan Prioritas Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Sekretaris Badan	



Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN BUMD
(PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR)
PER 31 DESEMBER 2023

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

**DRAF LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
REPRESENTASI MANAJEMEN.....	iii
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	iv
BAB. I LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Posisi Keuangan Komparatif per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.....	1
2. Laporan Laba (Rugi) dan Saldo Laba Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	3
3. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	4
4. Laporan Arus Kas Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	5
BAB. II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum.....	6
2. Ringkasan Kebijakan Akuntansi.....	7
3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Posisi Keuangan	10
4. Penjelasan Pos - Pos Laba (Rugi).....	17
BAB. III LAMPIRAN	
1. Daftar Piutang dan Daftar Penyisihan Piutang	
2. Daftar Persediaan	
3. Daftar Aset Tetap	
4. Daftar Utang Usaha	
5. Daftar Utang Lainnya	
6. Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	
7. Koreksi Fiskal	



ආරාධනා මහානගරයේ පිහිටි තෙල් පහන සපයන
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
අරාධනා මහානගරයේ
PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR



අරාධනා මහානගරයේ පිහිටි තෙල් පහන සපයන
Jln. Gatot Subroto No. 7, Amlapura Tlp. (0363) 21363 (80811)

E-mail : pdam_karangasem@yahoo.co.id - Website : <http://tirtatohlangkir.karangasemkab.go.id>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Haryadi Parwatha, SH
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto No. 7 Amlapura
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggungjawab atas sistem dan pengendalian intern dalam Permuda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Denpasar, 7 Maret 2023


Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem

2A717ALX098317324

I Komang Haryadi Parwatha, SH
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00007/3.0395/AU.2/11/0822-3/1/III/2024

Kepada

Yth. Dewan Pengawas dan Direksi

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Tirta Tohlangkir (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Pusat :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307

Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320; Telp 3151534, 42882576; Facs.: 42882577

Cabang :

Bandar Lampung : Perumahan Taman Palem Permai II Blok B No.5

Jalan Raden Gunawan II, Rajabasa Pemuka, Rajabasa, Bandar Lampung 35152, Telp.: (0721) 5609431; Facs.: (0721) 5609431

Bogor : Jl. Raya Karanggen No. 234. Gunung Putri, Bogor 16960, Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724156

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Pusat :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320; Telp 3151534, 42882576; Facs.: 42882577

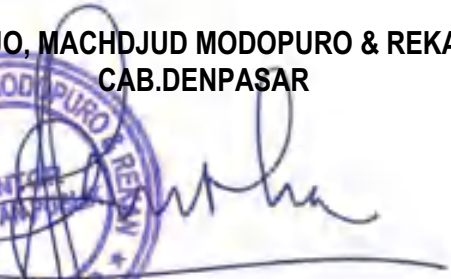
Cabang :

Bandar Lampung : Jl. Purnawirawan Raya No 128, Bandar Lampung 35152, Telp.: (0721) 5609431; Facs.: (0721) 5609431
Bogor : Jl. Raya Karanggen No. 234. Gunung Putri, Bogor 16960, Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724156

Kantor Akuntan Publik
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
CAB.DENPASAR




Drs. Made Mertha, M.Si, Ak., CA., CPA
NIAP AP. 0822

Denpasar, 13 Maret 2024



Pusat :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320; Telp 3151534, 42882576; Facs.: 42882577

Cabang :

Bandar Lampung : Jl. Purnawirawan Raya No 128, Bandar Lampung 35152, Telp.: (0721) 5609431; Facs.: (0721) 5609431
Bogor : Jl. Raya Karanggen No. 234. Gunung Putri, Bogor 16960, Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724156

BAB I
LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA TIRTA TOHLAHGKIR KADUPATEN KARANGASEM
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

	Cat.	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3a	28.786.295.390,34	14.307.975.160,23
Deposito	3b	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Piutang Rekening Air	2b,3c	7.438.345.675,00	5.088.369.100,00
Piutang Rekening Non Air	2b,3c	122.040.275,00	171.478.275,00
Penyisihan Piutang Air	2b,3c	(2.120.418.509,10)	(1.236.208.015,03)
Piutang Non Usaha	3d	-	-
Persediaan	2c,3e	2.262.594.591,60	2.891.451.408,00
Pembayaran Dimuka	3f	19.920.873,32	10.333.470,33
Jumlah Aset Lancar		47.508.778.296,16	32.239.399.398,54
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2d,3g	117.522.875.088,20	111.306.844.713,60
Akumulasi Penyusutan	2d,3g	(69.732.333.783,19)	(63.904.714.061,44)
Nilai Buku Aset Tetap		47.890.541.305,01	47.402.130.652,16
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	2e,3h	-	-
Aset Tidak Berwujud	2g,3i	385.120.218,00	140.926.214,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		385.120.218,00	140.926.214,00
JUMLAH ASET		95.784.439.819,17	79.782.456.264,69

PERUMDA TIRTA TGHLANGKIR KABUPATEN KARAHGASEM
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

	Cat.	2023	2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2f,3j	332.505.637,00	581.825.211,00
Utang Lancar Lainnya	2f,3k	431.272.625,69	120.169.374,00
Utang Pajak	2f,3l	2.955.339.720,00	125.372.872,00
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	2f,3m	467.559.985,00	885.984.204,06
Jumlah Kewajiban Lancar		4.186.677.967,69	1.713.352.661,06
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Cadangan Pensiun dan Sokongan	2f,3n	8.668.698,71	8.668.698,71
Kewajiban Jasa Produksi	2f,3n	1.971.108.627,52	1.970.631.161,49
Corporate Social Responsibility (CSR)	2f,3n	138.929.708,52	94.647.087,29
Penggunaan Lainnya	2f,3n	485.188.316,99	440.428.231,72
Kewajiban Imbalan Pascakerja	2f,3n	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.603.895.349,74	2.514.375.179,21
EKUITAS			
Modal Pemerintah Daerah	2i,3n	70.600.547.648,88	69.100.547.648,66
Modal Hibah	3o	1.245.250.466,00	1.245.250.456,90
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	2h,3p	5.680.195.396,00	5.880.195.396,00
Cadangan Umum	3q	3.986.708.244,77	3.609.577.767,83
Cadangan Sosial dan Pendidikan	3r	1.561.492.094,69	1.561.492.094,69
Akumulasi Laba/ (Rugi) s/d Tahun Lalu	3s	(6.727.987.333,45)	(6.727.987.333,45)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3t	12.647.659.985,05	885.652.384,67
Jumlah Ekuitas		88.993.866.501,74	75.554.728.424,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		95.784.439.819,17	79.782.456.264,69

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA TIRTA TGHLANGKIR KABUPATEN KARAHGASEM


PERUMDA TIRTA TGHLANGKIR KABUPATEN KARAHGASEM
Romang Haryadi Parwatha, SH
Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

	Cat.	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	2j, 4a		
Pendapatan Air		46.676.675.725,00	29.274.521.150,00
Pendapatan Non Air		5.059.048.000,00	3.580.564.250,00
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		51.735.723.725,00	32.855.085.400,00
HARGA POKOK PENJUALAN			
Harga Pokok Penjualan	2k, 4b	24.834.398.850,50	22.561.191.786,66
Jumlah Harga Pokok Penjualan			
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai	2k, 4c	8.113.146.729,00	7.762.440.444,00
Beban Pemeliharaan	2k, 4d	642.035.211,00	256.575.497,00
Beban Operasi Lainnya	2k, 4e	2.273.768.139,08	1.418.264.449,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2k, 4f	183.752.207,99	187.558.146,13
JUMLAH BEBAN USAHA		11.212.702.287,07	9.626.838.536,69
LABA USAHA		15.688.622.587,37	667.055.076,65
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN			
Pendapatan Lainnya	2j, 4g	826.886.799,25	633.728.022,38
Beban Non Usaha	2k, 4g	(169.925.941,57)	(97.886.879,36)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - lain		656.960.857,68	535.841.143,02
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		16.345.583.445,05	1.202.896.219,67
Pajak Penghasilan			
Beban Pajak Penghasilan	4h	3.697.923.460,00	317.243.835,00
Laba (Rugi) Bersih		12.647.659.985,05	885.652.384,67

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM

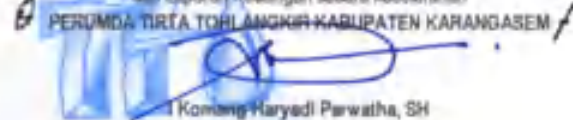
Romang Haryadi Parwatha, SH

Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Pemerintah Daerah	Modal Hibah	Cadangan Umum	Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	Total Modal dan Cadangan	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan	Akumulasi Laba/ (Rugi)	Total Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021	67.600.547.648,68	1.245.250.466,00	3.861.881.607,75	1.561.492.094,69	74.069.171.817,12	5.680.195.396,00	(5.199.859.944,04)	74.549.507.269,08
<u>Mulai Dalam Tahun 2021</u>								
Tambahan Setoran Modal	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
Pembagian Laba Tahun 2021	-	-	147.696.160,08	-	147.696.160,08	-	-	147.696.160,08
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu atas Batas Pajak 2016 dan 2020	-	-	-	-	-	-	(791.563.589,00)	(791.563.589,00)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu atas Pembagian Laba	-	-	-	-	-	-	(738.480.800,41)	(738.480.800,41)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu atas Kesalahan Pencatatan Upah	-	-	-	-	-	-	1.917.000,00	1.917.000,00
Labas (Rugi) Tahun Berjalan 2022	-	-	-	-	-	-	885.652.384,67	885.652.384,67
Saldo Per 31 Desember 2022	68.100.547.648,68	1.245.250.466,00	3.809.577.767,83	1.561.492.094,69	75.716.867.977,20	5.680.195.396,00	(5.842.334.948,78)	75.554.728.424,42
<u>Mulai dalam tahun 2023</u>								
Tambahan Setoran Modal	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
Pembagian Laba Tahun 2022	-	-	177.130.476,94	-	177.130.476,94	-	-	177.130.476,94
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu atas Kesalahan Pencatatan Upah	-	-	-	-	-	-	(885.652.384,67)	(885.652.384,67)
Labas (Rugi) Tahun Berjalan 2023	-	-	-	-	-	-	12.647.659.985,05	12.647.659.985,05
Saldo Per 31 Desember 2023	70.600.547.648,68	1.245.250.466,00	3.986.708.244,77	1.561.492.094,69	77.393.998.454,14	5.680.195.396,00	5.919.672.651,60	88.993.866.501,74

Detilan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

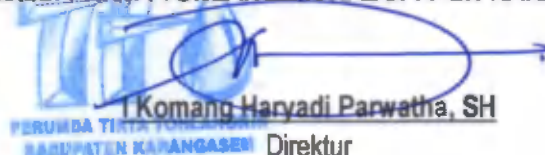
PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

Komang Haryadi Parwatha, SH
Direktur
PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba (Rugi) Operasi	12.647.659.985,05	885.652.364,67
- Penyusutan Aset Tetap	5.827.619.721,75	5.528.094.861,99
- Amortisasi	-	15.125.000,00
- Penyisihan Piutang	890.210.494,08	211.515.080,89
Jumlah Penyesuaian	19.365.490.200,87	6.640.387.327,55
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja		
Perubahan Modal Kerja:		
- (Kenaikan)/Penurunan Deposito	-	(1.000.000.000,00)
- (Kenaikan)/Penurunan Piutang Usaha	(2.300.538.575,00)	(225.962.475,00)
- (Kenaikan)/Penurunan Piutang Non Usaha	-	306.834.039,00
- (Kenaikan)/Penurunan Persediaan	628.856.816,40	(674.097.797,90)
- (Kenaikan)/Penurunan Pembayaran di Muka	(9.587.402,99)	(4.700.483,33)
- Kenaikan/(Penurunan) Utang Usaha	(249.320.574,00)	51.793.811,00
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Pajak	2.829.966.648,00	77.240.764,00
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Lancar Lainnya	311.103.251,69	(62.156.701,00)
- Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	(418.424.219,06)	765.433.533,06
Arus Kas Beraih Dari Aktivitas Operasi	20.157.546.345,91	5.874.772.017,38
Arus kas dari aktivitas investasi		
- (Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	(6.316.030.374,60)	(4.769.384.667,30)
- (Kenaikan)/Penurunan Aset Daiam Penyelesaian	-	-
- (Kenaikan)/Penurunan Aset Tidak Berwujud	(244.194.064,00)	37.989.996,00
Jumlah Arus kas bersih yang Diperoleh (digunakan) dari aktivitas Investasi	(6.560.224.378,60)	(4.731.394.671,30)
Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jasa Produksi	477.406,03	-
- Kenaikan / (Penurunan) Corporate Social Responsibility (CSR)	44.282.619,23	36.924.640,02
- Kenaikan / (Penurunan) Penggunaan Lainnya	44.760.085,27	38.924.640,02
- Kenaikan / (Penurunan) Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
- Konaikan / (Penurunan) Cadangan Umum	177.130.476,94	147.696.160,08
- Kenaikan / (Penurunan) Akumulasi Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu	(885.652.384,67)	(1.528.127.389,41)
Jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	880.998.262,80	193.416.850,71
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	14.478.320.230,10	1.336.794.196,79
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	14.307.975.160,23	12.971.180.963,44
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	28.786.295.390,34	14.307.975.160,23

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM


Komang Haryadi Parwatha, SH
Direktur

BAB II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Latar Belakang dan Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tk II Kabupaten Karangasem Nomor: 02/Perda/1976, tanggal 29 Juni 1976 Pasal 2 Ayat (1), dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 2) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (2, 12 / 2018).

Tujuan pendirian perusahaan sesuai Perda di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam rangka menuju Kabupaten Karangasem yang Maju, Mapan, dan Mandiri (3M) Jagadhita Yacaiti Dharma.

b. Susunan Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 443 Tahun 1991, tanggal 2 Oktober 1991 yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 440/HK/2021 Tanggal 1 Desember 2021, tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, menetapkan: I Komang Haryadi Parwatha, SH sebagai Direktur untuk periode Tahun 2021 - 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 193/HK/2021 Tanggal 2 Juni 2021, tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem, menetapkan: I Nyoman Sutirtayasa, ST. MT sebagai Dewan Pengawas untuk periode Tahun 2021-2025, sebagai berikut :

Direktur : I Komang Haryadi Parwatha, SH
Dewan Pengawas : I Nyoman Sutirtayasa, ST. MT

c. Personalia

Jumlah pegawai Perumda Tohlangkir per 31 Desember 2023 sebanyak 134 orang terdiri dari 1 orang direksi dan 120 orang pegawai tetap dan 14 orang pegawai honorer dengan komposisi sebagai berikut:

No	Direksi / Bagian	Pegawai Tetap	Honorer	Jumlah
1	Direktur	1	0	1
2	Bagian Keuangan	20	4	24
3	Bagian Teknik	21	2	23
4	Unit Pelayanan Kec. Karangasem	17	2	19
5	Unit Pelayanan Kec. Selat	8	0	8
6	Unit Pelayanan Kec. Abang	13	2	15
7	Unit Pelayanan Kec. Kubu	10	1	11
8	Unit Pelayanan Kec. Rendang	9	0	9
9	Unit Pelayanan Kec. Manggis	10	1	11
10	Unit Pelayanan Kec. Bebandem	5	0	5
11	Unit Pelayanan Kec. Sidemen	6	2	8
Total				134

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHITISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perumda Tirta Tohlangkir disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual.

Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung.

b. Piutang dan Penyisihan Kerugian

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut :

Sosial Umum (A1)	:	61.20%
Tempat Ibadah (A2)	:	28.61%
Sosial Khusus (A3)	:	9.58%
Rumah Tangga 1 (B1)	:	27.49%
Rumah Tangga 2 (B2)	:	31.34%
Instansi Pemerintah (B3)	:	15.04%
Niaga Kecil (C1)	:	48.30%
Niaga Besar (C2)	:	27.89%
Industri Kecil (D2)	:	0.00%
Industri Besar (D2)	:	0.00%
Khusus (E)	:	0.00%
Lainnya	:	0.00%

c. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO).

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- Persediaan bahan instalasi, terdiri atas persediaan barang/bahan yang dibeli untuk investasi dan pemeliharaan instalasi.
- Persediaan bahan operasi terdiri atas persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya.
- Metode pencatatan persediaan bahan operasi menggunakan metode "Physical Inventory Method", sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode "Perpetual Method".

d. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aktiva Tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan Aktiva Tetap tersebut.

Aktiva Tetap disusutkan dengan metode yang dianut dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penggolongan dan besarnya tarif penyusutan sebagai berikut :

- Kelompok I Disusutkan 25% dari nilai perolehan.
- Kelompok II disusutkan 12,5% dari nilai perolehan.
- Kelompok III disusutkan 6,25% dari nilai perolehan.
- Bangunan Permanen disusutkan sebesar 5% dari nilai perolehan.
- Bangunan Tidak Permanen disusutkan sebesar 10% dari nilai perolehan.

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

e. Aktiva Tetap dalam Penyelesaian

Aset-aset perusahaan yang dibangun sendiri yang sedang dalam masa konstruksi dibukukan dalam perkiraan ini. Pada saat pekerjaan selesai dan telah digunakan untuk operasional perusahaan dipindahbukukan pada aktiva tetap masing-masing.

f. Kewajiban

Kewajiban dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terutang pada akhir tahun.

Untuk kewajiban yang telah terjadi namun jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti dapat dilakukan dengan taksiran yang wajar.

g. Bagian Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Bagian Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca disajikan sebagai kewajiban lancar.

h. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pos ini menampung pembiayaan Proyek eks BPAM dan Proyek PDAM yang berasal dari Pemerintah yang diserahkan oleh proyek kepada PDAM, namun belum ditentukan statusnya sebagai penyertaan.

i. Modal Pemda

Pos ini menampung penyertaan modal Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari Penyetoran Pemda pengalihan ex proyek APBD, pengalihan ex proyek Pemerintah Pusat, maupun setoran bagian laba pemda sebesar 55% yang diserahkan kembali ke PDAM sebagai penyertaan modal pemda.

j. Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.

Seluruh Pendapatan baik pendaptan usahan maupun non usaha diakui pada saat terjadinya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati yaitu :

- 1) Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai
- 2) Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan. Pendapatan ini diakui pada saat pembayaran jika calon pelanggan membayar kewajibannya secara tunai, atau pada saat ditandatanganinya kontrak sambungan baru bagi pelanggan yang memenuhi kewajibannya dengan cara mengangsur.

k. Beban

Pada dasarnya beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka. Untuk biaya listrik dan pajak air bawah tanah diakui berdasarkan bulan rekening/tagihan.

l. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah mengikuti kewajiban imbalan pasca kerja melalui iuran pasti sebagaimana telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) 131 Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Perusahaan membayar iuran pasti melalui Dapenma Pamsi dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Perumda Tirta Tohlangkir juga memiliki kebijakan internal berupa pemberian penghargaan dan tanda jasa atas yang memasuki masa pensiun atau diberhentikan dengan hormat.

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Nomor: 800/01/PERUMDA/I/2023 tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem yang Memasuki Masa Pensiun dan atau Diberhentikan dengan Hormat, dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) Tahun, diberikan penghargaan minimal 4 (empat) kali penghasilan terakhir.
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 20 (dua puluh) Tahun, diberikan penghargaan minimal 7 (tujuh) kali penghasilan terakhir.
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) Tahun, diberikan penghargaan minimal 10 (sepuluh) kali penghasilan terakhir.

Atas pemberian penghargaan dan tanda jasa tersebut dibebankan sekaligus saat pegawai memasuki masa pensiun atau diberhentikan dengan hormat.

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Akun kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
<u>Kas Bank</u>		
- Giro BPD	18,496,533,287.28	6,179,457,084.17
- Tabungan BPD	-	-
- Kas BPD	67,887,650.00	33,559,575.00
- Giro BRI	5,220,874,453.06	3,093,958,501.06
- Tabungan BRI	-	-
<u>Kas Kecil</u>		
- Uang Kas (Kas Kecil)	1,000,000.00	1,000,000.00
<u>Deposito</u>		
- Deposito Bank Pembangunan Daerah Bali	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
- Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	28,786,295,390.34	14,307,975,160.23

Saldo kas dan setara kas sebesar di atas merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Deposito

Deposito yang tergolong kas dan setara kas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penempatan pada Bank	No. Bilyet	Jangka Waktu	Nominal
1.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.01.01676-7	1 bulan	3,000,000,000.00
2.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.02.00684-8	3 bulan	2,000,000,000.00
	Jumlah			5,000,000,000.00

b. Deposito

Akun deposito per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Deposito Bank Pembangunan Daerah Bali	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
- Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	-
Jumlah	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penempatan pada Bank	No. Bilyet	Jangka Waktu	Nominal
1.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.03.00192-4	6 bulan	5,000,000,000.00
2.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.09.00263-3	6 bulan	6,000,000,000.00
	Jumlah			11,000,000,000.00

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

c. Piutang Usaha

Akun piutang usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Piutang Rekening Air	7,438,345,675.00	5,088,369,100.00
- Piutang Rekening Non Air	122,040,275.00	171,478,275.00
- <u>Penyisihan Piutang Air</u>		
- Piutang Rekening Air Pelanggan Sosial Umum	(33,154,870.50)	(20,909,448.08)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Tempat Ibadah	(49,174,939.53)	(10,754,025.75)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Sosial Khusus	(774,478.34)	(7,482,483.50)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Rumah Tangga	(1,455,789,208.29)	(838,195,863.66)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Rumah Tangga	(309,637,633.00)	(218,642,954.89)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Instansi Pemerintah	(41,036,504.64)	(17,656,739.10)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Niaga Kecil	(179,921,182.88)	(93,397,547.52)
- Piutang Rekening Air Pelanggan Niaga Besar	(50,929,691.94)	(23,168,952.52)
Jumlah Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(2,120,418,509.10)	(1,230,208,015.03)
Jumlah Piutang Usaha Bersih	5,439,967,440.90	4,029,639,359.98

Daftar Piutang dan Daftar Penyisihan Piutang Rekening Air tersaji pada Lampiran 1.

d. Piutang Non Usaha

Akun piutang non usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari rincian sebagai berikut:

	12/31/2023	12/31/2022
- Piutang Pajak	-	-
Jumlah Piutang Non Usaha	-	-

e. Persediaan

Akun persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Persediaan Operasi Kimia	44,845,302.00	50,692,590.00
- Persediaan Bahan Bakar (Solar)	585,800.00	638,600.00
- Persediaan Suku Cadang Pompa	269,159,200.00	161,441,900.00
- Persediaan Bahan Instalasi	1,948,004,289.60	2,678,678,318.00
Jumlah Persediaan	2,262,594,591.60	2,891,451,408.00

Daftar persediaan tersaji pada Lampiran 2.

f. Pembayaran Dimuka

Akun pembayaran dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Uang Muka Pembelian	19,920,873.32	10,333,470.33
Jumlah	19,920,873.32	10,333,470.33

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

g. Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

31 Desember 2023

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Perolehan :				
Tanah dan Hak atas Tanah	237,704,075.00	-	-	237,704,075.00
Instalasi Sumber	3,038,727,701.00	47,193,000.00	-	3,085,920,701.00
Instalasi Perpompaan	20,000,411,016.00	1,549,720,950.00	-	21,550,131,966.00
Instalasi Pengolahan Air	2,544,571,948.00	-	-	2,544,571,948.00
Instalasi Trans. & Distribusi	81,815,365,123.60	4,385,022,824.60	-	86,200,387,948.20
Bangunan Gedung	388,551,500.00	44,048,000.00	-	432,599,500.00
Peralatan Kantor	94,449,700.00	9,800,000.00	-	104,249,700.00
Kendaraan	973,805,355.00	-	-	973,805,355.00
Inventaris Kantor	2,213,258,295.00	280,245,600.00	-	2,493,503,895.00
Jumlah Perolehan	111,306,844,713.60	6,316,030,374.60	-	117,622,875,088.20
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Ph. Tanah dan Hak atas Tanah	-	-	-	-
Akumulasi Ph. Instalasi Sumber	(1,832,399,740.17)	(121,216,801.32)	-	(1,953,616,541.49)
Akumulasi Ph. Instalasi Perpompaan	(11,053,825,341.40)	(1,113,850,290.63)	-	(12,167,675,632.03)
Akumulasi Ph. Instalasi Pengolahan Air	(1,678,531,627.26)	(77,718,078.12)	-	(1,756,249,705.38)
Akumulasi Ph. Instalasi Trans. & Distribusi	(46,100,226,987.80)	(4,331,082,343.69)	-	(50,431,309,331.49)
Akumulasi Ph. Gedung	(251,277,222.07)	(16,510,383.41)	-	(267,787,605.48)
Akumulasi Ph. Kantor	(94,449,678.43)	(204,166.67)	-	(94,653,845.10)
Akumulasi Ph. Kendaraan	(973,805,331.38)	-	-	(973,805,331.38)
Akumulasi Ph. Inventaris Kantor	(1,920,198,132.93)	(167,037,657.91)	-	(2,087,235,790.84)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(63,904,714,061.44)	(5,827,619,721.75)	-	(69,732,333,783.19)
Nilai Buku	47,402,130,652.16			47,890,541,305.01

31 Desember 2022

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Perolehan :				
Tanah dan Hak atas Tanah	237,704,075.00	-	-	237,704,075.00
Instalasi Sumber	3,038,727,701.00	-	-	3,038,727,701.00
Instalasi Perpompaan	19,071,354,466.00	929,056,550.00	-	20,000,411,016.00
Instalasi Pengolahan Air	2,544,571,948.00	-	-	2,544,571,948.00
Instalasi Trans. & Distribusi	78,136,944,276.30	3,678,420,847.30	-	81,815,365,123.60
Bangunan Gedung	388,551,500.00	-	-	388,551,500.00
Peralatan Kantor	94,449,700.00	-	-	94,449,700.00
Kendaraan	973,805,355.00	-	-	973,805,355.00
Inventaris Kantor	2,051,351,025.00	161,907,270.00	-	2,213,258,295.00
Jumlah Perolehan	106,537,460,046.30	4,769,384,667.30	-	111,306,844,713.60

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Ph. Instalasi Sumber	(1,711,475,063.85)	(120,924,676.32)	-	(1,832,399,740.17)
Akumulasi Ph. Instalasi Perpompaan	(9,990,069,822.32)	(1,063,755,519.08)	-	(11,053,825,341.40)
Akumulasi Ph. Instalasi Pengolahan Air	(1,600,813,549.14)	(77,718,078.12)	-	(1,678,531,627.26)
Akumulasi Ph. Instalasi Trans. &	(42,006,963,545.46)	(4,093,263,442.34)	-	(46,100,226,987.80)
Akumulasi Ph. Gedung	(235,087,396.99)	(16,189,825.08)	-	(251,277,222.07)
Akumulasi Ph. Kantor	(93,967,897.18)	(481,781.25)	-	(94,449,678.43)
Akumulasi Ph. Kendaraan	(973,805,331.38)	-	-	(973,805,331.38)
Akumulasi Ph. Inventaris Kantor	(1,764,436,593.13)	(155,761,539.80)	-	(1,920,198,132.93)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(58,376,619,199.45)	(5,528,094,861.99)	-	(63,904,714,061.44)
Nilai Buku	48,160,840,846.85			47,402,130,652.16

Daftar Aset Tetap tersaji pada Lampiran 3.

h. Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari

	12/31/2023	12/31/2022
- Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	-	-
Jumlah aset tetap dalam penyelesaian	-	-

i. Aset Tidak Berwujud

Akun aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Sewa Jangka Panjang	385,120,218.00	140,926,214.00
- Beban Ditangguhkan	192,000,000.00	192,000,000.00
- Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	(192,000,000.00)	(192,000,000.00)
Jumlah aset tidak berwujud	385,120,218.00	140,926,214.00

j. Utang Usaha

Akun utang usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Utang Usaha	332,505,637.00	581,826,211.00
Jumlah utang usaha	332,505,637.00	581,826,211.00

Daftar Utang usaha tersaji pada Lampiran 4.

k. Utang Lainnya

Akun utang lainnya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Utang lainnya	431,272,625.69	120,169,374.00
Jumlah Utang Lainnya	431,272,625.69	120,169,374.00

Daftar Utang Lainnya tersaji pada Lampiran 5.

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

I. Utang Pajak

Akun utang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- PPh Badan Pasal 29	2,695,489,177.00	104,821,083.00
- PPh Pasal 25	254,847,285.00	17,701,896.00
- PPN Keluaran	5,003,258.00	2,849,893.00
Jumlah Utang Pajak	2,955,339,720.00	125,372,872.00

m. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Akun kewajiban jangka pendek lainnya merupakan cek yang belum dicairkan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	467,559,985.00	885,984,204.06
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	467,559,985.00	885,984,204.06

Daftar Utang Lainnya tersaji pada Lampiran 6.

n. Kewajiban Jangka Panjang

Akun Kewajiban Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Cadangan Dana Pensiun dan Sokongan	8,668,698.71	8,668,698.71
- Kewajiban Jasa Produksi	1,971,108,627.52	1,970,631,161.49
- Coorporate Social Responsibility (CSR)	138,929,706.52	94,647,087.29
- Penggunaan Lainnya	485,188,316.99	440,428,231.72
- Kewajiban Imbalan Pascakerja	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2,603,895,349.74	2,514,375,179.21

o. Modal Pemda

Akun Modal Pemda per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Modal Pemda	3,210,026,336.00	3,210,026,336.00
- Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan aset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) yang ditetapkan sebagai Modal Pemda berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997.	6,291,233,421.07	6,291,233,421.07
- Bagian Laba Pemda Tahun 2006 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK. Bupati Karangasem No. 900/3613/Ek tanggal 27 Desember 2007.	260,948,940.86	260,948,940.86
- Bagian Laba Pemda Tahun 2007 dan 2008 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK. Bupati Karangasem No.900/1283/Ek tanggal 1 Juni 2010.	617,578,084.99	617,578,084.99
- Bagian Laba Pemda Tahun 2009 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK. Bupati Karangasem No. 900/1511/Ek tanggal 7 Juli 2010	1,973,610,301.58	1,973,610,301.58
- Pengadaan dan Pemasangan Pompa Sumbersible beserta Pelengkapannya 2 Unit di Mata Air Tirta dan Desa Tumbu Keputusan Bupati tanggal 31 Maret 2011 No. 171/HK/2011.	839,391,000.00	839,391,000.00
- Bagian Laba Pemda Tahun 2010 yang ditetapkan sebagai modal penyertaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah No. 931/01-90/LS/KEU/2012 tgl. 19 April 2012	1,847,107,887.69	1,847,107,887.69

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

- Batuan Pipa dari Kementrian Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali. Nota Kesepahaman (MOU) No. AM.04.03/1053.3/PDAM/2012.	191,202,660.00	191,202,660.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab.Karangasem sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tgl. 15 Agustus 2014	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab.Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2015	2,478,010,016.49	2,478,010,016.49
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 9 Tahun 2015	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Jaringan Air bersih Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem	27,691,439,000.00	27,691,439,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Perda. Nomor 13 Tahun 2016	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Perda. Nomor 14 Tahun 2017	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab.Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Perda. Nomor 10 Tahun 2018	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab.Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Perda. Nomor 14 Tahun 2020	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Perda. Nomor 8 Tahun 2021	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangsem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Perda. Nomor 11 Tahun 2022	1,500,000,000.00	
Jumlah Modal Pemda	70,600,547,648.68	69,100,547,648.68
p. Modal Hibah		
Akun Modal Hibah per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:		
	12/31/2023	12/31/2022
- Modal Hibah	1,245,250,466.00	1,245,250,466.00
Jumlah Modal Hibah	1,245,250,466.00	1,245,250,466.00
q. Penyertaan Pemerintah Yang belum Ditetapkan Statusnya		
Akun penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:		
	12/31/2023	12/31/2022
- Penyertaan Pemerintah yang belum Ditetapkan Statusnya	5,680,195,396.00	5,680,195,396.00
Jumlah Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	5,680,195,396.00	5,680,195,396.00
r. Cadangan Umum		
Akun Cadangan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:		
	12/31/2023	12/31/2022
- Cadangan Umum	3,986,708,244.77	3,809,577,767.83
Jumlah Cadangan Umum	3,986,708,244.77	3,809,577,767.83

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

s. Cadangan Lainnya

Akun Cadangan Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Cadangan Dana Sosial & Pendidikan	1,561,492,094.69	1,561,492,094.69
Jumlah Cadangan Lainnya	1,561,492,094.69	1,561,492,094.69

t. Akumulasi Laba/(Rugi) s/d Tahun Lalu

Akun laba/ (rugi) s/d tahun lalu per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Akumulasi Laba/(Rugi) s/d Tahun Lalu	(6,727,987,333.45)	(6,727,987,333.45)
Jumlah Laba/ (Rugi) s/d Tahun Lalu	(6,727,987,333.45)	(6,727,987,333.45)

u. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Akun laba (rugi) tahun berjalan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	12/31/2023	12/31/2022
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12,647,659,985.05	885,652,384.67
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12,647,659,985.05	885,652,384.67

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

4. PENJELASAN POS-POS LABA/RUGI

a. Pendapatan Usaha

Akun ini terdiri dari :

a) Pendapatan Air

	12/31/2023	12/31/2022
- Penjualan Air	46,673,755,525.00	29,253,566,750.00
- Penjualan Air Tanpa Meter	2,920,200.00	20,954,400.00
Jumlah Pendapatan Air	46,676,675,725.00	29,274,521,150.00

b) Pendapatan Non Air

	12/31/2023	12/31/2022
- Pendapatan Sambungan Baru	2,597,313,000.00	2,398,451,250.00
- Pendapatan Pendaftaran	24,440,000.00	7,810,000.00
- Pendapatan Penyambungan Kembali	285,345,000.00	398,420,000.00
- Pendapatan Denda	1,918,185,000.00	713,075,000.00
- Pendapatan Balik Nama	2,620,000.00	1,110,000.00
- Uang Jaminan Langganan (UJL)	166,200,000.00	35,000,000.00
- Pendapatan Non Air Lainnya	64,945,000.00	26,698,000.00
Jumlah	5,059,048,000.00	3,580,564,250.00
Total Pendapatan Usaha	51,735,723,725.00	32,855,085,400.00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

b. Harga Pokok Penjualan

Akun ini terdiri dari :

a) Departemen Sumber

	12/31/2023	12/31/2022
- Beban Pegawai Sumber	1,076,648,620.00	777,866,650.00
- Beban Bahan Bakar	4,168,800.00	1,637,700.00
- Beban Listrik PLN	10,639,675,273.00	10,001,499,108.00
- Rupa - rupa Beban Operasi	522,599,000.00	316,600,000.00
- Beban Pemeliharaan Sumber	81,483,650.00	87,788,800.00
- Beban Air Baku	2,722,726,248.00	1,998,025,660.00
- Beban Penyusutan Sumber	1,235,067,091.95	1,184,680,195.40
Jumlah Departemen Sumber	16,282,368,682.95	14,368,098,113.40

b) Departemen Pengolahan Air

	12/31/2023	12/31/2022
- Beban Bahan Kimia	48,103,848.00	56,788,390.00
- Rupa-rupa Beban Pengolahan	86,152,000.00	78,684,000.00
- Beban Pemeliharaan Pengolahan	-	-
- Beban Penyusutan Pengolahan	77,718,078.12	77,718,078.12
Jumlah Departemen Pengolahan Air	211,973,926.12	213,190,468.12

c. Departemen Transmisi dan Distribusi

	12/31/2023	12/31/2022
- Beban Pegawai Transmisi / Distribusi	1,724,507,730.00	2,074,772,251.00
- Beban Pemeliharaan Transmisi / Distribusi	2,284,466,167.80	1,811,867,511.80
- Beban Penyusutan Transmisi / Distribusi	4,331,082,343.69	4,093,263,442.34
Jumlah Departemen Transmisi/Distribusi	8,340,056,241.49	7,979,903,205.14
Total Harga Pokok Penjualan	24,834,398,850.56	22,561,191,786.66

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

c. Beban Pegawai

Akun ini terdiri dari :

	12/31/2023	12/31/2022
- Biaya Pegawai Adm. Umum	6,990,561,906.00	6,662,600,024.00
- Biaya Pembaca Meter	100,720,800.00	98,318,800.00
- Biaya Direksi dan Dewan Pengawas	968,980,440.00	936,783,400.00
- Biaya Perjalanan Dinas	52,883,583.00	64,738,220.00
Jumlah	8,113,146,729.00	7,762,440,444.00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

d. Beban Pemeliharaan

Akun ini terdiri dari :

	12/31/2023	12/31/2022
- Biaya Pemeliharaan Adm. Umum	642,035,211.00	258,575,497.00
Jumlah	642,035,211.00	258,575,497.00

Jumlah tersebut merupakan beban pemeliharaan perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

e. Beban Operasi Lainnya

Akun ini terdiri dari :

	12/31/2023	12/31/2022
- Beban Kantor	388,898,037.01	374,098,492.67
- Beban Hubungan Langganan	29,243,850.00	9,749,400.00
- Beban Penyisihan Piutang	890,210,494.07	211,515,080.89
- Rupa - Rupa Beban Umum	965,415,758.00	822,901,476.00
Jumlah	2,273,768,139.08	1,418,264,449.56

Jumlah tersebut merupakan beban operasi lainnya perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Akun ini terdiri dari :

	12/31/2023	12/31/2022
- Beban Penyusutan Adm. Umum	183,752,207.99	187,558,146.13
Jumlah	183,752,207.99	187,558,146.13

Jumlah tersebut merupakan beban penyusutan perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

g. Pendapatan dan Beban Non Usaha

Akun ini terdiri dari :

a) Pendapatan Non Usaha

	12/31/2023	12/31/2022
- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Tabungan	348,429,117.83	168,313,029.71
- Pendapatan Bunga Diposito	477,199,999.92	464,384,057.27
- Rupa - Rupa Pendapatan lainnya	1,257,681.50	1,030,935.40
Jumlah	826,886,799.25	633,728,022.38

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah)

b) Beban Non Usaha

	12/31/2023	12/31/2022
- Sumbangan	67,742,520.00	57,550,000.00
- Beban Administrasi Bank	2,263,600.00	2,662,962.00
- Beban Pajak Bank	69,685,821.57	33,661,149.36
- Beban Lainnya	30,234,000.00	4,012,768.00
Jumlah	169,925,941.57	97,886,879.36

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan beban non usaha perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 20223 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

h. Beban Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri dari :

	12/31/2023	12/31/2022
- PPh Badan	3,697,923,460.00	317,243,835.00
Jumlah	3,697,923,460.00	317,243,835.00

Jumlah tersebut merupakan taksiran pajak badan perusahaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Perhitungan terlampir pada Lampiran 7.

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
REKAP PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG REKENING AIR PER KLASIFIKASI
PER 31 DESEMBER 2023

1. DAFTAR PIUTANG

NO	GOLONGAN	U.KARANGASEM	U.SELAT	U.ABANG	U.KUBU	U.RENDANG	U.MANGGIS	U.BEBANDEM	U.SIDEMEN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sosial Umum (A1)	4,743,475.00	2,928,750.00	16,144,575.00	24,870,700.00	5,204,675.00	44,000.00	194,450.00	44,000.00	54,174,625.00
2	Sosial Khusus (A2)	50,085,350.00	14,879,750.00	27,281,600.00	14,896,550.00	23,376,625.00	23,793,475.00	6,646,350.00	10,920,550.00	171,880,250.00
3	Sosial Khusus (A3)	1,594,175.00	841,500.00	178,500.00	1,355,425.00	485,900.00	3,118,900.00	.00	509,925.00	8,084,325.00
4	Rumah Tangga 1 (B1)	1,630,460,950.00	591,111,550.00	621,170,050.00	439,866,800.00	834,327,450.00	700,900,175.00	137,785,500.00	340,082,175.00	5,295,704,650.00
5	Rumah Tangga 2 (B2)	190,093,750.00	18,477,500.00	52,093,750.00	589,882,000.00	44,644,750.00	58,742,750.00	23,953,250.00	10,107,250.00	987,995,000.00
6	Instansi Pemerintah (B3)	170,774,500.00	4,563,300.00	13,325,100.00	28,752,300.00	20,526,900.00	25,250,100.00	4,938,400.00	4,718,500.00	272,849,100.00
7	Niaga Kecil (C1)	177,029,500.00	14,796,875.00	12,489,500.00	31,572,750.00	47,816,875.00	64,215,750.00	10,019,125.00	14,567,250.00	372,507,625.00
8	Niaga Besar (C2)	50,468,900.00	2,818,150.00	5,248,200.00	28,154,300.00	5,846,300.00	80,110,200.00	628,000.00	9,335,100.00	182,609,150.00
9	Industri Kecil (D1)	.00	4,016,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,016,950.00
10	Niaga Lain-lain (D2)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,876,000.00	.00	1,876,000.00
11	Khusus (E)	.00	.00	.00	.00	.00	86,648,000.00	.00	.00	86,648,000.00
12	Lainnya	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	-
	JUMLAH TOTAL	2,275,250,600.00	654,434,325.00	747,931,275.00	1,159,350,825.00	982,229,475.00	1,042,823,350.00	186,041,075.00	390,284,750.00	7,438,345,675.00

2. DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG

NO	GOLONGAN	Saldo Piutang Per 31 Desember	Prosentase Rata - Rata (%)	Perhitungan Penyisihan Th.
1	Sosial Umum (A1)	54,174,625.00	61.20%	33,154,870.50
2	Tempat Ibadah (A2)	171,880,250.00	28.61%	49,174,939.53
3	Sosial Khusus (A3)	8,084,325.00	9.58%	774,478.34
4	Rumah Tangga 1 (B1)	5,295,704,650.00	27.49%	1,455,789,208.29
5	Rumah Tangga 2 (B2)	987,995,000.00	31.34%	309,637,633.00
6	Instansi Pemerintah (B3)	272,849,100.00	15.04%	41,036,504.64
7	Niaga Kecil (C1)	372,507,625.00	48.30%	179,921,182.88
8	Niaga Besar (C2)	182,609,150.00	27.89%	50,929,691.94
9	Industri Kecil (D1)	4,016,950.00	0.00%	-
10	Niaga Lain-lain (D2)	1,876,000.00	0.00%	-
11	Khusus (E)	86,648,000.00	0.00%	-
12	Lainnya	-	0.00%	-
	JUMLAH TOTAL	7,438,345,675.00	2	2,120,418,509.10

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA PERSEDIAAN	NILAI
1	Persediaan Operasi Kimia	44,845,302.00
2	Persediaan Bahan Pembantu (OLIE)	-
3	Persediaan Bahan Bakar (Solar)	585,800.00
4	Persediaan Suku Cadang Pompa	269,159,200.00
5	Persediaan Bahan Instalasi	1,948,004,289.60
	TOTAL	2,262,594,591.60

PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
DAFTAR ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2021

NAMA BARANG	UNIT	Harga Perolehan 2022	Mutasi 2023		Harga Perolehan 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2022	Nilai Buku 2022	Mutasi Penyusutan s/d 31 Des 2023		Beban Penyusutan S/d 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2023	Nilai Buku 2023
			Penambahan	Pengurangan				Penambahan	Pengurangan			
Tanah	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karangasem	5,375,000.00	-	-	5,375,000.00	-	5,375,000.00	-	-	-	-	5,375,000.00
	Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abang	3,530,975.00	-	-	3,530,975.00	-	3,530,975.00	-	-	-	-	3,530,975.00
	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendang	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00
	Manggis	222,798,100.00	-	-	222,798,100.00	-	222,798,100.00	-	-	-	-	222,798,100.00
	Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	237,704,075.00	-	-	237,704,075.00	-	237,704,075.00	-	-	-	-	237,704,075.00
Instalasi Pompa Air	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karangasem	3,369,819,142.00	169,730,100.00	-	3,539,549,242.00	1,845,232,455.58	1,524,586,687.25	184,174,096.06	-	184,174,096.06	2,029,406,552.00	1,510,142,690.00
	Selat	1,585,071,523.00	-	-	1,585,071,523.00	932,290,953.36	652,780,569.82	93,720,801.15	-	93,720,801.15	1,026,011,754.60	559,059,768.40
	Abang	5,895,769,964.00	313,575,000.00	-	6,209,344,964.00	2,886,384,973.80	3,009,384,990.02	349,510,303.68	-	349,510,303.68	3,235,895,278.94	2,973,449,685.06
	Kubu	2,401,044,221.00	-	-	2,401,044,221.00	1,404,507,972.00	996,536,248.95	129,647,943.63	-	129,647,943.63	1,534,155,915.60	866,888,305.40
	Rendang	2,992,367,748.00	493,338,390.00	-	3,485,706,138.00	1,615,672,351.83	1,376,695,398.83	167,144,947.97	-	167,144,947.97	1,782,817,300.26	1,702,888,837.74
	Manggis	1,656,352,218.00	168,276,000.00	-	1,824,628,218.00	1,111,528,441.68	544,823,776.38	68,772,354.63	-	68,772,354.63	1,180,300,796.38	644,327,421.62
	Bebandem	1,585,056,600.00	404,801,460.00	-	1,989,858,060.00	886,486,101.66	698,570,498.50	97,508,965.94	-	97,508,965.94	983,995,067.72	1,005,862,992.28
	Sidemen	514,929,600.00	-	-	514,929,600.00	371,722,091.41	143,207,508.59	23,370,875.00	-	23,370,875.00	395,092,966.53	119,836,633.47
	Total	20,000,411,016.00	1,549,720,950.00	-	21,550,131,966.00	11,053,825,341.32	8,946,585,678.33	1,113,850,288.04	-	1,113,850,288.04	12,167,675,632.03	9,382,456,333.97
Instalasi Pengolahan Air	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karangasem	960,634,566.00	-	-	960,634,566.00	513,807,726.28	446,826,839.52	37,617,028.30	-	37,617,028.30	551,424,754.48	409,209,811.52
	Selat	135,718,000.00	-	-	135,718,000.00	114,680,910.54	21,037,089.46	1,765,350.00	-	1,765,350.00	116,446,260.54	19,271,739.46
	Abang	636,232,000.00	-	-	636,232,000.00	361,158,622.29	275,073,377.55	28,873,700.00	-	28,873,700.00	390,032,322.21	246,199,677.79
	Kubu	21,793,395.00	-	-	21,793,395.00	21,793,392.92	2.08	-	-	-	21,793,392.92	2.08
	Rendang	375,208,389.00	-	-	375,208,389.00	252,105,384.15	123,103,004.85	9,462,000.00	-	9,462,000.00	261,567,384.15	113,641,004.85
	Manggis	311,527,225.00	-	-	311,527,225.00	311,527,220.04	4.96	-	-	-	311,527,220.04	4.96
	Bebandem	103,458,373.00	-	-	103,458,373.00	103,458,371.04	1.96	-	-	-	103,458,371.04	1.96
	Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2,544,571,948.00	-	-	2,544,571,948.00	1,678,531,627.26	866,040,320.38	77,718,078.30	-	77,718,078.30	1,756,249,705.38	788,322,242.62
Instalasi Distribusi dan Transmisi	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karangasem	32,491,154,427.86	2,151,727,325.50	-	34,642,881,753.36	19,006,199,592.43	13,484,954,853.82	1,668,075,925.87	-	1,668,075,925.87	20,674,275,535.79	13,968,606,217.57
	Selat	3,985,464,662.10	190,491,137.50	-	4,175,955,799.60	1,699,455,993.00	2,286,008,681.90	209,915,339.22	-	209,915,339.22	1,909,371,347.32	2,266,584,452.28
	Abang	10,942,034,590.45	240,313,798.00	-	11,182,348,388.45	5,345,430,898.03	5,596,603,708.30	612,053,845.62	-	612,053,845.62	5,957,484,760.79	5,224,863,627.66
	Kubu	2,567,220,888.10	601,723,520.00	-	3,168,944,408.10	1,491,806,741.19	1,075,414,152.58	128,449,558.53	-	128,449,558.53	1,620,256,313.59	1,548,688,094.51
	Rendang	4,572,183,249.14	660,066,882.50	-	5,232,250,131.64	2,569,301,764.65	2,002,881,486.64	208,717,606.08	-	208,717,606.08	2,778,019,385.48	2,454,230,746.16
	Manggis	20,755,927,547.05	240,357,538.50	-	20,996,285,085.55	13,125,497,968.33	7,630,429,583.68	1,146,570,221.22	-	1,146,570,221.22	14,272,068,210.22	6,724,216,875.33
	Bebandem	2,736,987,802.85	224,167,603.10	-	2,961,155,405.95	1,358,542,313.55	1,378,445,490.73	131,299,510.06	-	131,299,510.06	1,489,841,826.34	1,471,313,579.61
	Sidemen	3,764,391,956.05	76,175,019.50	-	3,840,566,975.55	1,503,991,716.62	2,260,400,242.38	226,000,232.25	-	226,000,232.25	1,729,991,951.96	2,110,575,023.59
	Total	81,815,365,123.60	4,385,022,824.60	-	86,200,387,948.20	46,100,226,987.80	35,715,138,200.02	4,331,082,238.84	-	4,331,082,238.84	50,431,309,331.49	35,769,078,616.71
Instalasi Sumber Air	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karangasem	719,059,532.00	47,193,000.00	-	766,252,532.00	260,743,852.34	458,315,679.61	29,079,781.35	-	29,079,781.35	289,823,633.66	476,428,898.34
	Selat	45,639,000.00	-	-	45,639,000.00	45,638,997.04	2.96	-	-	-	45,638,997.04	2.96
	Abang	1,670,005,500.00	-	-	1,670,005,500.00	1,018,565,599.30	651,439,900.70	82,091,625.00	-	82,091,625.00	1,100,657,224.30	569,348,275.70
	Kubu	194,030,000.00	-	-	194,030,000.00	157,400,839.19	36,629,160.81	3,117,375.00	-	3,117,375.00	160,518,214.19	33,511,785.81
	Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manggis	203,099,334.00	-	-	203,099,334.00	168,284,078.11	34,815,255.97	2,963,000.00	-	2,963,000.00	171,247,078.15	31,852,255.85
	Bebandem	134,093,935.00	-	-	134,093,935.00	134,093,932.08	2.96	-	-	-	134,093,932.08	2.92
	Sidemen	72,800,400.00	-	-	72,800,400.00	47,672,442.11	25,127,957.81	3,965,020.00	-	3,965,020.00	51,637,462.07	21,162,937.93
	Total	3,038,727,701.00	47,193,000.00	-	3,085,920,701.00	1,832,399,740.17	1,206,327,960.82	121,216,801.35	-	121,216,801.35	1,953,616,541.49	1,132,304,159.51
	Pusat	26,197,500.00	31,686,000.00	-	57,883,500.00	6,722,827.31	19,474,672.69	1,573,925.00	-	1,573,925.00	8,296,752.31	49,586,747.69

Gedung	Karangasem	61,234,000.00	-		61,234,000.00	61,233,998.96	1.04	-	-	61,233,998.96	1.04	
	Selat	148,999,000.00	-		148,999,000.00	90,020,229.65	58,978,770.43	7,449,950.00	7,449,950.00	97,470,179.69	51,528,820.31	
	Abang	148,600,000.00	-		148,600,000.00	89,779,167.15	58,820,832.93	7,430,000.00	7,430,000.00	97,209,167.19	51,390,832.81	
	Kubu	-	9,962,000.00	-	9,962,000.00	-	-	41,508.33	-	41,508.33	9,920,491.67	
	Rendang	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	1,195,000.00	
	Manggis	3,521,000.00	-	-	3,521,000.00	3,520,999.00	1.00	-	-	-	1.00	
	Bebandem				-	-	-	-	-	-	-	
	Sidemen	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	1,190,000.00	
	Total	388,551,500.00	44,048,000.00	-	432,599,500.00	251,277,222.07	137,274,278.09	16,510,383.33	-	16,510,383.33	267,787,605.48	164,811,894.52
Peralatan	Pusat	93,214,200.00	9,800,000.00		103,014,200.00	93,214,183.35	20.81	204,166.67	-	204,166.67	93,418,350.02	9,595,849.98
	Karangasem				-	-	-	-	-	-	-	-
	Selat	60,000.00	-		60,000.00	59,999.00	1.00	-	-	-	59,999.00	1.00
	Abang				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kubu	308,000.00	-	-	308,000.00	308,000.08	(0.08)	-	-	-	308,000.08	(0.08)
	Rendang				-	-	-	-	-	-	-	-
	Manggis	122,500.00	-	-	122,500.00	122,497.96	2.04	-	-	-	122,497.96	2.04
	Bebandem	745,000.00	-	-	745,000.00	744,998.04	1.96	-	-	-	744,998.04	1.96
	Sidemen				-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94,449,700.00	9,800,000.00	-	104,249,700.00	94,449,678.43	25.73	204,166.67	-	204,166.67	94,653,845.10	9,595,854.90	
Kendaraan/ Alat pengangkut	Pusat	846,860,355.00		-	846,860,355.00	846,860,339.36	15.64	-	-	846,860,339.36	15.64	
	Karangasem	14,420,000.00			14,420,000.00	14,419,998.97	1.03	-	-	14,419,998.97	1.03	
	Selat				-	-	-	-	-	-	-	-
	Abang	27,930,000.00	-		27,930,000.00	27,929,999.04	0.96	-	-	27,929,999.04	0.96	
	Kubu	9,930,000.00	-		9,930,000.00	9,929,999.04	0.96	-	-	9,929,999.04	0.96	
	Rendang	23,280,000.00	-	-	23,280,000.00	23,279,998.92	1.08	-	-	23,279,998.92	1.08	
	Manggis	14,420,000.00	-	-	14,420,000.00	14,419,999.00	1.00	-	-	14,419,999.00	1.00	
	Bebandem	9,930,000.00	-	-	9,930,000.00	9,929,999.04	0.96	-	-	9,929,999.04	0.96	
	Sidemen	27,035,000.00	-	-	27,035,000.00	27,034,998.01	1.99	-	-	27,034,998.01	1.99	
Total	973,805,355.00	-	-	973,805,355.00	973,805,331.38	21.63	-	-	973,805,331.38	23.62		
Inventaris	Pusat	1,562,421,195.00	210,911,100.00	-	1,773,332,295.00	1,330,841,561.21	231,579,700.04	129,356,463.65	-	129,356,463.65	1,460,198,041.93	313,134,253.07
	Karangasem	159,966,000.00	15,984,000.00		175,950,000.00	146,579,275.80	13,386,735.28	7,305,144.76	7,305,144.76	153,884,421.64	22,065,578.36	
	Selat	71,143,750.00	4,276,500.00		75,420,250.00	58,330,409.24	12,813,346.68	5,010,319.84	5,010,319.84	63,340,732.16	12,079,517.84	
	Abang	66,781,000.00	19,314,000.00	-	86,095,000.00	64,363,691.00	2,417,315.40	4,948,288.50	-	4,948,288.50	69,311,982.74	16,783,017.26
	Kubu	59,256,500.00	4,107,000.00	-	63,363,500.00	54,572,160.06	4,684,346.77	2,570,039.74	2,570,039.74	57,142,201.76	6,221,298.24	
	Rendang	74,478,500.00	4,276,500.00	-	78,755,000.00	70,133,065.77	4,345,441.27	3,207,237.46	-	3,207,237.46	73,340,305.31	5,414,694.69
	Manggis	80,728,850.00	6,718,500.00	-	87,447,350.00	65,201,953.15	15,526,902.77	6,964,196.99	-	6,964,196.99	72,166,151.02	15,281,198.98
	Bebandem	66,284,500.00	10,381,500.00	-	76,666,000.00	62,387,526.72	3,896,977.36	4,213,364.56	-	4,213,364.56	66,600,891.36	10,065,108.64
	Sidemen	72,198,000.00	4,276,500.00	-	76,474,500.00	67,788,489.98	4,409,513.02	3,462,572.94	-	3,462,572.94	71,251,062.92	5,223,437.08
	Total	2,213,258,295.00	280,245,600.00	-	2,493,503,895.00	1,920,198,132.93	293,060,278.58	167,037,628.44	-	167,037,628.44	2,087,235,790.84	406,268,104.16
TOTAL		111,306,844,713.60	6,316,030,374.60	-	117,622,875,088.20	63,904,714,061.36	47,402,130,838.58	5,827,619,584.97	-	5,827,619,584.97	69,732,333,783.19	47,890,541,305.01

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR UTANG USAHA
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	CV. Putra Payangan (Jembatan Pipa)	90,529,000.00
2	PERBAIKAN KABEL POMPA ARCA MENANGA II 26 KW	5,688,750.00
3	B.PERLENGKAPAN KOMPUTER	1,252,080.00
4	B. KONSUMSI RAPAT RUTIN & PENINJAUAN PBJ	1,972,000.00
5	SEWA SISTEM ABSENSI SMART PRESENCE	10,709,280.00
6	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GARASE KANTOR U.KUBU	9,962,000.00
7	1 PAKET FREE CHLORINE PORTABLE PHOTOMETER	9,800,000.00
8	B. PEMEL / PERAWATAN MOBIL TANGKI	5,467,167.00
9	B. ALAT TULIS KANTOR	7,715,080.00
10	PEMASANGAN PIPA DI RESERVOIR UMANYAR	4,440,000.00
11	PENGADAAN BAHAN INSTALASI & ACC	71,204,280.00
12	3 BOX FREE CHLORINE POWDER REAGENT	3,300,000.00
13	B. LISTRIK PENERANGAN	90,000.00
14	B. KONSUMSI RAPAT AKHIR TAHUN 2023	4,510,000.00
15	REHAB BANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT	100,900,000.00
16	B. PERLENGKAPAN UTK RAPAT AKHIR TAHUN 2023	3,706,000.00
17	UCAPAN SELAMAT ULANG TAHUN BUPATI & WAKIL BUPATI	1,260,000.00
	Jumlah	332,505,637.00

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR UTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST. & DNS	6,977,500.00
2	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS/ DIST & DNS	945,000.00
3	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS	1,472,500.00
4	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS/DIST & DNS	25,439,000.00
5	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS	10,202,500.00
6	5 PAKET BANTEN PEJATI UTK DI 4 SUMBER & 1 SUMUR BOR	750,000.00
7	4 PAKET BANTEN PEJATIAN DI SUMBER MATA AIR	600,000.00
8	4 PAKET BANTEN PEJATI DI EMPAT SUMBER	600,000.00
9	CANANG SARI KECIL, SEGEHAN ALIT & DUPA	125,000.00
10	B. CANANG SARI KECIL & DUPA	120,000.00
11	3 PAKET BANTEN PEJATI DI UNIT BEBANDEM	450,000.00
12	1 PAKET BANTEN PEJATI U. SIDEMEN	150,000.00
13	UTL. PEMAS. SAMB. REGULER	7,180,000.00
14	HONOR NARASUMBER PENDAMPINGAN&PENINJAUAN PBJ	5,400,000.00
15	BANTUAN PARTISIPASI KEGIATAN PENGHIJAUAN	5,000,000.00
16	IURAN KEANGGOTAAN PERPAMSI	2,000,000.00
17	B.PEMERIKSAAN KIMIA AIR & HASIL LAB,BAKTERIOLOGI AIR	12,701,500.00
18	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST. & DNS	13,750,000.00
19	B. PEMELIHARAAN PROGRAM ATP & HRD PAYROLL	9,000,000.00
20	PPH. PASAL 21 UTK PAJAK MASA DESEMBER 2023	11,510,569.00
21	UTL.PEMAS.SAMB. REGULERBL. DES"23	8,090,000.00
22	UTL. PEMASANGAN SAMB. RUMAH BLN. DES "23	4,965,000.00
23	UTL. PEMAS. SAMB. REGULER BLN. DES "23	8,060,000.00
24	UTL.PEMINDAHAN JARINGAN PIPA DIST. SERAYA TENGAH	58,750,000.00
25	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS/ DIST. & DINAS DES"23	20,605,000.00
26	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS/ DIST. & DNS	30,970,000.00
27	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS DES"23	5,150,000.00
28	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS DES "23	9,708,000.00
29	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS DES"23	537,500.00
30	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST. & DINAS BL. DES"23	935,000.00
31	UTL.PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DNS BL.DES"23	1,480,000.00
32	UTL. PERBAIKAN PIPA TRANS / DIST & DINAS BLN. DES"23	1,125,000.00
33	B. SPPD DALAM DAERAH UTK PUSATBLN. DESEMBER 2023	2,470,000.00
34	BBM DEXLITE UTK UJI COBA PEMOMPAANUNIT KUBU	339,000.00
35	B. BANTEN TUMPEK LANDEP DI KTR PUSAT BLN DES "23	4,483,500.00
36	B. BANTEN TUMPEK LANDEP U. KARANGASEM BLN. DES"23	2,186,750.00
37	B. BANTEN TUMPEK LANDEP U. SELAT BLN. DES"23	1,500,000.00

38	B. TUMPEK LANDEP U. ABANG BLN. DES "23	1,500,000.00
39	BANTEN PEJATI DI SUMBER MATA AIR GRUBUG UR	175,000.00
40	B. CANANG SARI KECIL & SEGEHAN ALIT U. KUBU	124,000.00
41	B. BANTEN TUMPEK LANDEPU. BEBANDEM BLN. DES"23	1,495,500.00
42	B. BANTEN TUMPEK LANDEP U. SIDEMEN BLN. DES "23	1,500,000.00
43	B. BANTEN TUMPEK LANDEP U. RENDANG BL. DES"23	1,500,000.00
44	DANA TANTIEM & PENGGUNAAN LAINNYA ATAS	132,847,857.69
45	B. BANTEN DLM RANGKA RAPAT AKHIR TAHUN 2023	365,000.00
46	7 PAKET BANTEN PEJATI U. KUBU BLN. DES"23	1,050,000.00
47	B. BANTEN TUMPEK LANDEPU. KUBU BLN. DES"23	1,500,000.00
48	PPH PASAL 21 TANTIEM & PENGGUNAAN LAINNYA BLN DES"23	11,086,949.00
49	BANTEN TUMPEK LANDEP DI U. MANGGIS BL. DES "23	1,500,000.00
50	BANTEN PEJATIAN DI 6 AIR BAWAH TANAH U. MANGGIS	900,000.00
	JUMLAH	431,272,625.69

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	PENGADAAN & PEMINDAHAN PIPA DIST. Ø 1 " DI BR. ABABI	1,931,400.00
2	B. PEMEL/ PERWAT INVENTARIS KANTOR U. BEBANDEM	138,750.00
3	PEMBANGUNAN & PENGAMANAN DI SUMBER MATA AIR TAUKA	22,917,000.00
4	B. PEMEL/PERWAT KENDARAAN MOBIL TANGKI UTK BLN. NOP"23	4,505,800.00
5	1GANTI 1 ROL PENARIK KERTAS UTK PEMEL. INVENTARIS KANTOR	305,250.00
6	1 UNIT REFILL TONER PRINTER UTK PEMEL. INVENTARIS U.SELAT	94,350.00
7	B. PEMEL / PERWAT SEPEDA MOTOR PUSAT & U. KARANGASEM	3,610,000.00
8	B. PERLENGKAPAN KOMPUTER PUSAT & UNIT " UTK BLN. NOP"23	1,962,480.00
9	PEMB.SENDERAN PENGAMANAN SUMBER MATA AIR EMBUKAN	24,276,000.00
10	PENGURUSAN IJIN PENY. DOKUMEN TEKNIS IJIN DIUJUNG & TAUKA	167,499,000.00
11	BUKU CEK BESERTA LEGES DI BAGIAN KEUANGAN BL. DES"23	480,000.00
12	B.KONSUMSI BAGIAN PRODUKSI PENGURUSAN DI TIRTA GANGGA	300,000.00
13	PENGAD.& PEMAS. PANEL POMPA INVERTER BESERTA ACC, PERASI	105,350,100.00
14	B. ALAT TULIS UTK PUSAT & UNIT " UTK BLN. NOP"23	7,552,470.00
15	UTL PENGOPELAN PIPA DIST.Ø 4 " BR.DNS. ABIAN SOAN	10,800,000.00
16	UTL. PENGEMB.JARINGAN PIPA DIST.Ø 2 " BR.D BEBANDEM	17,280,000.00
17	UTL. PEMAS. SAMB. REGULER KARANGASEM,ABANG & KUBU	7,995,000.00
18	PARTISIPASI GREETING NATAL & TAHUN BARU 2024	1,000,000.00
19	UCAPAN SELAMAT HARI NATAL & TAHUN BARU 2024	1,709,400.00
20	UPAH TENAGA CLEANING SERVICE BULAN DESEMBER 2023	1,000,000.00
21	B.PEMBEL.CANANG SARI & BANTEN PEJATI DIJERUK MANIS&PUSAT	990,000.00
22	B. CANANG SARI KECIL PERSEMAHYANGAN DI U. SIDEMEN	125,000.00
23	TOKEN LISTRIK UTK KEPERLUAN DI U. SIDEMEN BLN. DES"23	54,000.00
24	B. LANGGANAN MEDIA CETAK KORANBLN. DES"23	325,000.00
25	KUOTA INTERNET TELKOMSEL UTK KEHUMASAN DI BAG.HUBLANG	102,000.00
26	B. CLEANING SERVICE DI KANTOR PUSAT BLN. DES"23	1,037,811.00
27	B. BANTEN DI JAGAT NATA & PIODALAN SARASWATI JERUK MANIS	4,745,000.00
28	B. BARANG CETAK UTK UNIT UNIT BLN.NOP"23	433,293.00
29	B. BARANG CETAK UTK U. RENDANG & SIDEMEN BLN. NOP"23	853,000.00
30	B. LANGGANAN MEDIA CETAK KORAN DENPOST BLN. DES'23	90,000.00
31	B.CANANG SARI,DUPA&SEGEHAN UTK. DIRESERVOAR JERUK MANIS	109,500.00
32	B.CANANG SARI KECIL,DUPA,DAKSINA SEGEHAN DI U. KARANGASEM	124,500.00
33	CANANG SARI,DUPA & SEGEHAN DI RESERVOIR JUUK MANIS	109,500.00
34	PAPAN UCAPAN SELAMAT&SUkses SERTIJAB KAPOLRES KR.ASEM	525,000.00
35	B. PEMEL. 5 BUAH SEPEDA MOTOR	685,000.00
36	B. BARANG CETAK U.KR.ASEM,U.ABANG,U.MANGGIS&U.BEBANDEM	216,647.00

37	KERTAS NCR 2 PLAY 9,5 X 11 (PRS) ABANG & MANGGIS	853,000.00
38	TABLET & BRAKET SARANA PENUNJANG ABSENSI SMART PRESENCE	19,580,400.00
39	B.KONSUMSI SOSIALISASI PEMBERSIHAN P.TD DGN GAS NITROGEN	72,000.00
40	B. PEMEL. KOMPUTER PUSAT,RENDANG & MANGGIS	860,250.00
41	B. CANANG SARI KECIL, DUPA,DAKSINA & SEGEHAN U.KARANGASEM	124,500.00
42	2 PAKET BANTEN BUDHA WAGE KLAU DI U. SIDEMEN BL. DES"23	300,000.00
43	B. PEMBACAAN METER AIR DGN. JML. PELANGGAN 42. 537	8,507,400.00
44	HNR NARASUMBER/PENDAMPINGAN PEMBY.TUNGGAKAN RA&RNA	6,938,000.00
45	UTL. PEMAS. SAMB. KARANGASEM, ABANG, KUBU & BEBANDEM	7,955,000.00
46	B. BACA METER (BARCODE) DGN JML PELANGGAN 42.448	14,135,184.00
47	UTL.PERB.PIPA TRANS/DIST&DINAS UTK KARANGASEM & RENDANG	440,000.00
48	PEMAS.PELINGGIH PADMASANA DI POMPA RESERVOIR MENAGA	1,200,000.00
49	1 BIZNET METRONET 2A NPWP VI INTERNET DI KTR PERUMDA	1,887,000.00
50	BANTEN DAKSINA UTK PERSEMBAHYANGAN HARI RAYA PURNAMA	224,000.00
51	REHAB GEDUNG KANTOR BR. ABANG, DS. MENANGA U. RENDANG	13,251,000.00
Total Kewajiban Jangka Pendek Lainnya		467,559,985.00

KOREKSI FISKAL
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

Laba (Rugi) Komersial	16,345,583,445
I. Koreksi Positif	
1 Beban Penyisihan Piutang	890,210,494.07
2 Sumbangan - Sumbangan	67,742,520.00
3 Beban Rapat & Tamu	40,026,500.00
4 Rupa - rupa Beban Umum Lainnya	249,010,660.00
5 Beban Iuran Keanggotaan Perpamsi	50,089,806.00
6 Beban Langganan Media Cetak	7,170,000.00
7 Dana Representatif	241,326,000.00
8 Beban Kontribusi	355,100,000.00
9 Beban Administrasi Bank	2,263,600.00
9 Beban Pajak Bank	69,685,821.57
10 Beban Pemeliharaan Taman Lapangan	1,786,600.00
12 Beban Lainnya	30,234,000.00
Jumlah Koreksi Positif	2,004,646,001.64
II. Koreksi Negatif	
1 Pendapatan Jasa Giro	348,429,117.83
2 Pendapatan Bunga Deposito	477,199,999.92
3 Beban Pemel. Water Meter (25 %) Th. 2022	93,795,917.00
4 Beban Pemel. Trans. Distr. (25 %) Th. 2022	43,528,736.00
5 Beban Pemel. Water Meter (25 %) Th. 2021	148,653,875.00
6 Beban Pemel. Trans. Distr. (25 %) Th. 2021	105,842,903.00
7 Beban Pemel. Trans. Distr. (25 %) Th. 2020	324,035,275.00
Jumlah Koreksi Negatif	1,541,485,823.75
Laba (Rugi) setelah Koreksi Fiskal	#####
Laba (Rugi) Koreksi Fiskal (Pembulatan)	#####
PPh Terhutang	
- <u>PKP Yang Tidak Memperoleh Fasilitas</u> (22% x 16.804.942.000)	= 3,697,923,460.00
Jumlah PPh Terhutang	3,697,923,460.00
Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 25 masa Januari s.d. November 2023)	747,586,998.00
Kurang (Lebih) Bayar Tahun Fiskal 2023	2,950,336,462.00
PPh Pasal 25 Desember 2023	254,847,285.00
Kurang (Lebih) Bayar Tahun Fiskal 2023 setelah mempertimbangkan PPh 25 Des 2023	2,695,489,177.00

Pemerintah Kabupaten Karangasem
BLUD RSUD KARANGASEM
PER 31 DESEMBER 2023

**LAPORAN KEUANGAN
RSUD KADUPATEN KARANGASEM
PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMDER 2023
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH..... 1

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BLU RSUD..... 2

LAPORAN POSISI KEUANGAN..... 3

LAPORAN OPERASIONAL..... 4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 5

LAPORAN ARUS KAS 6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



ආර්ථික සංවර්ධන කොට්ඨාසය
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය
DINAS KESEHATAN



උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස්
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Ngurah Rai No 58 – Amlapura (80811) ☎ (0363) 21470. 21011
Fax : (0363) 23592, Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id
website : rsud.karangasemkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. I Gede Yuliasena, M.M
Alamat Kantor : Jl. Ngurah Rai No.58, Kabupaten Karangasem
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 15 Maret 2023


dr. I Gede Yuliasena, M.M
Direktur

A. LAPORAN KEUANGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
Lain-lain PAD yang sah -LRA	70.271.126.923	85.702.649.873	121,96%	107.465.715.913
JUMLAH PENDAPATAN LRA	70.271.126.923	85.702.649.873	121,96%	107.465.715.913
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	115.517.295.696	119.751.601.149		133.238.761.917
Belanja Pegawai	52.791.723.072	53.913.591.768	102,13%	69.285.139.003
Belanja Barang dan Jasa	62.725.572.624	65.838.009.381	104,96%	63.953.622.914
BELANJA MODAL	6.565.051.000	5.728.351.434		14.716.133.836
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.002.051.000	4.210.151.940	84,17%	10.674.563.872
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	945.000.000	942.604.194	99,75%	4.041.569.964
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	285.000.000	281.445.300	98,75%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	333.000.000	294.150.000	88,33%	-
JUMLAH BELANJA DAERAH	122.082.346.696	125.479.952.583	102,78%	147.954.895.753
SURPLUS/DEFISIT	(51.811.219.773)	(39.777.302.710)	76,77%	(40.489.179.840)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PEMBIAYAAN BERSIH	-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(51.811.219.773)	(39.777.302.710)	76,77%	(40.489.179.840)



*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BLU RSUD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

KETERANGAN	2023	2022 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal	17.714.268.768	31.363.854.583
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Total	17.714.268.768	31.363.854.583
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(39.777.302.710)	(40.489.179.840)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
RK PPKD	30.857.311.775	26.875.594.025
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	8.794.277.833	17.750.268.768
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	(36.000.000,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	8.794.277.833	17.714.268.768

Karangasem, 15 Maret 2024
Atas nama dan mewakili manajemen,

dr. Gede Yudasena, M.M
Direktur

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	5.1		
Kas dan Setara Kas	5.1.1	8.794.277.833	17.714.268.768
Piutang	5.1.2	8.599.793.052	12.960.351.871
Penyisihan Piutang	5.1.2	(575.984.595)	(622.916.583)
Persediaan	5.1.3	8.396.545.511	13.116.599.504
Jumlah Aset Lancar		25.214.631.801	43.168.303.560
Aset Tetap			
Harga Perolehan	5.2	260.571.569.070	258.312.475.636
Akumulasi Penyusutan	5.2	(162.306.186.543)	(151.498.993.314)
Jumlah Aset Tetap		98.265.382.527	106.813.482.323
Aset Lain-Lain	5.3	377.716.877	88.469.377
TOTAL ASET		123.857.731.205	150.070.255.260
KEWAJIAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	5.4	48.240.000	48.240.000
Utang Belanja	5.4	16.504.430.471	24.398.703.861
JUMLAH KEWAJIBAN		16.552.670.471	24.446.943.861
EKUITAS			
Ekuitas Dana	5.5	107.305.060.735	125.623.311.399
JUMLAH EKUITAS		107.305.060.735	125.623.311.399
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		123.857.731.205	150.070.255.260

Angka 15 Maret 2024
Atas nama dan mewakili manajemen,

D. I Gede Tulutan, M.M.
Direktur

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022 (Audited)	Kenaikan Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.1	81.794.014.951	75.484.810.976	6.309.203.975	0,08
Jumlah Pendapatan Operasioaal		81.794.014.951	75.484.810.976	6.309.203.975	0,08
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	6.2	52.080.336.802	47.790.695.226	4.289.641.575	0,09
Beban Barang dan Jasa	6.2	66.188.955.199	65.830.311.454	358.643.745	0,01
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.2	13.980.003.729	12.867.001.421	1.113.002.308	0,09
Beban Penyisihan Pintang	6.2	-	442.351.822	(442.351.822)	(1,00)
Jumlah Bebaa Oparasional		132.249.295.730	126.930.359.923	5.318.935.806	0,04
Kegiatan Non Operasional					
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.3	199.254.760	-	199.254.760,47	100%
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	6.3	(50.256.026.018)	(51.445.548.948)	990.268.169	(0,02)



Amlapura, 15 Maret 2024

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2023	2022 (Audited)
EKUITAS AWAL	125.623.311.399	147.338.625.866
Surplus/(Defisit) Lo	(50.256.026.018)	(51.445.548.948)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:		
Koreksi peralatan dan mesin extracomtable	-	-
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	-	-
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:		
Koreksi piutang lainya	-	-
Koreksi Peralatan dan Mesin	-	-
Reklasifikasi dan Koreksi Gedung dan Bangunau	-	-
Reklasifikasi dan Koreksi Akumulasi Penyusutan	-	-
Koreksi Aset Lancar	(523.651.573)	319.447.249
Koreksi Utang	186.438.977	20.915.550
Koreksi Kesaiahan Pencatatan Pinlang	-	-
Koreksi Ekuitas iainnya	-	-
Koreksi Lainnya	(25.419.971)	(178.654.261)
RK PPKD	32.300.407.921	29.568.525.942
EKUITAS AKHIR	107.305.060.735	125.623.311.399



*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Audited)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Aras Kas Masuk		
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	85.702.649.873	107.465.715.913
Aras Kas Keluar		
Belanja Pegawai	(53.913.591.768)	(69.285.139.003)
Belanja Barang dan Jasa	(65.838.009.381)	(63.964.630.364)
Belanja Pemeliharaan	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	(34.048.951.276)	(25.784.053.454)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aras Kas Masuk		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Aras Kas Keluar		
Belanja Peralatan dan Mesin	(4.210.151.940)	(10.674.563.872)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(942.604.194)	(4.041.569.964)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	(281.445.300)	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	(294.150.000)	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(5.728.351.434)	(14.716.133.836)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Aras Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-
Subsidi APBD	30.857.311.775	26.850.601.475
Aras Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	30.857.311.775	26.850.601.475
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORS		
Aras Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Aras Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS TRANSITORS	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(8.919.990.935)	(13.649.585.815)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	17.714.268.768	31.363.854.583
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	8.794.277.833	17.714.268.768

Amlapura, 15 Maret 2024



Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

1. UMUM

1.1 Hiwayat Perusahaan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem yang dulunya lebih dikenal dengan nama RSU Amlapura didirikan pada tanggal 20 Juli 1966. Mulai tanggal 14 April 2010, RSUD Kab. Karangasem melaksanakan PPK BLUD berdasarkan Perbup. Karangasem No 11 tahun 2010. Sesuai dengan SK. Menkes RI Nomor 486 / Menkes / SK/V / 1997, tanggal 20 Mei 1997, RSUD Kabupaten Dati II Karangasem ditingkatkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C. Menindaklanjuti SK. Menkes RI tersebut, Pemda Karangasem telah mengesahkan Perda Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kab. Dati II Karangasem. Kemudian pada tahun 2008 dengan terbimya PP No. 41 Tahun 2007, maka struktur RSUD Karangasem dirubah berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2019, struktur organisasi RSUD Kabupaten Karangasem kembali dirubah dan dikukuhkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Pengukuhan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Karangasem nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Tugas

Visi RSUD Karangasem yaitu "Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana". Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka RSUD Kabupaten Karangasem memiliki Misi untuk mewujudkannya, diantaranya :

1. Membentuk SDM RSUD Karangasem yang cerdas dan profesional
2. Menyediakan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat
3. Menjamin Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Terstandarisasi.

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkanlah Tujuan RSUD Kabupaten Karangasem, diantaranya :

1. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat
2. Tersedianya penunjang pelayanan yang berkualitas
3. Tersedianya tenaga kesehatan berkualitas sesuai dengan standard ketenagaan rumah sakit.
4. Terwujudnya keptasan dan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit
5. Meningkatnya keefisiensi dan efektifitas keuangan RSUD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas melaksanakan Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Kabupaten Karangasem, yang meliputi program sebagai berikut :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.3 Jenis Pelayanan

Cakupan jenis pelayanan yang mampu diberikan oleh RSUD Kabupaten Karangasem mencakup pelayanan medik dan penunjang medik diantaranya:

1. Pelayanan Medik

- a. Perawatan Rawat Jalan mencakup Pelayanan Kesehatan Anak, Kebidanan dan Kandungan, Pelayanan Penyakit Dalam dan Umum, Pelayanan Bedah Umum dan Orthopedi, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan THT, Pelayanan Penyakit Saraf, Pelayanan pemeriksaan Kulit dan Kelamin, Pelayanan pemeriksaan Jiwa/Psikiatry dan Narkoba, Pelayanan Fisiotherapy, Pelayanan Pemeriksaan Mata, Pelayanan TB DOTs, Pelayanan VCT, dan Pelayanan Konsultasi Gizi.
- b. Pelayanan Rawat Inap meliputi Pelayanan Kebidanan dan Kandungan (Bangsal Kamboja), Pelayanan Kesehatan Anak (Bangsal Melati), Pelayanan Penyakit Dalam (Bangsal Mawar), Pelayanan Penyakit Bedah (Bangsal Cempaka), Pelayanan Kelas I dan II (Bangsal Wijaya Kusuma 3, Bangsal Kenanga), Intermediate (Bangsal Puri Gangga) serta VIP (Wijaya Kusuma 2) untuk semua jenis spesialisasi.
- c. Pelayanan Gawat Darurat. Dilakukan dalam 24 jam sehari di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- d. Pelayanan Operasi Pembodohan, yang telah dilengkapi dengan kamar operasi (OK), dengan 2 kamar operasi cito di IGD dan 4 kamar operasi elektif di IBS.
- e. Pelayanan Intensive dengan fasilitas ICU dan NICU.
- f. Pelayanan Hemodialisa atau cuci darah yang sampai saat ini mengoperasikan U Amlapura, 15 Maret 2024
- g. Pelayanan Rujukan yang terdiri dari menerima rujukan/merujuk dari/ke fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan oleh Unit Ambulan.
- h. Pelayanan Keluarga Berencana, baik perawatan maupun bagi peserta KB baru.

2. Pelayanan Penunjang Medik

- a. Pelayanan Farmasi. Pelayanan ini dilakukan melalui unit farmasi, diantaranya Apotik Poliklinik dan Apotik Rawat Inap.
- b. Pelayanan Laboratorium, mencakup Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.
- c. Pelayanan Radiologi berupa Rontgen dan CT scan, serta USG 3 dimensi dan 4 dimensi.
- d. Pelayanan Gizi, mencakup pelayanan gizi di ruang rawat inap dan peayulahan/konsultasi gizi baik bagi penderita rawat inap maupun penderita rawat jalan.
- e. Pelayanan Medico Legal merupakan pelayanan surat-surat keterangan terkait dengan masalah hukum.
- f. Pelayanan Transfusi dan Bank Darah. Pelayananannya meliputi penyediaan darah dan komponen darah bagi pasien yang dirawat di RSUD Karangasem.

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

1.4 Struktur Organisasi

Tahun 2023 terdapat Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 101/HK/2023 tanggal 15 Februari 2023. Sesuai keputusan tersebut terdapat perubahan susunan struktur organisasi RSUD Kabupaten Karangasem di Tahun 2023 sebagai berikut:

- Direktur	dr. I Gede Yuliasena, MM.
- Kepala Bagian Tata Usaha	Ni Made Astini Handayani, SKM., M.Kes.
- Snb Bag. Umum & Kepegawaian	I Gede Muriana, S.Kep., Ners
- Snb Bag. Keuangan & Akuntansi	Ni Ketut Seri, SE.
- Snb Bag. Sunprog & Evapor	Ida Bagus Made Redita, SKM.
- Bidang Pelayanan	dr. I Komang Wirya, MM.
- Seksi Pelayanan Medis	dr. I Wayan Yogi Ranga Permana.
- Seksi Keperawatan	Ni Luh Suciati, S.Kep., Ners.
- Bidang Penunjang	I Gusti Agung Bagus, ST.
- Seksi Penunjang Medis	Komang Agus Sariasa, SST.
- Seksi Penunjang Non Medis	I Nyoman Wirata, SST., MM. (Plt)
- Bidang Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu	Ni Putu Sutarnini, S.Sos., M.Si.
- Seksi Pengembangan SDM & Diklat	Ni Putu Artioi, SKM.
- Seksi Penjamin Mutu & Akreditasi	Ni Gusti Ayu Ketut Rusmawati, S.Si. Apt.

1.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai RSUD Karangasem per 31 Desember Tahun 2023 seluruhnya berjumlah 862 orang terdiri dari 318 orang PNS dan 544 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lain dan manajemen. Jumlah pegawai saat ini menurun dari tahun 2022 yang berjumlah 885 orang.

1.6 Lokasi Organisasi

RSUD Karangasem berlokasi di di pusat kota Amlapura yaitu di Jalan Ngurah Rai No. 58 Amlapura

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun buku 2023 dan 2022 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu RSUD Kabupaten Karangasem juga menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan prinsip akrual dan menggunakan dasar nilai historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung.

Kebijakan akuntansi RSUD Kabupaten Karangasem ditetapkan menggunakan Peraturan Bupati Karangasem Nomor. 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tertanggal 8 Desember 2022.

2.2 Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

2.3 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2.4 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan/ akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang dihitung sesuai dengan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas piutang lancar, 1%
- Kualitas piutang kurang lancar, 10%
- Kualitas piutang diragukan, 50%
- Kualitas piutang macet, 100%

RSUD KADUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misal akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

2.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 tahun 2016 adalah:

Objek	Rincian Objek
Barang pakai habis	Bahan Suku Cadang Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Obat-Obatan Persediaan untuk dijual/diserahkan Persediaan untuk tujuan strategis Natura dan pakan Persediaan Penelitian Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	Komponen
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikecualikan untuk persediaan obat-

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- Metode perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatkan *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- Metode periodic, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor. Maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*) dengan menggunakan metode FIFO atau Masuk Pertama Keluar Pertama yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Persediaan disajikan:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

2.6 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Nilai Rpiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah

Batasan jumlah biaya kapitalisasi

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00
- Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 kecuali untuk hewan dan tanaman yang ditujukan dipelihara oleh SKPD.

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00. Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Tarif penyusutan aset tetap yaitu:

Golongan Aktiva	Masa Manfaat/ Tahun
Peralatan dan Mesin	
Alat Besar	10
Alat Angkutan	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5-10
Alat Pertanian	5
Alat Kantor dan Rumah tangga	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
Alat Laboratorium	5-10
Alat Persenjataan	5-10
Komputer	5
Alat Eksplorasi	5
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	5
Alat Bantu Eksplorasi	5
Alat Keselamatan Kerja	5
Alat Peraga	5
Peralatan Proses/Produksi	5
Rambu-Rambu	5
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	25
Monumen	25
Menara	25
Tugu Titik Kontrol/Pasti	25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Jalan dan Jembatan	12
Instalasi	12
Jaringan	12

Aset tetap dapat direklasifikasi ke aset lainnya karena kondisi rusak berat dan/usang setelah mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya dan;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset Tidak Berwujud;
- Aset Lain-Lain

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

2.8 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang hasilnya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

2.9 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

2.10 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.

2.11 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima RKUD
- b. Kas atas pendapatan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2.12 Beban

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.13 Belanja

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2BP.

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BJU terdiri dari Penjelasan Pos Pos sebagai berikut:

3.1 PENDAPATAN-LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 sebesar Rp85.702.649.873,00 dengan besaran presentase adalah 121,96% dari yang dianggarkan yaitu Rp.70.271.126.923,00. Dengan rincian dan perbandingan realisasi anggaran Tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) <i>Audited</i>
a. Pendapatan Jasa Layanan		
1) Pendapatan Umum		
Tindakan/Operasi	177.232.800	318.488.330
Rawat Jalan	900.093.902	662.349.892
Rawat Inap	420.387.360	433.705.925
Rontgen	173.892.500	185.204.170
Administrasi	3.280.000	5.810.000
IRD	135.642.730	127.265.606
Jasa Konsultan Medik	12.300.000	5.513.500
Jasa Konsultasi Gizi	2.310.000	4.451.050
Laboratorium	738.583.300	625.274.001
Pelayanan Medik Legal	22.587.500	16.635.500
ICU	-	7.348.500
Pemulasaran Jenasah	384.317.000	389.370.000
Pemulasaran Jenasah Covid 19	2.760.000	674.640.000
Jumlah Saldo Pendapatan Umum	2.973.387.092	3.456.056.474
2) Pendapatan Penyedia Darah		
Layanan Penyedia Darah Umum	2.207.000	7.969.000
Layanan Penyedia Darah JKN	1.471.487.700	1.013.400.000
Layanan Penyedia Darah Covid 19	-	84.600.000
Jumlah Saldo Pendapatan Penyedia Darah	1.473.694.700	1.105.969.000
3) Pendapatan Ambulan		
Ambulan Umum	60.345.000	54.239.600
Ambulan JKN	169.585.400	149.799.600
Ambulan Covid 19	600.000	12.100.000
Jumlah Saldo Pendapatan Ambulan	230.530.400	216.139.200
4) Pendapatan Farmasi		
Farmasi Umum	222.853.455	289.878.323
Farmasi JKN	21.374.536.274	17.689.043.598
Farmasi Jasa Raharja	209.748.794	194.693.550
Farmasi Jampersal	-	-
Farmasi Covid 19	6.302.685	1.981.705.010
Jumlah Saldo Pendapatan Farmasi	21.813.441.208	20.155.320.481
5) Pendapatan Dengan Kerjasama		
JKN	57.349.536.056	37.358.652.404
Askes Inhealth	1.820.860	-
Jampersal	-	-
Jasa Raharja	424.138.964	455.624.800
BPJS Tenaga Kerja	36.605.380	73.852.090
Jumlah Saldo Pendapatan Dengan Kerjasama	57.812.101.260	37.888.129.294
6) Pendapatan Dari Kemeokes		
Covid 19	697.306.315	43.400.042.690
Jumlah Saldo Pendapatan Kemeokes	697.306.315	43.400.042.690
b. Pendapatan Hasil Kerjasama		
Sewa Kantin	8.000.000	9.600.000
Sewa Ruang Belajar/Diklat	95.765.000	100.923.600
Pengguna Sarana & Prasarana RS oleh Pihak Lain	66.141.000	97.131.000
Penggunaan Jasa Lab oleh Pihak Lain	21.850.000	18.825.000
Jumlah Saldo Pendapatan Dengan Kerjasama	191.756.000	226.479.600

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

c. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain	9.774.664	7.246.922
Jasa Giro	390.296.234	908.580.252
Pendapatan Parkir	110.362.000	101.752.000
Jumlah Saldo Pendapatan Lain-Lain	510.432.898	1.017.579.174
Jumlah Saldo Pendapatan-LRA	85.702.649.873	107.465.715.913

Pendapatan tersebut sudah termasuk Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022, pada Kas Bendahara dengan rincian sebagai berikut :

Total Pendapatan yang disetor per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		107.460.960.643
Kas di Bendahara Penerimaan pertanggal 31 Desember 2023 dan 2022	32.409.500	4.755.270
Jadi Total Penerimaan secara akrual Tahun 2022	32.409.500	107.465.715.913

3.2 BELANJA-LRA

Realisasi Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 sebesar Rp125.479.952.583,00 dengan besaran presentase adalah 102,78% dari yang dianggarkan yaitu Rp122.082.346.696,00. Dengan rincian dan perbandingan realisasi anggaran Tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
a. Belanja Pegawai		
Belanja Gaji dan Tunjangan (APBD)	22.566.797.079	22.196.397.030
Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS (APBD)	3.614.525.903	3.552.706.777
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (APBD)	1.075.631.169	1.101.497.668
Jasa Pelayanan (BLUD)	26.637.597.617	42.424.337.528
Honorarium Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	19.040.000	10.200.000
Jumlah Saldo Belanja Pegawai	53.913.591.768	69.285.139.003
b. Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Alat Tulis Kantor	912.329.750	774.503.450
Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor kertas dan Cover	101.184.280	128.286.000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar Bateray Kering	78.133.800	108.062.700
Belanja Perangko, Materai Benda Pos lainnya	7.500.000	7.500.000
Belanja Perabot Kantor	762.343.500	699.374.464
Belanja Kegiatan Kantor Lainnya	20.366.241.630	20.293.196.082
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	589.756.150	-
Belanja Pengisian Tab pemadam Kebakaran	-	22.168.809
Belanja Pengisian Tabung Gas	2.153.175.720	1.936.056.431
Belanja Bahan Perlengkapan Dinas	224.265.084	235.271.203
Belanja Bahan Komputer	182.649.200	151.225.000
Belanja Bahan Baku Bangunan	91.266.300	-
Belanja Obat-Obatan Pasien	13.989.726.221	16.681.809.294
Belanja Bahan Obat-Obatan Lainnya	68.931.000	116.049.968
Belanja Bahan Kimia/Laboratorium	3.077.863.704	4.736.789.847
Belanja Bahan Makanan/Natura Pasien dan Pegawai	2.054.490.700	1.843.285.522
Belanja Makanan dan Minuman Rapal	104.716.000	31.805.000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.422.000	4.815.000
Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	19.750.000	122.140.000
Belanja Telpo	45.933.316	70.716.946
Belanja Listrik	1.131.767.244	1.096.429.743
Belanja Air	627.726.850	230.240.650
Belanja Kawat /Faximile/Internet	149.256.660	149.385.969
Belanja paket pengiriman	465.720	1.251.200
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	112.510.000	73.215.122
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	203.000	309.900
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.800.000	52.453.061
Belanja Jasa Kalibrasi	98.175.000	74.750.000
Belanja Honorarium Narasumber/Moderator, Pembawa Acara	22.800.000	63.250.000
Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	105.393.972	-
Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan	47.250.000	-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Non Medis	1.854.938.985	1.316.908.690
Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	-	28.995.160
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.921.178.075	7.188.753.402
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama	29.815.200	31.605.863

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

Belanja Jasa (kian/Reklame	6.131.000	16.960.800
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	468.874.630
Belanja cetak	-	4.972.800
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.700.000	9.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	7.500.000	3.000.000
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	92.036.000	35.778.750
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Meubelair	19.975.000	59.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Bersih	-	14.758.750
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	51.661.000	45.314.000
Belanja Pemeliharaan Alat Dapur	9.990.000	8.097.450
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya	300.732.627	138.750.312
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telp	9.987.225	47.402.550
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainnya	789.275.600	368.955.332
Belanja Pemeliharaan Personel Komputer	59.375.000	73.245.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	99.650.000	105.940.000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kesehatan	533.159.700	583.182.578
Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	-	105.820.853
Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	-	31.315.122
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lainnya	-	44.750.000
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	41.400.000	44.820.000
Belanja Pemeliharaan PLTD	19.677.747	19.922.280
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya	19.804.953	293.712.318
Belanja Jasa Berorientasi Bidang kesehatan	45.700.000	45.700.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.984.426	79.212.435
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	5.987.500
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.652.712	-
Belanja Jasa Diberikan Kepada Pihak Ketiga	804.278.100	233.152.500
Belanja Pakaian Teknis	17.450.000	18.403.800
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	179.705.235	59.666.889
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	612.175.648	471.242.254
Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	1.261.275.000	1.718.748.980
Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	-	89.282.500
Belanja suku cadang alat angkutan	86.934.223	69.436.750
Belanja suku cadang alat kedokteran	38.657.500	294.337.705
Belanja Suku Cadang Lainnya	-	49.281.050
Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas APBD	-	24.992.550
Belanja Sewa Floating Excavator	24.744.000	-
Belanja pemeliharaan alat studio komunikasi dan pemancar alat komunikasi lainnya	99.345.000	-
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	5.735.000	-
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	3.600.357.624	-
Jumlah Saldo Belanja Barang dan Jasa	65.838.009.381	63.953.622.914

e. Belanja Modal

1) Belanja Peralatan dan Mesin

Pengadaan Pompa	-	7.500.000
Pengadaan Perkakas Bengkel kerja	9.958.799	-
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	196.900.000
Pengadaan Alat Kantor Lainnya	500.165.000	193.845.900
Pengadaan Meubelair	57.350.000	37.980.000
Pengadaan Alat pembersih	-	33.322.450
Pengadaan Alat Pendingin	322.500.000	267.700.000
Pengadaan Alat Dapur	16.150.000	44.475.000
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.730.000	-
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	16.317.000
Pengadaan Alat Komunikasi Telp	7.200.000	2.850.000
Pengadaan Personal Komputer	1.401.344.250	484.540.000
Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	-	4.438.224
Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	-	38.250.600
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	64.150.000	124.307.060
Pengadaan Peralatan Jaringan	692.000.000	207.926.732
Pengadaan Alat Kedokteran Umum	597.060.713	185.066.599
Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	-	28.787.330
Pengadaan Alat kedokteran mata	9.435.000	933.400.000
Pengadaan alat alat kedokteran Bedah	3.010.800	6.989.162.327

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

Pengadaan alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	60.366.690	45.923.100
Pengadaan Alat kedokteran Radiodiagnostic	160.990.000	-
Pengadaan Alat Kesehatan Anak	8.215.000	29.631.550
Pengadaan alat Kesehatan Rehabilitasi medis	-	245.740.000
Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	11.000.000	124.500.000
Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi	-	432.000.000
Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	285.525.688	-
Jumlah Saldo Belanja Peralatan dan Mesin	4.210.151.940	10.674.563.872
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	942.604.194	3.310.249.916
Belanja Modal Pengadaan Tempat Ibadah	-	160.884.000
Belanja Modal Taman	-	558.636.000
Belanja Modal Pagar	-	11.800.048
Jumlah Saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan	942.604.194	4.041.569.964
3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	281.445.300	-
Jumlah Saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	281.445.300	-
4) Belanja Aset Lainnya		
Belanja Aset Lainnya	294.150.000	-
Jumlah Saldo Belanja Aset Lainnya	294.150.000	-
Jumlah Saldo Belanja-LRA	125.479.952.583	147.954.895.753

4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yaitu Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Saldn Anggaran Lebih Awal Tahun	17.714.268.768	31.363.854.583
Penggunaan SAL Pembiayaan	-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(39.777.302.710)	(40.489.179.840)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
RK PPKD	30.857.311.775	26.875.594.025
Koreksi Lain-Lain	-	(36.000.000)
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	8.794.277.833	17.714.268.768

5. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2023 dan 2022

5.1 ASET LANCAR

5.1.1 KAS SETARA KAS

Merupakan saldo Kas dan Setara Kas RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	32.409.500	4.755.270
Kas di BLUD		
BPD Cabang Karangasem 0220100004731	8.367.631.125	17.583.040.443
Bank Mandiri KCP Amplapura 145-00-7555777-3	394.237.208	126.473.055
Jumlah Saldo Kas Setara Kas	8.794.277.833	17.714.268.768

5.1.2 PIUTANG

Merupakan saldo Piutang RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 :

Rincian Piutang dapat dilihat pada Lampiran I

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	8.599.793.052	12.960.351.871
Penyisihan Piutang Lainnya	(575.984.595)	(622.916.583)
Jumlah Saldo Piutang	8.023.808.457	12.337.435.288

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

5.1.3 PERSEDIAAN

Merupakan saldo Persediaan RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 :
 Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 2

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) <i>Audited</i>
Persediaan Barang	8.396.545.511	13.116.599.504
Jumlah Saldo Persediaan	8.396.545.511	13.116.599.504

5.2 ASET TETAP

Merupakan saldo Aset Tetap RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) <i>Audited</i>
Harga Perolehan		
Tanah	7.292.093.400	7.292.093.400
Peralatan dan Mesin	138.510.558.502	137.475.514.562
Gedung dan Bangunan	112.875.240.629	111.908.796.435
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.609.817.262	1.298.374.213
Aset Tetap lainnya	2.547.500	2.547.500
Konstruksi dalam pengerjaan	281.311.776	335.149.526
Jumlah Saldo Aset Tetap	260.571.569.070	258.312.475.636
Akumulasi Penyusutan		
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(115.046.647.871)	(108.659.301.679)
Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(46.510.467.221)	(42.184.756.428)
Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(749.071.451)	(654.935.207)
Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Saldo Akumulasi Penyusutan	(162.306.186.543)	(151.498.993.314)
NILAI BUKU ASET TETAP	98.265.382.527	106.813.482.323

Berikut mutasi atas aset tetap RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2023:

Uraian	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo Akhir
Tanah	7.292.093.400	-	-	7.292.093.400
Peralatan dan Mesin	137.475.514.562	4.210.151.940	3.175.108.000	138.510.558.502
Gedung dan Bangunan	111.908.796.435	1.116.140.594	149.696.400	112.875.240.629
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.298.374.213	311.443.050	-	1.609.817.262
Aset Tetap lainnya	2.547.500	294.150.000	294.150.000	2.547.500
Konstruksi dalam pengerjaan	335.149.526	149.696.400	203.534.150	281.311.776
Jumlah	258.312.475.636	6.081.581.984	3.822.488.550	260.571.569.070

5.3 ASET LAINNYA

Merupakan saldo Aset Lainnya RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 :
 Rincian aset lainnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) <i>Audited</i>
Aset Lain-Lain	88.469.377	88.469.377
Aset Tidak Berwujud	289.247.500	-
Jumlah Saldo Aset Lainnya	377.716.877	88.469.377

Aset lain-lain merupakan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta yang dimanfaatkan Pihak lain.

5.4 KEWAJIBAN

Merupakan saldo Kewajiban RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022
 Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 4

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) <i>Audited</i>
Kewajiban Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka	48.240.000	48.240.000
Utang Belanja	16.504.430.471	24.398.703.861
Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek	16.552.670.471	24.446.943.861

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Diakhiri Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

Pendapatan diterima dimuka merupakan pembayaran sewa ATM dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total Sewa (Rp)	Pendapatan Tahun 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)
PT.Bank BPD Bali (31 Januari 2022 s/d 10 Januari 2027)	60.300.000	12.060.000	24.120.000	36.180.000
PT.Bank Mandiri Tbk. (06 Januari 2023 s/d 06 Januari 2025)	24.120.000	12.060.000	12.060.000	12.060.000
Total	84.420.000	24.120.000	36.180.000	48.240.000

5.5 EKUITAS

Merupakan saldo ekuitas RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Ekuitas Dana		
Total Aset	123.857.731.205	150.070.255.260
Total Kewajiban	(16.552.670.471)	(24.446.943.861)
Jumlah Saldo Ekuitas Dana	107.305.060.735	125.623.311.399
Kewajiban dan Ekuitas Dana		
Total Kewajiban Ekuitas Dana	16.552.670.471	24.446.943.861
Total Ekuitas Dana	107.305.060.734	125.623.311.399
Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas Dana	123.857.731.205	150.070.255.260

6. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Kabupaten Karangasem dalam Tahun 2023.

6.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Merupakan saldo realisasi dari pendapatan operasional yang diperoleh RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.794.014.951	75.484.810.976
Jumlah Pendapatan Operasional	81.794.014.951	75.484.810.976

6.2 BEBAN OPERASIONAL

Merupakan saldo realisasi dari beban operasional yang diperoleh RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Beban Pegawai	52.080.336.802	47.790.695.226
Beban Barang dan Jasa	66.188.955.199	65.830.311.454
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.980.003.729	12.867.001.421
Beban Penyisihan Piutang	-	442.351.822
Jumlah Saldo Beban Belanja Operasional	132.249.295.730	126.930.359.923
Rincian atas		
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.555.254.192	8.493.995.719
Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.325.710.793	4.281.712.826
Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	94.136.244	91.292.876
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.902.500	-
Jumlah	13.980.003.729	12.867.001.421

6.3 PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Merupakan saldo realisasi dari pendapatan non operasional yang diperoleh RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	199.254.760	-
Jumlah Pendapatan Operasional	199.254.760	-

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2022 (Audited)

6.4 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Merupakan pengakuan nilai Surplus/Defisit atas kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp) Audited
Kegiatan Operasional		
Pendapatan LO	81.794.014.951	75.484.810.976
Behan L.O	(132.249.295.730)	(126.930.359.923)
Kegiatan Non Operasional		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	199.254.760,47	-
Surplus/Defisit LO	<u>(50.256.026.018)</u>	<u>(51.445.548.948)</u>

7. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 01 Maret 2023. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan penyesuaian terhadap laporan keuangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR PIUTANG 31 DESEMBER 2023**

No	Keterangan	Saldo (Rp)
1	Inhealth	98.010
2	Rujukan JKN & Jamkesmas	7.130.000
3	PMI(Sarana/Kantong Darah)	3.780.000
4	Obat Fee For Service	659.899.107
5	Pasien Umum	487.806.025
6	Jasa Raharja	2.428.725
7	Rujukan Ambulance	22.340.000
8	RS. Balimed Karangasem	10.637.500
9	BPJS Tenaga Kerja	10.534.270
10	BPJS Kesehatan	7.390.597.090
11	Pasien LP	3.242.325
12	Dinas Kesehatan Kab.Karangasem	1.300.000
Total		8.599.793.052

Lampiran 2

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR PERSEDIAAN 31 DESEMBER 2023**

No	Keterangan	Saldo (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	
	Belanja Alat Tulis Kantor	35.639.150
	Belanja Bahan Komputer dan ATK	34.754.200
	Belanja Alat Kegiatan Kantor	4.412.267.194
2	Persediaan Bahan/Material	
	Belanja Bahan Obat-obatan / P3K / Amprah	3.632.831.878
	Belanja Bahan Makanan/Natura	199.864.050
	Belanja Bahan/Material Kain/Linen	80.274.440
	Alat Listrik	914.600
	Total	8.396.545.511

Lampiran 3

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARUPATEN KARANGASEM
DAFTAR ASET LAUN-LAIN 31 DESEMBER 2023**

No	Kode Aset	Nama Aset	Harga Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan 2023 (Rp)	Nilai Buku
1	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	127.000	-	127.000
2	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	75.000	-	75.000
3	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	47.000	-	47.000
4	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	125.000	-	125.000
5	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	125.000	-	125.000
6	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	1.000.000	-	1.000.000
7	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	1.000.000	-	1.000.000
8	1.3.5.1.1.7.1	Ilmu Kedokteran	3.000.000	-	3.000.000
9	1.3.3.1.2.1.1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	51.135.000	18.238.150	32.896.850
10	1.3.3.1.1.6.1	Bangunan Rumah Sakit Umum	24.407.500	24.407.500	-
11	1.3.2.8.6.1.2	X-Ray Machine & Control	1.190.000.000	1.190.000.000	-
12	1.3.2.8.1.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	7.800.000	7.800.000	-
13	1.3.2.8.1.55.13	Steam Sterilizer (Laboratorium Hematologi & Urinalisis)	104.500.000	104.500.000	-
14	1.3.2.8.1.19.8	U V Sterilizer	15.950.000	15.950.000	-
15	1.3.2.8.1.19.64	alat laboratorium farmasi lainnya (dst)	7.643.000	7.643.000	-
16	1.3.2.8.1.18.43	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	38.500.000	38.500.000	-
17	1.3.2.8.1.10.128	Xray Unit	264.800.000	264.800.000	-
18	1.3.2.7.1.9.2	Motuary Refrigerator	189.717.000	189.717.000	-
19	1.3.2.7.1.8.45	Bed Side Monitor Complete	120.000.000	120.000.000	-
20	1.3.2.7.1.8.45	Bed Side Monitor Complete	120.000.000	120.000.000	-
21	1.3.2.7.1.8.33	Ventilator Internal Medicine	644.600.000	644.600.000	-
22	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	1.436.000	646.200	789.800
23	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	1.436.000	646.200	789.800
24	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	55.000.000	55.000.000	-
25	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	27.500.000	27.500.000	-
26	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	27.500.000	27.500.000	-
27	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	27.500.000	27.500.000	-
28	1.3.2.7.1.8.25	Ultrasonic Nebulizer	27.500.000	27.500.000	-
29	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	1.721.500	1.721.500	-
30	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	1.721.500	1.721.500	-
31	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	59.142.858	59.142.858	-
32	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	59.142.857	59.142.857	-
33	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	59.142.857	59.142.857	-
34	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	59.142.857	59.142.857	-
35	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	38.115.000	38.115.000	-
36	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	38.115.000	38.115.000	-
37	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	38.115.000	38.115.000	-
38	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	1.347.500	1.347.500	-
39	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	1.347.500	1.347.500	-
40	1.3.2.7.1.6.15	Laryngoscope	3.080.000	3.080.000	-
41	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	5.445.000	5.445.000	-
42	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	21.450.000	21.450.000	-
43	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	625.000	625.000	-
44	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	10.120.000	10.120.000	-
45	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	10.120.000	10.120.000	-
46	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	10.120.000	10.120.000	-
47	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	6.500.000	6.500.000	-
48	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	143.000.000	143.000.000	-
49	1.3.2.7.1.6.147	alat kedokteran tht lainnya (dst)	44.000.000	44.000.000	-
50	1.3.2.7.1.5.58	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	35.200.000	35.200.000	-
51	1.3.2.7.1.5.58	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	35.200.000	35.200.000	-
52	1.3.2.7.1.5.55	Cardiotocography	115.000.000	115.000.000	-
53	1.3.2.7.1.5.55	Cardiotocography	73.700.000	73.700.000	-
54	1.3.2.7.1.5.55	Cardiotocography	73.700.000	73.700.000	-
55	1.3.2.7.1.5.55	Cardiotocography	73.700.000	73.700.000	-
56	1.3.2.7.1.5.53	Foetal Monitoring	74.250.000	74.250.000	-
57	1.3.2.7.1.5.27	Oxygen Regulator	1.785.000	1.785.000	-
58	1.3.2.7.1.5.27	Oxygen Regulator	1.785.000	1.785.000	-
59	1.3.2.7.1.5.27	Oxygen Regulator	1.785.000	1.785.000	-
60	1.3.2.7.1.5.27	Oxygen Regulator	1.785.000	1.785.000	-
61	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	21.400.000	21.400.000	-
62	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	21.400.000	21.400.000	-

63	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	21.400.000	21.400.000	-
64	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	21.400.000	21.400.000	-
65	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	21.400.000	21.400.000	-
66	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	3.100.000	3.100.000	-
67	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	6.490.000	6.490.000	-
68	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	1.749.000	1.749.000	-
69	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	85.470.000	85.470.000	-
70	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	85.470.000	85.470.000	-
71	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	85.470.000	85.470.000	-
72	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	85.470.000	85.470.000	-
73	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	85.470.000	85.470.000	-
74	1.3.2.7.1.5.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	20.900.000	20.900.000	-
75	1.3.2.7.1.4.7	Tracheotomy Set	53.185.000	53.185.000	-
76	1.3.2.7.1.4.22	Mobile Operating Lamp	444.400.000	444.400.000	-
77	1.3.2.7.1.4.22	Mobile Operating Lamp	88.000.000	88.000.000	-
78	1.3.2.7.1.4.190	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	33.522.500	33.522.500	-
79	1.3.2.7.1.4.190	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	33.522.500	33.522.500	-
80	1.3.2.7.1.4.190	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1.400.000	1.400.000	-
81	1.3.2.7.1.4.190	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1.400.000	1.400.000	-
82	1.3.2.7.1.4.14	Endoscopy Unit	206.800.000	206.800.000	-
83	1.3.2.7.1.4.11	Anaesthesia App	1.239.700.000	1.239.700.000	-
84	1.3.2.7.1.3.1	Genekologi Tabel	16.879.500	16.879.500	-
85	1.3.2.7.1.3.1	Genekologi Tabel	16.879.500	16.879.500	-
86	1.3.2.7.1.3.1	Genekologi Tabel	16.879.500	16.879.500	-
87	1.3.2.7.1.3.1	Genekologi Tabel	16.879.500	16.879.500	-
88	1.3.2.7.1.2.2	Dental Unit	30.000.000	30.000.000	-
89	1.3.2.7.1.2.2	Dental Unit	618.200.000	618.200.000	-
90	1.3.2.7.1.2.135	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	10.350.000	10.350.000	-
91	1.3.2.7.1.2.135	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	10.350.000	10.350.000	-
92	1.3.2.7.1.2.135	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	11.650.000	11.650.000	-
93	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
94	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
95	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
96	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
97	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
98	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
99	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
100	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
101	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
102	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
103	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
104	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
105	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
106	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
107	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	2.585.000	2.585.000	-
108	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
109	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
110	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
111	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
112	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
113	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
114	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
115	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
116	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
117	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
118	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
119	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
120	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	533.500	533.500	-
121	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	522.500	522.500	-
122	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	522.500	522.500	-
123	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	522.500	522.500	-
124	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	522.500	522.500	-
125	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	522.500	522.500	-
126	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	1.500.000	1.500.000	-
127	1.3.2.7.1.2.106	Infus Standard Mac High 2 M	1.500.000	1.500.000	-
128	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	49.940.000	49.940.000	-
129	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	49.940.000	49.940.000	-
130	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	49.940.000	49.940.000	-
131	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	49.940.000	49.940.000	-
132	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	40.833.333	40.833.333	-
133	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	40.833.333	40.833.333	-
134	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	40.833.333	40.833.333	-

135	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	40.833.334	40.833.334	-
136	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	16.057.125	9.366.656	6.690.469
137	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	16.057.125	10.437.131	5.619.994
138	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	16.057.125	10.437.131	5.619.994
139	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	16.057.125	10.437.131	5.619.994
140	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	22.000.000	22.000.000	-
141	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	28.600.000	28.600.000	-
142	1.3.2.7.1.19.93	Syringe	28.600.000	28.600.000	-
143	1.3.2.7.1.19.46	Steam Sterilizer (Alat Kedokteran Nuklir)	104.500.000	104.500.000	-
144	1.3.2.7.1.15.28	Automatic Film Processing	113.579.400	113.579.400	-
145	1.3.2.7.1.15.24	CT-Scan	4.417.000.000	4.417.000.000	-
146	1.3.2.7.1.14.8	Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	90.200.000	90.200.000	-
147	1.3.2.7.1.14.8	Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	1.999.800	1.999.800	-
148	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	59.620.000	59.620.000	-
149	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	59.620.000	59.620.000	-
150	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	39.600.000	39.600.000	-
151	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	55.000.000	55.000.000	-
152	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	39.600.000	39.600.000	-
153	1.3.2.7.1.13.9	alat kedokteran neurologi (syaraf) lainnya (dst)	42.350.000	42.350.000	-
154	1.3.2.7.1.13.5	Patient Monitor	202.125.000	202.125.000	-
155	1.3.2.7.1.13.5	Patient Monitor	202.125.000	202.125.000	-
156	1.3.2.7.1.13.5	Patient Monitor	132.000.000	132.000.000	-
157	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
158	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
159	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
160	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
161	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
162	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
163	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.720.000	5.720.000	-
164	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
165	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
166	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.720.000	5.720.000	-
167	1.3.2.7.1.12.2	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5.542.900	5.542.900	-
168	1.3.2.7.1.11.21	Dressing Forceps	550.000	550.000	-
169	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	3.613.636	3.613.636	-
170	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	3.613.636	3.613.636	-
171	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	2.090.000	2.090.000	-
172	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	2.090.000	2.090.000	-
173	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	2.090.000	2.090.000	-
174	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	3.499.100	3.499.100	-
175	1.3.2.7.1.10.85	alat kedokteran anak lainnya (dst)	3.499.100	3.499.100	-
176	1.3.2.7.1.10.25	Pulscoxy Meter	1.980.000	1.980.000	-
177	1.3.2.7.1.10.25	Pulscoxy Meter	89.980.000	89.980.000	-
178	1.3.2.7.1.10.24	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	31.750.000	31.750.000	-
179	1.3.2.7.1.10.24	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	26.500.000	26.500.000	-
180	1.3.2.7.1.10.24	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	15.893.454	15.893.454	-
181	1.3.2.7.1.10.18	Insrumen Tray Stainless Steel 36X30X5 cm	1.540.000	1.540.000	-
182	1.3.2.7.1.10.16	Vanasetie Set	18.232.500	18.232.500	-
183	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	21.223.400	21.223.400	-
184	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	21.223.400	21.223.400	-
185	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	57.310.000	57.310.000	-
186	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	53.000.000	53.000.000	-
187	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	53.000.000	53.000.000	-
188	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	53.000.000	53.000.000	-
189	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	34.000.000	34.000.000	-
190	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	34.000.000	34.000.000	-
191	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	34.000.000	34.000.000	-
192	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	19.500.000	19.500.000	-
193	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	35.200.000	35.200.000	-
194	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	35.200.000	35.200.000	-
195	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	35.200.000	35.200.000	-
196	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	35.200.000	35.200.000	-
197	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	35.200.000	35.200.000	-
198	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	31.900.000	31.900.000	-
199	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	31.900.000	31.900.000	-
200	1.3.2.7.1.1.80	Infusion Pump	31.900.000	31.900.000	-
201	1.3.2.7.1.1.7	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	13.585.000	13.585.000	-
202	1.3.2.7.1.1.67	Film Viewer	5.940.000	5.940.000	-
203	1.3.2.7.1.1.67	Film Viewer	5.060.000	5.060.000	-
204	1.3.2.7.1.1.67	Film Viewer	5.060.000	5.060.000	-
205	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	5.445.000	5.445.000	-
206	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	11.000.000	11.000.000	-

207	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	11.000.000	11.000.000	-
208	1.3.2.7.1.1.60	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	24.000.000	24.000.000	-
209	1.3.2.7.1.1.60	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	39.865.000	30.563.167	9.301.833
210	1.3.2.7.1.1.60	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	39.865.000	30.563.167	9.301.833
211	1.3.2.7.1.1.60	Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	24.000.000	24.000.000	-
212	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
213	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
214	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
215	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
216	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
217	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
218	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
219	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5.720.000	5.720.000	-
220	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.585.000	2.585.000	-
221	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.585.000	2.585.000	-
222	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.499.200	2.499.200	-
223	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.499.200	2.499.200	-
224	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
225	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
226	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
227	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
228	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
229	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	949.000	949.000	-
230	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	1.895.000	1.895.000	-
231	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	1.815.000	1.815.000	-
232	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	4.180.000	4.180.000	-
233	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.419.349	2.379.027	40.322
234	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.419.349	2.379.027	40.322
235	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.775.000	2.266.250	508.750
236	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.775.000	1.387.500	1.387.500
237	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.775.000	1.387.500	1.387.500
238	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.775.000	1.387.500	1.387.500
239	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2.775.000	1.387.500	1.387.500
240	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
241	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
242	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
243	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
244	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
245	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
246	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.540.000	1.540.000	-
247	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.495.000	1.495.000	-
248	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.495.000	1.495.000	-
249	1.3.2.7.1.1.3	Diagnostik Set	274.670.000	274.670.000	-
250	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	5.454.650	5.454.650	-
251	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	3.890.000	3.890.000	-
252	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	39.099.500	39.099.500	-
253	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	39.820.000	39.820.000	-
254	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	148.720.000	148.720.000	-
255	1.3.2.7.1.1.28	Autoclave Table	523.600.000	523.600.000	-
256	1.3.2.7.1.1.18	Instrumen Cabinet	6.000.000	6.000.000	-
257	1.3.2.7.1.1.18	Instrumen Cabinet	15.000.000	15.000.000	-
258	1.3.2.7.1.1.18	Instrumen Cabinet	15.000.000	15.000.000	-
259	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	11.550.000	11.550.000	-
260	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	11.550.000	11.550.000	-
261	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	11.550.000	11.550.000	-
262	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	11.550.000	11.550.000	-
263	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.370.000	7.370.000	-
264	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.370.000	7.370.000	-
265	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.287.500	7.287.500	-
266	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.287.500	7.287.500	-
267	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.287.500	7.287.500	-
268	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.287.500	7.287.500	-
269	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	7.287.500	7.287.500	-
270	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	120.750.000	120.750.000	-
271	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.875.000	6.875.000	-
272	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	1.925.000	1.925.000	-
273	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	1.265.000	1.265.000	-
274	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	1.265.000	1.265.000	-
275	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	561.000	561.000	-
276	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	2.300.000	2.300.000	-
277	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	2.200.000	2.200.000	-
278	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	54.010.000	54.010.000	-

[illegible]

351	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.500.000	6.500.000	-
352	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.500.000	6.500.000	-
353	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.500.000	6.500.000	-
354	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	137.800.000	137.800.000	-
355	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	248.000.000	248.000.000	-
356	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	1.000.000	1.000.000	-
357	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.000.000	6.000.000	-
358	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.000.000	6.000.000	-
359	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	2.500.000	2.500.000	-
360	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	8.030.000	8.030.000	-
361	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	8.030.000	8.030.000	-
362	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	8.030.000	8.030.000	-
363	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.270.000	6.270.000	-
364	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	38.500.000	38.500.000	-
365	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	38.500.000	38.500.000	-
366	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	230.000.000	230.000.000	-
367	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	314.215.000	314.215.000	-
368	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	28.600.000	28.600.000	-
369	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	28.600.000	28.600.000	-
370	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	28.600.000	28.600.000	-
371	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	51.700.000	51.700.000	-
372	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	45.100.000	45.100.000	-
373	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	45.100.000	45.100.000	-
374	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	9.790.000	9.790.000	-
375	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	9.790.000	9.790.000	-
376	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	9.790.000	9.790.000	-
377	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	6.270.000	6.270.000	-
378	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	33.000.000	33.000.000	-
379	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	15.396.700	15.396.700	-
380	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	16.170.000	16.170.000	-
381	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	16.170.000	16.170.000	-
382	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	16.170.000	16.170.000	-
383	1.3.2.7.1.1.152	U S G	1.001.000.000	1.001.000.000	-
384	1.3.2.7.1.1.152	U S G	59.500.000	59.500.000	-
385	1.3.2.7.1.1.152	U S G	2.025.000.000	2.025.000.000	-
386	1.3.2.7.1.1.152	U S G	326.000.000	326.000.000	-
387	1.3.2.7.1.1.133	Suction Pump	44.000.000	44.000.000	-
388	1.3.2.7.1.1.133	Suction Pump	27.500.000	27.500.000	-
389	1.3.2.7.1.1.121	Resusitasi Dewasa	2.970.000	2.970.000	-
390	1.3.2.7.1.1.121	Resusitasi Dewasa	42.900.000	42.900.000	-
391	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	2.650.000	2.650.000	-
392	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	2.249.500	2.249.500	-
393	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	2.249.500	2.249.500	-
394	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
395	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
396	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
397	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
398	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
399	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	3.000.000	3.000.000	-
400	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	104.500.000	104.500.000	-
401	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.470.000	1.470.000	-
402	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.470.000	1.470.000	-
403	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.470.000	1.470.000	-
404	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.470.000	1.470.000	-
405	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.490.000	1.490.000	-
406	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.490.000	1.490.000	-
407	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	1.490.000	1.490.000	-
408	1.3.2.6.2.1.22	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	48.280.000	48.280.000	-
409	1.3.2.6.1.2.42	Rak Peralatan	5.280.000	5.280.000	-
410	1.3.2.6.1.2.42	Rak Peralatan	5.280.000	5.280.000	-
411	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	7.425.000	7.425.000	-
412	1.3.2.5.2.7.1	Alat Pemadam/Portable	700.000	700.000	-
413	1.3.2.5.2.7.1	Alat Pemadam/Portable	700.000	700.000	-
414	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	975.000	975.000	-
415	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6.200.000	6.200.000	-
416	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	923.000	923.000	-
417	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.562.000	1.562.000	-
418	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.562.000	1.562.000	-
419	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2.316.000	2.316.000	-
420	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.180.000	1.180.000	-
421	1.3.2.5.2.6.25	Timbangan Orang	1.136.182	1.136.182	-
422	1.3.2.5.2.6.25	Timbangan Orang	1.136.182	1.136.182	-

423	1.3.2.5.2.6.25	Timbangan Orang	750.000	750.000	-
424	1.3.2.5.2.6.25	Timbangan Orang	750.000	750.000	-
425	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	2.345.000	2.345.000	-
426	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	4.825.880	4.825.880	-
427	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	3.925.000	3.859.583	65.417
428	1.3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	825.000	811.250	13.750
429	1.3.2.5.2.5.6	Oven Listrik	10.615.000	10.615.000	-
430	1.3.2.5.2.5.26	Alat Dapur lainnya	625.000	625.000	-
431	1.3.2.5.2.5.26	Alat Dapur lainnya	625.000	625.000	-
432	1.3.2.5.2.5.26	Alat Dapur lainnya	625.000	625.000	-
433	1.3.2.5.2.5.26	Alat Dapur lainnya	638.000	638.000	-
434	1.3.2.5.2.5.26	Alat Dapur lainnya	638.000	638.000	-
435	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.620.000	9.620.000	-
436	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	3.998.000	3.998.000	-
437	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	8.997.000	8.997.000	-
438	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4.237.200	4.237.200	-
439	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4.237.200	4.237.200	-
440	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4.237.200	4.237.200	-
441	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.000.000	5.000.000	-
442	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.000.000	5.000.000	-
443	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.000.000	5.000.000	-
444	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	13.140.000	13.140.000	-
445	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	13.140.000	13.140.000	-
446	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.916.500	5.916.500	-
447	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.916.500	5.916.500	-
448	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.916.500	5.916.500	-
449	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.916.500	5.916.500	-
450	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.785.000	7.785.000	-
451	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
452	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
453	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
454	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
455	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
456	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
457	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4.785.000	4.785.000	-
458	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
459	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
460	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
461	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.460.000	9.460.000	-
462	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4.785.000	4.785.000	-
463	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	5.270.000	5.270.000	-
464	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.650.000	7.650.000	-
465	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.660.000	7.660.000	-
466	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.660.000	7.660.000	-
467	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.660.000	7.660.000	-
468	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.660.000	7.660.000	-
469	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	7.275.000	7.153.750	121.250
470	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.900.000	9.900.000	-
471	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	9.900.000	9.900.000	-
472	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	750.000	750.000	-
473	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	750.000	750.000	-
474	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	1.465.000	1.465.000	-
475	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	3.495.800	3.495.800	-
476	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	2.233.000	2.233.000	-
477	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	1.550.000	1.550.000	-
478	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	18.518.170	18.518.170	-
479	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	4.807.000	4.807.000	-
480	1.3.2.5.2.3.4	Mesin Cuci	94.000.000	94.000.000	-
481	1.3.2.5.2.3.4	Mesin Cuci	11.550.000	11.550.000	-
482	1.3.2.5.2.3.4	Mesin Cuci	11.550.000	11.550.000	-
483	1.3.2.5.2.3.3	Mesin Pemotong Rumput	4.009.000	4.009.000	-
484	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
485	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
486	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
487	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
488	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
489	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
490	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
491	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
492	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
493	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
494	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-

495	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
496	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
497	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
498	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
499	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
500	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
501	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
502	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
503	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
504	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
505	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
506	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
507	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
508	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
509	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
510	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
511	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
512	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
513	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
514	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
515	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
516	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
517	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
518	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
519	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
520	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
521	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
522	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
523	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
524	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
525	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
526	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
527	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
528	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
529	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
530	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
531	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
532	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
533	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
534	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
535	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
536	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
537	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
538	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	22.000.000	22.000.000	-
539	1.3.2.5.2.1.50	Meubeleur lainnya	1.498.000	1.498.000	-
540	1.3.2.5.2.1.50	Meubeleur lainnya	1.475.000	1.475.000	-
541	1.3.2.5.2.1.48	Sofa	500.000	500.000	-
542	1.3.2.5.2.1.48	Sofa	2.820.000	2.820.000	-
543	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.887.500	3.887.500	-
544	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.887.500	3.887.500	-
545	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.949.000	3.949.000	-
546	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
547	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
548	1.3.2.5.2.1.3	Kursi Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
549	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	2.600.000	2.600.000	-
550	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	2.600.000	2.600.000	-
551	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
552	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
553	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
554	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
555	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
556	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
557	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
558	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
559	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
560	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
561	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	9.680.000	9.680.000	-
562	1.3.2.5.2.1.24	Meja 1/2 Biro	899.800	899.800	-
563	1.3.2.5.2.1.19	Meja Periksa Pasien	900.000	900.000	-
564	1.3.2.5.2.1.19	Meja Periksa Pasien	750.100	750.100	-
565	1.3.2.5.2.1.19	Meja Periksa Pasien	750.100	750.100	-
566	1.3.2.5.2.1.10	Tempat Tidur Kayu	3.997.000	3.997.000	-

[illegible]

639	1.3.2.5.2.1.1	Meja Kerja Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
640	1.3.2.5.2.1.1	Meja Kerja Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
641	1.3.2.5.2.1.1	Meja Kerja Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
642	1.3.2.5.2.1.1	Meja Kerja Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
643	1.3.2.5.2.1.1	Meja Kerja Besi/Metal	3.575.000	3.575.000	-
644	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	1.518.000	1.518.000	-
645	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	4.950.000	4.950.000	-
646	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	36.300.000	36.300.000	-
647	1.3.2.5.1.5.77	Papan Pengumuman	1.500.000	1.500.000	-
648	1.3.2.5.1.5.77	Papan Pengumuman	500.000	500.000	-
649	1.3.2.5.1.5.3	Papan Visual/Papan Nama	2.200.000	2.200.000	-
650	1.3.2.5.1.4.7	Brankas	2.500.000	2.500.000	-
651	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	500.000	500.000	-
652	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	507.400	507.400	-
653	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	507.400	507.400	-
654	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	507.400	507.400	-
655	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	550.000	550.000	-
656	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
657	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
658	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
659	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
660	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
661	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
662	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
663	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
664	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	748.000	748.000	-
665	1.3.2.5.1.3.7	Mesin Fotocopy Folio	27.999.950	27.999.950	-
666	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	22.449.000	22.449.000	-
667	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1.477.339.000	1.477.339.000	-
668	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.650.000	1.650.000	-
669	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.145.000	2.145.000	-
670	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.595.000	1.595.000	-
671	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.595.000	1.595.000	-
672	1.3.2.10.2.3.2	Monitor	1.045.000	1.045.000	-
673	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	13.000.000	13.000.000	-
674	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	15.478.100	15.478.100	-
675	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	4.400.000	4.400.000	-
676	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	5.885.000	5.885.000	-
677	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	7.370.000	7.370.000	-
678	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	15.999.500	15.999.500	-
679	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	15.999.500	15.999.500	-
680	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.980.500	7.980.500	-
681	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.975.750	5.975.750	-
682	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.975.750	5.975.750	-
683	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.975.750	5.975.750	-
684	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.975.750	5.975.750	-
685	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.300.000	7.300.000	-
686	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.300.000	7.300.000	-
687	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.300.000	7.300.000	-
688	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.300.000	7.300.000	-
689	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.350.000	7.350.000	-
690	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.350.000	7.350.000	-
691	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.060.000	5.060.000	-
692	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.060.000	5.060.000	-
693	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5.940.000	5.940.000	-
694	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	7.150.000	7.150.000	-
695	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
696	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
697	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
698	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
699	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
700	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
701	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
702	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
703	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
704	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
705	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
706	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
707	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
708	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
709	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
710	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-

711	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
712	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
713	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
714	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
715	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
716	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
717	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
718	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
719	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
720	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
721	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	3.850.000	3.850.000	-
722	1.5.3.01.001.005.001	Software E Rekam Medik	294.150.000	4.902.500	289.247.500
Jumlah			27.943.719.099	27.566.002.222	377.716.877

Lampiran 4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR UTANG 31 DESEMBER 2023**

No	Keterangan	Saldo (Rp)
1	Jasa Pelayanan	4.862.603.782
2	Darah Siap Transfusi (PMI)	184.182.000
3	BBM Rujukan Ambulance	4.096.000
4	sampah Medis	262.175.895
5	Bahan Habis Pakai (BHP)	5.419.965.909
6	Obat - obatan	3.934.738.105
7	Bahan Kimia/Lab	1.435.768.102
8	Gas Medis	229.460.624
9	RS Balimed Karangasem	6.949.230
10	Belanja Air	60.752.600
12	RS Kasih Ibu Saba	470.000
13	PT.Prodia	2.852.000
15	Iuran BPJS 4% (APBD)	61.956.224
17	Alat Tulis Kantor	38.460.000
TOTAL		16.504.430.471

B. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00004/2.1151/AU.5/11/0328-1/1/III/2024

Dewan Pengawas dan Direktur
RSUD Kabupaten Karangasem

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD Kabupaten Karangasem ("RSUD") terlampir, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi penting.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RSUD pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor untuk Audit atas Laporan Keuangan dalam laporan kami. Kami independen terhadap RSUD sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etis kami lainnya sesuai dengan ketentuan ini. Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian internal yang menurut manajemen diperlukan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan, yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sebagaimana berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi RSUD atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain untuk melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD.

Tanggung jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan yang memadai adalah tingkat keyakinan yang tinggi, tetapi bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit akan selalu mendeteksi salah saji material ketika hal itu ada. Salah saji dapat timbul dari kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, secara individual atau agregat, kesalahan tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan ini.

Sebagai bagian dari audit sesuai dengan Standar Audit, kami menerapkan penilaian profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

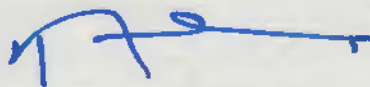
1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tanggap terhadap risiko tersebut dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan yang disengaja, penyajian yang keliru, atau pengesampingan pengendalian internal.
2. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal RSUD.
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika kami menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian material, kami diharuskan untuk memperhatikan dalam laporan auditor kami tentang pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi di masa depan dapat menyebabkan RSUD berhenti melanjutkan usahanya.
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan menggambarkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan serta temuan audit yang signifikan, termasuk defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami temukan selama audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan RSUD Kabupaten Karangasem periode 31 Desember 2022 diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan Nomor: 00038/2.0526/AU.2/11/0595-4/1/III/2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut, yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2023.

KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto



Hermen Bustaman, CA, CPA
AP.0328



15 Maret 2024